PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024/
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

	Halaman/ *Page*	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		**DIRECTORS' STATEMENT LETTER**
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024		**CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS** – For the years ended 31 December 2025 and 2024
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	Notes to Consolidated Financial Statements

Barito Renewables

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/*Name* : Hendra Soetjipto Tan
   Alamat Kantor/*Office Address* : Wisma Barito Pacific II, 23rd Floor
   Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 60, Jakarta, 11410
   Nomor Telepon/*Phone Number* : + 62 21 5306711
   Jabatan/*Position* : Direktur Utama / *President Director*

2. Nama/*Name* : Hsing Chee Chiam
   Alamat Kantor/*Office Address* : Wisma Barito Pacific II, 23rd Floor
   Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 60, Jakarta, 11410
   Nomor Telepon/*Phone Number* : + 62 21 5306711
   Jabatan/*Position* : Direktur Keuangan / *Finance Director*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Barito Renewables Energy Tbk dan entitas anak;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Barito Renewables Energy Tbk dan entitas anak. telah disajikan secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Barito Renewables Energy Tbk dan entitas anak. tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements of PT Barito Renewables Energy Tbk and its subsidiaries;*
2. *The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information contained in the Consolidated Financial Statements of PT Barito Renewables Energy Tbk and its subsidiaries. have been fully and correctly disclosed;*
   b. The Consolidated Financial Statements of PT Barito Renewables Energy Tbk and its subsidiaries. do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; and
4. *We are responsible for the Company's internal control system.*

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 18 Maret 2026/ March 18, 2026

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 44631ANX110652380

Hendra Soetjipto Tan
Direktur Utama/*President Director*

Hsing Chee Chiam
Direktur Keuangan/*Finance Director*

PT Barito Renewables Energy Tbk
Wisma Barito Pacific II, 23rd Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60
Jakarta 11410, Indonesia
Phone: +62 215306711
www.baritorenewables.co.id

Deloitte.

Liana Ramon Xenia & Rekan
Registered Public Accountants
License No. 432/KM.1/2024
The Plaza Office Tower 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350
Indonesia

Tel: +62 21 5081 8000
Fax: +62 21 2992 8300
Email: iddttl@deloitte.com
www.deloitte.com/id

Laporan Auditor Independen

No. 00071/2.1460/AU.1/02/0565-1/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Barito Renewables Energy Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Barito Renewables Energy Tbk dan entitas anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

No. 00071/2.1460/AU.1/02/0565-1/1/III/2026

The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Barito Renewables Energy Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Barito Renewables Energy Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2025 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Liana Ramon Xenia & Rekan ("LRX") is a member (as such term is used in Regulation of the Ministry of Finance Number 186/PMK.01/2021 and Regulation of the Financial Services Authority Number 9 of 2023 (the "Relevant Law")) of Deloitte Southeast Asia Limited ("DSEAL"). DSEAL is the registered Foreign Audit Organisation ("Organisasi Audit Asing" or "OAA") to LRX for the purposes of the Relevant Law.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pemulihan nilai *goodwill*, aset tidak berwujud dan aset non-keuangan dari bisnis panas bumi Salak dan Darajat

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup memiliki *goodwill* dan aset tidak berwujud sebesar AS$ 1.371.112 ribu serta aset non-keuangan termasuk aset tetap dan biaya ditangguhkan sebesar AS$ 681.399 ribu, terkait dengan bisnis panas bumi Salak dan Darajat, yang masing-masing merupakan unit penghasil kas ("UPK") terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Grup melakukan pengujian penurunan nilai *goodwill*, aset tidak berwujud dan aset non-keuangan terkait dengan bisnis panas bumi Salak dan Darajat tersebut pada setiap akhir periode pelaporan. Pengujian penurunan nilai dilakukan untuk setiap UPK yang telah mendapatkan alokasi *goodwill* dengan membandingkan nilai tercatat UPK, termasuk alokasi *goodwill*, dengan jumlah terpulihkannya.

Penentuan jumlah terpulihkan, yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai UPK, melibatkan pertimbangan dan asumsi-asumsi utama sehubungan dengan tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan tahunan, yang telah mempertimbangkan asumsi harga jual listrik dan uap di masa mendatang, produksi listrik dan uap (termasuk cadangan uap panas bumi, yang dihitung oleh tenaga ahli manajemen) dan estimasi belanja modal dan operasi.

Kami mengidentifikasi pemulihan nilai *goodwill*, aset tidak berwujud dan aset non-keuangan dari bisnis panas bumi Salak dan Darajat sebagai hal audit utama karena saldo yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian dan melibatkan estimasi dan asumsi yang terpengaruh oleh ketidakpastian, dalam menentukan jumlah terpulihkan.

Key Audit Matter

Key audit matter is those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. This matter was addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Recoverability of goodwill, intangible assets and non-financial assets of the Salak and Darajat geothermal businesses

As of December 31, 2025, the Group held goodwill and intangible assets amounted to US$ 1,371,112 thousand and property, plant and equipment and deferred charges amounted to US$ 681,399 thousand, relating to the Salak and Darajat geothermal businesses, each of which is each considered to be a separate cash generating unit ("CGU") in the consolidated statement of financial position.

The Group performs an impairment assessment of goodwill, intangible assets and non-financial assets relating to the Salak and Darajat geothermal businesses at the end of each reporting period. An impairment assessment is performed for each CGU for which goodwill has been allocated by comparing the carrying value of the CGUs, including the allocated goodwill, with their recoverable amounts.

The determination of the recoverable amount, which is the higher of the fair value less costs of disposal and the value in use of the CGU, involves judgement and key assumptions with respect to the discount rate and the annual growth rate, which take into consideration assumptions on future electricity and steam sales prices, electricity and steam generation (including geothermal steam reserves, which are calculated by management experts) and estimated capital and operating expenditures.

We identified the recoverability of goodwill, intangible assets and non-financial assets of the Salak and Darajat geothermal businesses as a key audit matter due to the significance of the balances to the consolidated financial statements and the estimates and assumptions involved, which were subject to uncertainty, in determining the recoverable amount.

Pengungkapan atas pemulihan nilai *goodwill*, aset tidak berwujud dan aset non-keuangan terkait dengan bisnis panas bumi Salak dan Darajat dijelaskan pada Catatan 4 dan 14 pada laporan keuangan konsolidasian.

Bagaimana hal ini ditangani dalam audit

Kami telah melakukan prosedur audit berikut berkaitan dengan hal ini:

- Memperoleh pemahaman dan menganalisa pengendalian dan proses manajemen dalam melakukan pengujian penurunan nilai dan menganalisa risiko bawaan salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan kompleksitas model dan pertimbangan manajemen yang terlibat dalam menentukan asumsi yang diterapkan.
- Menganalisa penetapan UPK oleh manajemen.
- Menganalisa estimasi dan asumsi yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai, yang meliputi antara lain: tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan tahunan. Prosedur kami mencakup membandingkan estimasi dan asumsi dengan kinerja keuangan historis dan sumber informasi eksternal untuk tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan tahunan.
- Melibatkan tenaga ahli penilai internal untuk membantu kami dalam menguji salah satu asumsi utama yang digunakan manajemen (yaitu, tingkat diskonto).
- Memeriksa keakuratan matematis perhitungan arus kas diskontoan dan membandingkan perkiraan informasi keuangan yang digunakan dengan rencana bisnis manajemen yang telah disetujui.
- Melakukan analisa sensitivitas independen atas asumsi utama dalam model untuk menilai dampak potensial dari rentang hasil yang memungkinkan.
- Menelaah kesesuaian pengungkapan terkait di dalam laporan keuangan konsolidasian.

The Group's disclosures on the recoverability of goodwill, intangible assets and non-financial assets relating to the Salak and Darajat geothermal businesses are set out in Notes 4 and 14 to the consolidated financial statements.

How the matter was addressed in the audit

We performed the following audit procedures in response to this matter:

- Obtained understanding and assessed management's controls and processes for performing its impairment assessments and assessed the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and the complexity of management's models and the judgements involved in determining the assumptions applied.
- Assessed management's determination of the CGUs.
- Assessed the estimates and assumptions used in the impairment assessments, which included amongst others: the discount rate and annual growth rate. Our procedures included comparing the estimates and assumptions to the historical financial performance. For the discount rate and annual growth rate we compared to external sources of information.
- Engaged internal valuation expert to assist us in testing one of the key assumptions used by management (i.e., discount rate).
- Checked the mathematical accuracy of the discounted cash flows and compared the forecasted financial information used with management's approved business plans.
- Performed independent sensitivity analysis one of the key assumptions in the model to assess the potential impact of a range of possible outcomes.
- Assessed the appropriateness of the related disclosures in the consolidated financial statements.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the ability of the Group to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Auditor's Responsibility for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal-hal audit utama. Kami menguraikan hal-hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

LIANA RAMON XENIA & REKAN

Muhammad Irfan, CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 0565

18 Maret/*March* 2026

00071

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali nilai nominal dan data saham)

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in thousands of United States Dollars, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
ASET				**ASSETS**
ASET LANCAR				**CURRENT ASSETS**
Kas dan setara kas	6	114.985	162.724	Cash and cash equivalents
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	7	314.877	341.989	Restricted cash and time deposits
Piutang usaha dan lain-lain	8	106.886	112.629	Trade and other receivables
Piutang sewa pembiayaan - bagian lancar	9	12.299	9.883	Finance lease receivables - current portion
Persediaan	10	18.871	23.301	Inventories
Aset lancar lainnya		10.596	8.261	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		578.514	658.787	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				**NON-CURRENT ASSETS**
Piutang usaha dan lain-lain	8	83.565	68.891	Trade and other receivables
Piutang sewa pembiayaan - bagian tidak lancar	9	383.990	353.566	Finance lease receivables - non-current portion
Barang modal dan peralatan	10	26.772	22.736	Capital spares and equipment
Aset hak guna		4.844	6.915	Right-of-use assets
Aset tetap	12	846.074	835.958	Property, plant and equipment
Aset sewa operasi	13	284.624	309.164	Property on operating lease
Biaya ditangguhkan		37.551	13.740	Deferred charges
Biaya pengembangan proyek		34.048	34.044	Project development costs
Aset tidak berwujud	14	1.458.963	1.462.429	Intangible assets
Aset eksplorasi dan evaluasi		26.216	7.009	Exploration and evaluation assets
Aset keuangan derivatif		8.889	10.427	Derivative financial assets
Investasi obligasi	11	89.381	-	Investment in bonds
Aset tidak lancar lain-lain		3.979	3.847	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.288.896	3.128.726	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET		3.867.410	3.787.513	**TOTAL ASSETS**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				**LIABILITIES AND EQUITY**
LIABILITAS JANGKA PENDEK				**CURRENT LIABILITIES**
Utang usaha dan lain-lain:	15			Trade and other payables:
Pihak berelasi	25	38	97	Related parties -
Pihak ketiga		19.496	21.104	Third parties -
Utang pajak - bagian jangka pendek				Taxes payable - current portion:
Pajak penghasilan badan	24a	34.323	36.512	Corporate income tax -
Pajak lain-lain	24a	3.841	6.438	Other taxes -
Beban yang masih harus dibayar	15	73.153	87.119	Accrued expenses
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek		1.708	1.853	Lease liabilities - current portion
Pinjaman - bagian jangka pendek	16	202.048	202.613	Borrowings - current portion
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		334.607	355.736	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				**NON-CURRENT LIABILITIES**
Utang lain-lain	15	-	7.377	Other payables
Utang pajak lain-lain	24a	5.711	5.931	Other taxes payable
Saldo make-up account Perusahaan Listrik Negara (“PLN”)	17	24.280	23.182	Perusahaan Listrik Negara (“PLN”) make-up account balances
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang		3.668	5.115	Lease liabilities - non-current portion
Pinjaman - bagian jangka panjang	16	1.856.996	1.894.624	Borrowings - non-current portion
Liabilitas imbalan pasca kerja	18	25.095	16.934	Post-employment benefits liabilities
Liabilitas keuangan derivatif		4.062	-	Derivative financial liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	24c	729.472	746.081	Deferred tax liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.649.284	2.699.244	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		2.983.891	3.054.980	**TOTAL LIABILITIES**
EKUITAS				**EQUITY**
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				**Equity attributable to owners of the Company**
Modal saham - nilai nominal Rp 150 per saham				
Modal dasar - 500.000.000.000 saham pada				Capital stock - par value of Rp 150 per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 133.786.220.000 saham	19a	1.286.720	1.286.720	Authorized - 500,000,000,000 shares at Issued and fully paid - 133,786,220,000 shares
Saham treasuri	19e	(1.930)	-	Treasury Shares
Tambahan modal disetor	19b	(338.977)	(338.977)	Additional paid-in capital
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		(975)	(516)	Foreign currency translation adjustment
Cadangan lainnya	19c	(993.247)	(987.622)	Other reserves
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	19d	3.231	2.011	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		682.046	555.246	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		636.868	516.862	**Total equity attributable to owners of the Company**
Kepentingan nonpengendali	20	246.651	215.671	**Non-controlling interests**
Jumlah Ekuitas		883.519	732.533	**Total Equity**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3.867.410	3.787.513	**TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali nilai nominal dan data saham)

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in thousands of United States Dollars, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
Pendapatan	21	605.187	596.823	Revenue
Beban depresiasi dan amortisasi	12, 22	(93.449)	(82.756)	Depreciation and amortisation expenses
Beban kompensasi dan tunjangan karyawan	22	(39.647)	(39.210)	Employee compensation and benefits expenses
Beban konsultan dan teknisi	22	(22.376)	(17.088)	Consultant and technician expenses
Tunjangan produksi kepada PT Pertamina Geothermal Energy	22	(16.747)	(16.574)	Production allowance to PT Pertamina Geothermal Energy
Beban keuangan	23	(118.812)	(134.472)	Finance costs
Kerugian kurs mata uang asing, bersih	22	(150)	(202)	Loss on foreign exchange, net
Pendapatan bunga	22	11.892	15.397	Interest income
Lain-lain, bersih	22	(20.144)	(23.822)	Others, net
LABA SEBELUM PAJAK		305.754	298.096	**PROFIT BEFORE TAX**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	24b	(140.617)	(143.013)	**INCOME TAX EXPENSE - NET**
LABA TAHUN BERJALAN		165.137	155.083	**PROFIT FOR THE YEAR**
KERUGIAN KOMPREHENSIF LAIN				**OTHER COMPREHENSIVE LOSS**
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak		(5.043)	(102)	Remeasurement of defined benefits obligation, net of tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Cadangan lindung nilai arus kas		(5.632)	(272)	Hedging reserves for cash flow hedge
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		(777)	(516)	Foreign currency translation adjustment
Jumlah kerugian komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		(11.452)	(890)	Total other comprehensive loss for the year, net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		153.685	154.193	**TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR**
LABA TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				**PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:**
Pemilik entitas induk		132.198	122.108	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	20	32.939	32.975	Non-controlling interests
Laba tahun berjalan		165.137	155.083	**Profit for the year**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				**TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:**
Pemilik entitas induk		121.936	121.249	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	20	31.749	32.944	Non-controlling interests
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		153.685	154.193	**Total Comprehensive Income for the Year**
LABA PER SAHAM (dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	26	0,00099	0,00091	**EARNINGS PER SHARE** (in United States Dollar full amount)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali nilai nominal dan data saham)

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in thousands of United States Dollars, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Capital stock*	Saham treasuri/ *Treasury shares*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ *Foreign currency translation adjustment*	Cadangan lainnya/ *Other reserves*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to the owners of the Company*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
							Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*				
Saldo per 1 Januari 2024		1.286.720	-	(338.977)	-	(987.622)	911	483.077	444.109	206.229	650.338	Balances as of 1 January 1 2024
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	122.108	122.108	32.975	155.083	Profit for the year
Dividen tunai	19a	-	-	-	-	-	-	(48.496)	(48.496)	(28.001)	(76.497)	Cash dividend
Akuisisi entitas anak	5b,c,d,e,20	-	-	-	-	-	-	-	-	4.499	4.499	Acquisition of subsidiaries
Pencadangan saldo laba	19d	-	-	-	-	-	1.100	(1.100)	-	-	-	Appropriation of retained earnings
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		-	-	-	(516)	-	-	-	(516)	-	(516)	Foreign currency translation adjustment
Kerugian komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	(343)	(343)	(31)	(374)	Other comprehensive loss for the year
Saldo per 31 Desember 2024		1.286.720	-	(338.977)	(516)	(987.622)	2.011	555.246	516.862	215.671	732.533	Balance as of 31 December 2024
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	132.198	132.198	32.939	165.137	Profit for the year
Pembelian kembali saham	19e	-	(1.930)	-	-	-	-	-	(1.930)	-	(1.930)	Shares buyback
Perubahan ekuitas sehubungan penambahan modal ditempatkan dan disetor entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	12.844	12.844	Change in equity due to increase of issued and paid-up capital of subsidiaries
Dividen tunai	19a	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.613)	(13.613)	Cash dividend
Pencadangan saldo laba	19d	-	-	-	-	-	1.220	(1.220)	-	-	-	Appropriation of retained earnings
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		-	-	-	(459)	-	-	-	(459)	(318)	(777)	Foreign currency translation adjustment
Cadangan lindung nilai arus kas		-	-	-	-	(5.625)	-	-	(5.625)	(7)	(5.632)	Cash flow hedging reserve
Kerugian komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	(4.178)	(4.178)	(865)	(5.043)	Other comprehensive loss for the year
Saldo per 31 Desember 2025		1.286.720	(1.930)	(338.977)	(975)	(993.247)	3.231	682.046	636.868	246.651	883.519	Balance as of 31 December 2025

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali nilai nominal dan data saham)

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in thousands of United States Dollars, except for par value and share data)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**
Penerimaan dari pelanggan	622.603	607.927	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(119.038)	(89.347)	Payments to suppliers and others
Penerimaan bunga	11.892	15.397	Interest received
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa	(551)	(592)	Interest payment on lease liabilities
Pembayaran pajak penghasilan	(158.248)	(154.084)	Payment for income taxes
Pembayaran beban keuangan	(128.272)	(110.891)	Payment of finance costs
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	228.386	268.410	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			**CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**
Penambahan aset tetap	(107.984)	(109.552)	Addition of property, plant and equipment
Penambahan aset sewa operasi	(3.628)	(794)	Addition of property on operating lease
Penambahan biaya ditangguhkan	(29.640)	(4.743)	Addition of deferred charges
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	(19.207)	(1.884)	Addition of exploration and evaluation assets
Penambahan barang modal dan peralatan	(4.036)	(3.067)	Addition of capital spares and equipment
Penambahan biaya pengembangan proyek	(838)	(1.448)	Addition of project development costs
Pembayaran pinjaman novasi	-	(5.156)	Payment of novation loan
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	(101.003)	Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired
Penambahan investasi obligasi	(89.381)	-	Addition of investment in bonds
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(254.714)	(227.647)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			**CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES**
Penerimaan dari utang bank	170.158	199.167	Proceeds from bank loan
Pembayaran kembali utang bank	(100.236)	(89.468)	Repayment of bank loan
Pembayaran senior secured notes	(101.352)	(82.167)	Repayment of senior secured notes
Pembagian dividen kepada kepentingan non-pengendali di anak perusahaan	(13.613)	(28.001)	Dividend distribution to non-controlling interests in subsidiaries
Pembagian dividen kepada pemilik entitas induk	-	(48.496)	Dividend distribution to owners of the parent entity
Pembayaran untuk pembelian kembali modal dasar	(1.930)	-	Payment for buy-back of capital stock
Penarikan dari kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	673.070	456.438	Withdrawal from restricted cash and time deposits
Penempatan pada kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	(645.958)	(531.093)	Placement in restricted cash and time deposits
Pembayaran biaya pendanaan	(695)	-	Payment of financing charges
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali	1.221	-	Capital contribution from minority interest
Pembayaran atas porsi pokok liabilitas sewa	(2.076)	(2.206)	Payment of principal portion of lease liabilities
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(21.411)	(125.826)	Net Cash Used in Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(47.739)	(85.063)	**NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	162.724	247.787	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	114.985	162.724	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR**

Informasi atas aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 28

Information of non-cash investing activities are disclosed in Note 28

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Barito Renewables Energy Tbk (dahulu PT Barito Cahaya Nusantara) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris dari Nanny Wiana Setiawan, S.H., notaris di Jakarta, No. 3 tertanggal 5 Februari 2018. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0010938.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 1 Maret 2018.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No 54 tanggal 15 Juni 2023 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta terkait perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dan pemecahan nilai nominal saham. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0033656.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 (Catatan 1.b).

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan saat ini adalah sebagai perusahaan holding yang bergerak dalam aktivitas konsultasi manajemen lainnya, pembangkit tenaga listrik dan pengusahaan tenaga panas bumi.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Wisma Barito Pacific II, Lantai 23, Jl. Letjen S. Parman Kav. 60, Jakarta.

Entitas induk langsung dan terakhir Perusahaan adalah PT Barito Pacific Tbk. ("Barito Pacific"), sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Barito Renewables Energy Tbk (formerly PT Barito Cahaya Nusantara) (the "Company") was established based on the Notarial Deed of Nanny Wiana Setiawan, S.H., notary in Jakarta, No. 3 dated 5 February 2018. The Company's establishment deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0010938.AH.01.01. Tahun 2018 dated 1 March 2018.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment based on Notarial Deed No. 54 dated 15 June 2023 of Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta was regarding changes to the Company's Articles of Association to increase the Company's authorised capital and changes in the Company's nominal share value. This amendment to the Company's Articles of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0033656.AH.01.02.Tahun 2023 dated 16 June 2023 (Note 1.b).

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's current activities is as a holding company engaged in other management consulting activities, power generation and geothermal power business.

The Company is domiciled in Jakarta with its head office located at Wisma Barito Pacific II, 23rd Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 60, Jakarta.

The direct parent and ultimate parent entity of the Company is PT Barito Pacific Tbk. ("Barito Pacific"), a company incorporated in Indonesia and listed on the Indonesia Stock Exchange.

The Company's Boards of Commissioners and Directors were as follows:

	31 Desember 2025/ 31 December 2025	31 Desember 2024/ 31 December 2024	
Komisaris Utama	Agus Salim Pangestu	Agus Salim Pangestu	President Commissioner
Komisaris	David Kosasih T. Suan Swee Merly	Erwin Ciputra David Kosasih T. Suan Swee	Commissioners
Komisaris Independen	Cholanat Yanaranop Tan Ek Kia	Tan Ek Kia Todung Mulya Lubis Cholanat Yanaranop	Independent Commissioners
Direktur Utama	Hendra Soetjipto Tan	Hendra Soetjipto Tan	President Director
Direksi	Kenneth Lee Riedel Agus Sandy Widyanto Hsing Chee Chiam	Merly Kenneth Lee Riedel Agus Sandy Widyanto	Directors

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 susunan Audit Komite Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2025 and 2024, the composition of the Company's Audit Committee was as follows:

Ketua	Tan Ek Kia	Chairman
Anggota	Jennywati Soewito	Members
	Dikdik Sugiharto	

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan dan entitas anak memiliki 705 orang karyawan tetap (2024: 713 karyawan tetap) (tidak diaudit).

As at 31 December 2025, the Company and its subsidiaries had 705 permanent employees (2024: 713 permanent employees) (unaudited).

b. Penawaran umum saham biasa

b. Public offering of ordinary shares

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 54 tanggal 15 Juni 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-0033656.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023, para pemegang saham menyetujui perubahan dalam Anggaran Dasar Perusahaan mengubah nilai nominal masing-masing saham Perusahaan dari semula Rp1.000.000 – nilai penuh per lembar saham menjadi Rp150 – nilai penuh per lembar saham dan modal dasar perseroan dari berjumlah 30.000.000 lembar saham menjadi 500.000.000.000 lembar saham, serta modal yang ditempatkan dan disetor dari 19.465.683 lembar saham menjadi 129.771.220.000 lembar saham.

Based on the Deed of Notary Aulia Taufani, S.H., No. 54 dated 15 June 2023 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0033656.AH.01.02.Tahun 2023 dated 16 June 2023, the shareholders approved the changes in the Company's Articles of Association changing the nominal value of each of the Company's shares from IDR1,000,000 – full amount per share to become IDR150 – full amount per share and the Company's authorised capital from 30,000,000 shares to 500,000,000,000 shares, as well as issued and paid-up capital from 19,465,683 shares to 129,771,220,000 shares.

Pada tanggal 29 September 2023, Perusahaan memperoleh pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat No. S-311/D.04/2023 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan. Pada tanggal 9 Oktober 2023, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

On 29 September 2023, the Company received notification on the effective registration statement from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK") through letter No. S-311/D.04/2023 to conduct an Initial Public Offering ("IPO") of the Company's shares. On 9 October 2023, these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

Perusahaan menawarkan sebanyak 4.015.000.000 lembar saham dengan harga nominal sebesar Rp150 – nilai penuh per lembar saham sehingga menambah modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar AS$38.600.

The Company offered 4,015,000,000 shares with par value of IDR150 – full amount per share, hence it increased its issued and fully paid capital by US$38,600.

Tambahan modal disetor terdiri dari selisih antara harga nominal saham sebesar Rp150 – nilai penuh per lembar saham dan nilai transaksi atas Penawaran Umum Perdana Saham atau harga penawaran sebesar Rp780 – nilai penuh per lembar saham sebesar AS$162.118, dikurangi dengan biaya emisi saham sebesar AS$3.178.

The additional paid-in capital consists of the difference between the share's par value of IDR150 – full amount per share and the transaction value of the IPO or offering price of IDR780 – full amount per share totalling US$162,118, less the share issuance costs amounting to US$3,178.

Biaya emisi saham merupakan biaya transaksi yang timbul dari aktivitas Penawaran Umum Saham Perdana, antara lain mencakup biaya pendaftaran dan biaya wajib lain, jasa yang dibayarkan kepada penasehat hukum, akuntan, dan lain-lain.

Share issuance costs represent transaction costs arising from the IPO, which includes registration fees and other regulatory fees, service fees paid to legal counsel, accountants, and others.

c. Struktur grup

c. Group structure

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup".

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group".

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 entitas anak dari Grup adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2025 and 2024 the subsidiaries of the Group were as follows:

Entitas Anak/*Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Persentase Pemilikan/ *Percentage of ownership (%)* 31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	Tahun Operasi Komersial/ *Start of commercial operations*	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024
Kepemilikan langsung/ Direct ownership						
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd ("SEGHPL")	Singapura/ *Singapore*	100,00	100,00	2012	1.914.530	1.814.268
PT Barito Wind Energy ("BWE")	Indonesia	99,99	99,99	2023	149.057	143.253
Kepemilikan tidak langsung melalui SEGHPL dan entitas anak/Indirect ownership through SEGHPL and subsidiaries:						
Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("SEGPL") Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL/ *Indirect ownership through SEGHPL*	Singapura/ *Singapore*	90,00	90,00	2005	792.542	709.241
Star Energy Geothermal Netherlands B.V (*Formerly* Star Phoenix Geothermal JV B.V) ("SEG-NBV") Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL/ *Indirect ownership through SEGHPL*	Belanda/ *Netherlands*	100,00	100,00	2016	465.535	436.009
Star Energy Geothermal Phillipines B.V Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL/ *Indirect ownership through SEGHPL*	Belanda/ *Netherlands*	100,00	100,00	Tidak beroperasi/ *Dormant*	22	-
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd ("SEG-WW") Pemilikan tidak langsung melalui SEGPL/ *Indirect ownership through SEGPL*	British Virgin Island	90,00	90,00	2000	796.929	806.317
PT Star Energy Geothermal Halmahera Pemilikan tidak langsung melalui SEGPL/ *Indirect ownership through SEGPL*	Indonesia	85,50	85,50	Tahap eksplorasi/ *Exploration stage*	4.737	261
Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEG-SL") Pemilikan tidak langsung melalui SEGSDBV/ *Indirect ownership through SEGSDBV*	Bermuda	80,91	80,91	1994	4.158.503	3.709.646
Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd. Pemilikan tidak langsung melalui SEG-SL/ *Indirect ownership through SEG-SL*	Pulau Cayman/ *Cayman Island*	80,91	80,91	1997	2.347.477	2.051.125
Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I") Pemilikan tidak langsung melalui SEGSDBV/ *Indirect ownership through SEGSDBV*	Persemakmuran Bahama/ *Bahama*	80,91	80,91	1994	582.358	550.008
Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II") Pemilikan tidak langsung melalui SEGSDBV/ *Indirect ownership through SEGSDBV*	*Commonwealth* Bermuda	80,91	80,91	1994	929.805	887.736
PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau Pemilikan tidak langsung melalui SEGSDBV/ *Indirect ownership through SEGSDBV*	Indonesia	76,86	76,86	Tahap eksplorasi/ *Exploration stage*	93.370	1.271
PT Star Energy Geothermal Indonesia Pemilikan tidak langsung melalui SEGPL/ *Indirect ownership through SEGPL*	Indonesia	85,50	85,50	2011	30.443	11.714
Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V. ("SEGHSDBV") Pemilikan tidak langsung melalui SEGPL dan SEG-NBV/ *Indirect ownership through SEGPL and SEG-NBV*	Belanda/ *Netherlands*	94,90	94,90	2016	923.607	871.684
Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V. ("SEGSDBV") Pemilikan tidak langsung melalui SEGHSDBV/ *Indirect ownership through SEGHSDBV*	Belanda/ *Netherlands*	80,91	80,91	2016	2.315.652	2.249.122
PT Darajat Geothermal Indonesia Tidak langsung melalui SEGSDBV/ *Indirect ownership through SEGSDBV*	Indonesia	76,86	76,86	2000	45.968	42.934
PT Star Energy Geothermal Drilling Services Pemilikan tidak langsung melalui SEGPL dan SEGSDBV/ *Indirect ownership through SEGPL and SEGSDBV*	Indonesia	85,55	85,55	2023	27.619	18.378
Kepemilikan tidak langsung melalui BWE/Indirect ownership through BWE:						
PT Sidrap Bayu Energi Tahap Dua (sebelumnya/*formerly* PT UPC Sidrap Bayu Energi Tahap Dua) ("SIDRAP2")	Indonesia	50,99	50,99	Tahap eksplorasi/ *Exploration stage*	13.321	13.304
PT Sukabumi Bayu Energi (sebelumnya/*formerly* PT UPC Sukabumi Bayu Energi) ("SUKABUMI")	Indonesia	50,99	50,99	Tahap eksplorasi/ *Exploration stage*	7.228	8.038
PT Lombok Timur Bayu Energi (sebelumnya/*formerly* PT UPC Lombok Timur Bayu Energi) ("LOMBOK")	Indonesia	50,99	50,99	Tahap eksplorasi/ *Exploration stage*	2.353	2.448
PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SBE")	Indonesia	99,99	99,99	2018	131.503	135.246
PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia (sebelumnya/ *formerly* PT UPC Operation and Maintenance Indonesia) ("OMI")	Indonesia	99,96	99,96	2018	169	145
PT Nefin Solar Asset ("NSA")	Indonesia	50,99	-	Tahap pengembangan/ *Development stage*	1.319	-

Informasi singkat tentang entitas-entitas dalam Grup diuraikan di bawah ini:

SEGHPL

SEGHPL adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Singapura. Aktivitas utama SEGHPL adalah melakukan investasi.

Restrukturisasi SEGHPL dann entitas anak

Efektif pada tanggal 26 Desember 2022, sesuai dengan Akta Notaris No. 83, 84, 85 dan 86 dari Wiwik Condro, S.H., notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan menyetujui antara lain:

- penjualan 10 lembar saham dari PT Griya Idola kepada Barito Pacific senilai Rp10.000.000 (nilai penuh);
- peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi 30.000.000 lembar saham;
- penerbitan 19.463.808 lembar saham baru Perusahaan senilai Rp19.463.808.000.000 (nilai penuh) (setara dengan AS$1.248.000) yang akan diambil oleh Barito Pacific sebanyak 12.975.872 lembar saham dan Green Era sebanyak 6.487.936 lembar saham dengan mekanisme tukar saham (inbreng) atas seluruh saham SEGHPL milik Barito Pacific dan Green Era;
- penerbitan saham baru Perusahaan sebesar 625 lembar saham senilai Rp625.000.000 (nilai penuh) (setara dengan AS$40) yang akan diambil oleh Green Era dan dibayarkan secara tunai; dan
- untuk merubah Anggaran Dasar Perusahaan menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”).

Sebagai akibat dari restrukturisasi SEGHPL dan entitas anak (“SEGHPL Grup”) dan Perusahaan, seluruh posisi keuangan dan hasil operasi (termasuk saldo laba dan cadangan lainnya) dari SEGHPL digabungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan. Barito Pacific tetap memegang kendali atas Perusahaan dan SEGHPL saat sebelum dan sesudah restrukturisasi.

Nilai transaksi penerbitan saham baru sebesar AS$1.248.000 adalah berdasarkan laporan penilai independen. Selisih sebesar AS$497.917 antara nilai transaksi sebesar AS$1.248.000 (merupakan nilai saham baru yang diterbitkan) dan nilai modal saham SEGHPL yang diperoleh disajikan sebagai tambahan modal disetor dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

Perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan sebagai akibat dari transaksi di atas telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0129915.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022.

Brief information on the entities within the Group is set out below:

SEGHPL

SEGHPL is a limited liability company incorporated and domiciled in Singapore. The principal activity of SEGHPL is investment holding.

Restructuring of SEGHPL

Effective on 26 December 2022, according to Notarial Deeds No. 83, 84, 85 and 86 of Wiwik Condro, S.H., notary in Jakarta, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company approved the following:

- sale of 10 shares from PT Griya Idola to Barito Pacific for IDR10,000,000 (full amount);
- increase in the Company's authorised capital to 30,000,000 shares;
- issuance of 19,463,808 new shares of the Company valued at IDR19,463,808,000,000 (full amount) (equivalent to US$1,248,000) to be subscribed for by Barito Pacific as to 12,975,872 shares and Green Era as to 6,487,936 shares under a share swap (inbreng) mechanism for all of the SEGHPL shares owned by Barito Pacific and Green Era;
- issuance of 625 new shares of the Company valued at IDR625,000,000 (full amount) (equivalent to US$40) to be subscribed for by Green Era and paid for in cash; and
- to change the Company's Articles of Association to become a Foreign Investment (“PMA”) company.

As a result of the restructuring of SEGHPL and its subsidiaries (“SEGHPL Group”) and the Company, all of SEGHPL’s financial position and result of operations (including retained earnings and other reserves) have been combined into the Company’s consolidated financial statements. Barito Pacific controls both the Company and SEGHPL before and after the restructuring.

The value of the new shares issued of US$1,248,000 was based on an independent valuer’s report. The difference of US$497,917 between the transaction value of US$1,248,000 (being the value of the new shares issued) and the value of SEGHPL’s share capital acquired is presented as additional paid-in capital in the consolidated financial statements of the Group.

The changes to the Articles of Association of the Company due to the transactions listed above have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0129915.AH.01.02.Tahun 2022 dated 28 December 2022.

BWE

Berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 20 Oktober 2023, oleh Wiwik Condro, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan dan SEGHPL mendirikan BWE dengan modal dasar sejumlah Rp62.400.000.000 – nilai penuh (atau setara dengan AS$4.000.000 – nilai penuh) terdiri dari 40.000 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.560.000 – nilai penuh (atau setara dengan AS$100 – nilai penuh). Dari modal dasar tersebut, yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar 25% atau sejumlah 10.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp15.600.000.000 – nilai penuh (atau setara dengan AS$1.000.000 – nilai penuh), dengan Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dengan 9.999 lembar saham dan SEGHPL memiliki 1 lembar saham. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0080578.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023.

BWE adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Indonesia. Aktivitas utama BWE adalah perusahaan induk investasi.

Pada tanggal 14 Desember 2023, keputusan sirkuler pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa Perusahaan menyetujui dan memutuskan perubahan atas Anggaran Dasar BWE yang telah diresmikan melalui Akta Notaris No. 71 tanggal 15 Desember 2023, oleh Wiwik Condro, S. H., notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0079189.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023.

Perubahan tersebut antara lain:

i. Penjualan saham BWE sejumlah satu lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp1.560.000 – nilai penuh atau sama dengan 0,01% dari seluruh modal ditempatkan BWE dari SEGHPL kepada PT Barito Mitra Investama (“BMI”), entitas sepengendalian dengan Perusahaan.

ii. Perubahan nilai nominal saham yang sebelumnya masing-masing saham bernilai nominal Rp1.560.000 – nilai penuh atau AS$100 – nilai penuh menjadi Rp1.000.000 – nilai penuh.

iii. Peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor BWE melalui penerbitan saham baru sehingga modal dasar menjadi sebesar Rp930.000.000.000 – nilai penuh dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp465.000.000.000 – nilai penuh.

BWE

Based on Notarial Deed No. 35 dated 20 October 2023, by Wiwik Condro, S.H., a notary in Jakarta, the Company and SEGHPL established a company named BWE with total authorised capital amounted to IDR62,400,000,000 – full amount (or equivalent to US$4,000,000 – full amount) consisting of 40,000 shares with par value of IDR1,560,000 – full amount (or equivalent to US$100 – full amount). From the authorised capital, the issued and paid-in capital is 25% or equivalent to 10,000 shares amounted to IDR15,600,000,000 – full amount (or equivalent to US$1,000,000 – full amount), with the Company as majority shareholder with 9,999 shares and SEGHPL holding 1 share. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through Decision Letter No. AHU-0080578.AH.01.01.Tahun 2023 dated 24 October 2023.

BWE is a limited liability company incorporated and domiciled in Indonesia. The principal activity of BWE is an investment holding entity.

On 14 December 2023, a circular shareholder resolution in lieu of the Company's extraordinary general meeting of shareholders approved and decided changes in BWE’s Articles of Association which have been formalised through Notarial Deed No. 71 dated 15 December 2023, by Wiwik Condro, S. H., notary in Jakarta and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0079189.AH.01.02.Tahun 2023 dated 18 December 2023.

The changes included:

i. Sale of BWE shares in the amount of one share with a nominal value of Rp1,560,000 – full amount each or equal to 0.01% of the entire issued capital of BWE from SEGHPL to PT Barito Mitra Investama ("BMI"), an entity under common control with the Company.

ii. Change in the nominal value of shares from previously each share having a nominal value of Rp1,560,000 – full amount or US$100 – full amount to Rp1,000,000 – full amount.

iii. Increase in authorised, issued and paid-up capital of BWE through the issuance of new shares so that the authorised capital becomes Rp930,000,000,000 – full amount and issued and fully paid-up capital of Rp465,000,000,000 – full amount.

iv. Peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor BWE melalui penerbitan saham baru sehingga modal dasar menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000 – nilai penuh dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp962.389.000.000 – nilai penuh.

v. Susunan pemegang saham BWE menjadi sebagai berikut:

iv. Increase in authorised, issued and paid-up capital of BWE through the issuance of new shares so that the authorised capital becomes Rp1,000,000,000,000 – full amount and issued and fully paid-up capital of Rp962,389,000,000 – full amount.

v. The composition of BWE's shareholders becomes as follows:

	Sebelum/Before		Setelah/After	
	Jumlah saham/ No. of shares	IDR'000	Jumlah saham/ No. of shares	IDR'000
Modal ditempatkan dan disetor/Issued and fully paid:				
Perusahaan/Company	464.999	464.999.000	962.388	962.388.000
BMI	1	1.000	1	1.000
	465.000	465.000.000	962.389	962.389.000

BWE adalah entitas induk dari:

- PT Sidrap Bayu Energi Tahap Dua - sebelumnya PT UPC Sidrap Bayu Energi Tahap Dua ("SIDRAP2")
- PT Sukabumi Bayu Energi - sebelumnya PT UPC Sukabumi Bayu Energi) ("SUKABUMI")
- PT Lombok Timur Bayu Energi - sebelumnya PT UPC Lombok Timur Bayu Energi) ("LOMBOK")
- PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SBE")
- PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia - sebelumnya PT UPC Operation and Maintenance Indonesia) ("OMI")
- PT Nefin Solar Asset ("NSA")

BWE is the immediate parent of:

- PT Sidrap Bayu Energi Tahap Dua - formerly PT UPC Sidrap Bayu Energi Tahap Dua ("SIDRAP2")
- PT Sukabumi Bayu Energi - formerly PT UPC Sukabumi Bayu Energi) ("SUKABUMI")
- PT Lombok Timur Bayu Energi - formerly PT UPC Lombok Timur Bayu Energi) ("LOMBOK")
- PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SBE")
- PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia - formerly PT UPC Operation and Maintenance Indonesia) ("OMI")
- PT Nefin Solar Asset ("NSA")

PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SBE")

SBE didirikan dengan akta notaris Mala Mukti SH, LLM, No. 71 tanggal 25 Februari 2013 di Jakarta. Akta pendirian disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dalam surat keputusannya No. AHU-16472.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 2 April 2013 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013, tambahan No. 90048.

SBE saat ini mengoperasikan pembangkit listrik tenaga angin 75 megawatts ("MW") berdasarkan Power Purchase Agreement ("PPA") dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") untuk periode selama 30 tahun dari tanggal 5 April 2018.

SBE beroperasi berdasarkan peraturan pajak di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan dalam menentukan ketentuan untuk pajak penghasilan dan pajak lainnya, pemulihan klaim pengembalian pajak, dan pengakuan aset pajak tangguhan. Jika hasil pajak akhir dari klaim tersebut berbeda dari jumlah yang awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat dalam laba rugi pada periode saat penentuan tersebut dilakukan.

PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SBE")

SBE was established based on Notarial Deed No. 71 dated 25 February 2013 of Notary Mala Mukti, S.H., LL.M., a public notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (the "MOLHR") in Decision Letter No. AHU-16472.AH.01.01.Tahun 2013, dated 2 April 2013 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 72 dated 6 September 2013, supplement No. 90048.

SBE currently operates a 75 megawatts ("MW") wind-powered electricity plant under a Power Purchase Agreement ("PPA") with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") for a period of 30 years from 5 April 2018.

SBE operates under the tax regulations in Indonesia. Significant judgement is required in determining the provision for income tax and other taxes, recoverability of claims for tax refunds and recognition of deferred tax assets. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will be recorded in profit or loss in the period in which such a determination is made.

Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("SEGPL")

SEGPL adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Singapura. Aktivitas utama SEGPL adalah melakukan investasi.

Star Energy Geothermal Netherlands B.V. ("SEGNBV") dan Star Energy Geothermal Philippines B.V. ("SEG Philippines")

SEGNBV dan SEG Philippines didirikan pada Desember 2016 di Belanda. Aktivitas utama SEGNBV dan SEG Philippines adalah melakukan investasi.

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. ("SEGWWL")

Joint Operation Contract ("JOC")

Kegiatan utama SEGWWL adalah untuk mengoperasikan area sumber energi panas bumi di pulau Jawa, Indonesia berdasarkan JOC tertanggal 2 Desember 1994, dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("PERTAMINA"), perusahaan minyak dan gas milik Negara Indonesia.

Jangka waktu JOC adalah 42 tahun, mulai dari 2 Desember 1994. Periode produksi ("masa pakai") untuk setiap unit produksi tenaga listrik adalah 30 tahun terhitung sejak unit pertama beroperasi secara komersial. Masa ini dapat diperpanjang hingga akhir masa JOC apabila masa pakainya diakhiri sebelum masa kontrak JOC. 110 MW unit pertama (Unit 1) mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Juni 2000 dan yang selanjutnya meningkat menjadi 113,5 MW. Unit kedua 117 MW (Unit 2) mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2009. SEGWWL telah memulai kegiatan pembangunan unit ketiga (Unit 3) dan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan Final Investment Decision ("FID") dari Direksi.

Pada tanggal 12 Maret 2007, PERTAMINA telah mengalihkan hak dan kewajibannya terkait kegiatan panas bumi kepada anak perusahaannya, PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"). Pengalihan ini kemudian didokumentasikan dalam Amendemen Kedua atas JOC Wayang Windu ("Amendemen kedua JOC") tertanggal 27 Juni 2016.

Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("SEGPL")

SEGPL is a limited liability company incorporated and domiciled in Singapore. The principal activity of SEGPL is investment holding.

Star Energy Geothermal Netherlands B.V. ("SEGNBV") and Star Energy Geothermal Philippines B.V. ("SEG Philippines")

SEGNBV and SEG Philippines were incorporated in December 2016 in the Netherlands. The principal activity of SEGNBV and SEG Philippines is investment holding.

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. ("SEGWWL")

Joint Operation Contract ("JOC")

The principal activity of SEGWWL is to operate a geothermal energy resource area on the island of Java in Indonesia under a JOC dated 2 December 1994 with Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("PERTAMINA"), the Indonesian state-owned oil and natural gas corporation.

The term of the JOC is 42 years, beginning on 2 December 1994. The production period (the "generation term") for each power production unit is 30 years commencing on the date the first unit began to operate commercially. This term may be extended to the end of the term of the JOC if the generation term concludes prior to the JOC contract term. The first 110 MW Unit (Unit 1) commenced commercial operation on 8 June 2000 and was subsequently increased to 113.5 MW. The second 117 MW Unit (Unit 2) commenced commercial operation in March 2009. SEGWWL commenced development activities for the third Unit (Unit 3) and as of the date of these consolidated financial statements, management is still in the process of obtaining pre-Final Investment Decision ("FID") approval from the Board of Directors.

On 12 March 2007, PERTAMINA transferred its rights and obligations related to geothermal activities to its subsidiary, PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"). This transfer was subsequently documented in the Second Amendment of the Wayang Windu JOC ("JOC 2nd amendment") dated 27 June 2016.

Syarat-syarat utama JOC adalah sebagai berikut:

i. Manajemen operasi

PGE memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya panas bumi. SEGWWL menanggung risiko dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional panas bumi dan harus membiayai pengeluaran untuk kegiatan operasional panas bumi tersebut.

ii. Kepemilikan material dan peralatan

Bahan dan peralatan yang dibeli oleh SEGWWL dan digunakan dalam fasilitas lapangan dan hak atas tanah, bergantung pada hak gadai kreditur, akan menjadi hak milik PGE saat pembangunan fasilitas tersebut selesai. PGE memberikan SEGWWL hak eksklusif selama jangka waktu JOC untuk menggunakan, antara lain, fasilitas lapangan untuk operasi energi panas bumi. Oleh karena SEGWWL telah membayar dan mempunyai hak untuk menggunakan aset tersebut, harga perolehan atas aset-aset tersebut dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan SEGWWL. Fasilitas pembangkit harus tetap menjadi milik SEGWWL. Fasilitas pembangkit listrik dapat dialihkan atau dijual ke PGE pada saat berakhirnya jangka waktu kontrak JOC.

iii. Pajak penghasilan badan

Kontraktor JOC tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991, yang memberikan tarif pajak inklusif pada kontraktor sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai “bagian Pemerintah”.

iv. Penyisihan produksi

Kontraktor JOC diharuskan membayar penyisihan produksi kepada PGE setara dengan 4% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Tunjangan Produksi PGE merupakan biaya royalti yang dibayarkan kepada PGE. Biaya ini dapat dikurangkan dari pajak sehingga dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Energy Sales Contract (“ESC”)

Sehubungan dengan JOC antara SEGWWL dengan PERTAMINA, maka kedua pihak sepakat untuk membuat ESC dengan PLN, dimana PLN telah menyetujui untuk membeli listrik yang dihasilkan dan dikirim oleh SEGWWL kepada PLN atas nama PERTAMINA untuk jangka waktu 30 tahun, dimulai dari tanggal komersial hingga mencapai kapasitas pembangkit maksimum sebesar 400 MW.

The principal terms of the JOC are as follows:

i. Management of operations

PGE shall have the right and responsibility to manage the geothermal resources. SEGWWL bears the risk and is responsible for the conduct of the geothermal operations and shall finance the expenditures for the geothermal operations.

ii. Ownership of materials and equipment

Materials and equipment purchased by SEGWWL and incorporated into the field facilities and land rights, subject to liens in favour of lenders, shall become the property of PGE when the construction of such facilities has been completed. PGE has granted SEGWWL an exclusive and irrevocable right during the term of the JOC to use, among other things, the field facilities for geothermal operations. As SEGWWL has paid for and has the right to use such property, the costs of these assets have been recorded as assets in SEGWWL’s financial statements. Electricity generating facilities shall remain the property of SEGWWL. Electricity generating facilities may be transferred or sold to PGE at the termination of the JOC contract term.

iii. Corporate income tax

A joint operation contractor is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991, which provides the contractor with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain government regulations, this 34% is referred to as the “Government share”.

iv. Production allowance

The JOC contractor is required to pay PGE a production allowance equivalent to 4% of net operating income, calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law. The PGE Production Allowance represents a royalty fee paid to PGE. This charge is tax deductible therefore it is accounted for as an expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Energy Sales Contract (“ESC”)

In conjunction with SEGWWL entering into the JOC with PERTAMINA, both PERTAMINA and SEGWWL entered into an ESC with PLN whereby PLN has agreed to purchase electricity output which is delivered by SEGWWL to PLN on behalf of PERTAMINA for 30 years commencing on the date of commercial generation, up to a maximum aggregate generating capacity of 400 MW.

ESC mengatur pembayaran energi yang dihitung dalam satuan Dolar Amerika Serikat berdasarkan jam kilowatt ("kWh") yang dapat dikirim pada harga energi dasar, yang disesuaikan dengan inflasi. ESC didukung oleh surat dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") serta Kementerian Keuangan ("Kemenkeu") Republik Indonesia.

The ESC provides for a United States Dollar calculated energy payment based on deliverable kilowatt hour ("kWh") at a base energy price, as adjusted for inflation. The ESC is supported by letters of support from the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MoEMR") and the Ministry of Finance ("MoF") of the Republic of Indonesia.

Setelah amendemen pertama ESC, PERTAMINA menginstruksikan PLN untuk membayar semua jumlah langsung ke SEGWWL dalam waktu 30 hari sejak diterimanya tagihan, untuk listrik yang dikirim atau disediakan oleh SEGWWL ke PLN, berdasarkan formula harga yang tercantum dalam amendemen ESC. PLN setuju untuk mengirimkan kepada PERTAMINA salinan perintah transfer dana yang relevan dengan pembayaran yang dilakukan. Faktur dinyatakan dan harus dibayar dalam Dolar Amerika Serikat ("AS$").

After the first amendment of the ESC, PERTAMINA instructed PLN to pay all amounts directly to SEGWWL within 30 days of receipt of an invoice, for the electricity delivered or made available by SEGWWL to PLN, based upon the pricing formula stated in the ESC amendment. PLN agrees to send to PERTAMINA a copy of the funds transfer order relevant to the payment made. The invoice is stated and payable in United States Dollars ("US$").

Setiap jumlah berdasarkan kontrak yang tidak dibayar oleh PLN pada saat jatuh tempo akan menimbulkan bunga sejak tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga per tahun sama dengan tingkat suku bunga deposito LIBOR tiga bulan (sebagaimana tingkat tersebut berubah dari waktu ke waktu) ditambah 3%, dihitung dan dimajemukkan setiap bulan sampai jumlah tersebut dibayarkan.

Any amount under the contract not paid by PLN when due shall accrue interest from the date due at a per annum interest rate equal to the three months LIBOR deposit rate (as the rate is changed from time to time) plus 3%, calculated and compounded monthly until such amounts are paid.

Sesuai dengan ketentuan ESC, PLN harus membayar kapasitas minimum berdasarkan kapasitas tarif unit dan faktor pendukung dari setiap unit, selama SEGWWL dapat menyediakan listrik pada tingkat yang telah ditentukan.

In accordance with the terms of the ESC, PLN shall pay a minimum capacity payment based on the unit rated capacity and the availability factor of each unit, as long as SEGWWL can supply and generate energy at the minimum specified levels.

Efektif tanggal 21 November 2006, SEGWWL, PLN dan PERTAMINA melakukan perubahan atas Wayang Windu Geothermal ESC ("Amendemen pertama ESC").

Effective on 21 November 2006, SEGWWL, PLN and PERTAMINA amended the Wayang Windu Geothermal ESC ("ESC 1st Amendment").

Pada tanggal 27 Juni 2016, SEGWWL, PLN dan PERTAMINA menandatangani Amendemen kedua dari ESC Wayang Windu ("Amendemen kedua ESC") yang berlaku efektif tanggal 5 April 2016.

On 27 June 2016, SEGWWL, PLN and PERTAMINA signed the Second Amendment of the Wayang Windu ESC ("ESC 2nd amendment"), effective on 5 April 2016.

Berdasarkan Amendemen pertama dan kedua ESC, tarif listrik telah direvisi menjadi:

Under the ESC first and second amendments, the electricity tariff has been revised as follows:

ESC Awal/Original ESC	AS$0,04638/kWh x indeks inflasi + tingkat kapasitas dasar bulanan(1)/ US$0.04638/kWh x inflation index + monthly base capacity rate(1)
Amendemen pertama ESC/ ESC 1st amendment	AS$0,04940/kWh x indeks eskalasi(3)/ US$0.04940/kWh x escalation index(3)
Amendemen kedua ESC/ ESC 2nd amendment	AS$0,04940/kWh x indeks eskalasi(3) + tarif tambahan tetap delta(2)/ US$0.04940/kWh x escalation index(3) + additional flat delta tariff(2)

(1) tingkat kapasitas dasar bulanan AS$329,5 – nilai penuh per kilowatt-tahun.
(2) tarif tambahan tetap delta AS$0,031105/kWh – nilai penuh.

(1) monthly base capacity rate of US$329.5 – full amount per kilowatt-year.
(2) additional flat delta tariff of US$0.031105/kWh – full amount.

(3) indeks eskalasi akan berlaku selama 264 bulan sejak tanggal pembangkitan komersial dari masing-masing perangkat turbin-generator dan peralatan serta fasilitas terkait yang diperlukan untuk menghasilkan listrik dari energi panas bumi. Berdasarkan Side Agreement tanggal 28 Februari 2023, indeks eskalasi tetap untuk Unit 1 sebesar AS$0,10589/kWh berlaku sejak 9 Juni 2022 dan untuk Unit 2 akan dihitung berdasarkan indeks eskalasi terbaru per Februari 2031 yang akan berlaku mulai 3 Maret 2031.

(3) escalation index shall apply for 264 months from the date of commercial generation of the respective turbine-generator set and its related equipment and facilities required for generating of electricity from geothermal energy. Based on Side Agreement dated 28 February 2023, a flat escalation index for Unit 1 of US$0.10589/kWh is applicable since 9 June 2022 and for Unit 2 shall be calculated based on the latest escalation index as of February 2031 which will be applicable from 3 March 2031.

PT Star Energy Geothermal Indonesia (“PT SEGI”)

PT SEGI didirikan tanggal 4 Februari 2011 dengan nama PT Pakar Usaha Sejati. Sebelumnya, PT SEGI dimiliki oleh PT Artha Sarana Karya dan PT Sarana Karya Mandiri (“PT SKM”) sebelum 99% kepemilikannya diakuisisi oleh SEGPL. Selanjutnya, sisa 1% dimiliki oleh PT SKM. Adapun kegiatan usaha utama PT SEGI adalah memberikan jasa konsultasi manajemen.

Pada tanggal 15 Februari 2019, PT SEGI mengubah pemegang sahamnya dari PT SKM menjadi Barito Pacific dan menerbitkan saham tambahan. Komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

PT Star Energy Geothermal Indonesia (“PT SEGI”)

PT SEGI was incorporated on 4 February 2011 under the name PT Pakar Usaha Sejati. It was previously owned by PT Artha Sarana Karya and PT Sarana Karya Mandiri (“PT SKM”) before SEGPL acquired 99% ownership interest. The remaining 1% was owned by PT SKM. PT SEGI’s main business activities are to provide management consultation services.

On 15 February 2019, PT SEGI changed its shareholder from PT SKM to Barito Pacific and issued additional shares. The shareholder structure is as follows:

	Sebelum/Before		Setelah/After	
	Jumlah saham/ No. of shares	IDR’000	Jumlah saham/ No. of shares	IDR’000
Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and fully paid:				
SEGPL	108.900	10.890.000	108.900	10.890.000
PT SKM	1.100	110.000	-	-
Barito Pacific	-	-	5.732	573.200
	110.000	11.000.000	114.632	11.463.200

PT Star Energy Geothermal Halmahera (“PT SEGH”)

PT SEGH didirikan dengan nama PT Bintang Andalan Prasadana, di mana pada tanggal 30 Maret 2009, namanya berubah menjadi PT SEGH. Pada tanggal 9 Desember 2009, PT SEGH memperoleh izin untuk mengeksplorasi area Jailolo dari Bupati Halmahera Barat. Selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober 2012, SEGPL mengakuisisi 95% kepemilikan saham PT SEGH dari PT Star Energy Investment (“PT SEI”) dan PT Tritunggal Artha Unggul. Pada bulan Januari 2013, Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyetujui peningkatan modal saham PT SEGH dari Rp25.000.000 – nilai penuh menjadi Rp10.000.000.000 – nilai penuh. SEGPL menyetorkan modal tambahan untuk mempertahankan 95% kepemilikannya.

Pada tanggal 17 Februari 2017, PT SEGH menerima surat keputusan dari Kementerian ESDM yang menanggapi permohonan PT SEGH untuk mengembalikan konsesi tersebut kepada Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Maret 2017, Kementerian ESDM menyetujui permintaan pengembalian konsesi.

PT Star Energy Geothermal Halmahera (“PT SEGH”)

PT SEGH was incorporated under the name PT Bintang Andalan Prasadana, and on 30 March 2009, it changed its name to PT SEGH. On 9 December 2009, PT SEGH obtained a licence to explore the Jailolo area from the Regency of Halmahera Barat. On 15 October 2012, SEGPL acquired 95% ownership interest in PT SEGH from PT Star Energy Investment (“PT SEI”) and PT Tritunggal Artha Unggul. Subsequently, in January 2013, the Ministry of Justice and Human Rights approved the increase in share capital in PT SEGH from IDR25,000,000 – full amount to IDR10,000,000,000 – full amount. SEGPL injected additional capital to maintain its 95% ownership interest.

On 17 February 2017, PT SEGH received a decision letter from the MoEMR in response to PT SEGH’s request to return the concession to the Government of Indonesia (“GOI”). On 3 March 2017, the MoEMR approved the request to return the concession.

Pada tanggal 15 Februari 2019, PT SEGH mengubah pemegang sahamnya dari PT SEI menjadi Barito Pacific. Komposisi pemegang saham PT SEGH adalah sebagai berikut:

On 15 February 2019, PT SEGH changed its shareholder from PT SEI to Barito Pacific. The shareholders structure of PT SEGH is as follows:

	Sebelum/Before		Setelah/After	
	Jumlah saham/ No. of shares	IDR'000	Jumlah saham/ No. of shares	IDR'000
Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and fully paid:				
SEGPL	95.000	9.500.000	95.000	9.500.000
PT SEI	5.000	500.000	-	-
Barito Pacific	-	-	5.000	500.000
	100.000	10.000.000	100.000	10.000.000

Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V ("Holdings B.V.")

Holdings B.V. didirikan pada tanggal 15 Desember 2016 dan memegang 80,20% kepemilikan di Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. ("SEGSDBV").

Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. ("SEGSDBV")

SEGSDBV didirikan pada tanggal 16 Desember 2016 dengan penerbitan 10.000 lembar saham bernilai nominal AS$1 per lembarnya. SEGSDBV adalah entitas induk dari:

- Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGSL") - sebelumnya Chevron Geothermal Salak, Ltd. ("CGS")
- Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I") - sebelumnya Chevron Darajat Ltd. ("CDL")
- Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II") - sebelumnya Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI")
- PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("PT SEGSS") - sebelumnya PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau
- PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI")

Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II"); Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I"); dan PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI") – semuanya sebagai Darajat Geothermal Operation West Java Joint Operation Contractor Group ("Kelompok Kontraktor Darajat" atau "SEGDL")

SEGD-I didirikan berdasarkan sertifikat pendirian dari J.O. Liddell, notaris publik dari Persemakmuran Bahama tertanggal 21 Juni 1984 berdasarkan Undang-Undang Bahama dengan lokasi usaha utama di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2017, namanya diubah menjadi SEGD-I setelah diakuisisi oleh SEGSDBV, yang merupakan bagian dari perjanjian jual dan beli tertanggal 22 Desember 2016 antara Chevron Corporation ("CVX") dan Star Energy Consortium dengan tujuan untuk menjual aset panas bumi CVX Indonesia.

Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V ("Holdings B.V.")

Holdings B.V. was incorporated on 15 December 2016 and has 80.20% ownership interest in Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. ("SEGSDBV").

Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. ("SEGSDBV")

SEGSDBV was incorporated on 16 December 2016 with 10,000 issued shares of US$1 each. SEGSDBV is the immediate parent of:

- Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGSL") - formerly known as Chevron Geothermal Salak, Ltd. ("CGS")
- Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I") - formerly known as Chevron Darajat Ltd. ("CDL")
- Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II") - formerly known as Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI")
- PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("PT SEGSS") - formerly known as PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau
- PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI")

Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II"); Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I"); and PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI") - together the Darajat Geothermal Operation West Java Joint Operation Contractor Group (the "Darajat Contractor Group" or "SEGDL")

SEGD-I was incorporated based on a certificate of incorporation of J.O. Liddell, public notary of the Commonwealth of Bahamas Island dated 21 June 1984 under the Laws of the Bahamas with its principal place of business in Indonesia. It changed its name to SEGD-I on 31 March 2017 after its acquisition by SEGSDBV as part of a sale and purchase agreement on 22 December 2016 between Chevron Corporation ("CVX") and the Star Energy Consortium to sell CVX's Indonesian geothermal assets.

SEGD-II adalah perusahaan Bermuda, yang dahulu didirikan dengan nama Texaco Darajat, Ltd. berdasarkan sertifikat pendirian tertanggal 10 Januari 1984 berdasarkan hukum Bermuda, dengan kegiatan usaha utama di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 2005, namanya diubah menjadi CGI. Pada tanggal 31 Maret 2017, CGI diakuisisi sepenuhnya oleh SEGSDBV dan namanya diubah menjadi SEGD-II.

Pada tanggal 26 Februari 1997, PT DGI didirikan dengan Akta No. 160 dari Notaris Sutjipto, S.H. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-5403.HT.01.01.TH.97 tertanggal 24 Juni 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tertanggal 15 Mei 1998, tambahan No. 2609. Pada tanggal 27 September 2017, 95% kepemilikan PT DGI diakuisisi oleh SEGSDBV.

JOC Darajat

SEGD-II dan SEGD-I mengadakan JOC tertanggal 16 November 1984 yang telah diubah pada tanggal 16 November 1988, 15 Januari 1996 dan 7 Februari 2003 dengan PERTAMINA, di mana kegiatan operasional panas bumi sekarang dikelola oleh PGE, anak perusahaan dari PERTAMINA. JOC mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber energi panas bumi di wilayah sekitar 49,98 kilometer persegi (setara dengan 4.998 hektar) di lapangan panas bumi Darajat, Jawa Barat, serta pembangkit listrik dari sumber daya tersebut dan penjualan energi panas bumi dan listrik tersebut ke PLN, melalui PGE, sesuai dengan ESC.

Jangka waktu JOC adalah 564 bulan terhitung sejak 16 November 1984 dengan ketentuan bahwa jika suatu masa produksi dengan periode 360 bulan untuk suatu unit apapun tidak memungkinkan untuk diselesaikan hingga periode 564 bulan berakhir terhitung sejak tanggal efektif, maka perpanjangan periode akan ditambahkan ke dalam jangka waktu JOC selama hal tersebut hanya berkenaan dengan pengadaan energi panas bumi (sebagaimana didefinisikan dalam JOC) untuk unit tersebut dalam periode produksi 360 bulan.

Amendemen No. 1 atas JOC Darajat ("Darajat Amended and Restated JOC") pada tanggal 7 Februari 2003, menyatakan bahwa:

- Dalam hal PLN atau Kelompok Kontraktor Darajat menjalankan opsi yang diberikan untuk memperpanjang masa produksi dari 360 menjadi 480 bulan, maka periode produksi juga harus diubah secara otomatis dari 360 menjadi 480 bulan.
- Selanjutnya, dalam hal PLN atau Kelompok Kontraktor Darajat menjalankan opsi yang diberikan untuk memperpanjang jangka waktu ESC dari 432 menjadi 552 bulan, maka jangka waktu JOC harus diubah secara otomatis dari 564 menjadi 684 bulan dari tanggal 16 November 1984.

SEGD-II is a Bermuda corporation that was incorporated under the name Texaco Darajat, Ltd. based on a certificate of incorporation dated 10 January 1984 under the Laws of Bermuda, with its principal place of business in Indonesia. It changed its name to CGI on 14 November 2005. On 31 March 2017, CGI was fully acquired by SEGSDBV and changed its name to SEGD-II.

PT DGI was established by Deed No. 160 of Notary Sutjipto, S.H., dated 26 February 1997. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No.C2-5403.HT.01.01.TH.97 dated 24 June 1997 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 dated 15 May 1998, supplement No. 2609. On 27 September 2017, 95% ownership of PT DGI was acquired by SEGSDBV.

Darajat JOC

SEGD-II and SEGD-I, entered into a JOC dated 16 November 1984 as amended on 16 November 1988, 15 January 1996 and 7 February 2003 with PERTAMINA for which geothermal operations are now managed by PGE, a subsidiary of PERTAMINA. The JOC provides the exploration and exploitation rights for geothermal energy resources in an area of approximately 49.98 square kilometres (equivalent to 4,998 hectares) in the Darajat geothermal field, West Java, as well as the generation of electricity from those resources and the sale of such geothermal energy and electricity to PLN through PGE, pursuant to an ESC.

The term of the JOC is 564 months commencing from 16 November 1984, provided that if a production period of 360 months for any unit is not possible within the period ending 564 months following the effective date, then an extension period will be added to the term of the JOC as it pertains to that unit only to enable the supply of geothermal energy (as defined in the JOC) to such unit for a production period of 360 months.

Amendment No.1 to the Darajat JOC ("Darajat Amended and Restated JOC") dated 7 February 2003 states that:

- In the event that either PLN or the Darajat Contractor Group exercises the option granted to extend the production period from 360 to 480 months, the production period shall be automatically amended from 360 to 480 months.
- Furthermore, in the event that either PLN or the Darajat Contractor Group exercises the option granted to extend the ESC term from 432 to 552 months, the term of the JOC shall be automatically amended from 564 to 684 months from 16 November 1984.

- Jika periode produksi melampaui batas waktu sebagaimana tertera dalam Amended and Restated JOC, maka jangka waktu JOC secara otomatis akan diperpanjang sampai dengan akhir periode produksi.

Pada tanggal 22 September 2020, Kelompok Kontraktor Darajat telah melaksanakan hak/opsinya untuk mengubah jangka waktu JOC dan masa produksi sebagaimana tercantum dalam Darajat Amended and Restated JOC, sehingga jangka waktu JOC diperpanjang hingga 16 November 2041 untuk unit 1 dan 2, dan 11 Mei 2047 untuk unit 3.

JOC Darajat tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/1992 yang memberikan tarif pajak inklusif pada Kelompok Kontraktor Darajat sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam JOC dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai "bagian Pemerintah".

Selain itu, Kelompok Kontraktor Darajat diharuskan membayar penyisihan produksi untuk PGE setara dengan 2,66% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Beban ini dapat dikurangkan dari pajak; oleh karenanya dicatat sebagai beban dalam laba rugi.

Berdasarkan JOC Darajat, biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pendapatan kotor (didefinisikan sebagai semua jumlah yang dibayarkan atau diperoleh oleh Kelompok Kontraktor Darajat) dan dikeluarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat sebelum tanggal operasi pertama untuk unit awal adalah pengurangan dari pendapatan kotor pada tahun tanggal operasi pertama. Setiap kerugian yang timbul pada tahun tanggal operasi pertama dapat dikreditkan terhadap pendapatan dalam delapan tahun berikutnya. Jika suatu kerugian terjadi pada tahun mana pun yang dimulai setelah tanggal operasi pertama, kerugian tersebut akan menjadi "Kerugian yang Dibawa ke Depan Delapan Tahun" dan dapat dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari laba bersih yang diperoleh dalam salah satu dari delapan tahun berikutnya pada tahun terjadinya kerugian tersebut.

ESC Darajat

Sehubungan dengan JOC antara Kelompok Kontraktor Darajat dengan PERTAMINA, PERTAMINA membuat ESC dengan PLN, dimana PLN setuju untuk membeli energi panas bumi dan listrik, yang dikirim oleh Kelompok Kontraktor Darajat. Tagihan dinyatakan dan dibayar dalam mata uang AS$.

- If the production period extends beyond the term of the Darajat Amended and Restated JOC, the JOC term will automatically be extended to coincide with the end of the production period.

On 22 September 2020, the Darajat Contractor Group has exercised its right/option to amend the term of the JOC and the production period as stated in the Darajat Amended and Restated JOC, therefore the JOC term was extended up to 16 November 2041 for units 1 and 2, and 11 May 2047 for unit 3.

The Darajat JOC is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991 and the Minister of Finance Decree No. 766/1992 which provides the Darajat Contractor Group with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the JOC and the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain government regulations, this 34% is referred to as the "Government share".

The Darajat Contractor Group is also required to pay the PGE production allowance equivalent to 2.66% of net operating income calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law. The PGE production allowance represents a royalty fee paid to PGE. This charge is tax deductible; therefore, it is accounted for as an expense in profit or loss.

Based on the Darajat JOC, costs or expenses that are deductible from gross income (defined as all amounts paid to or accrued by the Darajat Contractor Group) and incurred by the Darajat Contractor Group prior to the date of first operation for the initial unit shall be a deduction from gross income in the year of the date of first operation. Any losses incurred in the year of the date of first operation may be credited against income in the succeeding eight years. In the event a loss is incurred in any year commencing after the date of first operation, that loss shall become an "Eight Year Loss Carry Forward" and may be deducted in whole or in part from net income accruing in any of the eight years succeeding the year in which the loss was incurred.

Darajat ESC

In conjunction with the Darajat Contractor Group entering into the JOC with PERTAMINA, PERTAMINA entered into an ESC with PLN whereby PLN agreed to purchase geothermal energy and electricity delivered by the Darajat Contractor Group. The invoice is stated and payable in US$.

Sesuai dengan ketentuan take-or-pay yang diatur dalam Darajat Amended and Restated ESC tanggal 1 Mei 2000, PLN harus membayar minimal 80% dari tingkat kapasitas masing-masing Unit yang beroperasi untuk setiap Unit yang dimiliki oleh PLN (Unit I) dan 95% dari rata-rata kilowatt kapasitas bruto unit yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh Kelompok Kontraktor Darajat (Unit II dan III).

Pada tanggal 10 Agustus 2004, ketentuan dari Darajat Amended and Restated ESC mengalami perubahan kembali melalui Amendemen Perjanjian No. 2 yang ditandatangani oleh PLN, PERTAMINA dan Kelompok Kontraktor Darajat. Perubahan-perubahan yang signifikan adalah sebagai berikut:

- Berkaitan dengan Unit III Darajat, harga dasar sumber daya energi panas bumi dan listrik adalah AS$0,042336 - angka penuh per kWh.

- Segala hak dan pendapatan dari semua perdagangan dan emisi kredit sebagai hasil dari United Nations Framework Convention on Climate Change (“UNFCCC”) dan Protokol Kyoto untuk Clean Development Mechanism (“CDM”) atau mekanisme Pasar Emisi Kredit Gas lainnya yang meliputi Area Kontrak Darajat merupakan properti dari dan dimiliki oleh Kelompok Kontraktor Darajat.

Pada tanggal 28 April 2014, bagian 5.2 dari ESC yang telah diubah, telah disetujui untuk mengatur perubahan Indeks Harga Konsumen (“IHK”) dari tahun dasar 2007 = 100 menjadi tahun dasar 2012 = 100, di mana hal ini langsung diimplementasikan dalam transaksi energi untuk kuartal kedua di tahun 2014.

Darajat Joint Operating Agreement (“JOA”)

SEGD-I dan SEGD-II mengadakan JOA tertanggal 23 Agustus 1997 (sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu dan yang paling akhir tanggal 1 Januari 2009) dengan PT DGI, dimana PT DGI diberikan hak partisipasi sebesar 5%, termasuk hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam, JOC dan ESC untuk fasilitas pembangkit listrik Unit II dan semua unit masa depan. SEGD-I, SEGD-II dan PT DGI secara bersama-sama membentuk Kelompok Kontraktor Darajat.

Amendemen No. 1 atas Darajat Amended and Restated JOA ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2009. Amendemen tersebut menyatakan bahwa seluruh pihak menyetujui untuk menunjuk SEGD-II sebagai operator untuk proyek CDM dan bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kontraktor Darajat, dalam rangka menjual Certified Emission Reductions dan untuk menerima pembayaran.

In accordance with the terms of the take-or-pay provisions of the Darajat Amended and Restated ESC dated 1 May 2000, PLN should pay a minimum 80% of the rated capacity of each Unit in operation for the Unit owned by PLN (Unit I) and 95% of the average gross kilowatt generating capacity of the relevant units built, owned and operated by the Darajat Contractor Group (Units II and III).

On 10 August 2004, the terms of the Darajat Amended and Restated ESC were amended through Amendment Agreement No. 2 signed by PLN, PERTAMINA and the Darajat Contractor Group. The significant amendments are as follows:

- With respect to Darajat Unit III, the base resource price of geothermal energy and electricity is US$0.042336 – full amount per kWh.
- All rights to and revenue from any and all emissions credits and trading as a result of the United Nations Framework Convention on Climate Change (“UNFCCC”) and Kyoto Protocol for Clean Development Mechanism (“CDM”) or other Gas Emission Credit Market mechanisms related to the Darajat Contract Area are the property of and owned by the Darajat Contractor Group.

On 28 April 2014, the amended ESC section 5.2 was approved to change the Indonesian Consumer Price Index (“CPI”) from base year 2007 = 100 to base year 2012 = 100, which was implemented immediately for energy transactions from the second quarter of 2014.

Darajat Joint Operating Agreement (“JOA”)

SEGD-I and SEGD-II entered into a JOA dated 23 August 1997 (as amended from time to time and most recently amended on 1 January 2009) with PT DGI, whereby PT DGI was assigned a 5% participating interest in, and the rights and obligations under, the JOC and ESC for the Unit II power generating facility and all future units. SEGD-I, SEGD-II and PT DGI together form the Darajat Contractor Group.

Amendment No. 1 to the Darajat Amended and Restated JOA was signed on 1 January 2009. The amendment provides that all parties agree to appoint SEGD-II as the operator for the CDM project and act for and on behalf of the Darajat Contractor Group, to sell the Certified Emission Reductions and receive the payments.

Kegiatan operasi komersial Sumber Energi Panas Bumi Unit I ("Unit I") dimulai pada tahun 1994 dengan kapasitas pembangkit sebesar 55 MW. Pembangkit listrik Unit II ("Unit II") mulai beroperasi komersial pada tanggal 1 Juni 2000 dengan kapasitas pembangkit sebesar 70 MW, yang selanjutnya meningkat menjadi 97,5 MW. Pembangkit listrik Unit III ("Unit III") mulai dioperasikan tanggal 12 Mei 2007 dengan kapasitas pembangkit 110 MW, yang kemudian kapasitasnya ditingkatkan menjadi 122 MW.

The Unit I Geothermal Energy Plant ("Unit I") commenced commercial operations in 1994 and has a power generation capacity of 55 MW. The Unit II Power Plant ("Unit II") was commissioned and commenced commercial operations on 1 June 2000 with a power generation capacity at commissioning of 70 MW, subsequently increased to 97.5 MW. The Unit III Power Plant ("Unit III") was commissioned and commenced commercial operations on 12 May 2007 with a power generation capacity of 110 MW, subsequently increased to 122 MW.

Hak partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam Kelompok Kontraktor Darajat adalah sebagai berikut:

The respective participating interests of the participants in the Darajat Contractor Group are as follows:

	Unit I (Uap)/(Steam)	Unit II dan/and III (Listrik)/(Electricity)
SEGD-I	50,0%	47,5%
SEGD-II	50,0%	47,5%
PT DGI	0,0%	5,0%
	100,0%	100,0%

SEGSL dan Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd. ("SEGSPL") – semuanya sebagai "Kelompok Kontraktor Salak"

SEGSL adalah perusahaan Bermuda yang didirikan dengan nama Union Geothermal of Indonesia, Limited berdasarkan sertifikat pendirian tertanggal 25 November 1981, di bawah hukum Bermuda dengan kegiatan usaha utama di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2017, namanya berubah menjadi SEGSL setelah diakuisisi oleh SEGSDBV sebagai bagian dari perjanjian jual beli tertanggal 22 Desember 2016 antara CVX dan Star Energy Consortium dengan tujuan untuk menjual aset panas bumi CVX Indonesia.

SEGSPL (dahulu Dayabumi Salak Pratama, Ltd. ("DSPL")) adalah perusahaan yang dibentuk pada tanggal 1 Mei 1996 di Cayman Islands, dengan kegiatan usaha utama di Indonesia, dengan tujuan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas sumber energi panas bumi ("Power Plant"). SEGSPL merupakan entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh SEGSL. Namanya diubah menjadi SEGSPL pada tanggal 31 Maret 2017 setelah diakuisisi oleh SEGSDBV sebagai bagian dari perjanjian jual beli tanggal 22 Desember 2016 antara CVX dan Star Energy Consortium untuk menjual aset panas bumi milik CVX.

SEGSL and Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd. ("SEGSPL") - together the "Salak Contractor Group"

SEGSL is a Bermuda Corporation, incorporated under the original name Union Geothermal of Indonesia, Limited based on a certificate of incorporation dated 25 November 1981, under the Laws of Bermuda with its principal place of business in Indonesia. It changed its name to SEGSL on 31 March 2017 after its acquisition by SEGSDBV as part of a sale and purchase agreement on 22 December 2016 between CVX and the Star Energy Consortium to sell CVX's Indonesian geothermal assets.

SEGSPL (formerly known as Dayabumi Salak Pratama, Ltd. ("DSPL")) is a special purpose company formed on 1 May 1996 under the laws of the Cayman Islands, with its principal place of business in Indonesia, for the purpose of building and operating a geothermal energy fuelled power generating facility (the "Power Plant"). SEGSPL is a wholly-owned subsidiary of SEGSL. It changed its name to SEGSPL on 31 March 2017 after its acquisition by SEGSDBV as part of a sales and purchase agreement dated 22 December 2016 between CVX and the Star Energy Consortium to sell CVX's Indonesian geothermal assets.

Salak JOC

Pada tanggal 11 Februari 1982, Union Geothermal of Indonesia, Ltd., yang sekarang berubah menjadi SEGSL, mengadakan JOC dengan PERTAMINA, dimana kegiatan operasional panas bumi sekarang dikelola oleh PGE, untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber energi panas bumi di area kontrak Gunung Salak. JOC mengatur pelaksanaan operasi panas bumi di wilayah kontrak. Berdasarkan ketentuan JOC, SEGSL diharuskan untuk mengirim sumber energi panas bumi yang diproduksi dalam area tersebut kepada PLN melalui PGE, sesuai dengan ESC yang dibahas di bawah ini. Energi sumber panas bumi ini digunakan oleh PLN untuk pembangkit listrik dari tiga unit operasional berkapasitas 55 MW, yang selanjutnya meningkat menjadi 60 MW unit pembangkit (Unit 1, 2 dan 3) yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN di area kontrak tersebut. JOC tersebut kemudian diubah pada tanggal 16 November 1994 dan selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2002.

Pada tanggal 1 Mei 1996, CGS mendirikan DSPL sebagai entitas anak yang dimiliki sepenuhnya dan diberikan seluruh hak, kewajiban, dan kepemilikannya berdasarkan JOC terkait dengan kegiatan konstruksi dan operasional dari penambahan 3 unit pembangkit listrik 55 MW, yang selanjutnya meningkat menjadi 67 MW unit pembangkit (Unit 4, 5 dan 6). Hal ini dikonfirmasi melalui Amendemen No. 2 atas Gunung Salak amended and restated JOC pada tanggal 22 Juli 2002. Amendemen No. 2 tersebut juga memperpanjang jangka waktu JOC yang sebelumnya hingga 1 Desember 2030, dimana seterusnya diperpanjang hingga 30 November 2040.

Pada tanggal 3 Juli 2025, tanpa merubah ketentuan JOC sebelumnya, unit pembangkit *binary* telah efektif beroperasi secara komersial, menambah kapasitas 14,49 MW.

JOC Salak tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/1992 yang memberikan tarif pajak inklusif pada Kelompok Kontraktor Salak sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan Pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai “bagian Pemerintah”. Selain itu, Kelompok Kontraktor Salak diharuskan membayar penyisihan produksi setara dengan 4% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak penghasilan Indonesia Tahun 1984. Tunjangan Produksi PGE merupakan biaya royalti yang dibayarkan kepada PGE. Beban ini dapat dikurangkan dari pajak; oleh karenanya dicatat sebagai beban laba rugi.

Salak JOC

On 11 February 1982, Union Geothermal of Indonesia, Ltd., now succeeded by SEGSL, entered into a JOC with PERTAMINA, for which geothermal operations are now managed by PGE, to explore and develop geothermal energy resources within the Gunung Salak contract area. The JOC governs the conduct of geothermal operations in the contract area. Under the terms of the JOC, SEGSL is required to deliver the geothermal energy produced in the contract area to PLN through PGE, pursuant to the ESC discussed below. This geothermal energy is used by PLN to generate electricity from three 55 MW, subsequently increased to 60 MW power generating units (Units 1, 2 and 3) owned and operated by PLN in the contract area. The JOC was amended on 16 November 1994 and again on 22 July 2002.

On 1 May 1996, CGS established DSPL as a wholly owned subsidiary and assigned all of its rights, interests and obligations under the JOC in respect of construction and operation of an additional three 55 MW, subsequently increased to 67 MW power generating units (Units 4, 5 and 6). This was confirmed in Amendment No. 2 to the Gunung Salak amended and restated JOC dated 22 July 2002. Amendment No. 2 also extended the JOC term to 1 December 2030, which was further extended to 30 November 2040.

On 3 July 2025, without amending the provisions of the previous JOC, the binary power generating unit commenced effective commercial operation, adding a generation capacity of 14.49 MW.

The Salak JOC is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991, and the Minister of Finance Decree No. 766/1992 which provides the Salak Contractor Group with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the JOC and the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain Government regulations, this 34% is referred to as the “Government share”. The Salak Contractor Group is also required to pay the PGE production allowance equivalent to 4% of net operating income calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law. The PGE production allowance represents a royalty fee paid to PGE. This charge is tax deductible; therefore, it is accounted for as an expense in profit or loss.

Salak ESC

Bersamaan dengan SEGSL mengadakan JOC pada tanggal 11 Februari 1982 dengan PERTAMINA, PERTAMINA mengadakan ESC dengan PLN di mana PLN telah menyetujui untuk membeli sumber energi panas bumi yang akan dikirim oleh SEGSL. Mengacu pada Amended and Restated JOC tanggal 16 November 1994, ESC juga diubah dan disajikan kembali ("Salak Amended and Restated ESC").

Jangka waktu Amended and Restated Salak ESC berakhir dalam waktu 420 bulan setelah tanggal 16 November 1994 ("Tanggal Efektif") dengan ketentuan apabila periode produksi akan diperpanjang melebihi jangka waktu Salak Amended and Restated ESC, maka jangka waktu tersebut akan secara otomatis diperpanjang hingga berakhirnya periode produksi tersebut. Periode produksi untuk pengiriman energi panas bumi untuk unit pertama, atau listrik dari setiap unit yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh SEGSL, adalah 360 bulan sejak tanggal komersial dari setiap unit, dengan ketentuan jika periode produksi berakhir sebelum akhir dari Salak Amended and Restated ESC, maka periode produksi tersebut akan secara otomatis diperpanjang sampai akhir jangka waktu.

Jangka waktu yang dinyatakan dalam Salak Amended and Restated ESC kemudian diubah melalui perjanjian amendemen ("Second Amendment") yang telah ditandatangani oleh SEGSL pada tanggal 22 Juli 2002. Perubahan yang signifikan adalah sebagai berikut:

- SEGSPL menjadi pihak dalam ESC, di mana SEGSPL mempunyai hak untuk mengoperasikan dan mengirim listrik kepada PLN atas nama PERTAMINA menggunakan kombinasi dari Unit 4, 5 dan 6.
- Jangka waktu ESC akan berakhir tanggal 1 Desember 2030 dan telah diperpanjang sampai 30 November 2040.
- Berkaitan dengan seluruh unit, harga dasar sumber daya energi panas bumi akan diturunkan dari AS$0,04302 – nilai penuh, per kWh berdasarkan ESC asli ke AS$0,03724 – nilai penuh per kWh.

Sesuai dengan amendemen kedua tersebut, PLN harus membayar PGE, yang kemudian akan dibayarkan ke SEGSL dan SEGSPL, untuk setiap energi panas bumi dan listrik yang dikirim setiap bulannya berdasarkan rumus harga yang dinyatakan dalam ESC. Tagihan tersebut dinyatakan dan dibayar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sesuai dengan ketentuan take-or-pay dalam Amendemen Kedua, PLN harus membayar minimum 95,06% dari total kapasitas rated Unit 1, 2 dan 3. Untuk Unit 4, 5 dan 6, PLN harus membayar minimum 90,14% dari total tarif kapasitas. Sedangkan khusus untuk Unit Binary, PLN harus membayar total tarif dari kapasitas minimum 14,48911 MW.

Salak ESC

In conjunction with SEGSL entering into the JOC dated 11 February 1982 with PERTAMINA, PERTAMINA entered into an ESC with PLN whereby PLN agreed to purchase geothermal energy delivered by SEGSL. In connection with the amendment and restatement of the JOC dated 16 November 1994, the ESC was also amended and restated ("Salak Amended and Restated ESC").

The term of the Salak Amended and Restated ESC is for a period ending 420 months after 16 November 1994 (the "Effective Date") provided that should any production period extend beyond the term of the Salak Amended and Restated ESC, the term will be automatically extended until the end of such production period. The production period for delivery of geothermal energy to the initial unit, or electricity from each unit built, owned and operated by SEGSL, shall be at least 360 months commencing on the date of commercial generation of each unit, with the provision that if a production period ends prior to the end of the term of the Salak Amended and Restated ESC, such production period shall be automatically extended to coincide with the end of such term.

The terms as stated in the Salak Amended and Restated ESC were later amended through an Amendment Agreement ("Second Amendment") signed by SEGSL on 22 July 2002. Significant amendments are as follows:

- SEGSPL became a party in the ESC, whereby SEGSPL shall have the right to generate and deliver electricity to PLN on behalf of PERTAMINA using any combination of Units 4, 5 and 6.
- The term of the ESC will end on 1 December 2030 and has been extended to 30 November 2040.
- With respect to all units, the base resource price of geothermal energy was decreased from US$0.04302 – full amount, per kWh under the original ESC to US$0.03724 – full amount per kWh.

The terms of the Second Amendment provide that PLN shall pay PGE, who will then remit to SEGSL and SEGSPL, for the geothermal energy and electricity delivered each month based upon pricing formulas stated in the ESC. The invoice is stated and payable in United States Dollars.

In accordance with the terms of the take-or-pay provisions of the Second Amendment, PLN should pay a minimum 95.06% of the total rated capacity of Units 1, 2 and 3. For Units 4, 5 and 6, PLN should pay a minimum 90.14% of the total rated capacity. Specifically for the Binary Unit, PLN should pay the total tariff based on the minimum unit rate capacity of 14.48911 MW.

PT Star Energy Geothermal Drilling Services (“SEGDS”)

Berdasarkan Akta Notaris No. 65 tanggal 12 Juli 2023, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, SEGPL dan SEG-SD B.V mendirikan sebuah perusahaan bernama SEGDS dengan modal dasar sejumlah Rp150.400.000.000 – nilai penuh (atau setara dengan AS$10.000.000 – nilai penuh) terdiri dari 100.000 lembar saham, dengan nominal Rp1.504.000 – nilai penuh (atau setara dengan AS$100 – nilai penuh). Dari modal dasar, yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar 56% atau sejumlah 56.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp84.224.000.000 – nilai penuh (atau setara dengan AS$5.600.000 – nilai penuh), dengan SEGPL sebagai pemegang saham mayoritas dengan 28.560 lembar saham dan SEGSDBV memiliki 27.440 lembar saham. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU- 0053485.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023.

SEGDS adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Indonesia. Aktivitas utama SEGDS adalah menyediakan jasa pengeboran sumber energi panas bumi.

PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau (“PT SEGSS”)

Pada tanggal 6 April 2017, SEGSDBV mengakuisisi PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau. Efektif sejak tanggal tersebut, PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau diubah menjadi PT SEGSS melalui Akta No. 3 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., tertanggal 6 April 2017. Entitas induk dari PT SEGSS adalah SEGSDBV dengan kepemilikan sebesar 95%.

Pada tanggal 21 Juni 2018, Kementerian ESDM serta menyetujui Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (“PSPE”)) Suoh Sekincau Selatan. Sehubungan dengan PSPE ini, PT SEGSS diwajibkan untuk melakukan paling sedikit satu kali pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu (yaitu tiga tahun) di Suoh Sekincau Selatan. Pada tanggal 29 Juli 2021, Kementerian ESDM menyetujui untuk memperpanjang PSPE Suoh Sekincau Selatan hingga 20 Juni 2023. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Kementerian ESDM menyetujui untuk memperpanjang PSPE Suoh Sekincau Selatan hingga 20 Juni 2024. Pada tanggal 26 Maret 2024, Kementerian ESDM menyetujui untuk memperpanjang PSPE Suoh Sekincau Selatan hingga 20 Juni 2025. Pada tanggal 3 Juni 2025, Kementerian ESDM menyetujui untuk memperpanjang PSPE Suoh Sekincau Selatan hingga 20 Juni 2026.

PT Star Energy Geothermal Drilling Services (“SEGDS”)

Based on Notarial Deed No. 65 dated 12 July 2023, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, SEGPL and SEG-SD B.V established a company named SEGDS with total authorised capital amounted to IDR150,400,000,000 – full amount (or equivalent to US$10,000,000 – full amount) consisting of 100,000 shares with par value of IDR1,504,000 (or equivalent to US$100 – full amount). From the authorised capital, the issued and paid-in capital is 56% or equivalent to 56,000 shares amounted to IDR84,224,000,000 – full amount (or equivalent to US$5,600,000 – full amount), with SEGPL as majority shareholder with 28.560 shares and SEGSDBV holding 27,440 shares. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0053485.AH.01.01. Tahun 2023 dated 24 July 2023.

SEGDS is a limited liability company incorporated and domiciled in Indonesia. The principal activity of SEGDS is providing drilling services for geothermal energy resources.

PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau (“PT SEGSS”)

On 6 April 2017, SEGSDBV acquired PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau. Effective on that date, PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau changed its name to PT SEGSS by Deed No. 3 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn., dated 6 April 2017. The immediate parent of PT SEGSS is SEGSDBV, with 95% ownership.

On 21 June 2018, the MoEMR approved the Assignment of Preliminary Survey and Exploration (Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (“PSPE”)) of South Suoh Sekincau. In relation to this PSPE, PT SEGSS is required to perform at least one drilling for an exploration well within the period (i.e. three years) in South Suoh Sekincau. On 29 July 2021, the MoEMR approved extending the PSPE of South Suoh Sekincau until 20 June 2023. On 5 October 2022, the MoEMR approved extending the PSPE of South Suoh Sekincau, so the period of the PSPE will be prolonged until 20 June 2024. On 26 March 2024, the MoEMR approved extending the PSPE of South Suoh Sekincau, so the period of the PSPE will be prolonged until 20 June 2025. On 3 June 2025, the MoEMR approved extending the PSPE of South Suoh Sekincau, so the period of the PSPE will be prolonged until 20 June 2026.

Jika pengeboran eksplorasi dan penilaian berhasil memastikan potensi panas bumi, dan PT SEGSS memperoleh pembiayaan yang diperlukan dan persetujuan pemerintah untuk pengembangan serta tingkat tarif yang menarik di bawah ESC dengan PLN, PT SEGSS diharapkan dapat memulai kegiatan pembangunan. Sampai dengan tanggal diterbitkan laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih dalam proses mendapatkan izin (analisis dampak lingkungan ("AMDAL"), dan lain-lain).

If exploration and appraisal drilling is successful in confirming geothermal potential, and PT SEGSS obtains the necessary financing and government approvals for development as well as an attractive tariff rate under the ESC with PLN, PT SEGSS would expect to commence development activities. As of the issuance date of these consolidated financial statements, management is still in the process of obtaining the permits (environmental impact assessment ("AMDAL"), etc).

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI ("PSAK") DAN INTERPRETASI STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")

a. Amandemen/ Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/ penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan PSAK revisi tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

b. Standar dan Amandemen/ Penyesuaian StandarTelah Diterbitkan tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amandemen-amandemen atas PSAK, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

<u>Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026</u>

- Amandemen PSAK 338 Kombinasi BisnisEntitas Sepengendali.
- Amandemen PSAK 109 Instrumen Keuangan dan Amandemen PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan
- Amandemen PSAK 109 Instrumen Keuangan dan Amandemen PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam
- Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia

<u>Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027</u>

- PSAK 118 Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan
- PSAK 119 Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Amendments/ Improvements to Standards Effective in the Current Year

In the current year, the Group has applied a number of amendments/ improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after 1 January 2025. The adoption of these revised PSAKs does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years.

b. Standard and Amendments/ Improvements to Standards Issued but not yet Adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAKs were issued but not effective, with early application permitted:

<u>Effective for periods beginning on or after 1 January 2026</u>

- Amendment to PSAK 338 Business Combination Under Common Control
- Amendment to PSAK 109 Financial Instruments Keuangan and Amendment to PSAK 107 Financial Instruments: Disclosures on Classification and Measurement of Financial Instruments
- Amendment to PSAK 109 Financial Instruments Keuangan and Amendment to PSAK 107 Financial Instruments: Disclosures on Contracts Referencing Nature-dependent Electricity
- Annual Improvement 2024 SAK Indonesia

<u>Effective for periods beginning on or after 1 January 2027</u>

- PSAK 118 Presentation and Disclosures in Financial Statements
- PSAK 119 Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari amandemen-amandemen atas PSAK tersebut terhadap laporan keuangan konsilidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these amendents to PSAK on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”).

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dengan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, dan menggunakan konsep akuntansi biaya historis, kecuali diungkapkan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan dalam ribuan dan disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (“AS$” atau “Dolar AS”), kecuali dinyatakan lain.

Untuk memberi pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 4.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and Interpretations of Financial Accounting Standards (“ISAK”).

The consolidated financial statements of the Group have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the accounting policies below.

The consolidated statements of cash flows have been prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to thousands and stated in United States Dollars (“US$” or “US Dollars”), unless otherwise stated.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Group, due to the significant nature or amount, several items of income or expense have been shown separately.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group’s accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

i. Entitas anak

i.1. Konsolidasi

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas itu.

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

i.2. Akuisisi

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

b. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

i.1. Consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

i.2. Acquisition

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquired entity and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported in equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owners of the parent entity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan pihak non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

ii. Changes in ownership interest in subsidiaries without loss of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

iii. Disposal of subsidiaries

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss or transferred directly to retained earnings if required under other PSAK.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

iv. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Restrukturisasi antar entitas sepengendali merupakan kombinasi dari entitas tanpa bisnis yang sudah ada sebelumnya (entitas induk langsung baru) dan entitas operasi dalam kelompok perusahaan yang sama dan tidak mengubah pengendalian substantif entitas induk terakhir.

Penggabungan tersebut dicapai melalui akuisisi entitas operasi oleh entitas induk langsung baru dengan menerbitkan saham baru kepada pemegang saham pengendali sebelumnya dari entitas operasi, sebagai pertukaran kepemilikan dalam entitas operasi.

Restrukturisasi antar entitas sepengendali dicatat dengan menggabungkan entitas operasi ke laporan keuangan konsolidasian entitas induk langsung baru sebesar nilai buku tanpa peningkatan nilai wajar. Aset dan liabilitas yang diperoleh melalui restrukturisasi dicatat oleh pihak pengakuisisi sebesar nilai bukunya dan selisih antara imbalan dan nilai buku disajikan sebagai "Cadangan Lainnya" dan tidak didaur ulang ke laba rugi ketika pengendalian hilang.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

c. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("AS$" atau "Dolar AS"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

Dalam penyusunan laporan keuangan entitas Grup, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir perode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

iv. Business Combination under Common Control

Restructuring of entities under common control represents the combination of an entity without pre-existing business (new direct parent entity) and an operating entity within the same group of companies and does not change the substantive control of the ultimate parent entity.

The combination is achieved through an acquisition of an operating entity by the new direct parent entity by issuing new shares to the previous controlling shareholders of the operating entity, in exchange for the ownership in the operating entity.

Restructuring of entities under common control are accounted for by combining the operating entity into the consolidated financial statements of the new direct parent entity at the book values without fair value uplift. Assets and liabilities acquired through the restructuring are recorded by the acquirer at their book values and the difference between the consideration and the book value is presented as "Other Reserve" and is not recycled to profit or loss when control is lost.

The pooling-of-interests method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control.

c. Foreign currency translation

i. Functional and presentation currency

Items included in the consolidated financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in United States Dollars ("US$" or "US Dollars"), which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

In preparing the financial statements of the Group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Pembukuan SEGDS, SEGH, OMI, SIDRAP2, SUKABUMI dan LOMBOK diselenggarakan dalam Rupiah, mata uang fungsionalnya. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas SEGDS, SEGH, OMI, SIDRAP2, SUKABUMI dan LOMBOK dijabarkan ke dalam Dolar Amerika Serikat masing-masing dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan non pengendali).

Pada konsolidasi, selisih kurs yang berasal dari penjabaran atas investasi bersih entitas luar negeri (termasuk pos-pos moneter yang secara substansi membentuk bagian investasi bersih entitas luar negeri diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah di bawah judul “cadangan selisih kurs penjabaran” laporan keuangan.

The books of accounts of SEGDS, SEGH, OMI, SIDRAP2, SUKABUMI and LOMBOK are maintained in Indonesian Rupiah, their functional currency. For the purposes of presenting these consolidated financial statements, the assets and liabilities of SEGDS, SEGH, OMI, SIDRAP2, SUKABUMI and LOMBOK foreign operations are translated into U.S. Dollar using the exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during the period, in which case the exchange rates at the dates of the transactions are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity (and attributed to non-controlling interests as appropriate).

On consolidation, exchange differences arising from the translation of the net investment in foreign entities (including monetary items that, in substance, form part of the net investment in foreign entities) is recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity under the header of “foreign currency translation adjustment”.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (dalam Dolar AS penuh):

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the consolidated statements of financial position dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full US Dollars amount):

	2025	2024	
Rupiah 10.000 (“Rp”)	0,60	0,62	Rupiah 10,000 (“IDR”)

d. Transaksi dengan pihak berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

(a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

(i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
(ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
(iii) adalah anggota dari personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika salah satu kondisi berikut berlaku:

(i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari grup yang sama (yang berarti bahwa setiap entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait satu sama lain);
(ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama dari anggota grup yang mana entitas lain tersebut menjadi anggotanya);
(iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
(iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas lainnya adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
(v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
(vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
(vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas (atau merupakan anggota) dari personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
(viii) entitas, atau setiap anggota dari kelompok yang menjadi bagiannya, memberikan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

d. Transaction with related parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

(a) A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:

(i) has control or joint control over the reporting entity;
(ii) has significant influence over the reporting entity; or
(iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

(i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to each other);

(ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

(iii) both entities are joint ventures of the same third party;
(iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
(v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of the employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

(vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

(vii) a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity (or is a member) of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); and

(viii) the entity, or any member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaksi significant yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan pesyaratan, yang sama denga pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

Significant transactions with related parties, wether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya sebagaimana diatur dalam syarat-syarat perjanjian pinjaman disajikan sebagai “Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya”.

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposit with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

Cash and cash equivalents which is restricted for use as stipulated under the terms of a loan agreement are presented as “Restricted cash and time deposits”.

f. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain.

f. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

i. Aset keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (“OCI”), dan nilai wajar melalui laba rugi (“FVTPL”).

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal bergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup untuk mengelolanya. Pengecualian untuk piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang telah diterapkan oleh Grup dengan cara praktis, Grup pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah, dalam hal aset keuangan tidak pada FVTPL, transaksi biaya. Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang Grup telah menerapkan kebijaksanaan praktis diukur pada harga transaksi yang ditentukan berdasarkan PSAK 115.

Agar aset keuangan dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui OCI, maka perlu menimbulkan arus kas yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga (“SPPI”) atas jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

i. Financial assets

Initial recognition and measurement

Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortised cost, fair value through other comprehensive income (“OCI”), and fair value through profit or loss (“FVTPL”).

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial assets’ contractual cash flow characteristics and the Group’s business model for managing them. With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Group has applied the practical expedient, the Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortised cost or fair value through OCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest (“SPPI”) on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Grup mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (cara perdagangan biasa) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a timeframe established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e. the date that the Group commits to purchase or sell the asset.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang terdiri dari kas dan setara kas, kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain (tidak termasuk piutang Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")) tangguhan dan piutang sewa pembiayaan.

The Group's financial assets are classified as financial assets subsequently measured at amortised cost which consists of cash and cash equivalents, restricted cash and time deposit, trade and other receivables (excluding deferred Value Added Tax ("VAT") receivables) and finance lease receivables.

Pengukuran selanjutnya

Subsequent measurement

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Financial assets at amortised cost (debt instruments)

Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif diklasifikasikan dalam kategori ini. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual
- Persyaratan kontraktual aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified under this category. The Group measures financial assets at amortised cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("EIR") dan dapat mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognised in profit or loss when the asset is derecognised, modified or impaired.

Penghentian pengakuan

Suatu aset keuangan (atau, jika dapat diterapkan, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) umumnya dihentikan pengakuannya ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir, atau
- Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan pass-through arrangement; dan baik (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Ketika Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani pass-through arrangement, mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, telah mempertahankan risiko dan manfaat kepemilikan. Ketika Grup tidak mentransfer atau tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau tidak mentransfer kendali atas aset, Grup masih mengakui aset yang ditransfer tersebut sejauh keterlibatannya yang berkelanjutan. Dalam hal tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang dimiliki Grup.

Penurunan nilai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (“ECL”) untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki di FVTPL. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, didiskontokan pada perkiraan EIR awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari persyaratan kontraktual.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is generally derecognised when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired, or
- The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass-through arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control over the asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognise the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Impairment of financial assets at amortised cost

The Group recognises an allowance for expected credit losses (“ECL”) for all debt instruments not held at FVTPL. ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit dimana tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL dicadangkan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang risiko kreditnya meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu gagal bayar (ECL seumur hidup).

Untuk piutang usaha dan piutang lainnya, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Grup tidak melacak perubahan risiko kredit, namun mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Grup telah membentuk matriks penyisihan yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historisnya, disesuaikan dengan faktor-faktor berwawasan ke depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual lewat jatuh tempo 90 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan sebagai default ketika informasi internal atau eksternal mengindikasikan bahwa Grup tidak mungkin menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan peningkatan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan ketika tidak ada harapan yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan pada FVTPL, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, sebagaimana mestinya.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang terdiri dari utang usaha dan utang lain-lain, biaya akrual, liabilitas sewa dan pinjaman.

ECL are recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12 months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

For trade and other receivables, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognises a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

ii. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, financial liabilities at amortised cost or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of financial liabilities at amortised cost, net of directly attributable transaction costs.

The Group's financial liabilities are classified as financial liabilities subsequently measured at amortised cost, which consists of trade and other payables, accrued expenses, lease liabilities and borrowings.

Pengukuran selanjutnya

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang tidak dicatat pada FVTPL selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluwarsa. Ketika liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau persyaratan liabilitas yang ada dimodifikasi secara substansial, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru. Selisih nilai tercatat masing-masing diakui dalam laba rugi.

iii. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang aktif diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran pasar pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik tersebut dapat mencakup penggunaan transaksi pasar yang wajar baru-baru ini, referensi ke nilai wajar saat ini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

g. Piutang

Piutang usaha adalah jumlah terutang dari pelanggan dalam kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha merupakan jumlah terutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan tertagih dalam dua belas bulan atau kurang, piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika efek pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan cadangan kerugian.

Subsequent measurement

Financial liabilities at amortised cost

After initial recognition, financial liabilities that are not carried at FVTPL are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Gains and losses are recognised in profit or loss when the liabilities are derecognised, and through the amortisation process.

Derecognition

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged, cancelled, or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in profit or loss.

iii. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in active markets is determined by reference to quoted market bid prices at the close of business at the end of the reporting period. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's-length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

g. Receivables

Trade receivables are amounts due from customers in the ordinary course of business. Non-trade receivables are amounts arising from transactions outside of the ordinary course of business. If the collection of the receivables is expected within one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets in the consolidated statements of financial position.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less loss allowance.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap item baris yang sama.

Impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

Lihat Catatan 3.f untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

See Note 3.f for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi pada awalnya disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada alasan tertentu untuk disajikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Non-trade receivables from related parties are initially presented as non-current assets unless there are specific reasons for them to be presented as current assets in the consolidated statements of financial position.

h. Persediaan

h. Inventories

Pipa selubung dan persediaan terkait pengeboran lainnya serta barang modal, dinyatakan sebesar biaya perolehan dan diakui sebagai barang modal dan peralatan sebagai bagian dari aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Casings and other drilling related items as well as capital spares, are stated at cost and recognised as capital spares and equipment as part of non-current assets in the consolidated statements of financial position.

Berdasarkan ketentuan Salak JOC, persediaan menjadi milik pemerintah tuan rumah saat mendarat di negara tersebut. Berdasarkan ketentuan Darajat JOC, semua bahan dan peralatan yang dibeli berdasarkan kontrak menjadi milik PGE (atas nama Pemerintah Indonesia) ketika digabungkan ke dalam Fasilitas Lapangan untuk bahan dan peralatan yang digunakan sehubungan dengan Fasilitas Lapangan; dan setelah berakhirnya jangka waktu kontrak untuk bahan dan peralatan yang digunakan sehubungan dengan Fasilitas Pembangkit Listrik. Karena Grup telah membayar dan memiliki hak untuk menggunakan aset tersebut dan/atau memperoleh kembali biayanya, saldo tersebut telah tercermin sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Under the terms of the Salak JOC, inventory becomes the property of the host government upon landing in the country. Under the terms of the Darajat JOC, all materials and equipment purchased under the contract become the property of PGE (on behalf of the GOI) when they are incorporated into the Field Facilities for materials and equipment used in connection with Field Facilities; and upon the expiry of the contract term for materials and equipment used in connection with Electricity Generation Facilities. As the Group has paid for and has the right to use these assets and/or recover the costs, these balances have been reflected as assets in the consolidated statements of financial position.

Persediaan meliputi bahan kimia dan bahan habis pakai lainnya, yang diharapkan dapat digunakan dalam waktu satu tahun sejak tanggal akuisisi. Biaya perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak dan termasuk biaya pembelian dan biaya lain yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini.

Inventories include chemicals and other consumable materials, which are expected to be used within one year from the date of acquisition. Cost is determined based on the moving average method and includes costs of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

Barang modal dan peralatan terdiri dari barang-barang yang diperkirakan akan digunakan lebih dari satu tahun sejak tanggal perolehan. Mereka dinilai berdasarkan harga perolehan dan disajikan sebagai aset tidak lancar. Pos-pos ini dicatat berdasarkan perlakuan akuntansi yang sama seperti aset tetap (Catatan 3.i) dan properti dalam sewa operasi (Catatan 3.m).

Capital spares and equipment consist of items that are expected to be used more than one year from the date of acquisition. They are valued at cost and are presented as non-current assets. These items are accounted for based on the same accounting treatment as property, plant and equipment (Note 3.i) and property on operating lease (Note 3.m).

Manajemen menilai kondisi persediaan pada setiap akhir periode dan membuat penurunan nilai yang diperlukan.

Management assesses the condition of the inventories at the end of each period and makes the necessary write-down.

i. Aset tetap

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset yang mendasari, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 116 “Sewa”. Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 216, “Aset tetap” yaitu tanah dan hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Semua aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan, aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan saldo defisit penurunan nilai.

Biaya awal suatu aset terdiri dari harga beli atau biaya konstruksinya, setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk mengoperasikan aset tersebut, dan untuk aset kualifikasian (jika ada), biaya pinjaman. Harga pembelian atau biaya konstruksi adalah jumlah keseluruhan yang dibayarkan dan nilai wajar dari pertimbangan lain yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Ketika bagian signifikan dari aset tetap harus diganti secara berkala, Grup mengakui bagian tersebut sebagai aset individual dengan masa manfaat tertentu dan penyusutan. Demikian pula, ketika inspeksi besar dilakukan, biayanya diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai pengganti jika kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan dasar garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

i. Property, plant and equipment

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land and land rights in determining the accounting for each of its land rights so that it accurately represents an underlying economic event or transaction. If the land and land rights do not transfer control of the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under PSAK116 “Leases”. If the land and land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies PSAK 216 “Property, plant and equipment” under which land and land rights are recognised at cost and not depreciated.

All items of property, plant and equipment are initially recorded at cost. Subsequent to recognition, property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

The initial cost of an asset comprises its purchase price or construction cost, any costs directly attributable to bringing the asset into operation, and for qualifying assets (where applicable), borrowing costs. The purchase price or construction cost is the aggregate amount paid and the fair value of any other consideration given to acquire the asset.

The cost of an item of property, plant and equipment is recognised as an asset if and only if, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably.

When significant parts of property, plant and equipment are required to be replaced at intervals, the Group recognises such parts as individual assets with specific useful lives and depreciation, respectively. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repair and maintenance costs are recognised in profit or loss as incurred.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/Years	Persentase penyusutan/ Percentage of depreciation	
Hak guna tanah	30	3%	Land rights
Properti	43	2%	Property
Mesin, telekomunikasi dan peralatan otomotif	4 – 5	20% – 25%	Machineries, telecommunication and automotive equipment
Bangunan dan infrastruktur	4 – 30	3% – 25%	Buildings and infrastructure
Perabotan dan perlengkapan	5	20%	Furniture and fixtures

Untuk aset tetap yang dimiliki dan digunakan oleh entitas anak Grup yang mengoperasikan energi panas bumi dan pembangkit listrik, masa manfaat terbatas pada mana yang lebih rendah antara tanggal berakhirnya JOC atau ESC dan masa manfaat aset tersebut.

Saldo "production wells" dan "well facilities" disusutkan selama sisa umur hak partisipasi dengan menggunakan metode unit produksi ("UoP") sejak tanggal dimulainya operasi komersial. Penyusutan didasarkan pada taksiran cadangan uap panas bumi. Penyusutan fasilitas produksi dan biaya sumur dihitung dengan menggunakan metode UoP berdasarkan ton uap yang diproduksi selama estimasi ton uap yang akan diproduksi selama periode pembangkitan Salak dan Darajat.

Aset dalam pembangunan tidak disusutkan sampai aset yang bersangkutan selesai dan produksi dimulai. Pada saat aset yang bersangkutan akan digunakan, biayanya dipindahkan ke klasifikasi yang sesuai dan disusutkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Nilai tercatat aset tetap ditelaah untuk penurunan nilai ketika peristiwa atau perubahan keadaan menunjukkan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat diperoleh kembali.

Nilai sisa, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun buku dan disesuaikan secara prospektif, jika sesuai.

Suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Setiap keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

For property, plant and equipment that are owned and used by operating geothermal energy and power plant subsidiaries of the Group, useful lives are limited to the lesser of the expiry date of the JOC or ESC and the useful life of the asset.

The balances of "production wells" and "well facilities" are depreciated over the remaining life of the working interest using the units-of-production ("UoP") method from the date of the commencement of commercial operations. The depreciation is based on estimated geothermal steam reserves. Depreciation of production facilities and well costs is calculated using the UoP method based on tonnes of steam produced over the estimated tonnes of steam to be produced over the Salak and Darajat generation terms.

Construction in progress is not depreciated until such a time as the relevant assets are completed and production commences. When the assets concerned are brought into use, the costs are transferred to the appropriate classification and depreciated in accordance with the stated policy.

The carrying values of property, plant and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable.

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed at each financial year-end, and adjusted prospectively, if appropriate.

An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss on derecognition of the asset is included in profit or loss in the year the asset is derecognised.

j. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas, misalnya goodwill atau aset tidak berwujud yang belum siap digunakan, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Aset yang memiliki umur manfaat terbatas, diamortisasi atau didepresiasi dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahaan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain goodwill yang mengalami penurunan nilai diuji untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

j. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life, for example, goodwill or intangible assets not ready to use, are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Assets that have a definite useful life are subject to amortisation or depreciation and are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised at the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there is separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain goodwill, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai atas goodwill tidak dibalik lagi.

Aset yang telah disusutkan sepenuhnya yang masih digunakan tetap termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill is recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment assessment was carried out. The reversal of impairment losses will be recognised immediately in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised at the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill will not be reversed.

Fully depreciated assets still in use are retained in the consolidated financial statements.

k. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi panas bumi

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi panas bumi untuk setiap area of interest dipertanggung-jawabkan dengan menggunakan metode akuntansi upaya yang berhasil. Metode upaya yang berhasil mensyaratkan semua pengeluaran eksplorasi dan evaluasi dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya, kecuali biaya sumur yang berhasil dan biaya untuk memperoleh hak atas aset eksplorasi baru, yang dikapitalisasi sebagai pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang tidak berwujud. Biaya sumur awalnya dikapitalisasi sambil menunggu hasil sumur.

Biaya pra-lisensi

Biaya pra-lisensi dibebankan pada periode terjadinya.

Lisensi dan biaya akuisisi properti

Izin eksplorasi dan biaya akuisisi properti hak milik dikapitalisasi ke dalam aset tidak berwujud. Biaya perijinan yang dibayarkan sehubungan dengan hak untuk mengeksplorasi di wilayah eksplorasi yang ada dikapitalisasi dan diamortisasi selama jangka waktu izin. Lisensi dan biaya akuisisi properti ditelaah pada setiap tanggal pelaporan untuk memastikan bahwa tidak ada indikasi bahwa jumlah tercatat melebihi jumlah terpulihkan. Tinjauan ini mencakup konfirmasi bahwa pengeboran eksplorasi masih berlangsung atau direncanakan dengan tegas, atau telah ditentukan, atau pekerjaan sedang dilakukan untuk menentukan, bahwa penemuan tersebut layak secara ekonomi berdasarkan berbagai pertimbangan teknis dan komersial dan kemajuan yang memadai sedang dilakukan untuk menetapkan rencana dan waktu pengembangan.

k. Geothermal exploration and evaluation expenditure

Geothermal exploration and evaluation expenditure in respect of each area of interest is accounted for using the successful efforts method of accounting. The successful efforts method requires all exploration and evaluation expenditure to be expensed in the period it is incurred, except the costs of successful wells and the costs of acquiring interests in new exploration assets, which are capitalised as intangible exploration and evaluation expenditure. The costs of wells are initially capitalised pending the results of the well.

Pre-licence costs

Pre-license costs are expensed in the period in which they are incurred.

License and property acquisition costs

Exploration license and leasehold property acquisition costs are capitalised within intangible assets. License costs paid in connection with a right to explore in an existing exploration area are capitalised and amortised over the term of the permit. License and property acquisition costs are reviewed at each reporting date to confirm that there is no indication that the carrying amount exceeds the recoverable amount. This review includes confirming that exploration drilling is still under way or firmly planned, or that it has been determined, or work is under way to determine, that the discovery is economically viable based on a range of technical and commercial considerations and sufficient progress is being made on establishing development plans and timing.

Jika tidak ada kegiatan di masa depan yang direncanakan atau lisensi telah dilepaskan atau telah berakhir, nilai tercatat lisensi dan biaya perolehan properti dihapuskan melalui laba rugi. Setelah cadangan terbukti dan persetujuan internal untuk pengembangan diakui, pengeluaran yang relevan dipindahkan ke properti terbukti dalam aset tetap (Catatan 3.i) dan properti dalam sewa operasi (Catatan 3.m).

If no future activity is planned or the license has been relinquished or has expired, the carrying value of the license and property acquisition costs is written off through profit or loss. Upon recognition of proved reserves and internal approval for development, the relevant expenditure is transferred to proved properties in property, plant and equipment (Note 3.i) and property on operating lease (Note 3.m).

Biaya eksplorasi dan evaluasi

Exploration and evaluation costs

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi melibatkan pencarian sumber energi panas bumi, penentuan kelayakan teknis dan penilaian kelayakan komersial dari sumber daya yang diidentifikasi

Exploration and evaluation activity involves the search for geothermal energy resources, the determination of technical feasibility and the assessment of commercial viability of an identified resource.

Setelah hak legal untuk eksplorasi diperoleh, biaya yang terkait langsung dengan sumur eksplorasi dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud eksplorasi dan evaluasi sampai pengeboran sumur selesai dan hasilnya telah dievaluasi. Biaya-biaya ini termasuk remunerasi karyawan yang dapat diatribusikan secara langsung, bahan dan bahan bakar yang digunakan, biaya rig dan pembayaran yang dilakukan kepada kontraktor.

Once the legal right to explore has been acquired, costs directly associated with an exploration well are capitalised as exploration and evaluation intangible assets until the drilling of the well is completed and the results have been evaluated. These costs include directly attributable employee remuneration, materials and fuel used, rig costs and payments made to contractors.

Jika energi panas bumi yang berpotensi komersial tidak ditemukan, aset eksplorasi dihapuskan sebagai sumur kering. Jika energi panas bumi yang dapat diekstraksi ditemukan dan, tunduk pada aktivitas penilaian lebih lanjut (misalnya, pengeboran sumur tambahan), kemungkinan besar dapat dikembangkan secara komersial, biayanya tetap dianggap sebagai aset tidak berwujud sementara kemajuan yang memadai/berkelanjutan dibuat dalam menilai komersialitas energi panas bumi. Biaya yang terkait langsung dengan kegiatan penilaian yang dilakukan untuk menentukan ukuran, karakteristik dan potensi komersial suatu reservoir setelah penemuan awal energi panas bumi, termasuk biaya sumur penilaian di mana energi panas bumi tidak ditemukan, pada awalnya dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

If no potentially commercial geothermal energy is discovered, the exploration asset is written off as a dry hole. If extractable geothermal energy is found and, subject to further appraisal activity (e.g., the drilling of additional wells), is likely to be capable of being commercially developed, the costs continue to be carried as an intangible asset while sufficient/continued progress is made in assessing the commerciality of the geothermal energy. Costs directly associated with the appraisal activity undertaken to determine the size, characteristics and commercial potential of a reservoir following the initial discovery of geothermal energy, including the costs of appraisal wells where geothermal energy was not found, are initially capitalised as intangible assets.

Semua biaya yang dikapitalisasi tersebut tunduk pada tinjauan teknis, komersial dan manajemen serta tinjauan untuk indikator penurunan nilai setidaknya sekali setahun. Ini untuk mengonfirmasi niat berkelanjutan untuk mengembangkan atau mengekstraksi nilai dari penemuan. Ketika ini tidak lagi terjadi, biaya dihapuskan ke laba rugi.

All such capitalised costs are subject to technical, commercial and managerial review as well as review for indicators of impairment at least once a year. This is to confirm the continued intent to develop or otherwise extract value from the discovery. When this is no longer the case, the costs are written off to profit or loss.

Berdasarkan ketentuan PSAK 106 “Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral”, aset eksplorasi dan evaluasi, termasuk biaya perolehan bunga atas aset eksplorasi baru, terus dikapitalisasi sambil menunggu hasil kegiatan eksplorasi berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

Under the provisions of PSAK 106 “Exploration for and Evaluation of Mineral Resources”, exploration and evaluation assets, including the cost of acquiring interests in new exploration assets, continue to be capitalised pending the results of the exploration activities based on the following factors:

a) JOC di mana Grup memiliki hak untuk mengeksplorasi belum berakhir dan tidak akan berakhir dalam waktu dekat;
b) Pengeluaran yang signifikan untuk eksplorasi lebih lanjut dan evaluasi sumber daya panas bumi di wilayah tertentu dianggarkan di masa mendatang; dan
c) Manajemen terus melakukan kegiatan eksplorasi dan evaluasi di wilayah tertentu.

Ketika cadangan uap panas bumi terbukti diidentifikasi dan pengembangan disetujui oleh manajemen, pengeluaran yang dikapitalisasi terkait pertama-tama dinilai penurunan nilainya dan (jika diperlukan) setiap kerugian penurunan nilai diakui, kemudian sisanya ditransfer ke aset dalam pembangunan (Catatan 3.i). Selain biaya lisensi, tidak ada amortisasi yang dibebankan selama tahap eksplorasi dan evaluasi.

l. Aset dalam pembangunan

Akumulasi biaya pembangunan sumur dan proyek perluasan pembangkit listrik dikapitalisasi sebagai aset dalam pembangunan. Biaya ini awalnya diklasifikasikan dalam aset dalam pembangunan dan akan direklasifikasi ke aset tetap (Catatan 3.i) properti dalam sewa operasi (Catatan 3.m) dan biaya ditangguhkan (Catatan 3.o) ketika konstruksi atau pemasangan selesai dan aset siap untuk tujuan penggunaannya. Penyusutan tidak dibebankan pada biaya yang dialihkan sehubungan dengan aset dalam tahap pengembangan sampai produksi dimulai.

m. Properti dalam sewa operasi

Menurut persyaratan JOC, semua bahan dan peralatan yang dibeli oleh SEGWWL dan dimasukkan ke dalam fasilitas lapangan, tunduk pada hak gadai yang menguntungkan pemberi pinjaman, akan menjadi milik PGE ketika pembangunan fasilitas tersebut telah selesai. PGE telah memberikan SEGWWL hak eksklusif dan tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu JOC untuk menggunakan, antara lain, fasilitas lapangan untuk operasi panas bumi. Fasilitas pembangkit listrik harus dimiliki dan dioperasikan oleh SEGWWL selama jangka waktu JOC.

Sejauh fasilitas pembangkit listrik diharuskan untuk dialihkan ke PGE sesuai dengan syarat-syarat JOC dan ESC, dan setelah pembayaran jumlah terutang kepada SEGWWL berdasarkan JOC dan ESC dan tunduk pada hak gadai apapun kepada pemberi pinjaman SEGWWL, aset tersebut, setelah pengakhiran JOC dan ESC, akan dialihkan ke PGE atas dasar sebagaimana adanya. Berdasarkan ESC, SEGWWL bertindak sebagai kontraktor PGE untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik dan menjual listrik ke PLN atas nama PGE. Dalam ESC, tidak ada ketentuan yang memberikan hak kepada PLN untuk membeli Fasilitas Pembangkit Listrik dari SEGWWL.

a) The JOCs under which the Group has the right to explore have not expired and will not expire in the near future;
b) Significant expenditure on further exploration for and evaluation of geothermal resources in the specific area is budgeted in the future; and
c) Management continues to perform exploration and evaluation activities in the specific areas.

When proven geothermal steam reserves are identified and development is sanctioned by management, the relevant capitalised expenditure is first assessed for impairment and (if required) any impairment loss is recognised, then the remaining balance is transferred to construction in progress (Note 3.i). Other than licence costs, no amortisation is charged during the exploration and evaluation phase.

l. Construction in progress

The accumulated costs of constructing wells and power generating expansion projects are capitalised as construction in progress. These costs are initially classified in construction in progress and will be reclassified to property, plant and equipment (Note 3.i), property on operating lease (Note 3.m) and deferred charges (Note 3.o) when the construction or installation is completed, and the asset is ready for its intended use. Depreciation is not charged on costs carried forward in respect of assets in development stage until production commences.

m. Property on operating lease

Under the terms of the JOC, all materials and equipment purchased by SEGWWL and incorporated into the field facilities, subject to liens in favour of lenders, shall become the property of PGE when construction of such facilities has been completed. PGE has granted SEGWWL an exclusive and irrevocable right during the term of the JOC to use, among other things, the field facilities for geothermal operations. Electricity generating facilities shall be owned and operated by SEGWWL throughout the term of the JOC.

To the extent the electricity generating facilities are required to be transferred to PGE pursuant to the terms of the JOC and the ESC, and upon payment of any amount owed to SEGWWL under the JOC and the ESC and subject to any liens to SEGWWL's lenders, such asset shall, upon termination of the JOC and ESC, be transferred to PGE on an as-is basis. Under the ESC, SEGWWL is acting as the contractor of PGE to build, own and operate electricity generating facilities and sell electricity to PLN on behalf of PGE. Under the ESC, there is no provision which grants PLN the right to buy the electricity generating facilities from SEGWWL.

Penelaahan manajemen atas pengaturan kontraktual SEGWWL menyimpulkan bahwa transaksi tersebut secara substansi adalah sewa berdasarkan PSAK 116 "Sewa". Manajemen telah menentukan bahwa pengaturan kontraktual SEGWWL harus dicatat sebagai sewa operasi. Dengan demikian, aset berumur panjang yang digunakan untuk mendukung kewajibannya berdasarkan perjanjian kontrak telah diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan judul "Properti dalam sewa operasi".

Management's assessment of SEGWWL's contractual arrangement concluded that the transaction is in substance a lease based on PSAK 116 "Leases". Management has determined that SEGWWL's contractual arrangement should be accounted for as an operating lease. As such, the long-lived assets used in supporting its obligations under the contractual arrangement have been classified in the consolidated statements of financial position under the caption "Property on operating lease".

Selama periode transisi pada tanggal efektif PSAK 116, manajemen telah menggunakan pengecualian karena tidak ada modifikasi terhadap pengaturan kontraktual yang dinilai sebelumnya.

During the transition period on the effective date of PSAK 116, management has used the exemption as there is no modification to the previously assessed contractual arrangement.

Karena pengaturan kontraktual SEGWWL berisi sewa dan biaya pelaksanaan/pemeliharaan terkait, pendapatan yang terkait dengan pengaturan kontraktual SEGWWL diklasifikasikan ke dalam "pendapatan sewa" dan "penjualan produk - listrik" berdasarkan metode nilai wajar relatif.

Since SEGWWL's contractual arrangement contains a lease and related executory/ maintenance costs, revenues related to SEGWWL's contractual arrangement are classified into "lease revenue" and "sale of products - electricity" based on the relative fair value method.

Properti dalam sewa operasi dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Biaya tersebut termasuk biaya penggantian bagian dari properti pada sewa operasi ketika biaya tersebut terjadi, jika kriteria pengakuan terpenuhi. Demikian pula, ketika inspeksi besar dilakukan, biayanya diakui dalam jumlah tercatat properti dalam sewa operasi sebagai pengganti jika kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Property on operating lease is stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the property on operating lease when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the property on operating lease as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repair and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognised in profit or loss as incurred.

Penyusutan properti dalam sewa operasi, kecuali untuk fasilitas lapangan, dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama yang lebih rendah dari Wayang Windu JOC/ESC atau taksiran masa manfaatnya, sebagai berikut:

Depreciation of property on operating lease, except for field facilities, is calculated using the straight-line method over the lesser of the Wayang Windu JOC/ESC or their estimated useful lives, as follows:

	Tahun/*Years*	Persentase penyusutan/ *Percentage of depreciation*	
Hak guna tanah	30	3%	Land rights
Fasilitas lapangan	8 – 30	3% – 13%	Field facilities
Bangunan	20	5%	Buildings
Kendaraan	5	20%	Vehicles
Perabotan dan perlengkapan	5	20%	Furniture and fixtures

Di dalam fasilitas lapangan, sumur produksi dan fasilitas sumur disusutkan dengan metode UoP sejak tanggal dimulainya operasi komersial. UoP dihitung berdasarkan ton uap yang dihasilkan selama perkiraan ton uap yang akan diproduksi selama masa pembangkitan.

Within field facilities, production wells and well facilities are depreciated using the UoP method from the date of the commencement of commercial operations. The UoP is calculated based on tonnes of steam produced over the estimated tonnes of steam to be produced over the generation term.

Suatu aset sewa operasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Setiap keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah pada setiap akhir tahun keuangan, dan disesuaikan secara prospektif, jika sesuai.

Grup mengkapitalisasi biaya untuk overhaul, pengasaman dan intervensi sumur, karena Grup berkeyakinan bahwa kapitalisasi biaya ini akan secara efektif menunjukkan kinerja aset dan masa manfaat ekonomis untuk biaya tersebut lebih dari satu tahun. Grup mendepresiasi pengeluaran untuk overhaul, pengasaman, dan intervensi sumur yang dikapitalisasi selama periode hingga overhaul berikutnya, atau aktivitas pengasaman dan intervensi sumur berikutnya pada sumur yang sama.

An item of property on operating lease is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognised.

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed at each financial year-end, and adjusted prospectively, if appropriate.

The Group capitalises the cost for overhaul, acidising and well intervention, since the Group believes that capitalising these costs will effectively demonstrate the performance of the assets and the economic useful lives for such costs are more than one year. The Group depreciates the capitalised overhaul, acidising and well intervention expenditure over the period until the next overhaul, or the next acidising and well intervention activities on the same well.

n. Properti yang belum dikembangkan

Properti yang belum dikembangkan merupakan nilai wajar dari kepemilikan panas bumi yang belum dikembangkan yang diperoleh dari kombinasi bisnis.

Properti yang belum dikembangkan diakui secara terpisah sebagai aset tidak berwujud (Catatan 3.p), diuji penurunan nilainya jika terdapat indikator penurunan nilai dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi saldo defisit penurunan nilai.

Untuk setiap pengembangan yang dimulai dari properti yang belum dikembangkan terkait dengan sumber daya panas bumi, jumlah properti yang belum dikembangkan kemudian akan direklasifikasi menjadi properti yang telah dikembangkan dan akan mulai diamortisasi setelah pengembangan selesai.

n. Undeveloped properties

Undeveloped properties represent the fair value of undeveloped geothermal interests acquired from business combination.

Undeveloped properties are recognised separately as intangible assets (Note 3.p), tested for impairment if there is an impairment indicator and carried at cost less any accumulated impairment losses.

For any commenced development of undeveloped properties relating to geothermal resources, the developed amount of undeveloped properties will then be reclassified into developed properties and will start to be amortised upon the completion of the development.

o. Biaya ditangguhkan

Di bawah ESC, Grup Kontraktor diwajibkan untuk memelihara fasilitas pembangkit listrik, termasuk melakukan aktivitas penggantian dan *overhaul* suku cadang terjadwal. Pengeluaran sehubungan dengan penggantian dan *overhaul* bagian pembangkit listrik yang dianggap memberikan manfaat pada periode mendatang dicatat sebagai biaya ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. Biaya ditangguhkan terkait dengan "biaya untuk memenuhi kontrak" sesuai dengan PSAK 115 dan terkait dengan kewajiban kinerja untuk menyediakan *overhaul* dan pemeliharaan pembangkit listrik.

o. Deferred charges

Under the ESC, the Contractor Group is required to maintain the power plant facilities, including performing scheduled part replacement and overhaul activities. Expenditure related to part replacement and overhaul of the power plant that is considered to provide benefits in future periods is recorded as deferred charges and is amortised over the periods benefited using the straight-line method. Deferred charges relate to "cost to fulfil a contract" in accordance with PSAK 115 and relate to the performance obligation to provide overhaul and maintenance of the power plant.

Bagian utama dan bagian pendukung diamortisasi selama taksiran masa manfaat masing-masing sepuluh tahun dan lima tahun. Biaya ditangguhkan diuji penurunan nilainya sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 3.j.

Main parts and supporting parts will be amortised over the estimated useful lives of ten years and five years, respectively. Deferred charges are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 3.j.

p. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya aset tidak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah perolehan awal, aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal, tidak termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluarannya tercermin dalam laba rugi pada tahun terjadinya pengeluaran tersebut.

Masa manfaat aset tidak berwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama estimasi masa manfaat dan dinilai untuk penurunan nilainya bila terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi direview setidaknya setiap akhir tahun buku. Perubahan ekspektasi masa manfaat atau ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dicatat dengan mengubah periode atau metode amortisasi, sebagaimana mestinya, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laba rugi.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau yang belum tersedia untuk digunakan diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering jika peristiwa dan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai baik secara individu maupun pada tingkat unit penghasil kas (“UPK”). Aset tidak berwujud tersebut tidak diamortisasi. Masa manfaat aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah penilaian masa manfaat tetap dapat didukung. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas dilakukan secara prospektif.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tidak berwujud diukur sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

p. Intangible assets

Intangible assets acquired separately are measured initially at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is their fair value at the date of acquisition. Following the initial acquisition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses.

Internally generated intangible assets, excluding capitalised development costs, are not capitalised and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite.

Intangible assets with finite useful lives are amortised over the estimated useful lives and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method are reviewed at least at each financial year-end. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are accounted for by changing the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite useful lives is recognised in profit or loss.

Intangible assets with indefinite useful lives or that are not yet available for use are tested for impairment annually or more frequently if the events and circumstances indicate that the carrying value may be impaired either individually or at the cash generating unit (“CGU”) level. Such intangible assets are not amortised. The useful life of an intangible asset with an indefinite useful life is reviewed annually to determine whether the useful life assessment continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in profit or loss when the asset is derecognised.

Goodwill

Goodwill awalnya diukur pada biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, goodwill diukur sebesar biaya perolehan dikurangi saldo defisit penurunan nilai.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan ke setiap UPK Grup yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi merupakan ditugaskan ke unit-unit tersebut.

UPK yang telah mendapatkan alokasi goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun dan setiap kali terdapat indikasi bahwa UPK mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai untuk goodwill ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari setiap UPK (atau kelompok UPK) yang terkait dengan goodwill tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK lebih kecil dari nilai tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui untuk goodwill tidak dibalik pada periode berikutnya.

Jika goodwill merupakan bagian dari UPK dan bagian dari operasi dalam UPK tersebut dilepaskan, goodwill yang terkait dengan operasi yang dihentikan termasuk dalam jumlah tercatat operasi ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan operasi tersebut. Goodwill yang dilepas dalam keadaan ini diukur berdasarkan nilai wajar relatif dari operasi yang dilepas dan porsi UPK yang dipertahankan.

Perangkat lunak

Biaya untuk memperoleh dan menyiapkan perangkat lunak untuk digunakan dicatat sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat perangkat lunak yang terbatas selama lima tahun.

Bonus

Bonus merupakan pembayaran bonus kepada Pemerintah Indonesia setelah mendapat persetujuan dari JOC dan pembayaran bonus produksi kepada Pemerintah Indonesia setelah tanggal produksi komersial. Sifat dari pembayaran ini mirip dengan pembayaran untuk izin eksploitasi sumber daya panas bumi. Oleh karena itu, Grup mengklasifikasikan transaksi ini sebagai aset tidak berwujud dan jumlahnya akan diamortisasi sampai dengan akhir jangka waktu JOC.

Unit karbon terverifikasi (“VCU”) dan pengurangan emisi bersertifikat (“CER”) (“Kredit karbon”)

Biaya untuk mendaftarkan Kredit karbon dicatat sebagai aset tidak berwujud dan diakui dalam laba rugi ketika jumlah unit yang terdaftar terjual.

Goodwill

Goodwill is initially measured at cost. Following initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses.

For the purpose of impairment assessment, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group’s CGUs that are expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units.

The CGU to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the CGU may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than the carrying amount, an impairment loss is recognised in profit or loss. Impairment losses recognised for goodwill are not reversed in subsequent periods.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative fair values of the operations disposed of and the portion of the CGU retained.

Software

Costs to acquire and prepare software for use are recorded as intangible assets and amortised on a straight-line basis over the software’s finite useful life of five years.

Bonuses

Bonuses represent payment of signature bonus to the GOI after receiving approval of the JOC and payment of production bonus to the GOI after the date of commercial production. The nature of these payments is similar to payments for permits for exploitation of geothermal resources. Therefore, the Group classifies these transactions as intangible assets and the amount will be amortised until the end of the JOC term.

Verified Carbon Units (“VCU”) and Certified Emission Reduction (“CER”) (“Carbon credits”)

Costs to register the Carbon credits are recorded as intangible assets and recognised in profit or loss when the registered number of units are sold.

Biaya pengembangan proyek – pembangkit tenaga angin

Grup mengkapitalisasi biaya-biaya tertentu yang terjadi selama tahap pengembangan dalam proyek. Biaya-biaya ini terdiri dari biaya akuisisi tanah, bunga yang dikapitalisasi, biaya jasa profesional dan biaya terkait, izin dan biaya lainnya terkait dengan pengembangan proyek. Biaya yang dikapitalisasi akan diamortisasi selama periode yang sesuai dari tanggal dimulainya operasi atas proyek atau akan dibebankan sebagai beban jika manajemen Grup memutuskan biaya-biaya tersebut tidak dapat dipulihkan.

Kontrak pelanggan

Kontrak pelanggan merupakan nilai wajar dari kontrak dan perjanjian dengan pelanggan yang dapat memberikan sumber pendapatan berulang yang dapat diandalkan yang diperoleh dari kombinasi bisnis. Kontrak pelanggan diamortisasi secara garis lurus selama masa manfaatnya yang terbatas selama dua puluh tiga tahun dan tiga bulan.

q. Utang usaha

Utang usaha merupakan liabilitas atas barang dan jasa yang diberikan kepada Grup sebelum akhir tahun buku yang belum dibayar. Mereka diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar jika pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, mereka disajikan sebagai kewajiban tidak lancar.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

r. Sewa

Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Sebagai penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Project development costs – wind power plant

The Group capitalises certain costs incurred during the development stage of the project. These costs consist of land acquisition costs, capitalised interest, professional fees and related expenses, permits and other costs related with development of the project. The capitalised costs will be amortised over a suitable period from the date of commencement of commercial operation of the project or will be charged to expense if the Group's management determines the costs to be unrecoverable.

Customer contract

Customer contract represent the fair value of contracts and agreements with customers which can provide a reliable source of recurring revenue acquired from business combination. Customer contract is amortized on a straight line basis over its finite useful life of twenty three years and three months.

q. Trade payables

Trade payables represent liabilities for goods and services provided to the Group prior to the end of the financial year that are unpaid. They are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. Otherwise, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are initially recognised at fair value, and subsequently carried at amortised cost using the effective interest method.

r. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

As a lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognises liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Aset hak guna

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak guna diukur sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat aset tersebut.

Jika kepemilikan aset sewaan berpindah ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan taksiran masa manfaat aset.

Kewajiban sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap dalam substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan opsi penghentian oleh Grup. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan tingkat suku bunga pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan dengan mudah. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa dinaikkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa tetap in-substansi, atau perubahan penilaian untuk membeli aset pendasar.

Right-of-use assets

The Group recognises right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e. the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognised, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received.

Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If the ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognises lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Group exercising the option to terminate. The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognised as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendek atas mesin dan peralatan (yaitu, sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang sejak tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi pembelian). Pengecualian pengakuan aset bernilai rendah juga berlaku untuk sewa peralatan kantor yang dianggap bernilai rendah (yaitu, di bawah AS$5.000 – nilai penuh). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai pesewa

Pada awal perjanjian penjualan tenaga listrik jangka panjang, Grup menentukan apakah perjanjian tersebut merupakan atau mengandung sewa.

Sewa dimana Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dikeluarkan dalam negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Kebijakan akuntansi untuk pendapatan sewa dijelaskan pada Catatan 3.y. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

Sewa di mana Grup mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset kepada pihak lawan, tetapi bukan hak legal, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Ketika Grup adalah pesewa dalam sewa pembiayaan, jumlah yang terutang dalam sewa, setelah dikurangi pendapatan keuangan yang diterima di muka, dimasukkan dalam piutang sewa (dalam laporan posisi keuangan konsolidasian). Pendapatan sewa pembiayaan diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan pada laba rugi selama periode sewa sehingga memberikan tingkat pengembalian yang konstan atas investasi baru dalam sewa.

Berdasarkan ketentuan JOC dan ESC Salak dan Darajat, Grup, atas nama PGE, membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik, dan menyalurkan semua daya (selain daya tambahan) yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut ke PLN. Pada akhir masa kontrak, Grup akan mengalihkannya ke PGE yang selanjutnya akan mengalihkannya ke PLN.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of machinery and equipment (i.e. those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases of office equipment that are considered of low value (i.e. below US$5,000 – full amount). Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognised as expenses on a straight-line basis over the lease term.

As a lessor

At the inception of long-term power sales arrangements, the Group determines whether such an arrangement is or contains a lease.

Leases where the Group does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the asset are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised over the lease term on the same basis as lease revenue. The accounting policy for lease revenue is set out in Note 3.y. Contingent rents are recognised as revenue in the period in which they are earned.

Leases where the Group transfers to counterparties substantially all the risks and rewards of ownership of assets but not necessarily legal title, are classified as finance leases. When the Group is a lessor under finance leases the amounts due under the leases, after deduction of unearned finance income, are included in lease receivable (in the consolidated statements of financial position). The finance lease income is recognised as finance lease income in profit or loss over the periods of the leases so as to give a constant rate of return on the new investment in the leases.

Under the terms of the Salak and Darajat JOCs and ESCs, the Group, on behalf of PGE, builds and operates the power plants, and delivers all power (other than auxiliary power) generated by the power plants to PLN. At the end of the contract term, the Group will transfer them to PGE which, in turn, should transfer them to PLN.

Sebagai pesewa pembiayaan, Grup mengakui piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan nilai investasi bersih sewa, yang merupakan jumlah agregat dari: (i) pembayaran sewa minimum dalam sewa pembiayaan; ditambah (ii) nilai residu pembangkit listrik yang tidak dijamin; yang kemudian didiskontokan pada tingkat bunga implisit dalam sewa.

As a finance lessor, the Group recognises a finance lease receivable in the consolidated statements of financial position at an amount equal to the net investment value of the lease, which is the aggregate amount of: (i) the minimum lease payments under the finance lease; plus (ii) the unguaranteed residual values of the power plants; which are then discounted at the interest rate implicit in the lease.

Pembayaran sewa minimum merupakan total jumlah jaminan yang akan dibayarkan oleh PLN untuk mengkompensasi pemulihan biaya modal pembangkit listrik selama periode kontrak, terlepas dari tingkat penggunaan. Berdasarkan ESC, Grup hanya menerima satu pertimbangan untuk layanannya, yaitu satu tarif listrik campuran untuk mengkompensasi semua jenis layanan yang diberikan oleh Grup untuk menghasilkan listrik berbasis energi panas bumi. Oleh karena itu, Grup menggunakan metode nilai residu untuk membagi imbalan yang diterima dari PLN menjadi dua aktivitas berbeda: (i) aktivitas pembiayaan untuk membayar kembali pokok dan bunga piutang sewa pembiayaan; dan (ii) pendapatan untuk aktivitas operasi dan pemeliharaan yang diakui pada saat Grup menyalurkan tenaga listrik.

The minimum lease payments represent the total guaranteed amounts that will be paid by PLN to compensate the capital cost recovery of the power plants throughout the contract period, irrespective of the extent of use. Under the ESC, the Group receives only one consideration for its services, i.e. one blended electricity rate to compensate all types of services provided by the Group to generate geothermal energy-based electricity. Therefore, the Group uses the residual value method to split the consideration received from PLN into two different activities: (i) financing activities to repay the principal and interest of the finance lease receivables; and (ii) revenues for operating and maintenance activities that are recognised as the Group delivers electricity.

Manajemen mengestimasi nilai kini bersih piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah yang tidak melebihi biaya modal yang dikeluarkan untuk membangun dan mengembangkan pembangkit listrik. Suku bunga implisit adalah tingkat diskonto yang menyebabkan nilai sekarang agregat dari pembayaran minimum yang dijamin sama dengan nilai tercatat piutang sewa pembiayaan pada tanggal penerapan awal.

Management estimated the net present value of the finance lease receivable at an amount not to exceed the capital costs spent to construct and develop the power plants. The implicit interest rate is the discount rate that causes the aggregate present value of minimum guaranteed payments to be equal to the carrying value of the finance lease receivables at the initial application date.

Piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan menjadi bagian lancar dan tidak lancar berdasarkan periode penagihan yang diharapkan. Jumlah yang diharapkan dapat tertagih dalam satu tahun atau kurang diklasifikasikan sebagai bagian dari aset lancar; jika tidak, disajikan sebagai aset tidak lancar.

The finance lease receivables are classified into current and non-current portions based on the expected collection periods. Amounts that are expected to be collected in one year or less are classified as part of current assets; otherwise, they are presented as non-current assets.

s. Provisi

Umum

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu, ketika kemungkinan besar arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan ketika jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi andal.

s. Provisions

General

Provisions are recognised when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of a past event, when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when the amount of the obligation can be estimated reliably.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik saat ini. Jika kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi tidak lagi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, provisi dibatalkan. Jika pengaruh nilai waktu uang material, provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak kini yang mencerminkan, jika sesuai, risiko khusus liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi karena berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed. If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, where appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

Biaya pembongkaran, restorasi dan remediasi

Berdasarkan ketentuan JOC, manajemen telah diberi tahu dan yakin bahwa kewajiban apapun di masa depan untuk biaya restorasi dan remediasi lokasi, termasuk pembongkaran pabrik dan properti terbengkalai dapat diklaim dan/atau ditanggung oleh PERTAMINA atau PGE.

Oleh karena itu, tidak ada provisi yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian ini untuk operasi panas bumi.

Dismantlement, restoration and remediation cost

Under the terms of the JOC, management has been advised and believes that any future obligations for site restoration and remediation costs, including dismantling plants and abandoning properties are claimable and/or borne by PERTAMINA or PGE.

Accordingly, no provision has been recognised in these consolidated financial statements for the geothermal operations.

t. Pinjaman

Pinjaman disajikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pinjaman pada awalnya diakui sebesar nilai wajar (setelah dikurangi biaya transaksi) dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi. Selisih antara hasil (setelah dikurangi biaya transaksi) dan nilai penebusan diakui dalam laba rugi selama jangka waktu pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Ketika terdapat modifikasi arus kas kontraktual liabilitas keuangan yang tidak mengakibatkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan tersebut, penyesuaian terhadap biaya perolehan diamortisasi liabilitas keuangan dibuat untuk mencerminkan perubahan estimasi arus kas kontraktual. Grup menentukan biaya perolehan diamortisasi liabilitas keuangan sebagai nilai kini dari estimasi arus kas kontraktual masa depan yang dimodifikasi yang didiskontokan pada EIR awal dari instrumen keuangan tersebut. Penyesuaian tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi liabilitas keuangan.

t. Borrowings

Borrowings are presented as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer settlement for at least 12 months after the reporting date.

Borrowings are initially recognised at fair value (net of transaction costs) and subsequently carried at amortised cost. Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

When there is a modification of contractual cash flows of a financial liability that does not result in derecognition of that financial liability, adjustment to the amortised cost of the financial liability is made to reflect the changes in estimated contractual cash flows. The Group determines the amortised cost of the financial liability as the present value of the modified estimated future contractual cash flows that is discounted at the financial instrument's original EIR. The adjustment is recognised in profit or loss as a gain or loss on modification of financial liabilities.

u. Biaya pendanaan yang ditangguhkan

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pembiayaan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama jangka waktu perjanjian pembiayaan terkait. Jumlah biaya pendanaan tangguhan yang belum diamortisasi disajikan sebagai pengurang pinjaman terkait.

u. Deferred financing costs

Costs incurred to obtain financing are deferred and amortised using the effective interest method over the term of the related financing agreements. The unamortised amount of deferred financing costs is presented as a deduction of the related borrowings.

v. Kompensasi dan tunjangan karyawan

i. Imbalan jangka panjang

Hak karyawan atas jasa dan pembayaran kompensasi diakui pada saat terutang kepada karyawan. Penyisihan dibuat untuk taksiran liabilitas sebagai akibat dari jasa masa lalu yang diberikan oleh karyawan sampai dengan akhir periode pelaporan dan dihitung berdasarkan kebijakan Grup atau jumlah minimum hak karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode penilaian aktuaria projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan suku bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi yang didenominasikan dalam mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo yang mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasti yang terkait kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi Pemerintah.

Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk program imbalan pasti, seluruh keuntungan dan kerugian aktuarial diakui di OCI sebagai bagian dari pengukuran kembali. Biaya jasa lalu yang belum vested diakui segera dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Untuk imbalan jasa jangka panjang dan imbalan jangka panjang lainnya, Grup mengakui jumlah bersih tersebut dalam laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada yang lebih awal dari hal-hal berikut:
- tanggal amendemen atau kurtailmen program; atau
- tanggal dimana Grup mengakui biaya terkait restrukturisasi.

v. Employee compensation and benefits

i. Long-term service benefits

Employee entitlements to service and compensation payments are recognised when they accrue to the employees. A provision is made for the estimated liability as a result of past services rendered by employees up to the end of the reporting period and is calculated based on the Group's policy or a minimum amount of employee entitlements in accordance with the applicable regulations.

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit actuarial valuation method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability. When there is no deep market for such bonds, the market rates of Government bonds are used.

A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years.

For defined benefit plans, all actuarial gains and losses are recognised in OCI as part of remeasurement. Unvested past service costs are recognised immediately in profit or loss when incurred. For long-term service benefits and other long-term benefits, the Group recognises the net total of the amounts in profit or loss.

Past service costs are recognised in profit or loss on the earlier of the following:
- the date of the plan amendment or curtailment; or
- the date that the Group recognised restructuring related costs.

Liabilitas atau aset imbalan pasti neto adalah agregat nilai kini kewajiban imbalan pasti (diperoleh dengan menggunakan tingkat diskonto berdasarkan obligasi korporasi atau obligasi pemerintah berkualitas tinggi untuk pekerja yang bekerja di Indonesia) pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program (jika ada), disesuaikan dengan dampak pembatasan aset imbalan pasti neto ke batas atas aset. Batas aset adalah nilai kini dari setiap manfaat ekonomi yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran masa depan untuk program tersebut.

Bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto diakui sebagai beban atau pendapatan dalam laba rugi.

Biaya pemberian imbalan berdasarkan program imbalan pasti ditentukan secara terpisah untuk setiap program dengan menggunakan metode projected unit credit.

Biaya manfaat pasti terdiri dari:
- Biaya layanan;
- Bunga bersih atas liabilitas atau aset imbalan pasti bersih; dan
- Pengukuran kembali liabilitas atau aset imbalan pasti neto.

Biaya jasa, yang meliputi biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian tidak rutin, diakui sebagai beban dalam laba rugi. Biaya jasa lalu diakui pada saat amendemen atau kurtailmen program terjadi.

Pengukuran kembali, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, pengembalian aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset (tidak termasuk bunga neto atas liabilitas imbalan pasti) diakui dalam OCI pada periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam laba ditahan dalam ekuitas dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Aset program adalah aset yang dipegang oleh dana imbalan kerja jangka panjang atau polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset program tidak tersedia untuk kreditur Grup, juga tidak dapat dibayarkan langsung ke Grup. Nilai wajar aset program didasarkan pada informasi harga pasar. Ketika tidak ada harga pasar yang tersedia, nilai wajar aset program diestimasi dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan risiko yang terkait dengan aset program dan tanggal jatuh tempo atau perkiraan pelepasan aset tersebut (atau, jika tidak memiliki jatuh tempo, jangka waktu yang diharapkan sampai dengan penyelesaian kewajiban yang bersangkutan).

The net defined benefit liability or asset is the aggregate of the present value of the defined benefit obligation (derived using a discount rate based on high-quality corporate bonds or government bonds for employees working in Indonesia) at the end of the reporting period reduced by the fair value of plan assets (if any), adjusted for any effect of limiting a net defined benefit asset to the asset ceiling. The asset ceiling is the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan.

Net interest on the net defined benefit liability or asset is recognised as expense or income in profit or loss.

The cost of providing benefits under the defined benefit plans is determined separately for each plan using the projected unit credit method.

Defined benefit costs comprise the following:
- Service cost;
- Net interest on the net defined benefit liability or asset; and
- Remeasurements of the net defined benefit liability or asset.

Service costs, which include current service costs, past service costs and gains or losses on non-routine settlements, are recognised as expenses in profit or loss. Past service costs are recognised when plan amendment or curtailment occurs.

Remeasurements, comprising actuarial gains and losses, return on plan assets and any change in the effect of the asset ceiling (excluding net interest on a defined benefit liability) are recognised in OCI in the period in which they arise. Remeasurements are recognised in retained earnings within equity and are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Plan assets are assets that are held by a long-term employee benefit fund or qualifying insurance policies. Plan assets are not available to the creditors of the Group, nor can they be paid directly to the Group. Fair value of plan assets is based on market price information. When no market price is available, the fair value of plan assets is estimated by discounting expected future cash flows using a discount rate that reflects both the risk associated with the plan assets and the maturity or expected disposal date of those assets (or, if they have no maturity, the expected period until the settlement of the related obligations).

ii. Upah, gaji dan cuti tahunan

Liabilitas imbalan kerja untuk upah, gaji dan cuti tahunan yang diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan sejak akhir periode pelaporan merupakan kewajiban kini akibat jasa yang diberikan karyawan hingga akhir periode pelaporan dan dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskonto tentang remunerasi tingkat upah dan gaji yang diperkirakan akan dibayarkan oleh Grup pada akhir periode pelaporan termasuk biaya tambahan terkait.

ii. Wages, salaries and annual leave

Liabilities for employee benefits for wages, salaries and annual leave that are expected to be settled within 12 months from the end of the reporting period represent present obligations resulting from employees' service provided to the end of the reporting period and are calculated at undiscounted amounts based on remuneration wage and salary rates that the Group expects to pay as at the end of the reporting period including related add on-costs.

iii. Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK 237 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

iii. Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for certain benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 237 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involves in the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

w. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru atau opsi disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

w. Share capital

Ordinary shares are classified as equity and incremental costs directly attributable to the issuance of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

x. Saham treasuri

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasuri) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

x. Treasury share

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

y. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Grup beroperasi sumber energi panas bumi di pulau Jawa di Indonesia dan seluruh produksi listrik dan uap Grup dijual ke PLN sampai dengan akhir ESC. Manajemen menentukan bahwa kontrak Grup dengan PLN mengandung sewa dan harus dicatat sebagai sewa operasi (Catatan 3.m) atau sewa pembiayaan (Catatan 3.r). Dengan demikian, pendapatan dari kontrak dengan PLN dialokasikan antara pendapatan listrik dan pendapatan sewa berdasarkan nilai wajar relatif dari setiap komponen pendapatan.

y. Revenue and expense recognition

Revenue from contracts with customers

The Group operates geothermal and wind energy resource areas on the island of Java and Sulawesi in Indonesia and all of the Group's electricity and steam production are sold to PLN up to the end of the ESC and PPA for geothermal and wind energy, respectively. Management determined that the Group's contracts with PLN contain a lease and should be accounted for as either an operating lease (Note 3.m) or a finance lease (Note 3.r). As such, revenue from the contract with PLN is allocated between electricity revenue and lease revenue based on the relative fair value of each revenue component.

Pendapatan listrik merupakan bagian dari pendapatan yang memulihkan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik sementara pendapatan sewa dan pendapatan sewa pembiayaan merupakan bagian dari pendapatan yang memulihkan investasi di pembangkit listrik. Pendapatan listrik dan pendapatan uap diakui sesuai dengan PSAK 115 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", sedangkan pendapatan sewa operasi dan pendapatan sewa pembiayaan diakui sesuai dengan PSAK 116 "Sewa".

Electricity revenue represents the portion of revenue that recovers the operation and maintenance of the power plants while lease revenue and finance lease income represent the portion of revenue that recovers the investment in the power plants. Electricity revenue and steam revenue are recognised in accordance with PSAK 115 "Revenue from Contracts with Customers", while operating lease income and finance lease income are recognised in accordance with PSAK 116 "Leases".

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut). Grup secara umum menyimpulkan bahwa mereka adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya karena pada umumnya Grup mengendalikan barang atau jasa sebelum mengalihkannya kepada pelanggan. Grup menggunakan model lima langkah untuk mencatat pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan dan mensyaratkan bahwa pendapatan diakui pada suatu jumlah yang mencerminkan pertimbangan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan.

Revenue from contracts with customers is recognised when the performance obligation is satisfied by transferring the promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service). The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements because it typically controls the goods or services before transferring them to the customer. The Group uses a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers and requires that revenue be recognised at an amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer.

Grup mempertimbangkan apakah terdapat janji lain dalam kontrak yang merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah yang harus dialokasikan sebagian dari harga transaksi. Dalam menentukan harga transaksi untuk pendapatan tenaga listrik, Grup mempertimbangkan pengaruh imbalan variabel, adanya komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non-tunai, dan imbalan yang harus dibayarkan kepada PLN.

The Group considers whether there are other promises in the contract that are separate performance obligations to which a portion of the transaction price needs to be allocated. In determining the transaction price for the electricity revenue, the Group considers the effect of variable consideration, the existence of significant financing components, non-cash consideration, and consideration payable to PLN.

Grup mengevaluasi off-take agreements (ESC) SEGSL dan SEGSPL dan menentukan bahwa imbalan yang diterima atau piutang dari PLN berdasarkan pada jumlah yang ditagih mengandung kewajiban kinerja tambahan (mekanisme set-off) dimana jika SEGSL dan SEGSPL selanjutnya menyerahkan kepada PLN jumlah listrik dan energi panas bumi yang sebelumnya tidak dapat diterima oleh PLN, imbalan yang diterima atau dapat diterima sebelumnya dari PLN akan digunakan untuk pembayaran jumlah listrik atau energi panas bumi yang diserahkan oleh SEGSL dan SEGSPL (Catatan 3.y dan 17).

The Group evaluated SEGSL's and SEGSPL's off-take agreements (ESC) and determined that the consideration received or receivable from PLN based on invoiced amounts contains an additional performance obligation (set-off mechanism) whereby if SEGSL and SEGSPL subsequently deliver to PLN the quantities of electricity and geothermal energy that PLN previously was not able to accept, the consideration previously received or receivable from PLN will be utilised towards payment for such quantities of electricity or geothermal energy delivered by SEGSL and SEGSPL (Note 3.y and 17).

Grup juga mengevaluasi off-take agreement (ESC) SEGWWL dan Kelompok Kontraktor Darajat dan menentukan bahwa kontrak tersebut tidak memiliki pertimbangan variabel seperti hak imbalan dan rabat volume, dan tidak memiliki komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non-tunai dan imbalan yang dibayarkan kepada pelanggan.

The Group also evaluated SEGWWL's and the Darajat Contractor Group's off-take agreements (ESCs) and determined that the contracts do not have variable considerations such as rights of return and volume rebates, and have no significant financing component, non-cash consideration and consideration payable to customers.

Grup juga mengevaluasi power purchase agreement (PPA) dan menentukan bahwa kontrak tersebut tidak memiliki pertimbangan variabel seperti hak imbalan dan rabat volume, dan tidak memiliki komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non-tunai dan imbalan yang dibayarkan kepada pelanggan.

The Group also evaluated SBE's power purchase agreement (PPA) and determined that the contracts do not have variable considerations such as rights of return and volume rebates, and have no significant financing component, non-cash consideration and consideration payable to customers.

Pendapatan listrik

Pendapatan listrik diakui dari waktu ke waktu pada saat kendali keluaran listrik dialihkan ke PLN pada saat penyerahan. Kuantitas yang dikirim ditentukan melalui meteran pengukuran listrik di titik pengiriman. Jangka waktu kredit normal adalah 30-45 hari setelah diterbitkannya tagihan oleh Grup kepada PLN.

Electricity revenue

Electricity revenue is recognised over time when the control of the electrical output is transferred to PLN which is upon delivery. Quantities delivered are determined through electrical measurement meters at the delivery point. The normal credit term is 30-45 days upon issue of the invoice by the Group to PLN.

Pendapatan uap

Pendapatan uap diakui dari waktu ke waktu ketika kendali keluaran uap dialihkan ke PLN, yaitu pada saat pengiriman. Kuantitas yang dikirim ditentukan melalui meteran pengukuran listrik pada titik antarmuka (untuk uap) dengan PLN ("titik pengiriman"). Penjualan energi panas bumi dicatat berdasarkan harga yang ditentukan dengan formula tertentu sesuai dengan ESC (Catatan 1.c).

Steam revenue

Steam revenue is recognised over time when control of steam output is transferred to PLN, which is upon delivery. Quantities delivered are determined through electrical measurement meters at the point of interface (for steam) with PLN (the "delivery point"). Geothermal energy sales are recorded on the basis of prices determined by certain formulas in accordance with the ESC (Note 1.c).

Pendapatan kredit karbon

Pendapatan kredit karbon diakui pada waktu tertentu setelah penjualan unit CER dan Voluntary Emission Reduction ("VER") kepada pelanggan. Berdasarkan penilaian manajemen, transaksi kredit karbon Grup tidak memiliki pertimbangan variabel seperti hak imbalan dan rabat volume, dan tidak ada komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non-tunai, dan imbalan yang harus dibayarkan kepada pelanggan.

Carbon credit revenue

Carbon credit revenue is recognised at a point in time upon sale of CER and Voluntary Emission Reduction ("VER") units to the customer. Based on management's assessment, the Group's carbon credit transactions have no variable consideration such as rights of return and volume rebates, and no significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the customer.

Pendapatan sewa operasi

Pendapatan sewa operasi diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa sesuai dengan PSAK 116 "Sewa".

Operating lease income

Operating lease income is recognised on a straight-line basis over the lease term in accordance with PSAK 116 "Leases".

Pendapatan sewa pembiayaan

Pendapatan sewa pembiayaan diakui untuk semua jasa yang diberikan oleh Grup berdasarkan pengaturan bangun, miliki, operasikan dan serah untuk operasi pembangkit listrik Salak dan Darajat, termasuk pendapatan untuk pembangunan pembangkit listrik (melalui pengakuan piutang sewa pembiayaan).

Finance lease income

Finance lease income is recognised for all the services provided by the Group under the build, own, operate and transfer arrangement for the Salak and Darajat power plant operations, which include revenues for the construction of the power plants (through the recognition of finance lease receivable).

Grup mengalokasikan imbalan yang diterimanya untuk setiap kWh listrik yang dialirkan ke PLN menjadi dua kategori: pembayaran pokok dan bunga piutang sewa pembiayaan; dan pendapatan produksi tenaga listrik, operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik disajikan sebagai pendapatan tenaga listrik pada laba rugi. Grup menggunakan metode nilai residu untuk mengalokasikan total imbalan yang diterima dari PLN antara pendapatan untuk aktivitas pembiayaan, operasi dan pemeliharaan. Pendapatan sewa pembiayaan diakui berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian periodik yang konstan atas saldo piutang sewa pembiayaan Grup.

Pendapatan sewa pembiayaan diakui sesuai dengan PSAK 116 “Sewa”.

Biaya

Beban diakui dengan basis akrual pada saat terjadinya.

z. Saldo make-up account PLN

Saldo make-up account PLN merupakan jumlah kumulatif dimana listrik dan/atau uap yang dibayarkan oleh PLN kepada Kontraktor berdasarkan mekanisme take-or pay di ESC Salak melebihi jumlah uap dan/atau listrik yang benar-benar diterima oleh PLN dikurangi listrik dan/atau uap yang diserahkan oleh Grup sesuai dengan jumlah take-or-pay. Sesuai dengan PSAK 115, jika PLN membayar imbalan sebelum Grup mentransfer listrik dan uap ke pelanggan, saldo make-up account PLN diakui pada saat pembayaran dilakukan atau saat pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih dulu). Apabila Kontraktor melakukan penyerahan uap dan/atau listrik yang mengurangi saldo make-up account PLN sesuai dengan ESC, maka penyerahan tersebut diakui sebagai pendapatan berdasarkan PSAK 115.

Dengan pengakhiran Salak JOC, hak dan kewajiban SEGSL dan SEGSPL (termasuk saldo make-up account PLN), sebagai pihak ESC, dalam perannya sebagai Kontraktor PGE untuk pengiriman energi panas bumi atau listrik ke PLN, harus diakhiri dan PGE akan menanggung semua hak dan kewajiban SEGSL dan SEGSPL sesuai dengan ESC ini pada tanggal penghentian tersebut.

aa. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas, atau sebagaimana diatur dalam JOC anak perusahaan Grup.

The Group allocates the consideration that it receives for each kWh of electricity delivered to PLN into two categories: repayments of principal and interest of the finance lease receivables; and revenues for the production of electricity, operation and maintenance of the power plants presented as electricity revenue in profit or loss. The Group uses the residual value method to allocate the total consideration received from PLN between revenues for the financing, operating and maintenance activities. Finance lease income is recognised based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group’s outstanding finance lease receivables balance.

Finance lease income is recognised in accordance with PSAK116 “Leases”.

Expenses

Expenses are recognised on an accrual basis as incurred.

z. PLN make-up account balances

PLN make-up account balances represent the cumulative amount by which the electricity and/or steam paid by PLN to the Contractors based on the take-or pay mechanism in the Salak ESC exceeds the amount of steam and/or electricity actually accepted by PLN minus electricity and/or steam delivered by the Group pursuant to the take-or-pay amount. In accordance with PSAK 115, if PLN pays consideration before the Group transfers electricity and steam to the customer, PLN make-up account balances are recognised when the payment is made or when the payment is due (whichever is earlier). When the Contractors deliver steam and/or electricity which reduces the balance of PLN make-up account balances in accordance with the ESC, then such delivery shall be recognised as revenue under PSAK 115.

Upon termination of the Salak JOC, SEGSL’s and SEGSPL’s rights and obligations (including make-up account balances to PLN), as a party to the ESC, in their role as Contractor to PGE for the delivery of geothermal energy or electricity to PLN, shall terminate and PGE shall assume all the rights and obligations of SEGSL and SEGSPL pursuant to this ESC upon the date of such termination.

aa. Income tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, or as regulated in the JOCs of the Group’s subsidiaries, respectively.

Pajak penghasilan kini diakui dalam laba rugi kecuali untuk pajak yang berkaitan dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dalam ekuitas. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku diinterpretasikan dan menetapkan provisi jika diperlukan.

Current income taxes are recognised in profit or loss except to the extent that the tax relates to items recognised outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Pajak tangguhan disajikan dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada akhir periode pelaporan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan.

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the end of the reporting period between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer, kecuali jika liabilitas pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal goodwill atau aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak atau rugi kena pajak.

Deferred tax liabilities are recognised for all temporary differences, except where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan dikurangi apabila kemungkinan laba kena pajak tidak lagi mencukupi untuk memungkinkan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan dapat digunakan.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilised.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun ketika aset tersebut direalisasikan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir tahun setiap periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of each reporting period.

Pajak tangguhan terkait pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar pajak penghasilan. Pos pajak tangguhan diakui secara korelasi dengan transaksi yang mendasarinya baik dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas dan pajak tangguhan yang timbul dari kombinasi bisnis disesuaikan terhadap goodwill pada saat akuisisi.

Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside income tax. Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity and deferred tax arising from a business combination is adjusted against goodwill on acquisition.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak penghasilan kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current income tax assets against current income tax liabilities and the deferred tax relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

ab. Laba per saham

ab. Earnings per share

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the period attributable to the equity holders of the Company by the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the period.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar untuk mengasumsikan konversi seluruh potensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares.

ac. Laporan segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Direksi adalah pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

ac. Segment reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The Board of Directors is the chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

ad. Pembagian dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

ad. Dividend distributions

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as liabilities in the consolidated financial statements in the period when the dividends are declared.

ae. Akuntansi JOC

Perbedaan utama antara akuntansi JOC yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan dan PSAK adalah sebagai berikut:

ae. JOC accounting

The primary differences between JOC accounting which is used in income tax calculations and PSAK are as follows:

Kebijakan akuntansi/ Accounting policy	Dasar akuntansi JOC/ JOC basis of accounting	PSAK/ PSAK
Pendapatan listrik/ Electricity revenue	Pendapatan diakui berdasarkan output listrik yang dikirim ke PLN/Revenue recognised based on electrical output delivered to PLN	Untuk SEGWWL, SEGSPL, SEGD-I, SEGD-II dan DGI, menggunakan metode nilai residu untuk membagi imbalan yang diterima dari PLN menjadi dua aktivitas berbeda: (i) aktivitas pembiayaan untuk membayar pokok dan bunga piutang sewa pembiayaan; dan (ii) pendapatan untuk aktivitas operasi dan pemeliharaan yang diakui pada saat Grup menyalurkan tenaga listrik/For SEGWWL, SEGSPL, SEGD-I, SEGD-II and DGI, uses the residual value method to split the consideration received from PLN into two different activities: (i) financing activities to repay the principal and interest of the finance lease receivables; and (ii) revenues for operating and maintenance activities that are recognised as the Group delivers electricity
Amortisasi biaya modal/ Amortisation of capital costs	Depresiasi dipercepat (saldo menurun) menggunakan penyusutan setahun penuh pada tahun perolehan/ Accelerated depreciation (declining balance) using a full year's depreciation in the year of acquisition	Berbagai metode penyusutan (termasuk metode unit produksi) menggunakan sebagian kecil dari penyusutan satu tahun pada tahun perolehan/Various depreciation methods (including units of production method) using a fraction of a year's depreciation in the year of acquisition

Kebijakan akuntansi/ Accounting policy	Dasar akuntansi JOC/ JOC basis of accounting	PSAK/ PSAK
Persediaan usang atau fasilitas yang sedang tidak digunakan/Obsolete stores or idle facilities	Dihapuskan hanya jika disetujui oleh PGE/Written-off only when approved by PGE	Biaya saat diidentifikasi/Expense when identified
Kewajiban kontinjensi/ Contingent liabilities	Diakui ketika diselesaikan atau disetujui oleh PGE/ Recognised when settled or approved by PGE	Diungkapkan dalam laporan keuangan dan diakui ketika memenuhi kriteria tertentu dalam PSAK 237/ Disclosed in the financial statements and recognised when meeting certain criteria in PSAK 237
Pajak tangguhan/ Deferred tax	Tidak disediakan/Not provided	Metode liabilitas/Liability method
Biaya eksplorasi dan pengembangan tidak berwujud – sumur yang sukses/Intangible exploration and development costs – successful wells	Dibebankan/Expensed	Dikapitalisasi/Capitalised
Pengembangan sumur kering/ Development dry holes	Dibebankan/ Expensed	Awalnya dikapitalisasi kemudian dibebankan jika tidak berhasil/ Initially capitalised then expensed if not successful
Kewajiban pembongkaran/ Abandonment obligation	Diakui saat dibayar atau didanai/ Recognised when paid or funded	Diakui sebagai liabilitas jika terdapat kewajiban hukum atau konstruktif/ Recognised as a liability where there is a legal or constructive obligation
Penurunan nilai aset/Asset impairment	Tidak ada penghapusan sampai proposal pengabaian disetujui oleh PGE untuk setiap aset yang mengalami penurunan nilai atau terbengkalai/ No write-off until proposal for abandonment approved by PGE for any impaired or abandoned assets	Penghapusan kelebihan nilai tercatat aset atas jumlah terpulihkan ketika penurunan nilai teridentifikasi/Write-off excess of assets' carrying amount over recoverable amount when impairment identified
Derivatif/Derivatives	Tidak dapat diterapkan/ Not applicable	Dicatat pada nilai wajar/ Recognised at fair value
Overhaul/pemeliharaan besar/ Overhaul/major maintenance	Dibebankan/Expensed	Dikapitalisasi/Capitalised
Sewa (sebagai penyewa)/ Leases (as lessee)	Dibebankan/Expensed	Dicatat sesuai dengan PSAK 116/Accounted for in accordance with PSAK 116

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan ISAK mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

a. Penilaian pengaturan kontrak

Manajemen menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian kontraktual dengan PLN termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa. Berdasarkan evaluasi manajemen atas syarat-syarat pengaturan, ditetapkan bahwa pengaturan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pengaturan konsesi jasa dengan dasar bahwa PLN tidak mengendalikan – melalui kepemilikan, hak manfaat atau lainnya – kepentingan sisa yang signifikan atas infrastruktur pada berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Selain itu, manajemen juga menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian tersebut mengandung sewa dan jenis sewa. Berdasarkan evaluasi tersebut, manajemen menentukan bahwa perjanjian tersebut mengandung sewa karena pemenuhan perjanjian bergantung pada penggunaan aset atau aset tertentu (aset) dan perjanjian tersebut memberikan hak untuk menggunakan aset tersebut.

Wayang Windu

Manajemen mengklasifikasikan sewa yang timbul dari perjanjian kontraktual Wayang Windu sebagai sewa operasi berdasarkan penilaian manajemen bahwa perjanjian tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

The preparation of consolidated financial statements in conformity with ISAK requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future years.

a. Contractual arrangement assessment

Management exercises its judgement in determining whether the contractual arrangements with PLN fall within the scope of ISAK 16 Service Concession Arrangements. Based on management's evaluation of the terms of the arrangements, it determined that the arrangements are not within the scope of service concession arrangements on the basis that PLN does not control – through ownership, beneficial entitlement or otherwise – any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.

Furthermore, management also exercises its judgement in determining whether the arrangement contains a lease and the type of lease. Based on such evaluation, management determined that the arrangements contain a lease as fulfilment of the arrangements is dependent on the use of a specific asset or assets (the asset) and the arrangement conveys a right to use the asset.

Wayang Windu

Management classifies the lease arising from the contractual arrangement of Wayang Windu as an operating lease based on management's evaluation that the arrangement does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Salak dan Darajat

Manajemen mengklasifikasikan sewa yang timbul dari perjanjian kontrak Salak dan Darajat sebagai sewa pembiayaan, berdasarkan penilaian manajemen bahwa perjanjian tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan.

b. Piutang sewa pembiayaan

Saldo piutang sewa pembiayaan SEGSPL dan SEGDL sama dengan pembayaran sewa minimum ditambah nilai sisa yang tidak dijamin yang diakui oleh pesewa yang didiskontokan pada suku bunga implisit dalam sewa. Pembayaran sewa minimum dari sewa adalah pembayaran atas persyaratan JOC dan ESC yang harus dilakukan oleh PLN, tidak termasuk kenaikan harga yang tidak terduga (misalnya, penyesuaian inflasi), biaya produksi listrik, layanan operasi dan pemeliharaan, dan pajak. Intinya, pembayaran sewa minimum merupakan kompensasi atas biaya modal yang diinvestasikan oleh SEGSPL dan SEGDL untuk membangun dan mengembangkan pembangkit listrik saja. Namun, di bawah ESC, SEGSPL dan SEGDL menerima satu pertimbangan untuk semua layanan mereka.

Oleh karena itu, manajemen telah menggunakan metode nilai residu untuk mengestimasi pembagian antara imbalan yang diterima untuk aktivitas pendanaan guna menentukan jumlah yang berlaku untuk piutang sewa pembiayaan. Manajemen mengestimasi nilai sekarang bersih piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah yang tidak melebihi biaya modal yang dikeluarkan untuk membangun dan mengembangkan Pembangkit Listrik. Penilaian dan perkiraan digunakan untuk memperkirakan pembagian antara berbagai komponen imbalan yang diterima dari PLN; dan untuk memperkirakan tingkat pengembalian konstan yang digunakan untuk mendiskontokan pembayaran sewa minimum.

Jika asumsi awal yang digunakan untuk membangun piutang sewa pembiayaan berbeda dengan asumsi yang digunakan oleh manajemen, estimasi saldo piutang akan terpengaruh. Akibatnya, jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk pendapatan penjualan tenaga listrik yang diukur dengan menggunakan pendekatan nilai residu juga akan berbeda. Setelah piutang sewa pembiayaan diakui pada awal, saldo tidak perlu diukur kembali kecuali ada amendemen signifikan yang dibuat pada JOC dan ESC/PPA, di mana manajemen perlu menilai kembali model sewa pembiayaannya.

Salak and Darajat

Management classifies the leases arising from the contractual arrangements of Salak and Darajat as finance leases, based on management's evaluation that the arrangements transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

b. Finance lease receivables

The finance lease receivables balance of SEGSPL and SEGDL is equal to the minimum lease payments plus any unguaranteed residual value accruing to the lessor discounted at the interest rate implicit in the lease. Minimum lease payments of the lease are the payments over the JOC and ESC terms that PLN is required to make, excluding contingent escalation in prices (for example, inflation adjustments), costs for production of electricity, operation and maintenance services and taxes. In essence, the minimum lease payments represent the compensation for costs of capital invested by SEGSPL and SEGDL to construct and develop the power plant only. Under the ESC, however, SEGSPL and SEGDL receive one consideration for all of their services.

Therefore, management has used the residual value method to estimate the split between the consideration received for financing activities to determine the amount applicable to the finance lease receivables. Management estimated the net present value of the finance lease receivables at an amount not to exceed the capital costs spent to construct and develop the Power Plant. Judgements and estimates are used to estimate the split between the different components of the consideration received from PLN; and to estimate the constant rate of return used to discount the minimum lease payments.

Where the initial assumptions used to build the finance lease receivables differ from those used by management, the estimated receivable balance would have been affected. As a result, the amounts recognised in profit or loss for electricity sales revenue measured using the residual value approach would also have been different. Once the finance lease receivable is recognised at inception, the balance does not need to be subsequently re-measured unless there are significant amendments made to the JOC and ESC/PPA, at which time management needs to re-assess its finance lease model.

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama masa depan dan sumber estimasi utama lainnya pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun buku berikutnya dibahas di bawah ini:

a. Estimasi cadangan

Manajemen menentukan taksiran masa manfaat dan biaya penyusutan yang terkait untuk sumur produksi dan fasilitas sumur Grup. Pakar manajemen internal Grup memutakhirkan perkiraan cadangan uap panas bumi setiap tahun, dengan mempertimbangkan data geologis dan teknis dari setiap sumur produksi dan kondisi lapangan secara keseluruhan pada tanggal penilaian. Input data utama dalam perkiraan cadangan uap panas bumi adalah perkiraan tingkat produksi uap panas bumi selama umur operasi panas bumi dalam jangka waktu JOC antara entitas anak dan PGE, dan asumsi utama yang digunakan adalah perkiraan tingkat penurunan alami.

Karena asumsi geologis dan teknis yang digunakan untuk memperkirakan cadangan uap panas bumi bervariasi dari waktu ke waktu dan karena data geologis dan teknis tambahan dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan uap panas bumi dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan estimasi cadangan uap panas bumi yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil keuangan dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, termasuk nilai tercatat sumur produksi dan fasilitas sumur, yang mungkin terpengaruh karena perubahan biaya penyusutan yang dihitung berdasarkan UoP.

b. Pemulihan nilai aset tidak berwujud dan goodwill

Grup menilai setiap aset atau UPK setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikator penurunan nilai, estimasi formal atas jumlah terpulihkan dibuat, yang dianggap lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai ("ViU"). Penilaian ini membutuhkan penggunaan estimasi dan asumsi signifikan seperti tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan tahunan.

Estimasi dan asumsi ini dipengaruhi oleh risiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa perubahan keadaan akan mempengaruhi proyeksi tersebut, yang dapat berdampak pada jumlah terpulihkan aset dan/atau UPK.

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

a. Reserve estimates

Management determines the estimated useful lives and related depreciation charges for the Group's production wells and well facilities. The Group's internal management expert updates the geothermal steam reserves estimate on an annual basis, by considering the geological and technical data from each production well and the overall field condition as of the assessment date. The key data input in the geothermal steam reserves estimate is the estimated geothermal steam production rate over the life of the geothermal operations within the term of the JOC between the subsidiaries and PGE, and the key assumption used is the expected natural decline rate.

Because the geological and technical assumptions used to estimate geothermal steam reserves vary from period to period and because additional geological and technical data is generated during the course of operations, estimates of geothermal steam reserves may change from period to period. Changes in estimated geothermal steam reserves may affect the Group's financial results and financial position in a number of ways, including the carrying values of the production wells and well facilities, that may be affected due to changes in depreciation charges that were calculated on a UoP basis.

b. Recoverability of intangible assets and goodwill

The Group assesses each asset or CGU each reporting period to determine whether any indication of impairment exists. Where an indicator of impairment exists, a formal estimate of the recoverable amount is made, which is considered to be the higher of fair value less costs of disposal and value in use ("ViU"). These assessments require the use of estimates and significant assumptions such as discount rate and annual growth rate.

These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty. Therefore, there is a possibility that changes in circumstances will affect these projections, which may affect the recoverable amount of assets and/or CGUs.

Nilai wajar ditentukan sebagai jumlah yang akan diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi wajar antara pihak yang berpengetahuan dan berkeinginan.

Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kininya dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Dalam membuat estimasi ini, manajemen mengandalkan kinerja masa lalu dan ekspektasi perkembangan pasar di Indonesia.

Fair value is determined as the amount that would be obtained from the sale of the asset in an arm's length transaction between knowledgeable and willing parties.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In making these estimates, management has relied on past performance and its expectations of market developments in Indonesia.

c. Pajak penghasilan

Ketidakpastian muncul sehubungan dengan interpretasi peraturan perpajakan yang rumit dan jumlah serta waktu penghasilan kena pajak di masa mendatang. Mengingat luasnya hubungan bisnis internasional dan sifat jangka panjang dan kompleksitas perjanjian kontraktual yang ada, perbedaan yang timbul antara hasil aktual dan asumsi yang dibuat, atau perubahan asumsi tersebut di masa mendatang, dapat memerlukan penyesuaian di masa mendatang terhadap ketentuan perpajakan yang telah dicatat. Grup menetapkan provisi, berdasarkan perkiraan yang wajar, untuk kemungkinan konsekuensi audit oleh otoritas pajak di negara tempat Grup beroperasi.

Besarnya ketentuan tersebut didasarkan pada berbagai faktor, seperti pengalaman pemeriksaan pajak sebelumnya dan perbedaan interpretasi peraturan perpajakan oleh entitas kena pajak dan otoritas pajak yang bersangkutan. Perbedaan penafsiran tersebut dapat timbul pada berbagai macam persoalan tergantung pada kondisi yang berlaku.

Pertimbangan yang signifikan diperlukan dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan biaya tertentu selama estimasi penyisihan pajak penghasilan. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas atas masalah pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Apabila hasil pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang semula dicatat, perbedaan tersebut akan mempengaruhi ketentuan pajak penghasilan dan pajak tangguhan pada periode penetapan tersebut. Nilai tercatat utang pajak penghasilan dan liabilitas pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 24 pada laporan keuangan konsolidasian.

Semua rugi pajak yang belum digunakan diakui sebagai aset pajak tangguhan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga rugi tersebut dapat dimanfaatkan. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan kemungkinan waktu dan tingkat laba kena pajak di masa depan bersamaan dengan strategi perencanaan pajak di masa depan.

c. Income tax

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. Given the wide range of international business relationships and the long-term nature and complexity of existing contractual agreements, differences arising between the actual results and the assumptions made, or future changes to such assumptions, could necessitate future adjustments to tax provisions already recorded. The Group establishes provisions, based on reasonable estimates, for possible consequences of audits by the tax authorities of the respective countries in which it operates.

The amount of such provisions is based on various factors, such as experience of previous tax audits and differing interpretations of tax regulations by the taxable entity and the relevant tax authority. Such differences of interpretation may arise on a wide variety of issues depending on the prevailing conditions.

Significant judgement is required in determining the capital allowances and deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognises liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will affect the income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made. The carrying amounts of income tax payable and deferred tax liabilities are disclosed in Note 24 to the consolidated financial statements.

All unused tax losses are recognised as deferred tax assets to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Grup beroperasi di bawah pengaturan JOC. Pertimbangan diperlukan untuk menentukan penyisihan bagian Pemerintah dan pajak lainnya atau pungutan pemerintah, termasuk Pertamina Production Allowance, dan pemulihan klaim pengembalian pajak. Apabila hasil pajak final dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang awalnya dicatat, selisih tersebut akan dicatat dalam laba rugi pada periode penentuan tersebut dibuat.

The Group operates under the JOC arrangement. Judgement is required to determine the provision for Government share and other taxes or government charges, including the Pertamina Production Allowance, and recoverability of claims for tax refunds. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will be recorded in profit or loss in the period in which such a determination is made.

5. AKUISISI ENTITAS ANAK DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK NON-PENGENDALI

a. Akuisisi 51% kepemilikan di PT Sidrap Bayu Energi Tahap Dua - sebelumnya PT UPC Sidrap Bayu Energi Tahap Dua (“SIDRAP2”)

Pada tanggal 15 Desember 2023, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 10.200 saham yang mewakili sekitar 51% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor SIDRAP 2 yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia V Limited ("UPCRAV") dan UPC Sidrap Expansion (HK) Ltd. ("UPCSE"), selaku para penjual, dengan imbalan yang dibayarkan sebesar AS$1.346 serta penerimaan novasi sebagian piutang atas development loan participation untuk SIDRAP 2 sejumlah AS$19 dari PT UPC Renewables Indonesia ("UPCRI") dan AS$3.805 dari UPC Renewables Limited ("UPCRL").

Transaksi akuisisi saham ini dicatat sebagai akuisisi aset dan bukan sebagai kombinasi bisnis karena tidak ada input, proses dan output yang melekat pada aset tersebut yang memenuhi definisi bisnis berdasarkan PSAK.

Pada tanggal 17 Januari 2024, BWE membayarkan kewajiban sebelum penyelesaiaan sebesar AS$2.694.

Rincian aset dan liabilitas teridentifikasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

5. ACQUISITION OF SUBSIDIARY AND TRANSACTIONS WITH NON-CONTROLLING INTERESTS

a. Acquisition of 51% interest in PT Sidrap Bayu Energi Tahap Dua - formerly PT UPC Sidrap Bayu Energi Tahap Dua (“SIDRAP2”)

On 15 December 2023, BWE completed the acquisition of 10,200 shares representing approximately 51% of the total issued and paid-up capital of SIDRAP 2 from UPC Renewables Asia V Limited ("UPCRAV") and UPC Sidrap Expansion (HK) Ltd. ("UPCSE"), as the sellers, for a consideration paid of US$1,346 and the novation of a portion of the receivables in relation to the development loan participation for SIDRAP 2 in the amount of US$19 from PT UPC Renewables Indonesia ("UPCRI") and US$3,805 from UPC Renewables Limited ("UPCRL").

This share acquisition transaction has been accounted for as an asset acquisition rather than a business combination as there is no input, process and output attached to the assets that would meet the definition of a business under PSAK.

On 17 January 2024, BWE paid pre-completion liabilities amounting to US$2,694.

The details of the identifiable assets and liabilities acquired are as follows:

	15 Desember/ December 15, 2023	
Kas	2	Cash
Biaya pengembangan proyek	14.951	Project development costs
Aset tetap	100	Property, plant and equipment
Aset lancar lain-lain	3	Other current assets
Aset tidak lancar lain-lain	345	Other non-current assets
Utang usaha	(35)	Trade payables
Utang lain-lain	(12.474)	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	(97)	Accrued expenses
Utang pajak lain-lain	(156)	Other taxes payable
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	2.639	Fair value of the identifiable net assets acquired
Kepentingan nonpengendali (49%)	(1.293)	Non-controlling interest (49%)
Imbalan kas yang dibayar	1.346	Cash consideration paid

Rekonsiliasi kas yang dibayarkan dan diterima ke laporan arus kas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of cash paid and received to the statement of cash flows is as follows:

	15 Desember/ December 15, 2023	
Imbalan kas yang dibayar	(1.346)	Cash consideration paid
Pembayaran novasi pinjaman	(3.824)	Novation of loans paid
Dikurangi: saldo kas yang diperoleh	2	Less: balance of cash acquired
Arus kas keluar – aktivitas investasi	(5.168)	Cash outflow – investing activities

b. Akuisisi 51% kepemilikan di PT Lombok Timur Bayu Energi - sebelumnya PT UPC Lombok Timur Bayu Energi) ("LOMBOK")

Pada tanggal 3 Januari 2024, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 10.200 saham yang mewakili sekitar 51% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor LOMBOK yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia VIII Limited dan UPC Lombok (HK) Ltd., selaku para penjual, dengan imbalan yang dibayarkan sebesar AS$3.122 serta penerimaan novasi Sebagian piutang atas development loan participation untuk LOMBOK sejumlah AS$81 dari PT UPC Renewables Indonesia ("UPCRI") dan AS$171 dari UPC Renewables Limited ("UPCRL").

Transaksi akuisisi saham ini dicatat sebagai akuisisi aset dan bukan sebagai kombinasi bisnis karena tidak ada input, proses dan output yang melekat pada aset tersebut yang memenuhi definisi bisnis berdasarkan PSAK.

Pada tanggal 17 Januari 2024, BWE membayarkan kewajiban sebelum penyelesaiaan sebesar AS$587.

Rincian aset dan liabilitas teridentifikasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

b. Acquisition of 51% interest in PT Lombok Timur Bayu Energi - formerly PT UPC Lombok Timur Bayu Energi) ("LOMBOK")

On 3 January 2024, BWE completed the acquisition of 10,200 shares representing approximately 51% of the total issued and paid-up capital of LOMBOK from UPC Renewables Asia VIII Limited and UPC Lombok (HK) Ltd., as the sellers, for a consideration paid of US$3,122 and the novation of a portion of the receivables in relation to the development loan participation for LOMBOK in the amount of US$81 from PT UPC Renewables Indonesia ("UPCRI") and US$171 from UPC Renewables Limited (“UPCRL”).

This share acquisition transaction has been accounted for as an asset acquisition rather than a business combination as there is no input, process and output attached to the assets that would meet the definition of a business under PSAK.

On 17 January 2024, BWE paid pre-completion liabilities amounting to US$587.

The details of the identifiable assets and liabilities acquired are as follows:

	3 Januari/ January 3, 2024	
Kas	1	Cash
Piutang usaha dan lain-lain – lancar	44	Trade and other receivables – current
Aset lancar lain-lain	2	Other current assets
Aset tetap	37	Property, plant and equipment
Biaya pengembangan proyek	7.700	Project development costs
Beban yang masih harus dibayar	(962)	Accrued expenses
Utang pajak	(52)	Taxes payable
Utang usaha dan lain-lain – lancar	(156)	Trade and other payables – current
Utang usaha dan lain-lain – tidak lancar	(492)	Trade and other payables – non current
Total aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	6.122	Total identifiable net assets acquired
Kepentingan nonpengendali (49%)	(3.000)	Non-controlling interest (49%)
Imbalan kas yang dibayar	3.122	Cash consideration paid

Rekonsiliasi kas yang dibayarkan dan diterima ke laporan arus kas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of cash paid and received to the statement of cash flows is as follows:

	3 Januari/ January 3, 2024	
Imbalan kas yang dibayar	(3.122)	Cash consideration paid
Pembayaran novasi pinjaman	(252)	Novation of loans paid
Dikurangi: saldo kas yang diperoleh	1	Less: balance of cash acquired
Arus kas keluar – aktivitas investasi	(3.373)	Cash outflow – investing activities

c. Akuisisi 51% kepemilikan di PT Sukabumi Bayu Energi - sebelumnya PT UPC Sukabumi Bayu Energi) ("SUKABUMI")

Pada tanggal 3 Januari 2024, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 19.364 saham yang mewakili sekitar 51% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor SUKABUMI yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia IV Limited dan UPC Sukabumi (HK) Ltd., selaku para penjual, dengan imbalan yang dibayarkan sebesar AS$1.560 serta penerimaan novasi sebagian piutang atas development loan participation untuk SUKABUMI sejumlah AS$312 dari PT UPC Renewables Indonesia (“UPCRI”) dan AS$2.184 dari UPC Renewables Limited ("UPCRL").

Transaksi akuisisi saham ini dicatat sebagai akuisisi aset dan bukan sebagai kombinasi bisnis karena tidak ada input, proses dan output yang melekat pada aset tersebut yang memenuhi definisi bisnis berdasarkan PSAK.

Pada tanggal 17 Januari 2024, BWE membayarkan kewajiban sebelum penyelesaiaan sebesar AS$1.875.

Rincian aset dan liabilitas teridentifikasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

c. Acquisition of 51% interest in PT Sukabumi Bayu Energi - formerly PT UPC Sukabumi Bayu Energi) ("SUKABUMI")

On 3 January 2024, BWE completed the acquisition of 19,364 shares representing approximately 51% of the total issued and paid-up capital of SUKABUMI from UPC Renewables Asia IV Limited and UPC Sukabumi (HK) Ltd., as the sellers, for a consideration paid of US$1,560 and the novation of a portion of the receivables in relation to the development loan participation for SUKABUMI in the amount of US$312 from PT UPC Renewables Indonesia ("UPCRI") and US$2,184 from UPC Renewables Limited ("UPCRL").

This share acquisition transaction has been accounted for as an asset acquisition rather than a business combination as there is no input, process and output attached to the assets that would meet the definition of a business under PSAK.

On 17 January 2024, BWE paid pre-completion liabilities amounting to US$1,875.

The details of the identifiable assets and liabilities acquired are as follows:

	3 Januari/ January 3, 2024	
Kas	1	Cash
Piutang usaha dan lain-lain – lancar	634	Trade and other receivables – current
Persediaan	21	Inventories
Biaya pengembangan proyek	10.967	Project development costs
Aset tetap	46	Property, plant and equipment
Aset lancar lain-lain	15	Other current assets
Utang usaha dan lain-lain – lancar	(508)	Trade and other payables – current
Utang usaha dan lain-lain – tidak lancar	(4.901)	Trade and other payables – non current
Beban yang masih harus dibayar	(3.022)	Accrued expenses
Utang pajak	(194)	Taxes payable
Total aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	3.059	Total identifiable net assets acquired
Kepentingan nonpengendali (49%)	(1.499)	Non-controlling interest (49%)
Imbalan kas yang dibayar	1.560	Cash consideration paid

Rekonsiliasi kas yang dibayarkan dan diterima ke laporan arus kas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of cash paid and received to the statement of cash flows is as follows:

	3 Januari/ January 3, 2024	
Imbalan kas yang dibayar	(1.560)	Cash consideration paid
Pembayaran novasi pinjaman	(2.496)	Novation of loans paid
Dikurangi: saldo kas yang diperoleh	1	Less: balance of cash acquired
Arus kas keluar – aktivitas investasi	(4.055)	Cash outflow – investing activities

d. Akuisisi 99.99% kepemilikan di PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SBE")

SBE saat ini mengoperasikan pembangkit listrik tenaga angin 75 megawatts ("MW") berdasarkan Power Purchase Agreement ("PPA") dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") untuk periode selama 30 tahun dari tanggal 5 April 2018.

Pada tanggal 2 April 2024, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 515.515 saham A dan 34.368 saham B yang mewakili sekitar 99.99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor SBE yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia Holdings Pte. Ltd., ACEN Renewables International Pte. Ltd., UPC Renewabales Asia III Limited, Sidrap (HK) Limited, dan Sunedison Sidrap B.V., selaku para penjual, dengan imbalan yang dibayarkan sebesar AS$101.927. Setelahnya, sesuai dengan Sales Purchase Agreement, Perusahaan menunjuk pihak luar untuk melakukan verifikasi atas pembayaran dan menyimpulkan bahwa diperlukan tambahan pembayaran sebesar AS$6,351.

Transaksi akuisisi saham ini dicatat sebagai sebagai kombinasi bisnis sesuai definisi bisnis berdasarkan PSAK.

Perusahaan mengakui kontrak pelanggan, liabilitas pajak tangguhan dan goodwill masing - masing sebesar AS$78.709, AS$20.941 dan AS$12.051 pada saat pengalihan dilakukan.

d. Acquisition of 99.99% interest in PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SBE")

SBE currently operates a 75 MW wind-powered electricity plant under a Power Purchase Agreement ("PPA") with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") for a period of 30 years from 5 April 2018.

On 2 April 2024, BWE completed the acquisition of 515.515 of class A shares and 34,368 of class B shares representing approximately 99.99% of the total issued and paid-up capital of SBE from UPC Renewables Asia Holdings Pte. Ltd., ACEN Renewables International Pte. Ltd., UPC Renewabales Asia III Limited, Sidrap (HK) Limited, dan Sunedison Sidrap B.V., as the sellers, for a consideration paid of US$101,927. Subsequently, in accordance with the Sales Purchase Agreement, the company engaged an external party to perform verification of the consideration paid and has concluded that an additional payment of US$6,351 is required.

This share acquisition transaction has been accounted for a business combination which meet the definition of a business under PSAK.

The Company recognised customer contract, deferred tax liabilities and goodwill amounting to US$78,709, US$20,941 and US$12,051 respectively at the time the transfer took place.

Nilai wajar atas aset dan liabilitas teridentifikasi SBE pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

The fair values of the identifiable assets and liabilities of SBE as at the date of acquisition were:

	2 April/ April 2, 2024	
Kas	65	Cash
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	14.849	Restricted cash in banks
Piutang usaha dan lain-lain	2.308	Trade and other receivables
Persediaan	231	Inventories
Pajak dibayar di muka	1.497	Prepaid taxes
Aset lancar lain-lain	437	Other current assets
Aset tetap	108.523	Property, plant and equipment
Aset keuangan derivatif	10.776	Derivative financial assets
Aset tidak berwujud	26	Intangible assets
Aset tidak lancar lain-lain	209	Other non current assets
Utang usaha dan lain-lain	(195)	Trade and other payables
Beban yang masih harus dibayar	(8.988)	Accrued expenses
Liabilitas pajak tangguhan	(3.514)	Deferred tax liabilities
Utang pajak	(1.465)	Taxes payable
Pinjaman	(86.224)	Borrowing
Liabilitas imbalan kerja	(76)	Employment benefits obligation
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	38.459	Fair value of the identifiable net assets acquired
Kontrak pelanggan	78.709	Customer contract
Liabilitas pajak tangguhan	(20.941)	Deferred tax liabilities
Goodwill	12.051	Goodwill
Total imbalan	108.278	Total consideration
Dikurangi: saldo kas yang diperoleh	(14.914)	Less: balance of cash acquired
Arus kas keluar – aktivitas investasi	93.364	Cash outflow – investing activities

e. Akuisisi 99.96% kepemilikan di PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia - sebelumnya PT UPC Operation and Maintenance Indonesia) ("OMI")

Pada tanggal 2 April 2024, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 2.499 saham yang mewakili sekitar 99.96% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor OMI yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia Holdings Pte. Ltd., selaku para penjual, dengan imbalan yang dibayarkan sebesar AS$292.

Transaksi akuisisi saham ini dicatat sebagai sebagai kombinasi bisnis sesuai definisi bisnis berdasarkan PSAK.

Perusahaan mengakui biaya goodwill sebesar AS$162 pada saat pengalihan dilakukan.

e. Acquisition of 99.96% interest in PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia - formerly PT UPC Operation and Maintenance Indonesia) ("OMI")

On 2 April 2024, BWE completed the acquisition of 2,499 shares representing approximately 99.96% of the total issued and paid-up capital of OMI from UPC Renewables Asia Holdings Pte. Ltd., as the sellers, for a consideration paid of US$292.

This share acquisition transaction has been accounted for a business combination which meet the definition of a business under PSAK.

The Company recognised goodwill amounting to US$162 at the time the transfer took place.

Nilai wajar atas aset dan liabilitas teridentifikasi OMI pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

The fair values of the identifiable assets and liabilities of OMI as at the date of acquisition were:

	2 April/ April 2, 2024	
Kas	81	Cash
Piutang usaha dan lain-lain	61	Trade and other receivables
Aset lancar lain-lain	19	Other current assets
Aset tetap	11	Property, plant and equipment
Utang usaha dan lain-lain	(9)	Trade and other payables
Beban yang masih harus dibayar	(3)	Accrued expenses
Utang pajak	(12)	Taxes payable
Liabilitas imbalan kerja	(18)	Employment benefits obligation
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	130	Fair value of the identifiable net assets acquired
Kepentingan nonpengendali (0,04%)	0	Non-controlling interest (0.04%)
Goodwill	162	Goodwill
Imbalan kas yang dibayar	292	Cash consideration paid
Dikurangi: saldo kas yang diperoleh	(81)	Less: balance of cash acquired
Arus kas keluar – aktivitas investasi	211	Cash outflow – investing activities

6. KAS DAN SETARA KAS

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2025	2024	
Kas	93	94	Cash on hand
Kas di bank – pihak ketiga:			Cash in banks – third parties:
Rupiah			Rupiah
PT Bank DBS Indonesia	4.388	2.855	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.257	4.019	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.374	826	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	620	2.005	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	176	128	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dolar AS			US Dollars
Bank DBS Ltd. (Singapura)	86.950	127.218	DBS Bank Ltd. (Singapore)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.613	3.491	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.003	2.984	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DBS Indonesia	1.986	4.384	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	1.217	686	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	855	13.989	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Mata uang asing lainnya	102	45	Other foreign currencies
Deposito Berjangka - Dolar AS:			Time deposit - US Dollars:
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.350	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	114.985	162.724	Total

Tidak ada kas dan setara kas yang dimiliki oleh pihak berelasi. Tidak ada kas dan setara kas yang dijaminkan.

There is no cash and cash equivalents held with related parties. There is no cash and cash equivalents pledged as collateral.

Deposito berjangka yang dimiliki Grup memiliki jatuh tempo kurang dari tiga bulan sejak penempatannya, otomatis diperpanjang dan tidak dijaminkan.

The time deposit owned by the Group has a maturity date less than three months since the placement, automatically rolls over and is not pledged.

Tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The contractual interest rates on the time deposit during the year were as follows:

	2025	2024	
Dolar AS	4,25%	-	US Dollars

7. KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

7. RESTRICTED CASH AND TIME DEPOSITS

	2025	2024	
Kas di bank – pihak ketiga:			Cash in banks – third parties:
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.313	3.382	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2.028	482	PT Bank Central Asia Tbk
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)	1.281	1.741	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10	11	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dolar AS			US Dollars
Bank DBS Ltd. (Singapura)	156.449	204.175	DBS Bank Ltd. (Singapore)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)	36.191	18.823	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)
Bangkok Bank Public Company Ltd.	29.879	23.949	Bangkok Bank Public Company Ltd.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	353	2.274	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Deposito Berjangka:			Time deposit:
Rupiah			Rupiah
PT Bank DBS Indonesia	46.373	48.152	PT Bank DBS Indonesia
Dolar AS			US Dollars
PT Bank DBS Indonesia	39.000	39.000	PT Bank DBS Indonesia
Jumlah	314.877	341.989	Total

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya merupakan akun cadangan wajib untuk senior secured notes dan deposito berjangka sebagai jaminan untuk utang bank (Catatan 16).

Restricted cash and time deposit represents mandatory reserve accounts for the senior secured notes and time deposit as a guarantee for bank loan arrangement (Note 16).

Tidak ada kas atau deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan di pihak berelasi.

There is no restricted cash or time deposit held with related parties.

Tingkat suku bunga tahunan atas kas yang dibatasi penggunaannya pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Annual interest rates on restricted cash during the year are as follows:

	2025	2024	
Dolar AS	0,05% - 3,10%	0,05% - 3,10%	US Dollars

Deposito berjangka yang dimiliki Grup memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun sejak penempatannya.

Time deposit owned by the Group have maturity dates less than one year since the placement.

Tingkat suku bunga tahunan atas deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Annual interest rates on restricted time deposit during the years are as follows:

	2025	2024	
Dolar AS	3,00%	3,00%	US Dollars
Rupiah	3,00%	3,00%	Rupiah

8. PIUTANG USAHA DAN LAIN-LAIN

8. TRADE AND OTHER RECEIVABLES

	2025	2024	
Bagian lancar			**Current portion**
Pihak ketiga			Third parties
Piutang usaha	101.323	106.352	Trade receivables
Piutang lain-lain:			Other receivables:
Bonus produksi	1.508	1.773	Production bonus
Lainnya	4.055	4.504	Others
Subjumlah	106.886	112.629	Subtotal
Bagian tidak lancar			**Non-current portion**
Pihak ketiga			Third parties
Piutang usaha	-	415	Trade receivables
Piutang lain-lain:			Other receivables:
Pihak ketiga	9.872	9.090	Third parties
Pembayaran di muka terkait dengan klaim audit pemerintah (Catatan 30.a)	12.801	13.741	Prepayment related to government audit claims (Note 30.a)
Piutang PPN	75.134	60.002	VAT receivables
Subjumlah	97.807	83.248	Subtotal
Dikurangkan:			Less:
Cadangan kerugian kredit	(14.242)	(14.357)	Credit loss allowances
Jumlah pihak ketiga	83.565	68.891	Total third parties
Jumlah piutang usaha dan piutang lain-lain, bagian lancar dan tidak lancar	190.450	181.520	Total trade and other receivables, current and non-current portion
Berdasarkan mata uang:			By currency:
Dolar AS	101.095	119.335	US Dollars
Rupiah	89.355	62.185	Rupiah
Jumlah piutang usaha dan piutang lain-lain, bagian lancar dan tidak lancar	190.450	181.520	Total trade and other receivables, current and non-current portion

Piutang usaha

Seluruh piutang usaha berasal dari PLN. Piutang usaha tidak dikenakan bunga dan umumnya dibayar dengan jangka waktu 30–45 hari. Mereka diakui sebesar jumlah faktur aslinya, yang mewakili nilai wajarnya pada pengakuan awal.

Trade receivables

All trade receivables are from PLN. Trade receivables are non-interest bearing and are generally paid on 30–45 days term. They are recognised at their original invoice amounts, which represent their fair value on initial recognition.

	2025	2024	
Berdasarkan umur piutang			By aging of receivable
Belum jatuh tempo	101.323	103.988	Not yet due
Sudah jatuh tempo:			Past due:
1 - 30 hari	-	-	1 - 30 days
31 - 60 hari	-	-	31 - 60 days
61 - 90 hari	-	-	61 - 90 days
> 90 hari	-	2.779	> 90 days
Jumlah piutang usaha, bagian lancar dan tidak lancar	101.323	106.767	Total trade receivables, current and non-current portion

Piutang lain-lain (lancar)

Piutang lain-lain (lancar) dari pihak ketiga terutama berkaitan dengan bonus produksi tahunan yang dibayarkan kepada pemerintah daerah dan akan diganti oleh Direktorat Jenderal Anggaran (“DJA”) sesuai dengan Peraturan ESDM No. 23/2017.

Other receivables (current)

Other receivables (current) from third parties mainly pertain to annual production bonus paid to local government which will be reimbursed by the Directorate General of Budget (“DGB”) in accordance with MoEMR Regulation No. 23/2017.

Piutang lain-lain (tidak lancar)

Piutang lain-lain dari pihak ketiga tidak dikenakan bunga dan harus diselesaikan secara tunai. Pembayaran tidak diharapkan dalam waktu 12 bulan sejak akhir periode pelaporan.

Other receivables (non-current)

Other receivables from third parties are non-interest bearing and are to be settled in cash. Repayments are not expected within 12 months from the end of the reporting period.

Piutang PPN

Piutang PPN merupakan jumlah yang akan diganti oleh Pemerintah Indonesia setelah Grup memulai pembayaran bagian Pemerintah, yang didefinisikan dalam peraturan pajak panas bumi sebagai 34% dari pendapatan usaha bersih. Bagian Pemerintah akan terutang setelah akumulasi rugi pajak telah digunakan atau kadaluarsa. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK-04/1992 (“KMK 766”) dan kemudian diubah dengan No. 209/KMK.04/1998, Grup dapat meminta restitusi PPN sampai dengan jumlah yang dibayarkan untuk bagian Pemerintah.

Termasuk di dalam piutang PPN adalah piutang PPN tangguhan yang merupakan piutang PPN tangguhan yang belum dibayar dari kantor pajak sehubungan dengan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak badan dan orang asing (“BADORA”) pada tahun 2000 (Catatan 30.a).

Selama tahun 2025, Grup menerima restitusi PPN dari Pemerintah Indonesia sebesar AS$2.762 (2024: AS$294).

VAT receivables

VAT receivables represent amounts that will be reimbursed by the GOI after the Group has commenced payment of the Government share, which is defined in the geothermal tax regulation as 34% of net operating income. The Government share will be payable after the tax loss carry forward has either been utilised or expired. Based on the Decision Letter of MoF No. 766/KMK-04/1992 (“KMK 766”) and subsequently amended by No. 209/KMK.04/1998, the Group can request VAT refund up to the amount paid for the Government share.

Included within VAT receivables is deferred VAT receivables which represents the unpaid deferred VAT receivable from the tax office in relation to the tax assessment letter issued by the foreign companies and individuals (“BADORA”) tax office in year 2000 (Note 30.a).

During 2025, the Group received reimbursement of VAT from the GOI amounting to US$2,762 (2024: US$294).

Mutasi cadangan kerugian kredit atas piutang usaha dan piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for credit losses on trade and other receivables are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal tahun	14.357	14.512	At the beginning of the year
Penambahan/(pengurangan):			Addition/(deduction):
Sengketa penjualan uap ke PT PLN Indonesia Power (“PT PIP”) (Catatan 30.c)	(35)	(53)	Dispute on steam sales to PT PLN Indonesia Power (“PT PIP”) (Note 30.c)
Perbedaan translasi mata uang	(80)	(102)	Currency translation difference
Saldo akhir tahun	14.242	14.357	At the end of the year

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit yang dibentuk cukup untuk menutupi penurunan nilai dari piutang usaha dan piutang lain-lain.

Management believes the established allowance for credit losses is adequate to cover the impairment of trade and other receivables.

9. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

9. FINANCE LEASE RECEIVABLES

Tabel berikut menyajikan analisa jatuh tempo piutang sewa pembiayaan, yang menunjukkan pembayaran sewa tidak didiskontokan yang akan diterima pada tahun pelaporan:

The following table presents the maturity analysis of finance lease receivables, which shows the undiscounted finance lease payments to be received in the reporting years:

	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Jumlah piutang sewa pembiayaan			Total finance lease receivable
Tidak lebih dari satu tahun	54.169	48.552	Not later than one year
Lebih dari satu tahun namun tidak lebih dari lima tahun	216.677	194.210	Later than one year but not later than five years
Lebih dari lima tahun	537.468	529.852	Later than five years
Jumlah piutang sewa pembiayaan yang tidak didiskontokan	808.314	772.614	Total undiscounted finance lease receivables
Dikurangi: penghasilan keuangan yang ditangguhkan	(412.025)	(409.165)	Less: unearned finance income
Nilai kini piutang sewa pembiayaan	396.289	363.449	Present value of finance lease receivables
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(12.299)	(9.883)	Less: current portion
Bagian jangka panjang	383.990	353.566	Non-current portion

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, piutang sewa pembiayaan diakui berdasarkan persyaratan JOC dan ESC Salak dan Darajat, yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 116 “Sewa”. Kontrak tersebut memberikan hak eksklusif untuk menggunakan pembangkit listrik yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh Grup sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo kontrak. Piutang sewa pembiayaan ini terkait dengan Salak unit 4–6, Darajat unit 2–3 dan Binary unit.

As of 31 December 2025 and 2024, the finance lease receivables were recognised based on the terms of the Salak and Darajat JOC and ESC, which fall within the scope of PSAK 116 “Leases”. The contracts convey an exclusive right to use the power plants which are built, owned and operated by the Group until the end of the contract maturity date. These finance lease receivables are related to Salak units 4–6, Darajat units 2–3 and Binary unit.

Selama tahun berjalan, piutang sewa pembiayaan meningkat sehubungan dengan unit pembangkit listrik binary yang telah efektif. Pengakuan awal atas nilai investasi neto berjumlah AS$43.757 (Catatan 12).

Pada akhir periode pelaporan, Grup diharuskan untuk menilai pencadangan atas kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk semua piutang. Grup telah menilai dan menentukan bahwa jumlah ECL untuk piutang sewa pembiayaan tidak material pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Realisasi atas pendapatan keuangan yang belum diterima untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS$42.316 (2024: AS$39.633) yang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan pada laba rugi (Catatan 21).

During the year, finance lease receivables increased following the commencement of the binary power generating unit. The initial recognition of the net investment amounted to US$43,757 (Note 12).

At the end of the reporting period, the Group is required to assess an allowance for expected credit losses ("ECL") for all receivables. The Group has assessed and determined that the ECL amount for finance lease receivables is immaterial as of 31 December 2025 and 2024.

Realisation of unearned finance income for the year ended 31 December 2025 amounted to US$42,316 (2024: US$39,633) which was recognised as finance lease income in profit or loss (Note 21).

10. PERSEDIAAN DAN BARANG MODAL DAN PERALATAN

10. INVENTORIES AND CAPITAL SPARES AND EQUIPMENT

	2025	2024	
Persediaan:			**Inventories:**
Suku cadang	20.221	24.757	Spare parts
Pipa	232	364	Pipes
Pelumas dan bahan kimia	271	75	Lubricants and chemicals
Sub-jumlah	20.724	25.196	Sub-total
Dikurangi: provisi atas persediaan tidak bergerak dan usang	(1.853)	(1.895)	Less: provision for slow-moving and obsolete inventories
Jumlah	18.871	23.301	Total
Barang modal dan peralatan:			**Capital spares and equipment:**
Material pemboran	18.347	15.531	Drilling materials
Suku cadang	6.551	5.960	Spare parts
Pipa	1.874	1.245	Pipes
Jumlah	26.772	22.736	Total
Laporan laba rugi konsolidasian:			Consolidated statements of profit or loss:
Biaya perolehan persediaan diakui sebagai biaya pada persediaan dan material di dalam "lain-lain, bersih"	5.966	5.263	Cost of inventories recognised as an expense in supplies and materials in "others, net"

Mutasi saldo provisi atas persediaan tidak bergerak dan usang adalah sebagai berikut:

The movement in the provision for slow-moving and obsolete inventories is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	1.895	1.895	Beginning balance
Pemulihan	(42)	-	Recovery
Saldo akhir	1.853	1.895	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa provisi atas persediaan tidak bergerak dan usang yang ditetapkan memadai untuk menutup resiko penurunan nilai persediaan dan barang modal dan peralatan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Management believes that the provision for slow-moving and obsolete inventories is adequate to cover possible losses on decline in value of inventories and capital spares and equipment as of 31 December 2025 and 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset tetap, properti dalam sewa operasi, persediaan, barang modal dan peralatan diasuransikan terhadap kerugian akibat kerusakan fisik berdasarkan paket polis dengan jumlah pertanggungan asuransi AS$1.622.174 (2024: AS$1.580.306) dan risiko lainnya berdasarkan paket polis dengan pertanggungan asuransi sebesar AS$471.103 (2024: AS$489.167) dari PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Harta Aman Pratama, dan PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari risiko yang dipertanggungkan tersebut.

As of 31 December 2025 and 2024, fixed assets, property on operating lease, inventories and capital spares and equipment were insured against losses by physical damage under a policy package with insurance coverage totalling US$1,622,174 (2024: US$1,580,306) and other risks under a policy package with insurance coverage totalling US$471,103 (2024: US$489.167) from PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Harta Aman Pratama, and PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, which in management's opinion is adequate to cover any possible losses that may arise from such insured risks.

11. INVESTASI OBLIGASI

Pada bulan Oktober 2025, Grup melakukan pembelian Surat Utang Jangka Panjang yang Ditawarkan Tanpa Penawaran Umum Secara Bertahap oleh Danantara Investment Management (Persero) Tahun 2025 Tahap I ("SUJP") dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A SUJP sebesar Rp 750 miliar (setara dengan AS$44.690,5) dengan jangka waktu jatuh tempo Oktober 2030;
- Seri B SUJP sebesar Rp 750 miliar (setara dengan AS$44.690,5) dengan jangka waktu jatuh tempo Oktober 2032.

Nilai wajar atas SUJP diukur menggunakan hierarki pengukuran Tingkat 3.

11. INVESTMENT IN BONDS

In October 2025, the Group purchased Long-Term Debt Securities Offered Without a Public Offering in Stages by Danantara Investment Management (Persero) Year 2025 Phase I ("SUJP") in the following details:

- Series A SUJP in amount of Rp 750 billion (equivalent to US$44,690.5) with a maturity period of October 2030;
- Series B SUJP in amount of Rp 750 billion (equivalent to US$44,690.5) with a maturity period of October 2032.

The fair value of the SUJP is measured using the measurement hierarchy Level 3.

12. ASET TETAP / 12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2025	Penambahan/ Additions	Transfer/ Transfers	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment	31 Desember/ December 31, 2025	
Biaya perolehan						**Acquisition costs**
Hak guna tanah	570	-	-	-	570	Land rights
Properti	8.233	-	-	-	8.233	Property
Mesin, telekomunikasi dan peralatan otomotif	8.411	91	23.047	(13)	31.536	Machineries, telecommunication and automotive equipment
Sumur produksi dan fasilitas sumur	747.679	695	4.288	-	752.662	Production wells and well facilities
Pembangkit listrik	144.141	90	1.057	-	145.288	Power plant
Bangunan dan infrastruktur	37.389	9	90	-	37.488	Buildings and infrastructure
Perabotan dan perlengkapan	3.731	-	111	-	3.842	Furniture and fixtures
Aset dalam pembangunan	132.882	140.367	(105.618)	-	167.631	Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	1.083.036	141.252	(77.025)	(13)	1.147.250	Total acquisition costs
Akumulasi penyusutan						**Accumulated depreciation**
Hak guna tanah	(250)	(16)	-	-	(266)	Land rights
Properti	(2.689)	(347)	-	-	(3.036)	Property
Mesin, telekomunikasi dan peralatan otomotif	(7.118)	(1.747)	-	17	(8.848)	Machineries telecommunication and automotive equipment
Sumur produksi dan fasilitas sumur	(170.072)	(44.922)	-	-	(214.994)	Production wells and well facilities
Pembangkit listrik	(43.709)	(4.140)	-	-	(47.849)	Power plant
Bangunan dan infrastruktur	(20.308)	(2.383)	-	-	(22.691)	Buildings and infrastructure
Perabotan dan perlengkapan	(2.932)	(560)	-	-	(3.492)	Furniture and fixtures
Jumlah akumulasi penyusutan	(247.078)	(54.115)	-	17	(301.176)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	835.958				846.074	Net book value

	1 Januari/ January 1, 2024	Penambahan sehubungan dengan akuisisi entitas anak/ Addition related to acquisition of subsidiary	Penambahan/ Additions	Transfer/ Transfers	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment	31 Desember/ December 31, 2024	
Biaya perolehan							**Acquisition costs**
Hak guna tanah	263	398	-	(91)	-	570	Land rights
Properti	8.233	-	-	-	-	8.233	Property
Mesin, telekomunikasi dan peralatan otomotif	5.630	2.193	66	537	(15)	8.411	Machineries, telecommunication and automotive equipment
Sumur produksi dan fasilitas sumur	643.868	-	1	103.810	-	747.679	Production wells and well facilities
Pembangkit listrik	-	144.127	14	-	-	144.141	Power plant
Bangunan dan infrastruktur	35.735	1.648	6	-	-	37.389	Buildings and infrastructure
Perabotan dan perlengkapan	3.555	103	53	20	-	3.731	Furniture and fixtures
Aset dalam pembangunan	59.489	425	114.949	(41.973)	(8)	132.882	Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	756.773	148.894	115.089	62.303	(23)	1.083.036	Total acquisition costs
Akumulasi penyusutan							**Accumulated depreciation**
Hak guna tanah	(220)	-	(30)	-	-	(250)	Land rights
Properti	(2.342)	-	(347)	-	-	(2.689)	Property
Mesin, telekomunikasi dan peralatan otomotif	(5.401)	(1.405)	(298)	-	(14)	(7.118)	Machineries telecommunication and automotive equipment
Sumur produksi dan fasilitas sumur	(135.404)	-	(34.668)	-	-	(170.072)	Production wells and well facilities
Pembangkit listrik	-	(38.275)	(5.434)	-	-	(43.709)	Power plant
Bangunan dan infrastruktur	(17.442)	(508)	(2.358)	-	-	(20.308)	Buildings and infrastructure
Perabotan dan perlengkapan	(2.319)	(89)	(524)	-	-	(2.932)	Furniture and fixtures
Jumlah akumulasi penyusutan	(163.128)	(40.277)	(43.659)	-	(14)	(247.078)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	593.645					835.958	Net book value

Beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dibebankan sebagai beban operasi adalah sebagai berikut:

Depreciation and amortisation expenses for the years ended 31 December 2025 and 2024 charged as operating expenses were as follows:

	2025	2024	
Depresiasi aset tetap	(54.115)	(43.659)	Property, plant and equipment depreciation
Depresiasi aset sewa operasi (Catatan 13)	(28.168)	(28.823)	Property on operating lease depreciation (Note 13)
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 14)	(3.466)	(2.646)	Amortisation of intangible assets (Note 14)
Amortisasi biaya ditangguhkan	(5.829)	(5.510)	Amortisation of deferred charges
Amortisasi aset hak guna	(1.871)	(2.118)	Amortisation of right-of-use assets
Jumlah	(93.449)	(82.756)	Total

Aset tetap tertentu direklasifikasi dari/ke aset sewa operasi, biaya ditangguhkan dan aset tidak berwujud.

Certain property, plant and equipment were reclassified from/to property on operating lease, deferred charges and intangible assets.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, total transfer dari aset dalam pembangunan ke saldo akun lainnya adalah sebagai berikut:

For the years ended 31 December 2025 and 2024, total transfers from construction in progress to other account balances were as follows:

	2025	2024	
Transfer ke piutang sewa pembiayaan	(43.757)	-	Transfer to finance lease receivables
Transfer ke biaya ditangguhkan	(29.640)	(4.743)	Transfer to deferred charges
Transfer ke aset sewa operasi (Catatan 13)	(3.628)	(794)	Transfer to property on operating lease (Note 13)
Transfer ke biaya pengembangan proyek	-	(91)	Transfer to project development costs
Transfer dari aset tidak berwujud (Catatan 14)	-	67.931	Transfer from intangible assets (Note 14)
Jumlah	(77.025)	62.303	Total

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan Grup pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS$55.479 (2024: AS$52.540).

Total acquisition costs of property, plant and equipment which were fully depreciated but still in use by the Group as of 31 December 2025 amounted to US$55,479 (2024: US$52,540).

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara atau yang berasal dari hibah. Tidak ada aset tetap Grup yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

There are no property, plant and equipment that are temporarily not in use or derived from grants. None of the Group's property, plant and equipment are classified as available for sale.

Aset dalam pembangunan merupakan proyek yang belum selesai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Construction in progress represents projects that were not completed as at 31 December 2025 and 2024 with details as follows:

	2025			
Nama proyek	Nilai/ Amount	Persentase penyelesaian (tidak diaudit)/ Percentage of completion (unaudited)	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	Project name
Salak				Salak
Proyek pengembangan Salak unit 7	33.577	35%	Kuartal keempat tahun/ Fourth quarter of 2026	Salak unit 7 development project
Proyek pengeboran sumur make-up Salak	28.154	55%	Kuartal kedua tahun/ Second quarter of 2026	Drilling project of Salak make-up well
Modifikasi sistem pipa brine AWI 18	4.219	90%	Kuartal pertama tahun/ First quarter of 2026	AWI 18 brineline system modification
Lainnya (masing-masing di bawah AS$4 juta)	4.009	2 - 95%	Bervariasi/Various	Others (each below US$4 million)
Sub-jumlah	69.959			Sub-total
Darajat				Darajat
Proyek retrofit Darajat unit 3	7.888	32%	Kuartal keempat tahun/ Fourth quarter of 2026	Darajat unit 3 retrofit project
Lainnya (masing-masing di bawah AS$4 juta)	2.513	2 - 95%	Bervariasi/ Various	Others (each below US$4 million)
Sub-jumlah	10.401			Sub-total
Wayang Windu				Wayang Windu
Proyek pengembangan unit 3	32.549	58%	Kuartal keempat tahun/ Fourth quarter of 2026	Unit 3 development peject
Proyek retrofit unit 1 & 2	40.639	97%	Kuartal pertama tahun/ First quarter of 2026	Unit 1 & 2 retrofit project
Lainnya (masing-masing dibawah AS$4 juta)	12.946	2 - 95%	Bervariasi/ Various	Others (each below US$4 million)
Sub-jumlah	86.134			Sub-total
Lain-lain				Others
Lainnya (masing-masing di bawah AS$4 juta)	1.137	2 - 95%	Bervariasi/Various	Others (each below US$4 million)
Jumlah	167.631			Total

	2024			
Nama proyek	Nilai/ Amount	Persentase penyelesaian (tidak diaudit)/ Percentage of completion (unaudited)	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	Project name
Salak				Salak
Proyek pembangkit listrik binary	42.558	98%	Kuartal pertama tahun/ First quarter of 2025	Binary power plant project
Proyek retrofit Salak unit 4,5,6	14.417	60%	Desember/ December 2025	Salak unit 4,5,6 retrofit project
Proyek pengembangan Salak unit 7	5.480	2%	Kuartal keempat tahun/ Fourth quarter of 2026	Salak unit 7 development project
Lainnya (masing-masing di bawah AS$4 juta)	8.508	2 - 95%	Bervariasi/Various	Others (each below US$4 million)
Sub-jumlah	70.963			Sub-total
Darajat				Darajat
Proyek retrofit Darajat unit 3	5.303	0%	Kuartal keempat tahun/ Fourth quarter of 2026	Darajat unit 3 retrofit project
Lainnya (masing-masing di bawah AS$4 juta)	3.547	2 - 95%	Bervariasi/ Various	Others (each below US$4 million)
Sub-jumlah	8.850			Sub-total
Wayang Windu				Wayang Windu
Proyek pengembangan unit 3	16.306	5%	Kuartal keempat tahun/ Fourth quarter of 2026	Unit 3 development peject
Proyek retrofit unit 1 & 2	10.294	9%	Kuartal pertama tahun/ First quarter of 2026	Unit 1 & 2 retrofit project
Lainnya (masing-masing dibawah AS$4 juta)	9.918	2 - 95%	Bervariasi/ Various	Others (each below US$4 million)
Sub-jumlah	36.518			Sub-total
Drilling services				Drilling services
Rig	15.531	75%	Kuartal kedua tahun/ Second quarter of 2025	Rig
Lain-lain				Others
Lainnya (masing-masing di bawah AS$4 juta)	1.020	2 - 95%	Bervariasi/Various	Others (each below US$4 million)
Jumlah	132.882			Total

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset tetap, properti dalam sewa operasi, persediaan, barang modal dan peralatan diasuransikan terhadap kerugian akibat kerusakan fisik berdasarkan paket polis dengan jumlah pertanggungan asuransi AS$1.622.174 (2024: AS$1.580.306) dan risiko lainnya berdasarkan paket polis dengan pertanggungan asuransi sebesar AS$471.103 (2024: AS$489.167) dari PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Astra Buana, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari risiko yang dipertanggungkan tersebut.

As of 31 December 2025 and 2024, property, plant and equipment, property on operating lease, inventories and capital spares and equipment were insured against losses by physical damage under a policy package with insurance coverage totaling US$1,622,174 (2024: US$1,580,306) and other risks under a policy package with insurance coverage totaling US$471,103 (2024: US$489,167) from PT Asuransi Central Asia and PT Asuransi Astra Buana, which in management's opinion is adequate to cover any possible losses that may arise from such insured risks.

Pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk dalam aset tetap adalah beberapa aset tetap terkait bisnis panas bumi Salak dan Darajat sebesar AS$643.848 (2024: AS$682.459). Lihat Catatan 14 untuk rincian hasil pengujian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

As of 31 December 2025, included in property, plant and equipment is certain property, plant and equipment relating to the Salak and Darajat geothermal businesses amounted to US$643,848 (2024: US$682,459). Refer to Note 14 for details of the result of the impairment assessment as of 31 December 2025 and 2024.

Pada tanggal 13 Desember 2022, SEGSPL menandatangani perjanjian dengan PT Fuji Electric Indonesia untuk pembelian retrofit rotors yang seluruhnya diterima pada Juli 2025.

On 13 December 2022, SEGSPL entered into an agreement with PT Fuji Electric Indonesia for the purchase of retrofit rotors which fully received by July 2025.

Pada tanggal 31 Oktober 2023, SEGDS menandatangani perjanjian dengan Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co., Ltd untuk pembelian unit pemboran darat yang difabrikasi dan selesai pada Juli 2025.

On 31 October 2023, SEGDS entered into an agreement with Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co., Ltd for the purchase of a land drilling unit which fabricated and completed in July of 2025.

Pada tanggal 30 September 2024, SEGD-II menandatangani perjanjian dengan PT Mitsubishi Power Indonesia untuk pembelian retrofit rotors untuk Unit 3 yang akan seluruhnya diterima pada kuartal keempat tahun 2026.

On 30 September 2024, SEGD-II entered into an agreement with PT Mitsubishi Power Indonesia for the purchase of retrofit rotors for Unit 3 which will be fully received by fourth quarter of 2026.

Pada tanggal 17 Mei 2024, SEGWWL menandatangani perjanjian dengan Fuji Electric Co., Ltd untuk pembelian retrofit rotors untuk Unit 1 & 2 yang akan seluruhnya diterima pada kuartal pertama tahun 2026.

On 17 May 2024, SEGWWL entered into an agreement with Fuji Electric Co., Ltd for the purchase of retrofit rotors for Unit 1 & 2 which will be fully received by first quarter of 2026.

Pada tanggal 30 September 2024, SEGWWL menandatangani perjanjian dengan PT Inti Karya Persada Tehnik untuk mengembangkan Proyek Pembangkit Listrik Unit 3 di area panas bumi Wayang Windu yang akan berakhir pada kuartal keempat tahun 2026.

On 30 September 2024, SEGWWL signed an agreement with PT Inti Karya Persada Tehnik to develop the Power Plant Project Unit 3 at the Wayang Windu geothermal field which will expire on fourth quarter of 2026.

13. ASET SEWA OPERASI / 13. PROPERTY ON OPERATING LEASE

	1 Januari/ January 1, 2025	Penambahan/ Additions	Transfer/ Transfers	31 Desember/ December 31, 2025	
Biaya perolehan					**Acquisition costs**
Hak guna tanah	2.046	-	-	2.046	Land rights
Bangunan	8.593	-	-	8.593	Buildings
Kendaraan	1.063	-	19	1.082	Vehicles
Fasilitas lapangan	748.892	-	3.464	752.356	Field facilities
Perabotan dan perlengkapan	8.865	-	145	9.010	Furniture and fixtures
Jumlah	769.459	-	3.628	773.087	Total
Akumulasi penyusutan					**Accumulated depreciation**
Hak guna tanah	1.713	65	-	1.778	Land rights
Bangunan	5.096	360	-	5.456	Buildings
Kendaraan	1.063	4	-	1.067	Vehicles
Fasilitas lapangan	445.405	27.412	-	472.817	Field facilities
Perabotan dan perlengkapan	7.018	327	-	7.345	Furniture and fixtures
Jumlah	460.295	28.168	-	488.463	Total
Nilai buku bersih	309.164			284.624	Net book value

	1 Januari/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Transfer/ Transfers	31 Desember/ December 31, 2024	
Biaya perolehan					**Acquisition costs**
Hak guna tanah	2.046	-	-	2.046	Land rights
Bangunan	8.593	-	-	8.593	Buildings
Kendaraan	1.063	-	-	1.063	Vehicles
Fasilitas lapangan	748.741	-	151	748.892	Field facilities
Perabotan dan perlengkapan	8.222	-	643	8.865	Furniture and fixtures
Jumlah	768.665	-	794	769.459	Total
Akumulasi penyusutan					**Accumulated depreciation**
Hak guna tanah	1.648	65	-	1.713	Land rights
Bangunan	4.736	360	-	5.096	Buildings
Kendaraan	1.063	-	-	1.063	Vehicles
Fasilitas lapangan	417.312	28.093	-	445.405	Field facilities
Perabotan dan perlengkapan	6.713	305	-	7.018	Furniture and fixtures
Jumlah	431.472	28.823	-	460.295	Total
Nilai buku bersih	337.193			309.164	Net book value

Klasifikasi aset sewa operasi sesuai dengan penilaian manajemen atas pengaturan kontraktual JOC Wayang Windu.

Transfer untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 berasal dari aset tetap (Catatan 12).

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang mengindikasikan penurunan nilai aset sewa operasi Grup.

Piutang pembayaran sewa minimum di masa depan berdasarkan ESC untuk pengaturan sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut (tidak didiskonto):

Property on operating lease classification is in accordance with management's assessment of the contractual arrangements of the Wayang Windu JOC.

Transfers for years ended 31 December 2025 and 2024 are from property, plant and equipment (Note 12).

Management believes that there were no events or changes in circumstances as of 31 December 2025 and 2024 that indicate any impairment in the Group's property on operating lease.

Future minimum lease payment receivables under the ESC for non-cancellable lease arrangements are as follows (undiscounted):

	2025	2024	
Piutang pembayaran sewa minimum:			Minimum lease payments receivable:
Tidak lebih dari satu tahun	158.067	153.689	Not later than one year
Lebih dari satu tahun namun tidak lebih dari lima tahun	636.751	631.780	Later than one year but not later than five years
Lebih dari lima tahun	1.370.447	1.533.485	Later than five years
Piutang pembayaran sewa minimum bersih	2.165.265	2.318.954	Net minimum lease payment receivables

14. ASET TIDAK BERWUJUD

14. INTANGIBLE ASSETS

	1 Januari/ *January 1, 2025*	Penambahan/ *Additions*	31 Desember/ *December 31, 2025*	
Biaya perolehan				**Acquisition costs**
Properti yang belum dikembangkan	885.298	-	885.298	Undeveloped properties
Goodwill	498.027	-	498.027	Goodwill
Kontrak pelanggan	78.709	-	78.709	Customer contract
Perangkat lunak	3.134	-	3.134	Software
Bonus	3.736	-	3.736	Bonuses
Kredit karbon	1.758	-	1.758	Carbon credits
Jumlah biaya perolehan	1.470.662	-	1.470.662	Total acquisition costs
Akumulasi penyusutan				**Accumulated depreciation**
Perangkat lunak	3.114	6	3.120	Software
Kontrak pelanggan	2.460	3.280	5.740	Customer contract
Bonus	1.472	180	1.652	Bonuses
Kredit karbon	1.187	-	1.187	Carbon credits
Jumlah akumulasi penyusutan	8.233	3.466	11.699	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	1.462.429		1.458.963	Net book value

	1 Januari/ *January 1, 2024*	Penambahan sehubungan dengan akuisisi entitas anak/ *Addition related to acquisition of subsidiary*	Penambahan/ *Additions*	Transfer/ *Transfers*	31 Desember/ *December 31, 2024*	
Biaya perolehan						**Acquisition costs**
Properti yang belum dikembangkan	953.229	-	-	(67.931)	885.298	Undeveloped properties
Goodwill	485.814	12.213	-	-	498.027	Goodwill
Kontrak pelanggan	-	78.709	-	-	78.709	Customer contract
Perangkat lunak	3.108	26	-	-	3.134	Software
Bonus	3.736	-	-	-	3.736	Bonuses
Kredit karbon	1.758	-	-	-	1.758	Carbon credits
Jumlah biaya perolehan	1.447.645	90.948	-	(67.931)	1.470.662	Total acquisition costs
Akumulasi penyusutan						**Accumulated depreciation**
Perangkat lunak	3.108	-	6	-	3.114	Software
Kontrak pelanggan	-	-	2.460	-	2.460	Customer contract
Bonus	1.292	-	180	-	1.472	Bonuses
Kredit karbon	1.187	-	-	-	1.187	Carbon credits
Jumlah akumulasi penyusutan	5.587	-	2.646	-	8.233	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	1.442.058				1.462.429	Net book value

Pada 2024, terdapat reklasifikasi dari properti yang belum dikembangkan sebesar AS$67.931, merupakan reklasifikasi ke sumur produksi dan fasilitas sumur sebagai bagian dari aset tetap) (Catatan 12).

In 2024 there was reclassification from undeveloped properties amounted to US$67,931, representing reclassification to production wells and well facilities as part of property, plant and equipment) (Note 12).

Properti yang belum dikembangkan

Properti yang belum dikembangkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dialokasikan ke JOC Salak dan JOC Darajat berdasarkan alokasi harga beli yang dibuat saat mengakuisisi operasi Salak dan Darajat dari CVX (Catatan 1.c).

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tidak ada sumur yang diselesaikan. (2024: lima sumur telah diselesaikan dan biaya direklasifikasi dari properti yang belum dikembangkan menjadi sumur produksi dan fasilitas sumur dalam aset tetap).

Undeveloped properties

Undeveloped properties as at 31 December 2025 and 2024 are allocated to the Salak JOC and Darajat JOC based on the purchase price allocation made when acquiring the Salak and Darajat operations from CVX (Note 1.c).

During the year ended 31 December 2025 there were no wells completed (2024: five wells were completed and the costs were reclassified from undeveloped properties to production wells and well facilities in property, plant and equipment).

Kontrak pelanggan

Kontrak pelanggan dilokasikan ke BWE berdasarkan alokasi harga beli yang dibuat saat mengakuisisi Sidrap Bayu Energi (“SBE”) dari UPC.

Customer contract

Customer contract is allocated to the BWE based on the purchase price allocation made when acquiring the Sidrap Bayu Energi (“SBE”) from UPC.

Goodwill

Goodwill pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan *goodwill* yang diakui dari akuisisi operasi Salak, Darajat, SBE dan OMI sebesar AS$272.016, AS$213.798, AS$12.051, and AS$162. (Catatan 1.c).

Goodwill

Goodwill as of 31 December 2025 and 2024 represents goodwill recognised on the acquisition of the Salak, Darajat, SBE and OMI operations US$272,016, US$213,798, US$12,051, and US$162, respectively (Note 1.c).

Pengujian penurunan nilai

Salak dan Darajat

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup melakukan pengujian atas penurunan nilai atas UPK Salak dan Darajat senilai AS$2.052.511 (2024: AS$2.067.311), yang terdiri dari *goodwill*, properti yang belum dikembangkan, biaya ditangguhkan dan aset tetap masing-masing sebesar AS$485.814, AS$885.298, AS$37.551, dan AS$643.848 (2024: AS$485.814, AS$885.298, AS$13.740, dan AS$682.459). Manajemen berpendapat bahwa tidak ada penurunan nilai atas operasi Salak dan Darajat pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Jumlah masing-masing UPK yang dapat dipulihkan ditentukan berdasarkan ViU. Masing-masing operasi Salak dan Darajat diperlakukan sebagai UPK terpisah. Proyeksi arus kas yang digunakan dalam perhitungan ViU didasarkan pada anggaran keuangan yang disetujui manajemen untuk periode lima tahun. Arus kas setelah periode lima tahun diekstrapolasikan dengan menggunakan estimasi tingkat pertumbuhan yang dinyatakan di bawah ini. Tingkat pertumbuhan tidak melebihi rata-rata tingkat pertumbuhan historis.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai *goodwill*, properti yang belum dikembangkan, biaya ditangguhkan dan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 adalah tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 8,02% (2024: 8,55%) dan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 2,5% (2024: 2,5%) yang digunakan dalam memperkirakan arus kas yang didiskontokan. Harga listrik dan uap di masa mendatang yang digunakan dalam arus kas yang didiskontokan didasarkan pada kontrak dengan PLN. Sebagai hasil dari analisis tersebut, terdapat headroom sebesar AS$862.896 pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: AS$894.729).

SBE

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup melakukan pengujian atas penurunan nilai atas UPK SBE senilai AS$184.918, yang terdiri dari goodwill dan kontrak pelanggan sebesar AS$85.020 serta aset tetap sebesar AS$99.898. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada penurunan nilai atas SBE.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai goodwill, kontrak pelanggan dan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 adalah tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 6,58% yang digunakan dalam memperkirakan arus kas yang didiskontokan. Sebagai hasil dari analisis tersebut, terdapat headroom sebesar AS$1.361 pada tanggal 31 Desember 2025.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada kemungkinan perubahan dalam asumsi utama yang disebutkan di atas yang akan menyebabkan nilai tercatat UPK secara material melebihi jumlah terpulihkannya.

Impairment assessment

Salak and Darajat

As at 31 December 2025, the Group performed an assessment of impairment of the Salak and Darajat CGUs totalling US$2,052,511 (2024: US$2,067,311), which consist of goodwill and undeveloped properties, deferred charges, and property, plant and equipment amounted to US$485,814, US$885,298, US$37,551, and US$643,848 (2024: US$485,814, US$885,298, US$13,740, and US$682,459), respectively. Management is of the opinion that there is no impairment of the Salak and Darajat operations as at 31 December 2025 and 2024.

The recoverable amount of each CGU was determined based on ViU. Each of the Salak and Darajat operations are treated as a separate CGU. Cash flow projections used in the ViU calculations were based on financial budgets approved by management covering a five-year period. Cash flows beyond the five-year period were extrapolated using the estimated growth rates stated below. The growth rates did not exceed the average historical growth rate.

The key assumptions used in the assessment on impairment in value of goodwill, undeveloped properties, deferred charges and property, plant and equipment as of 31 December 2025 are estimated pre-tax discount rate of 8.02% (2024: 8.55%) and annual growth rate of 2.5% (2024: 2.5%) used in estimating the discounted cash flows. The prices for future electricity and steam used in the discounted cash flows are based on the contracts with PLN. As a result of the analysis, there is a total headroom of US$862,896 as of 31 December 2025 (2024: US$894,729).

SBE

As at 31 December 2025, the Group performed an assessment of impairment of SBE CGUs totalling US$184,918, which consist of goodwill and customer contract totalling US$85,020 and property, plant and equipment totalling US$99,898. Management is of the opinion that there is no impairment of SBE operations.

The key assumptions used in the assessment on impairment in value of goodwill, customer contract and property, plant and equipment as of 31 December 2025 are estimated pre-tax discount rate of 6.58% used in estimating the discounted cash flows. As a result of the analysis, there is a total headroom of US$1,361 as of 31 December 2025.

Management is of the opinion that there was no reasonably possible change in any of the key assumptions stated above that would cause the carrying amount of the CGUs to materially exceed their recoverable amounts.

15. UTANG USAHA DAN UTANG LAIN-LAIN, DAN BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

15. TRADE AND OTHER PAYABLES, AND ACCRUED EXPENSES

	2025	2024	
Lancar			Current
Utang usaha – pihak ketiga:			Trade payables – third parties:
Schlumberger Geophysics Nusantara	3.466	995	Schlumberger Geophysics Nusantara
PT Parker Wellbore Indonesia	3.361	172	PT Parker Wellbore Indonesia
PT Seamless Pipe Indonesia Jaya	878	-	PT Seamless Pipe Indonesia Jaya
PT Supraco Indonesia	573	-	PT Supraco Indonesia
PT Halliburton Indonesia	431	-	PT Halliburton Indonesia
PT Armindo Perkasa	372	-	PT Armindo Perkasa
PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk	342	-	PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk
PT Cipta Bangun Nusantara	61	350	PT Cipta Bangun Nusantara
PT Mitsubishi Power Indonesia	22	5.264	PT Mitsubishi Power Indonesia
PT EJJV Engineering Indonesia	12	332	PT EJJV Engineering Indonesia
PT Krakatau Pipe Industries	-	662	PT Krakatau Pipe Industries
PT BJ Services Indonesia	-	389	PT BJ Services Indonesia
Lainnya	7.573	6.054	Others
Sub-jumlah	17.091	14.218	Sub-total
Utang lain-lain – pihak ketiga:			Other payables – third parties:
ACEHI	-	4.864	ACEHI
Karyawan	662	716	Employees
Lainnya	1.743	1.306	Others
Sub-jumlah	2.405	6.886	Sub-total
Utang lain-lain – pihak berelasi:			Other payables – related parties
PT Griya Idola	38	97	PT Griya Idola
Beban yang masih harus dibayar			Accrued expenses:
Beban bunga	31.686	39.859	Interest expense
Lainnya - pihak ketiga	41.467	47.260	Others - third parties
Sub-jumlah	73.153	87.119	Sub-total
Tidak lancar			Non-current
Utang lain-lain:			Other payables:
ACEHI	-	7.377	ACEHI
Jumlah	92.687	115.697	Total
Berdasarkan mata uang:			By currency:
Dolar AS	53.061	91.480	US Dollars
Rupiah	39.137	24.105	Rupiah
Others	489	112	Others
Utang usaha dan utang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar	92.687	115.697	Trade and other payables and accrued expenses

Pada tanggal 31 Desember 2025, beban yang masih harus dibayar - lainnya - pihak ketiga terdiri dari beban yang masih harus dibayar untuk pembelian barang dan jasa sebesar AS$36.715 (2024: AS$41.448), tunjangan produksi untuk PGE sebesar AS$3.454 (2024: AS$4.039) dan produksi bonus sebesar AS$1.298 (2024: AS$1.773).

As at 31 December 2025, accrued expenses - others - third parties primarily represents accruals for purchase of goods and services of US$36,715 (2024: US$41,448), production allowance to PGE of US$3,454 (2024: US$4,039) and production bonus of US$1,298 (2024: $1,773).

16. PINJAMAN / 16. BORROWINGS

	2025	2024	
Pinjaman			Borrowings
Bagian lancar:			Current portion:
Senior secured notes	70.668	101.352	Senior secured notes
Utang bank	131.380	101.261	Bank loan
Sub-jumlah	202.048	202.613	Sub-total
Bagian tidak lancar:			Non-current portion:
Senior secured notes	1.248.371	1.316.955	Senior secured notes
Utang bank	608.625	577.669	Bank loan
Sub-jumlah	1.856.996	1.894.624	Sub-total
Jumlah	2.059.044	2.097.237	Total
Sisa jatuh tempo kontraktual dari total pinjaman adalah sebagai berikut:			The remaining contractual maturities of the total borrowings are as follows:
Senior secured notes:			Senior secured notes:
Tidak lebih dari satu tahun	70.668	101.352	Not later than one year
Di antara satu dan lima tahun	399.479	341.926	Between one and five years
Lebih dari lima tahun	861.596	989.817	Above five years
Utang bank:			Bank loan:
Tidak lebih dari satu tahun	131.380	101.261	Not later than one year -
Di antara satu dan lima tahun	521.489	475.410	Between one and five years -
Lebih dari lima tahun	101.572	112.708	Above five years
	2.086.184	2.122.474	
Dikurangi:			Less:
Biaya keuangan tangguhan yang belum diamortisasi:			Unamortised deferred financing costs:
Senior secured notes	(12.704)	(14.788)	Senior secured notes
Utang bank	(14.436)	(10.449)	Bank loan
Sub-jumlah	(27.140)	(25.237)	Sub-total
Jumlah	2.059.044	2.097.237	Total

Termasuk dalam pinjaman adalah jumlah yang terkait dengan biaya pendanaan yang ditangguhkan, sebagai berikut:

Included in the borrowings are amounts relating to deferred financing costs, which are as follows:

	2025	2024	
Biaya	95.572	89.468	Cost
Akumulasi amortisasi	(68.432)	(64.231)	Accumulated amortisation
Jumlah	27.140	25.237	Total

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup telah memenuhi pembatasan yang diwajibkan.

As of 31 December 2025 and 2024, the Group has complied with the required covenants.

Senior secured notes

Notes 2033

Pada tanggal 24 April 2018, SEGWWL menerbitkan jumlah pokok agregat sebesar AS$580.000 6,75% senior secured notes yang jatuh tempo pada tahun 2033 (“Notes 2033”). Notes 2033 dikenakan bunga sebesar 6,75% per tahun. Bunga atas Notes 2033 dibayarkan pada tanggal 24 April dan 24 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 24 Oktober 2018. Notes 2033 akan jatuh tempo pada tanggal 24 April 2033.

Senior secured notes

2033 Notes

On 24 April 2018, SEGWWL issued an aggregate principal amount of US$580,000 6.75% senior secured notes due in 2033 (the “2033 Notes”). The 2033 Notes bear interest at the rate of 6.75% per annum. Interest on the 2033 Notes is payable on 24 April and 24 October of each year, beginning on 24 October 2018. The 2033 Notes will mature on 24 April 2033.

Berdasarkan Indenture Notes 2033, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

Based on the 2033 Notes Indenture, the repayment schedule is as follows:

Tanggal pembayaran	Persentase dari nilai pokok awal/ Percentage of original principal amount	Payment date
24 Oktober 2018	1,70%	24 October 2018
24 April 2019	2,50%	24 April 2019
24 Oktober 2019	3,80%	24 October 2019
24 April 2020	1,30%	24 April 2020
24 Oktober 2020	0,00%	24 October 2020
24 April 2021	2,03%	24 April 2021
24 Oktober 2021	4,80%	24 October 2021
24 April 2022	1,60%	24 April 2022
24 Oktober 2022	1,19%	24 October 2022
24 April 2023	0,00%	24 April 2023
24 Oktober 2023	0,00%	24 October 2023
24 April 2024	2,78%	24 April 2024
24 Oktober 2024	3,80%	24 October 2024
24 April 2025	6,05%	24 April 2025
24 Oktober 2025	4,70%	24 October 2025
24 April 2026	3,50%	24 April 2026
24 Oktober 2026	1,27%	24 October 2026
24 April 2027	0,72%	24 April 2027
24 Oktober 2027	0,08%	24 October 2027
24 April 2028	2,15%	24 April 2028
24 Oktober 2028	3,82%	24 October 2028
24 April 2029	7,31%	24 April 2029
24 Oktober 2029	7,00%	24 October 2029
24 April 2030	4,60%	24 April 2030
24 Oktober 2030	6,30%	24 October 2030
24 April 2031	4,20%	24 April 2031
24 Oktober 2031	7,40%	24 October 2031
24 April 2032	4,20%	24 April 2032
24 Oktober 2032	7,00%	24 October 2032
24 April 2033	Semua jumlah pokok yang tersisa/ All remaining outstanding principal amounts	24 April 2033

SEGWWL dapat menebus Notes 2033, seluruhnya atau sebagian, kapan saja sebelum 24 April 2026, dengan harga penebusan yang setara dengan yang lebih besar dari berikut ini:

(1) 100% dari jumlah pokok Notes tersebut; dan
(2) jumlah dari (a) 100% dari jumlah pokok Notes tersebut yang akan dilunasi pada tanggal 24 April 2026 dan (b) nilai kini dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga terjadwal atas Notes yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal penebusan) sampai dengan 24 April 2026, didiskontokan ke tanggal penebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi satu tahun 360 hari terdiri dari dua belas 30-hari bulan) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

Ditambah, dalam setiap kasus, bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar atas jumlah pokok Notes sampai dengan, tetapi tidak termasuk, tanggal penebusan (tunduk pada hak pemegang catatan pada tanggal pencatatan yang relevan untuk menerima bunga yang jatuh tempo atas bunga yang relevan tanggal pembayaran).

SEGWWL may redeem the 2033 Notes, in whole or in part, at any time prior to 24 April 2026, at a redemption price equal to the greater of the following:

(1) 100% of the principal amount of such Notes; and
(2) the sum of (a) 100% of the principal amount of such Notes to be redeemed as would otherwise have been outstanding as at 24 April 2026 and (b) the present value of each remaining scheduled payment of principal and interest on the Notes to be redeemed (exclusive of interest accrued and unpaid to (but not including) the redemption date) up to 24 April 2026, discounted to the redemption date on a semi-annual basis (assuming a 360 day year consisting of twelve 30-day months) at the treasury rate plus 50 basis points.

Plus, in each case, accrued and unpaid interest on the principal amount of the Notes up to, but not including, the date of redemption (subject to the right of the holder of record on the relevant record date to receive interest due on the relevant interest payment date).

Setiap saat pada atau setelah 24 April 2026, SEGWWL dapat menebus Notes 2033, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan persentase jumlah pokok Notes 2033 yang harus ditebus yang tercantum di bawah ini ditambah akrual dan bunga yang belum dibayar, jika ada, sampai tanggal penebusan jika ditebus selama periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal 24 April tahun-tahun yang disebutkan di bawah ini:

At any time on or after 24 April 2026, SEGWWL may redeem the 2033 Notes, in whole or in part, at the redemption prices equal to the percentage of the principal amount of the 2033 Notes to be redeemed set out below plus accrued and unpaid interest, if any, to the redemption date if redeemed during the 12-month period beginning on 24 April of the years indicated below:

Tahun/Year	Persentase/Percentage
2026	103,38%
2027	101,69%
2028	100,84%
2029 dan seterusnya/and thereafter	100,00%

Manajemen berpendapat bahwa pelaksanaan opsi pelunasan dipercepat sebelum tanggal 24 April 2026 tidak menguntungkan secara ekonomi bagi Grup karena biaya penalti pelunasan dipercepat secara signifikan lebih tinggi daripada penghematan suku bunga jika dibiayai kembali, oleh karena itu, manajemen tidak bermaksud untuk melaksanakan opsi tersebut dalam waktu dekat. Manajemen juga berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka pada atau setelah 24 April 2026 hanya mengganti pemegang Notes 2033 dengan jumlah sampai dengan perkiraan nilai sekarang dari bunga yang hilang untuk sisa jangka waktu Notes 2033 dengan perbedaan yang tidak signifikan, dan karenanya nilai wajar opsi pembayaran di muka tidak signifikan.

Management is of the opinion that exercising the prepayment option prior to 24 April 2026 is not economically beneficial to the Group as the prepayment penalty cost is significantly higher than the interest rate saving if it is being refinanced, therefore, management does not intend to exercise such option in the near future. Management is also of the opinion that the prepayment option on or after 24 April 2026 only reimburses the holders of the 2033 Notes for an amount up to the approximate present value of lost interest for the remaining term of the 2033 Notes with an insignificant differential, and therefore the fair value of the prepayment option is not significant.

Notes 2033 adalah kewajiban langsung, tanpa syarat dan jaminan senior. Notes 2033 dijamin dengan agunan seperti; jaminan fidusia atas aset berwujud yang terdiri dari fasilitas pembangkit listrik yang terletak di Unit 1 dan Unit 2 (“Jaminan Aset”), jaminan fidusia atas hasil asuransi yang terkait dengan Jaminan Aset, beban atas rekening terkait utang dan gadai atas Onshore Rekening Korporasi dan Pajak dan biaya saham yang akan dilaksanakan oleh SEGPL atas seluruh sahamnya saat ini dan di masa mendatang di SEGWWL dan setiap perjanjian lindung nilai yang dibuat oleh SEGWWL atau salah satu anak perusahaannya. Rekening Pendapatan dan Operasi, Rekening Distribusi dan Rekening Perusahaan dan Pajak Darat diklasifikasikan sebagai saldo kas dan bank dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The 2033 Notes are direct, unconditional and senior secured obligations. The 2033 Notes are secured by collateral such as; fiduciary security over the tangible assets that comprise electricity generating facilities located at Unit 1 and Unit 2 (the “Asset Collateral”), fiduciary security over insurance proceeds related to the Asset Collateral, a charge over the debt related accounts and a pledge over the Onshore Corporate and Tax Account and a share charge to be executed by SEGPL over its entire present and future shares in SEGWWL and any hedging agreement entered into by SEGWWL or any of its subsidiaries. Revenue and Operating Account, the Distribution Account and the Onshore Corporate and Tax Account are classified as cash and bank balances in the consolidated statement of financial position.

Notes 2033 berisi batasan-batasan tertentu termasuk rasio keuangan, pembatasan utang tambahan, pembatasan penjualan aset, pembatasan hak gadai, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan distribusi ekuitas, pembatasan kegiatan bisnis yang berbeda, pembatasan amendemen dokumen proyek utama dan pembatasan penerbitan modal.

The 2033 Notes contain certain covenants including financial ratios, limitation on additional indebtedness, limitation on asset sales, limitation on liens, limitation on transactions with affiliates, limitation on equity distributions, limitation on different business activities, limitation on amendments to key project documents and limitation on issuances of capital stock.

Pada 31 Desember 2025, Notes 2033 memiliki peringkat “BB” dari Fitch dan “Ba3” dari Moody’s dengan prospek yang stabil berdasarkan penilaian terakhir pada Agustus 2025. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian agen pemeringkat bahwa SEGWWL akan secara efektif menjalankan strategi pertumbuhan sambil terus mematuhi kebijakan keuangan yang konservatif.

On 31 December 2025, the 2033 Notes has rating of “BB” by Fitch and “Ba3” by Moody’s with a stable outlook based on the latest assessment in August 2025. The rating reflects the rating agencies’ assessments that SEGWWL. will effectively execute its growth strategy while continuing to adhere to conservative financial policies.

Notes 2029 dan Notes 2038

Pada tanggal 14 Oktober 2020, SEGSL dan SEGD-II (bersama-sama, "Penerbit Bersama") menerbitkan jumlah pokok sebesar AS$320.000 3,25% senior secured notes yang akan jatuh tempo pada tahun 2029 ("Notes 2029") dan AS$790.000 4,85% senior secured notes jatuh tempo tahun 2038 ("Notes 2038"). Notes 2029 dikenakan bunga tetap sebesar 3,25% per tahun. Bunga atas Notes 2029 dibayarkan pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 14 April 2021. Notes 2029 akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2029. Notes 2038 dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% per tahun. Bunga atas Notes 2038 dibayarkan pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 14 April 2021. Notes 2038 akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2038.

2029 Notes and 2038 Notes

On 14 October 2020, SEGSL and SEGD-II (together, the "Co-Issuers") issued an aggregate principal amount of US$320,000 3.25% senior secured notes due in 2029 (the "2029 Notes") and US$790,000 4.85% senior secured notes due in 2038 (the "2038 Notes"). The 2029 Notes bear interest at a fixed rate of 3.25% per annum. Interest on the 2029 Notes is payable on 14 April and 14 October of each year, beginning on 14 April 2021. The 2029 Notes will mature on 14 April 2029. The 2038 Notes bear interest at a fixed rate of 4.85% per annum. Interest on the 2038 Notes is payable on 14 April and 14 October of each year, beginning on 14 April 2021. The 2038 Notes will mature on 14 October 2038.

Notes 2029

Berdasarkan Notes 2029, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

2029 Notes

Based on the 2029 Notes' Indenture, the repayment schedule is as follows:

Tanggal pembayaran	Persentase atas nilai/ Percentage of principal amount	Payment date
14 Oktober 2021	0,63%	14 October 2021
14 April 2022	4,69%	14 April 2022
14 Oktober 2022	3,13%	14 October 2022
14 April 2023	6,25%	14 April 2023
14 Oktober 2023	5,63%	14 October 2023
14 April 2024	5,31%	14 April 2024
14 Oktober 2024	8,44%	14 October 2024
14 April 2025	7,50%	14 April 2025
14 Oktober 2025	4,69%	14 October 2025
14 April 2026	4,69%	14 April 2026
14 Oktober 2026	8,75%	14 October 2026
14 April 2027	9,38%	14 April 2027
14 Oktober 2027	12,50%	14 October 2027
14 April 2028	8,44%	14 April 2028
14 Oktober 2028	5,47%	14 October 2028
14 April 2029	Semua jumlah pokok yang tersisa/ All remaining outstanding principal amounts	14 April 2029

Setiap saat dan dari waktu ke waktu pada atau setelah 14 April 2024, setiap Obligor (Obligor mengacu pada SEGSDBV dan anak perusahaannya) dapat, atas pilihannya sendiri, menebus Notes, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan persentase dari jumlah pokok yang tercantum di bawah ditambah bunga yang masih harus dibayar dan bunga yang belum dibayar pada tanggal penebusan jika ditebus selama periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal 14 April dari tahun-tahun yang ditunjukkan di bawah ini.

At any time and from time to time on or after 14 April 2024, any Obligor (Obligor refers to SEGSDBV and its subsidiaries) may at its option redeem the Notes, in whole or in part, at a redemption price equal to the percentage of the principal amount set out below plus accrued and unpaid interest to the redemption date if redeemed during the 12-month period beginning on 14 April of the years indicated below.

Tahun/Year	Persentase/ Percentage
2024	101,63%
2025	100,81%
2026 dan seterusnya/and thereafter	100,00%

Setiap saat dan dari waktu ke waktu sebelum 14 April 2024, setiap Obligor dapat, atas pilihannya, menebus Notes, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan yang lebih besar dari yang berikut ini:

(1) 100% dari jumlah pokok Notes tersebut yang akan ditebus pada tanggal penebusan; atau
(2) jumlah nilai sekarang dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga yang terjadwal atas Notes yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal penebusan) (dengan asumsi pembayaran jatuh tempo dari semua Jumlah Amortisasi Notes sesuai dengan profil amortisasi yang ditetapkan dalam jadwal di atas dan tidak ada penebusan berikutnya) didiskontokan ke tanggal penebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi satu tahun 360 hari terdiri dari dua belas 30-hari bulan) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

At any time and from time to time prior to 14 April 2024, any Obligor may, at its option, redeem the Notes, in whole or in part, at a redemption price equal to the greater of the following:

(1) 100% of the principal amount of such Notes to be redeemed as at the redemption date; or
(2) the sum of the present value of each remaining scheduled payment of principal and interest on the Notes to be redeemed (exclusive of interest accrued and unpaid to (but not including) the redemption date) (assuming the due payment of all Notes Amortisation Amounts in accordance with the amortisation profile set out in the schedule above and no other subsequent redemptions) discounted to the redemption date on a semi-annual basis (assuming a 360-day year consisting of twelve 30-day months) at the Treasury Rate plus 50 basis points.

Notes 2038

Berdasarkan Indenture Notes 2038, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

2038 Notes

Based on the 2038 Notes' Indenture, the repayment schedule is as follows:

Tanggal pembayaran	Persentase atas nilai pokok/ Percentage of principal amount	Payment date
14 Oktober 2029	2,53%	14 October 2029
14 April 2030	3,04%	14 April 2030
14 Oktober 2030	5,19%	14 October 2030
14 April 2031	5,06%	14 April 2031
14 Oktober 2031	4,56%	14 October 2031
14 April 2032	2,53%	14 April 2032
14 Oktober 2032	4,75%	14 October 2032
14 April 2033	5,06%	14 April 2033
14 Oktober 2033	6,33%	14 October 2033
14 April 2034	6,33%	14 April 2034
14 Oktober 2034	4,43%	14 October 2034
14 April 2035	3,54%	14 April 2035
14 Oktober 2035	5,44%	14 October 2035
14 April 2036	5,70%	14 April 2036
14 Oktober 2036	7,60%	14 October 2036
14 April 2037	8,86%	14 April 2037
14 Oktober 2037	6,33%	14 October 2037
14 April 2038	5,06%	14 April 2038
14 Oktober 2038	Semua jumlah pokok yang tersisa/ All remaining outstanding principal amounts	14 October 2038

Setiap saat dan dari waktu ke waktu pada atau setelah tanggal 14 Oktober 2029, setiap Obligor dapat, atas pilihannya, menebus Notes, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan persentase jumlah pokok Notes yang akan ditebus di bawah ini ditambah bunga yang masih harus dibayar dan bunga yang belum dibayar pada tanggal penebusan jika ditebus selama periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal 14 Oktober tahun-tahun yang ditunjukkan di bawah ini:

At any time and from time to time on or after 14 October 2029, any Obligor may, at its option, redeem the Notes, in whole or in part, at a redemption price equal to the percentage of the principal amount of the Notes to be redeemed set out below plus accrued and unpaid interest to the redemption date if redeemed during the 12-month period beginning on 14 October of the years indicated below:

Tahun/Year	Persentase/Percentage
2029	102,43%
2030	101,62%
2031	100,81%
2032 dan seterusnya/and thereafter	100,00%

Setiap saat dan dari waktu ke waktu sebelum tanggal 14 Oktober 2029, setiap Obligor dapat, atas pilihannya sendiri, menebus Notes, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan yang lebih besar dari berikut ini:

(1) 100% dari jumlah pokok Notes tersebut yang akan ditebus pada tanggal penebusan; dan
(2) jumlah nilai sekarang dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga yang dijadwalkan pada Notes yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal penebusan, dan dengan asumsi pembayaran jatuh tempo dari semua Jumlah Amortisasi Notes sesuai dengan profil amortisasi yang ditetapkan dalam skedul di atas dan tidak ada penebusan berikutnya) yang didiskontokan pada tanggal penebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi satu tahun 360 hari terdiri dari dua belas bulan 30 hari) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

At any time and from time to time prior to 14 October 2029, any Obligor may, at its option, redeem the Notes, in whole or in part, at a redemption price equal to the greater of the following:

(1) 100% of the principal amount of such Notes to be redeemed as at the redemption date; and
(2) the sum of the present value of each remaining scheduled payment of principal and interest on the Notes to be redeemed (exclusive of interest accrued and unpaid to (but not including) the redemption date, and assuming the due payment of all Notes Amortisation Amounts in accordance with the amortisation profile set out in the schedule above and no other subsequent redemptions) discounted to the redemption date on a semi-annual basis (assuming a 360-day year consisting of twelve 30-day months) at the Treasury Rate plus 50 basis points.

Manajemen berpendapat bahwa pelaksanaan opsi pembayaran di muka sebelum 14 April 2024 untuk Notes 2029 dan 14 Oktober 2029 untuk Notes 2038 tidak menguntungkan secara ekonomi bagi Grup karena biaya denda pembayaran di muka secara signifikan lebih tinggi daripada penghematan suku bunga jika dibiayai kembali, oleh karena itu, manajemen tidak bermaksud untuk menggunakan opsi tersebut dalam waktu dekat. Manajemen juga berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka pada atau setelah 14 April 2024 untuk Notes 2029 dan 14 Oktober 2029 untuk Notes 2038 hanya mengganti uang pemegang Notes 2029 dan Notes 2038 dengan jumlah sampai dengan perkiraan nilai sekarang dari bunga yang hilang untuk sisa jangka waktu Notes 2029 dan Notes 2038 dengan perbedaan yang tidak signifikan dan karenanya nilai wajar opsi pembayaran di muka tidak signifikan.

Management is of the opinion that exercising the prepayment options prior to 14 April 2024 for the 2029 Notes and 14 October 2029 for the 2038 Notes is not economically beneficial to the Group as the prepayment penalty cost is significantly higher than the interest rate saving if it is being refinanced, therefore, management does not intend to exercise such option in the near future. Management is also of the opinion that the prepayment options on or after 14 April 2024 for the 2029 Notes and 14 October 2029 for the 2038 Notes only reimburse the holders of the 2029 Notes and 2038 Notes for an amount up to the approximate present value of lost interest for the remaining term of the 2029 Notes and 2038 Notes with an insignificant differential and therefore the fair value of the prepayment options is not significant.

Notes 2029 dan Notes 2038 dijamin dengan agunan seperti pengalihan pinjaman antar perusahaan, pengalihan hak kontrak, beban rekening luar negeri, gadai rekening dalam negeri, gadai saham SEGSDBV, SEGSL, SEGSPL, SEGD-I, SEGD-II, PT DGI, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi. Notes 2029 dan Notes 2038 memuat ketentuan-ketentuan tertentu seperti rasio keuangan, pembatasan distribusi ekuitas, pembatasan penjualan aset, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan gadai, pembatasan kegiatan usaha obligor, pembatasan tentang penjualan dan penerbitan modal saham di anak perusahaan yang dibatasi, pembatasan amendemen dokumen proyek utama dan pembatasan penerbitan jaminan oleh anak perusahaan yang dibatasi.

The 2029 Notes and 2038 Notes are secured by collateral including the assignment of intercompany loans, assignment of contract rights, offshore account charges, onshore account pledges, share pledges of SEGSDBV, SEGSL, SEGSPL, SEGD-I, SEGD-II, PT DGI, and fiduciary security over the insurance claims. The 2029 Notes and 2038 Notes contain certain covenants such as financial ratios, the limitation on equity distributions, limitation on asset sales, limitation on transactions with affiliates, limitation on liens, limitation on business activities of the obligors, limitation on sales and issues of capital stock in restricted subsidiaries, limitation on amendments to key project documents and limitation on issues of guarantees by restricted subsidiaries.

Pada 31 Desember 2025, Notes 2029 dan Notes 2038 memiliki peringkat “BBB-” dari Fitch dan “Baa3” dari Moody’s, keduanya dengan prospek yang stabil berdasarkan penilaian terakhir masing-masing pada September 2024 dan Agustus 2025. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian agen pemeringkat bahwa SEGSDBV akan secara efektif menjalankan strategi pertumbuhan sambil terus mematuhi kebijakan keuangan yang konservatif.

On 31 December 2025, the 2029 Notes and the 2038 Notes have rating of “BBB-” by Fitch and “Baa3” by Moody’s both with a stable outlook based on the latest assessment in September 2024 and August 2025, respectively. The ratings reflect the rating agencies’ assessments that SEGSDBV will effectively execute its growth strategy while continuing to adhere to conservative financial policies.

Grup telah melakukan pembayaran *senior secured notes* sebesar AS$101.352 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 (31 Desember 2024: AS$82.167).

The Group has made payment of senior secured notes totalling US$101,352 for the year ended 31 December 2025 (31 December 2024: US$82,167).

Utang bank

Bank loans

(i) Utang Bank SEGHPL

(i) SEGHPL Bank Loan

Pada tanggal 11 Desember 2022, SEGHPL menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan jaminan dengan Bangkok Bank Public Company Limited untuk komitmen fasilitas, Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar AS$110.000 dan AS$545.000, masing-masing ("Utang Bank SEGHPL"). Fasilitas A dan Fasilitas B memiliki jatuh tempo masing-masing enam bulan dan 60 bulan setelah tanggal penggunaan.

On 11 December 2022, SEGHPL entered into a secured term loan facility agreement with Bangkok Bank Public Company Limited for committed facilities – Facility A and Facility B amounting to US$110,000 and US$545,000, respectively (the "SEGHPL Bank Loan"). Facility A and Facility B have maturity dates of six months and 60 months, respectively, after the utilisation date.

Pemanfaatan pertama Utang Bank SEGHPL dilakukan pada tanggal 13 Desember 2022, sebesar AS$160.500, yang terdiri dari penggunaan penuh dari Fasilitas A sebesar AS$110.000 dan pemanfaatan sebagian Fasilitas B sebesar AS$50.500. Total kas yang diterima adalah AS$160.000 setelah memperhitungkan biaya pembiayaan sebesar AS$500. Hasil tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. SEGHPL telah melunasi penarikan pada Fasilitas A sebesar AS$110.000, pada tanggal 27 Desember 2022.

The SEGHPL Bank Loan first utilisation was made on 13 December 2022, amounting to US$160,500, which consisted of full utilisation of Facility A of US$110,000 and partial utilisation of Facility B of US$50,500. The total cash received was US$160,000 after taking into account the financing costs of US$500. The proceeds were used to finance the acquisition of the 50% interest in DGA SEG B.V. SEGHPL has repaid the US$110,000 drawdown on Facility A on 27 December 2022.

Pemanfaatan kedua pinjaman bank SEGHPL dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar AS$489.950. Total kas yang diterima adalah AS$485.000 setelah memperhitungkan biaya pembiayaan sebesar AS$4.950. Dana tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi saham Phoenix Power B.V. di SEGPL dan SEGNBV.

The SEGHPL Bank Loan second utilisation was made on 20 December 2022 amounting to US$489,950. The total cash received was US$485,000 after taking into account the financing costs of US$4,950. The proceeds were used to finance the acquisition of Phoenix Power B.V.'s shares in SEGPL and SEGNBV.

Pemanfaatan ketiga pinjaman bank SEGHPL dilakukan pada tanggal 21 Februari 2023 sebesar AS$4.550.

The SEGHPL Bank Loan third utilisation was made on 21 February 2023 amounting to US$4,550.

Pada tanggal 8 November 2023, SEGHPL melakukan pembayaran di muka pokok pinjaman sebesar AS$90.000. Akibat pembayaran di muka tersebut, breaking costs pelunasan di muka pinjaman bank sebesar AS$391 telah dicatat sebagai bagian biaya keuangan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

On 8 November 2023, SEGHPL made a principal prepayment of US$90,000. As a result of such prepayment, the breaking costs for prepayment of the Bank Loan amounting to US$391 has been recorded as part of finance costs in profit or loss for the year ended 31 December 2023.

Perjanjian fasilitas dikenakan bunga mengambang (i) sebesar margin yang berlaku di atas LIBOR untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 atau ketika LIBOR tidak tersedia, mana yang lebih dahulu; dan (ii) margin yang berlaku ditambah spread kredit 0,42826% ditambah secured overnight financing rate ("SOFR") sebagaimana diterbitkan oleh CME Group Benchmark Administration Limited. Bunga terutang setiap semester.

The facility agreements bear floating interest (i) at applicable margin over LIBOR for the period until 30 June 2023 or until LIBOR is no longer available, whichever is earlier; and (ii) applicable margin plus 0.42826% credit spread over the secured overnight financing rate ("SOFR") as published by CME Group Benchmark Administration Limited. The interest is payable on a semi-annual basis.

Pinjaman bank SEGHPL tersebut dijamin dengan beberapa agunan berupa saham SEGPL yang dibeli, saham SEGNBV yang dibeli, saham DGA SEG B.V. yang dibeli, dan saham tertentu PT Barito Pacific Tbk dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (pihak berelasi), dan perjanjian jaminan bisnis atas rekening cadangan pelunasan utang.

The SEGHPL Bank Loan is secured by several items of collateral including the acquired SEGPL shares, acquired SEGNBV shares, acquired DGA SEG B.V. shares, and certain shares of PT Barito Pacific Tbk and PT Chandra Asri Pacific Tbk (related parties), and a business security agreement over the debt service reserve account.

Pada 2 September 2024, SEGHPL mengamandemen pinjaman dengan Bangkok Bank Public Company Limited sebagai berikut:

a. Pada dan setelah Amendment and Restatement Agreement Effective Date, margin per tahun dikurangi.

b. Setelah amandemen, pinjaman Fasilitas B akan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2029, dengan opsi untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo selama tambahan 36 bulan.

c. SEGHPL harus membayarkan pinjaman Fasilitas B secara cicilan dengan membayar pada setiasp Tanggal Pelunasan sesuai dengan nilai dan jadwal yang ditentukan sebagai berikut:

On 2 September 2024, SEGHPL amended the loan with Bangkok Bank Public Company Limited as follow:

a. On and after the Amendment and Restatement Agreement Effective Date, margin per annum is reduced.

b. Following the amandement, the Facility B loan will be due on 30 August 2029, with an option to extend the maturity date for an additional 36 months

c. SEGHPL shall repay the Facility B Loans in instalments by repaying on each Repayment Date an amount which reduces the total outstanding Facility B Loans by the amount set out opposite that Repayment Date below:

Jadwal pelunasan Fasilitas B adalah sebagai berikut:

The repayment schedule for Facility B is as follows:

Tanggal pembayaran	Cicilan Pembayaran/ *Repayment installment*	Payment date
5 Januari 2025	US$11.380	5 January 2025
5 Juli 2025	US$11.380	5 July 2025
5 Januari 2026	US$18.200	5 January 2026
5 Juli 2026	US$18.200	5 July 2026
5 Januari 2027	US$20.480	5 January 2027
5 Juli 2027	US$20.480	5 July 2027
5 Januari 2028	US$20.480	5 January 2028
5 Juli 2028	US$20.480	5 July 2028
5 Januari 2029	US$20.480	5 January 2029
Tanggal jatuh tempo akhir	US$293.440	Final maturity date

Perjanjian pinjaman yang telah diamandemen efektif pada tanggal 4 September 2024.

Pada bulan Desember 2024 dan Januari 2025, terdapat pelunasan pinjaman lebih awal sebesar AS$19.000 dan AS$5.000, sehingga jadwal pelunasan setelah tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebagai berikut:

The amended loan agreement was effective on 4 September 2024.

On December 2024 and January 2025, there are early repayment loan amounting to US$19,000 and US$5,000 respectively, thus the repayment schedules after 31 December 2024 becomes as follow:

Tanggal pembayaran	Cicilan Pembayaran/ *Repayment installment*	Payment date
5 Januari 2025	US$5.000	5 January 2025
5 Juli 2025	-	5 July 2025
5 Januari 2026	US$16.960	5 January 2026
5 Juli 2026	US$18.200	5 July 2026
5 Januari 2027	US$20.480	5 January 2027
5 Juli 2027	US$20.480	5 July 2027
5 Januari 2028	US$20.480	5 January 2028
5 Juli 2028	US$20.480	5 July 2028
5 Januari 2029	US$20.480	5 January 2029
Tanggal jatuh tempo akhir	US$293.440	Final maturity date

Akibat pembayaran di muka tersebut, *breaking costs* pelunasan di muka pinjaman bank sebesar AS$63 telah dicatat sebagai bagian biaya keuangan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

As a result of such prepayment, the breaking costs for prepayment of the Bank Loan amounting to US$63 has been recorded as part of finance costs in profit or loss for the year ended 31 December 2024

Pada tanggal 22 November 2024, SEGHPL menandatangani kontrak swap suku bunga dengan BBL untuk melindungi volatilitas biaya bunganya dari pinjaman suku bunga mengambang dalam dolar AS. Kontrak swap suku bunga berikut adalah sebagai berikut:

On 22 November 2024, SEGHPL entered into interest rate swap contract with BBL in order to protect its interest cost volatility from the US$ floating rate loan. The following interest rate swap contract is as follows:

Counterparty	Notional	Fixed rate	Period
BBL	US$221,810,000	4,00%	Jan 6, 2025 – Jul 5, 2029

Semua instrumen derivatif memenuhi syarat sebagai arus kas lindung nilai mulai tanggal 31 Desember 2025. Penurunan nilai wajar pada instrumen hedging ditetapkan sebagai arus kas lindung untuk periode 31 Desember 2025 bernilai AS$3.990 (setelah dikurangi pajak) disajikan sebagai penghasilan komprehensif lain.

All of the derivative financial instruments qualified as cash flow hedges as at 31 December 2025. Fair value loss on hedging instruments designated as cash flow hedges for the year ended 31 December 2025 amounting to US$3,990 (net of tax) is presented in other comprehensive income as other comprehensive income.

Pada tanggal 31 December 2025, nilai wajar estimasi kontrak ini adalah AS$3.990 dan tidak menguntungkan untuk SEGHPL.

As at 31 December 2025, the estimated fair value of these contracts was US$3,990 and was unfavourable to SEGHPL

Pinjaman tersebut mengandung batasan-batasan tertentu termasuk batasan keuangan (efektif sejak 30 Juni 2023 sampai tanggal jatuh tempo), batasan akuisisi, batasan utang, batasan pelepasan aset, batasan distribusi ekuitas dan batasan pelepasan saham gadai.

The loan contains certain covenants including financial covenants (effective from 30 June 2023 until the maturity date), limitation on acquisitions, limitation on indebtedness, limitation on asset disposal, limitation on equity distributions and limitation on disposal of pledged shares.

(ii) Utang Bank Perusahaan

(ii) The Company's Bank Loan

Pada tanggal 31 Oktober 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian committed revolving credit facility untuk tiga tahun sebesar AS$50.000 dengan PT DBS Indonesia. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal penarikan.

On 31 October 2023, the Company entered into a three-year committed revolving credit facility agreement of US$50,000 with PT DBS Indonesia. The facility has a maturity date of 12 months after the drawdown date.

Pada tanggal 2 November 2023, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar AS$39.000 yang digunakan untuk membiayai tujuan umum Perusahaan. Fasilitas ini telah dilunasi penuh pada bulan November 2024.

On 2 November 2023, the Company made a drawdown of US$39,000 to finance the Company's general purposes. This facility has been fully repaid on November 2024.

Pada tanggal 2 November 2024, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar AS$39.000 yang digunakan untuk membiayai tujuan umum Perusahaan. Fasilitas ini telah dilunasi penuh pada bulan November 2025.

On 2 November 2024, the Company made a drawdown of US$39,000 to finance the Company's general purposes. This facility has been fully repaid on November 2025.

Pada tanggal 2 November 2025, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar AS$39.000 yang digunakan untuk membiayai tujuan umum Perusahaan.

On November 2025, the Company made a drawdown of US$39,000 to finance the Company's general purposes.

Pada tanggal 24 Juni 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian committed revolving credit facility untuk tiga tahun sebesar IDR300.000.000.000 – nilai penuh, dengan PT DBS Indonesia. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal penarikan.

On 24 June 2024, the Company entered into a three-year committed revolving credit facility agreement of IDR300,000,000,000 – full amount, with PT DBS Indonesia. The facility has a maturity date of 12 months after the drawdown date.

Pada tanggal 26 Juni 2024, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar IDR272.070.250.000 – nilai penuh, yang digunakan untuk membiayai tujuan umum Perusahaan. Fasilitas ini telah dilunasi penuh pada bulan Juni 2025.

On 26 June 2024, the Company made a drawdown of IDR272,070,250,000 – full amount, to finance the Company's general purposes. This facility has been fully repaid on June 2025.

Pada tanggal 26 Juni 2025, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar IDR272.070.250.000 – nilai penuh, yang digunakan untuk membiayai tujuan umum Perusahaan.

On 26 June 2025, the Company made a drawdown of IDR272,070,250,000 - full amount to finance the Company's general purposes.

Pada tanggal 13 Desember 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian committed revolving credit facility untuk tiga tahun sebesar Rp507.000.000.000 - nilai penuh dengan PT DBS Indonesia. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal penarikan.

On 13 December 2024, the Company entered into a three-year committed revolving credit facility agreement of IDR507,000,000,000 - full amount with PT DBS Indonesia. The facility has a maturity date of 12 months after the drawdown date.

Pada tanggal 16 Desember 2024, Perusahaan melakukan penarikan sebesar Rp506.158.500.000 - nilai penuh untuk membiayai keperluan umum Perusahaan. Fasilitas ini telah dilunasi penuh pada bulan Desember 2025.

On 16 December 2024, the Company made a drawdown of IDR506,158,500,000 - full amount to finance the Company's general purposes. This facility has been fully repaid on December 2025.

Pada tanggal 16 Desember 2025, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar Rp506.158.500.000 – nilai penuh untuk membiayai keperluan umum Perusahan.

On 16 December 2025, the Company made a drawdown of Rp506.158.500.000 – full amount to finance the Company's general purposes.

Perjanjian-perjanjian fasilitas diatas ini memberikan bunga tetap sebesar 0,6% margin di atas tingkat bunga deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas perjanjian fasilitas ini. Bunga terutang pada saat jatuh tempo fasilitas.

The facility agreements above bears fixed interest at 0.6% margin over the time deposit interest rate used as collateral for this facility agreement. The interest is payable at the maturity date of the facility.

(iii) Utang Bank BWE

(iii) BWE's Bank Loan

Pada tanggal 28 Maret 2024, PT Barito Wind Energy ("BWE"), entitas anak yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") untuk komitmen fasilitas Tahap A dan Tahap B. Fasilitas Tahap A yang disetujui adalah jumlah rupiah yang disetarakan dengan USD 70.000 dan Fasilitas Tahap B setara dengan USD 40.000 ("Pinjaman Bank BWE").

On 28 March 2024, PT Barito Wind Energy ("BWE"), a 99.99% controlled subsidiary of the Company, has signed Facilities Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") for committed facilities – Tranche A and Tranche B. Tranche A Facility is the agreed IDR equivalent of USD 70,000 and Tranche B Facility is USD 40,000 respectively (the "BWE Bank Loan").

Fasilitas Tahap A dan B memiliki tanggal jatuh tempo 120 bulan (dapat diperpanjang) dan 6 bulan, setelah tanggal penggunaan dana awal.

Tranche A and B have maturity dates of 120 months (can be extended) and 6 months respectively, after the initial utilization date.

Pinjaman dari Bank BWE dipergunakan untuk:

1. Fasilitas Tahap A untuk mendanai pembayaran akuisisi PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SBE") dan PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia ("OMI").
2. Fasilitas Tahap B untuk mendanai keperluan umum BWE.

The proceeds of the BWE Bank Loan will be used as follows:

1. Tranche A Facility is to fund the acquisition payment of PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SBE") and PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia ("OMI").
2. Tranche B Facility is to fund the general corporate purposes of BWE.

Penggunaan dana pertama dari Pinjaman Bank BWE dilakukan pada tanggal 30 Maret 2024 sebesar Rp1.114.260.000.000 – nilai penuh, yang merupakan pemanfaatan penuh dari Pinjaman Bank Tahap A.

The BWE Bank Loan first utilisation was made on 30 March 2024, amounting to Rp1,114,260,000,000 – full amount, which consisted of full utilisation of Tranche A.

Penggunaan dana kedua dari Pinjaman Bank BWE dilakukan pada tanggal 1 April 2024 sebesar AS$29.000. Pada tanggal 14 Juni 2024, Pinjaman Bank Tahap B telah sepenuhnya dilunasi.

Pinjaman Bank BWE dikenakan bunga mengambang untuk setiap Periode Pembayaran Bunga dengan tingkat persentase per tahun, yaitu:

a) Untuk Pinjaman Tahap A, jumlah dari (i) margin yang berlaku dan (ii) JIBOR untuk Periode Pembayaran Bunga tersebut, bunga terutang setiap semester; dan
b) untuk Pinjaman Tahap B, sebesar 0,6%, bunga terutang pada saat pinjaman jatuh tempo.

Pinjaman Bank BWE dijamin dengan beberapa agunan termasuk saham-saham OMI, dan gadai atas rekening BWE dan OMI.

Pinjaman ini mengandung batasan-batasan rasio finansial tertentu (berlaku sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal jatuh tempo)

The BWE Bank Loan second utilisation was made on 1 April 2024, amounting to US$29,000. On 14 June 2024, tranche B has been fully repaid.

BWE Bank Loan bear floating interest for each Interest Period is the percentage rate per annum which is:

a) in relation to a Tranche A Loan, the aggregate of (i) the applicable Margin and (ii) JIBOR for that Interest Period, the interest is payable on a semi-annual basis; and
b) in relation to a Tranche B Loan, 0.6%, the interest is payable at the end of maturity date.

The BWE Bank Loan is secured by several items of collateral including the shares of OMI, and pledge of account of BWE and OMI.

The loan contains certain financial ratios covenants (effective from 31 December 2024 until the maturity date)

(iv) Utang Bank SBE

SBE menandatangani kesepakatan pinjaman dengan tujuan pengembangan Projek di Sidrap dengan jumlah yang tidak melebihi AS$120.000 dengan Konsorsium SMBC. Pada tanggal 31 December 2025, Konsorsium SMBC terdiri dari SMBC, Bank SMBC Indonesia, PT Indonesia Infrastructure Finance, DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan Bayfront IABS VII Pte. Ltd.

Berdasarkan kesepakatan pinjaman yang telah diamandemen dan dinyatakan ulang (“A&R Loan Agreement”), syarat pembayaran pinjaman secara setengah tahunan sampai 15 Januari 2034 dengan bunga yang dibebankan menggunakan SOFR ditambah margin per tahun. SBE juga diwajibkan untuk melakukan kesepakatan hedging (pertukaran suku bunga) untuk nilai notional minimal pada 80% dan tidak melebihi 100% dari nilai pokok.

Sesuai dengan kesepakatan pinjaman, utang ini menerapkan batasan keuangan tertentu dan dijaminkan dengan aset tetap SBE, asset bergerak, piutang, asuransi, modal saham, dan saham yang dimiliki oleh masing-masing BWE dan PT Barito Mitra Investama.

SBE menerapkan hedge accounting pada 15 Januari 2020 dan 16 Maret 2020 – tanggal berlakunya lindung nilai untuk instrumen keuangan derivatif terhadap pemaparan SBE terhadap resiko suku bunga atas pinjaman jangka panjangnya. SBE mendokumentasikan secara formal hubungan antara instrumen hedging dan objek lindung nilai, meliputi tujuan manajemen resiko, strategi dalam melaksanakan transaksi lindung nilai dan resiko yang dilindung nilai, bersama dengan metode yang akan digunakan untuk menilai keefektifan dari hubungan lindung nilai.

(iv) SBE’s Bank Loan

SBE entered into a loan agreement for the purpose of developing the Project in Sidrap for an amount not exceeding US$120,000 with SMBC Consortium. As at 31 December 2025, SMBC Consortium consist of SMBC, Bank SMBC Indonesia, PT Indonesia Infrastructure Finance, DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, PT Sarana Multi Infrastruktur, and Bayfront IABS VII Pte. Ltd.

Based on the amended and restated loan agreement (“A&R Loan Agreement”), the loan repayment terms were semi-annually until 15 January 2034 with interest charged at the SOFR plus margin per annum. SBE is also required to enter into hedging arrangements (interest rate swaps) for a notional amounts at the minimum 80% and does not exceed 100% of the principal amount.

In accordance with the loan agreement, this borrowing imposes certain financial covenants and is collateralised by SBE’s property, plant and equipment, moveable assets, receivables, insurance, share capital, and shares owned by each of BWE and PT Barito Mitra Investama.

SBE adopted hedge accounting on 15 January 2020 and 16 March 2020 - the hedge inception dates for its derivative financial instruments against the SBE’s exposure to interest rate risk on its long-term loan. SBE formally documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, including the risk management objectives, the strategy in undertaking the hedge transaction and the hedged risk, together with the methods that will be used to assess the effectiveness of the hedging relationship.

Semua instrumen keuangan derivatif memenuhi syarat sebagai arus kas lindung nilai mulai tanggal 31 Desember 2025. Penurunan nilai wajar pada instrumen hedging ditetapkan sebagai arus kas lindung untuk periode 31 Desember 2025 bernilai AS$1.592 (setelah dikurangi pajak) disajikan sebagai penghasilan komprehensif lain.

All of the derivative financial instruments qualified as cash flow hedges as of 31 December 2025. Fair value losses on hedging instruments designated as cash flow hedges for the year ended 31 December 2025 amounting to US$1,592 (net of tax) is presented as other comprehensive income.

Perusahaan menandatangani perjanjian pertukaran suku bunga dengan SMBC untuk melindungi volatilitas beban bunga dari suku bunga pinjaman floating AS$. Berikut rincian perjanjian pertukaran suku bunga yang tersisa pada 31 Desember 2025:

The Company entered into interest rate swap contracts with SMBC in order to protect its interest cost volatility from the US$ floating rate loan. The following interest rate swap contracts were outstanding as at 31 December 2025:

Counterparty	Notional	Fixed rate	Period
SMBC	70,917	2,036%	15 January 2020 – 13 January 2034
SMBC	7,880	1,109%	16 March 2020 – 13 January 2034

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai wajar estimasi kontrak ini adalah AS$8.868 dan menguntungkan untuk SBE.

As of 31 December 2025, the estimated fair value of these contracts was US$8,868 and was favourable to SBE.

(v) Utang Bank SEGDS

(v) SEGDS's Bank Loan

Pada tanggal 7 November 2024, PT SEGDS (Star Energy Geothermal Drilling Services) telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan BCA untuk Fasilitas Kredit Berganda dan fasilitas LC.

On 7 November 2024, PT SEGDS (Star Energy Geothermal Drilling Services) has signed Facilities Agreement with BCA for Multiples Credit Facilities and LC facilities.

Fasilitas kredit berganda dengan nilai yang disepakati sebesar Rp374.000.000.000 – nilai penuh atau setara dengan AS$22.000 memiliki tanggal jatuh tempo maksimum 31 Desember 2035. Dana dari fasilitas Kredit Berganda akan digunakan untuk pembelian 1 unit rig pengeboran dan semua keperluan untuk mendukung proyek. Fasilitas ini dikenakan bunga mengambang JIBOR 6 bulan + margin yang berlaku per tahun.

Multiples credit facilities with the agreed Rp374,000,000,000 – full amount or equivalent US$22,000 have maximum maturity dates of 31 December 2035. The proceeds of the Multiples Credit facilities will be used for purchase of 1 unit drilling rig and all necessities to support the project. The facilities bear floating interest JIBOR 6 month + applicable margin per annum.

Fasilitas LC sebesar Rp374.000.000.000 – nilai penuh atau setara dengan AS$22.000 akan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok rig pengeboran.

LC facilities amounted to Rp374,000,000,000 – full amount or equivalent of US$22,000 will be used for payment to drilling rig supplier.

Aset dan saham SEGDS dijaminkan untuk fasilitas tersebut. Pinjaman tersebut memuat beberapa batasan, termasuk batasan keuangan (efektif sejak 31 Desember 2025 sampai tanggal jatuh tempo) dan batasan negatif tertentu.

Asset and shares of SEGDS is pledged for the facilities. The loan contains certain covenants including financial covenants (effective from 31 December 2025 until the maturity dates) and certain negative covenants.

Pemanfaatan pertama Utang Bank SEGDS dilakukan pada tanggal 19 Desember 2024, sebesar Rp179.868.028.039 – nilai penuh.

The SEGDS Bank Loan first utilisation was made on 19 December 2024, amounting to Rp179,868,028,039 – full amount.

Pemanfaatan kedua Utang Bank SEGDS dilakukan pada tanggal 23 Januari 2025, sebesar Rp30.928.518.632– nilai penuh.

The SEGDS Bank Loan second utilisation was made on 23 January 2025, amounting to Rp30,928,518,632 – full amount.

Pemanfaatan ketiga Utang Bank SEGDS dilakukan pada tanggal 5 Juni 2025, sebesar Rp23.844.362.028– nilai penuh.

The SEGDS Bank Loan third utilisation was made on 5 June 2025, amounting to Rp23,844,362,028 – full amount.

Pemanfaatan keempat Utang Bank SEGDS dilakukan pada tanggal 31 Juli 2025, sebesar Rp31.900.867.356 – nilai penuh.

Pemanfaatan kelima Utang Bank SEGDS dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2025, sebesar Rp32.825.584.231 – nilai penuh.

(vi) Utang Bank SEGPL dan SEGWWL

Pada tanggal 15 April 2025, SEGPL dan SEGWWL menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka senior dengan jaminan dengan DBS Bank Ltd. dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (SMBC) untuk komitmen fasilitas, Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar AS$114.500 dan AS$25.000 ("Utang Bank SEGPL & SEGWWL"). Fasilitas A dan Fasilitas B memiliki jatuh tempo awal dan perpanjangan selama 60 dan 120 bulan setelah tanggal perjanjian fasilitas.

Selama tahun 2025, Utang Bank SEGPL dan SEGWWL telah diutilisasi sebesar AS$65.454 dari Fasilitas A dan B masing-masing sebesar AS$52.857 dan AS$12.597.

Dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk membiayai ekspansi kapasitas di Wayang Windu yang sedang berlangsung.

Perjanjian fasilitas dikenakan bunga mengambang margin yang berlaku ditambah secured overnight financing rate ("SOFR") sebagaimana diterbitkan oleh CME Group Benchmark Administration Limited. Bunga terutang setiap semester.

Pinjaman bank SEGPL & SEGWWL tersebut dijamin dengan beberapa agunan, termasuk gadai atas saham SEGHSDBV, rekening transaksi, dan increditor deed dari Notes 2033.

Seluruh jumlah yang telah digunakan dari Pinjaman Fasilitas B wajib dilunasi sepenuhnya pada tanggal jatuh tempo awal, atau pada tanggal jatuh tempo perpanjangan apabila opsi perpanjangan dilaksanakan.

Pinjaman tersebut mengandung batasan-batasan tertentu termasuk batasan keuangan (efektif sejak 30 Juni 2025 sampai tanggal jatuh tempo), serta ketentuan *negative pledge* tertentu.

(vii) Utang Bank SEGPL, SEGNBV, dan SEGSDBV

Pada tanggal 19 Juni 2025, SEGPL, SEGNBV, dan SEGSDBV menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka senior dengan jaminan dengan DBS Bank Ltd. dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (SMBC) untuk komitmen fasilitas, Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar AS$96.100 dan AS$25.000 ("Utang Bank SEGPL, SEGNBV & SEGSDBV"). Fasilitas A dan Fasilitas B memiliki jatuh tempo awal dan perpanjangan selama 60 dan 120 bulan setelah tanggal perjanjian fasilitas.

The SEGDS Bank Loan fourth utilisation was made on 31 July 2025, amounting to Rp31,900,867,356 – full amount.

The SEGDS Bank Loan fifth utilization was made on 17 October 2025, amounting to Rp32,825,584,231 – full amount.

(vi) SEGPL and SEGWWL Bank Loan

On 15 April 2025, SEGPL and SEGWWL entered into a senior secured term loan facilities agreement with DBS Bank Ltd. and Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (SMBC) for committed facilities – Facility A and Facility B amounting to US$114,500 and US$25,000, respectively (the "SEGPL & SEGWWL Bank Loan"). Facility A and Facility B have initial and extended maturity date of 60 and 120 months, respectively, after the facility agreement date.

During 2025, the SEGPL dan SEGWWL Bank Loan has been utilized amounting to US$65,454 from Facility A and B of US52,857 and US$12,597 respectively.

The proceeds are used to finance the ongoing capacity expansion in Wayang Windu.

The facility agreements bear floating interest applicable margin plus the secured overnight financing rate ("SOFR") as published by CME Group Benchmark Administration Limited. The interest is payable on a semi-annual basis.

The SEGPL & SEGWWL Bank Loan is secured by several items of collateral including pledge over SEGHSDBV shares, transaction account charge, and 2033 Notes intercreditor deed.

The entire amount of Facility B Loan that has been utilised shall be repaid in full on the initial maturity date, or on the extended maturity date if the extension option is exercised.

The loan contains certain covenants including financial covenants (effective from 30 June 2025 until the maturity dates), and certain negative pledge.

(vii) SEGPL, SEGNBV, and SEGSDBV Bank Loan

On 19 Juni 2025, SEGPL, SEGNBV, and SEGSDBV entered into a senior secured term loan facilities agreement with DBS Bank Ltd. and Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (SMBC) for committed facilities – Facility A and Facility B amounting to US$96,100 and US$25,000, respectively (the "SEGPL, SEGNBV & SEGSDBV Bank Loan"). Facility A and Facility B have initial and extended maturity date of 60 and 120 months, respectively, after the facility agreement date.

Selama tahun 2025, Utang Bank SEGPL, SEGNBV dan SEGSDBV telah diutilisasi sebesar AS$11.268 dari Fasilitas A dan B masing-masing sebesar AS$9.129 dan AS$2.139. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai ekspansi kapasitas di Salak dan Darajat yang sedang berlangsung.

Perjanjian fasilitas dikenakan bunga mengambang margin yang berlaku ditambah secured overnight financing rate ("SOFR") sebagaimana diterbitkan oleh CME Group Benchmark Administration Limited. Bunga terutang setiap semester.

Pinjaman bank SEGPL, SEGNBV & SEGSDBV tersebut dijamin dengan beberapa agunan, termasuk gadai atas sebagian saham SEGHSDBV, rekening transaksi, dan increditor deed dari Notes 2029 dan Notes 2038

Seluruh jumlah yang telah digunakan dari Pinjaman Fasilitas B wajib dilunasi sepenuhnya pada tanggal jatuh tempo awal, atau pada tanggal jatuh tempo perpanjangan apabila opsi perpanjangan dilaksanakan.

Pinjaman tersebut mengandung batasan-batasan tertentu termasuk batasan keuangan (efektif sejak 30 Juni 2025 sampai tanggal jatuh tempo), serta ketentuan negative pledge tertentu.

Grup telah melakukan pembayaran utang bank sebesar AS$100.236 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 (31 Desember 2024: AS$89.468).

During 2025, The SEGPL, SEGNBV and SEGSDBV Bank Loan has been utilized amounting to US$11,268 from Facility A and B of US$9,129 and US$2,139 respectively. The proceeds were used to finance the ongoing capacity expansion in Salak and Darajat.

The facility agreements bear floating interest applicable margin plus the secured overnight financing rate ("SOFR") as published by CME Group Benchmark Administration Limited. The interest is payable on a semi-annual basis.

The SEGPL, SEGNBV & SEGSDBV Bank Loan is secured by several items of collateral including pledge over a portion of SEGHSDBV shares, transaction account charge, and 2029 Notes and 2038 Notes intercreditor deed.

The entire amount of Facility B Loan that has been utilised shall be repaid in full on the initial maturity date, or on the extended maturity date if the extension option is exercised.

The loan contains certain covenants including financial covenants (effective from 30 June 2025 until the maturity dates), and certain negative pledge.

The Group has made payment of bank loans totalling US$100,236 for the year ended 31 December 2025 (31 December 2024: US$89,468).

17. SALDO MAKE-UP ACCOUNT PLN

Saldo make-up account PLN pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan jumlah kumulatif pembayaran listrik dan/atau uap oleh PLN kepada Grup Kontraktor Salak berdasarkan mekanisme take-or-pay di ESC Salak melebihi jumlah uap dan/atau listrik yang benar-benar diterima oleh PLN ("nilai make-up PLN") dikurangi listrik dan/atau uap yang dikirim oleh Grup sesuai dengan jumlah take-or-pay berdasarkan Bagian 5.1.1.3 dan Bagian 5.1.2.3 dari ESC Salak. make-up account PLN adalah rekening sementara yang menetapkan jumlah make-up PLN yang dibayarkan oleh PLN, yang akan dikompensasikan dengan pengiriman listrik atau uap masa depan oleh Grup yang melebihi jumlah take-or-pay yang disyaratkan untuk periode tersebut, dengan ketentuan bahwa pengiriman tersebut tunduk pada permintaan dari PLN dan dilakukan atas dasar Upaya Terbaik SEGS dan SEGSPL. Mekanisme set-off untuk mengurangi make-up account PLN sangat terbatas pada pengiriman listrik atau uap oleh SEGSL dan SEGSPL. Tidak ada kewajiban pembayaran finansial berdasarkan ESC untuk SEGSL dan SEGSPL untuk menyelesaikan make-up account. Per 31 Desember 2025, nilai make-up PLN di akun make-up PLN sebesar 191,7 GWh listrik (2024: 214 GWh) dan 204,1 GWh uap (2024: 178,9 GWh), yang setara dengan AS$24.280 (2024: AS$23.182).

17. PLN MAKE-UP ACCOUNT BALANCES

The PLN make-up account balances as at 31 December 2025 and 2024 represent the cumulative amount by which the electricity and/or steam paid by PLN to the Salak Contractor Group based on the take-or-pay mechanism in the Salak ESC exceeds the amount of steam and/or electricity actually accepted by PLN ("PLN make-up amount") minus electricity and/or steam delivered by the Group pursuant to the take-or-pay amount under Section 5.1.1.3 and Section 5.1.2.3 of the Salak ESC. The PLN make-up account is a temporary account setting out the PLN make-up amount paid by PLN, which shall be set off against delivery of future electricity or steam by the Group which exceeds the required take-or-pay amount for such period, provided that such delivery shall be subject to request from PLN and to be performed on SEGS and SEGSPL's Best Effort basis. The set-off mechanism to reduce the PLN make-up account is strictly limited to delivery of electricity or steam by SEGSL and SEGSPL. There are no financial repayment obligations under the ESC for SEGSL and SEGSPL to settle the make-up account. As of 31 December 2025, the PLN make-up amount in the PLN make-up account amounted to 191.7 GWh electricity (2024: 214 GWh) and 204.1 GWh steam (2024: 178.9 GWh), which is equivalent to US$24,280 (2024: US$23,182).

Realisasi saldo make-up account PLN tunduk pada persyaratan PLN untuk tanggal pengiriman uap dan/atau listrik di masa mendatang yang mungkin lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

The realisation of the PLN make-up account balance is subject to the requirements of PLN for the delivery date of steam and/or electricity in the future which may be more than 12 months after the statement of financial position date.

Berikut ini adalah mutasi saldo make-up account PLN:

Set out below is the movement of the PLN make-up account balances:

	2025	2024	
Saldo awal	23.182	22.174	Beginning balance
Penambahan	3.927	1.008	Addition
Realisasi ke laba rugi	(2.829)	-	Realisation to profit or loss
Saldo akhir	24.280	23.182	Ending balance

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

	2025	2024	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang			**Long-term employee benefit liabilities**
Imbalan pasca kerja			Post-employment benefits
Program pensiun manfaat pasti	23.217	15.418	Defined benefit pension program
Program masa persiapan pensiun	1.396	1.193	Pre-retirement benefit program
Imbalan jangka panjang lainnya	482	323	Other long-term benefits
Jumlah	25.095	16.934	Total
Beban diakui di laba rugi			Expense recognised in profit or loss
Imbalan pasca kerja			Post-employment benefits
Program pensiun manfaat pasti	3.210	3.078	Defined benefit pension program
Program masa persiapan pensiun	145	147	Pre-retirement benefit program
Imbalan jangka panjang lainnya	205	105	Other long-term benefits
Jumlah	3.560	3.330	Total
Pengukuran kembali program manfaat pasti diakui di penghasilan komprehensif lain			Remeasurement of defined benefit plan recognised in other comprehensive income
Imbalan pasca kerja			Post-employment benefits
Program pensiun manfaat pasti	7.238	(364)	Defined benefit pension program
Program masa persiapan pensiun	162	(82)	Pre-retirement benefit program
Jumlah	7.400	(446)	Total

Program pensiun manfaat pasti

Perusahaan-perusahaan yang relevan dalam Grup telah menyiapkan dana untuk pembayaran imbalan pasca kerja bagi karyawan mereka. Dana tersebut ditempatkan dalam Program Pensiun Untuk Kompensasi Pensiun (“DPLK PPUKP”) yang dikelola oleh DPLK PPUKP Allianz Indonesia.

DPLK PPUKP adalah program untuk mendanai skema manfaat pasti, yang menyediakan pesangon dan uang penghargaan masa kerja dalam bentuk dana gabungan. DPLK PPUKP bertindak sebagai pengurus dan pengelola dana dan tidak bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk membayar klaim yang sebenarnya. Aset dana akan digunakan hanya untuk menyelesaikan kewajiban imbalan kerja. Aset dana dapat dikembalikan ke perusahaan Grup yang relevan ketika pekerjaan semua anggota telah dihentikan.

Defined benefit pension program

The relevant companies within the Group have set up funds for the payment of post-employment benefits for their employees. The funds are placed in a Pension Program for Pension Compensation (“DPLK PPUKP”), which is managed by DPLK PPUKP Allianz Indonesia.

DPLK PPUKP is a program to fund the defined benefit schemes, which provides for severance and gratuity pay in the form of pooled funds. DPLK PPUKP acts as an administrator and fund manager and does not take liability for sufficiency of the fund to pay actual claims. The assets of the fund are to be used only to settle the employee benefit obligations. The assets of the fund can be returned to the relevant Group company when the employment of all members has been terminated.

Program masa persiapan pensiun

Perusahaan-perusahaan yang relevan dalam Grup memberikan program masa persiapan pensiun bagi karyawan yang telah bekerja selama minimal 15 tahun untuk tidak aktif selama tiga bulan sebelum mencapai usia pensiun normal. Selama periode ini, karyawan tersebut berhak atas pendapatan bulanan.

Pre-retirement benefit program

The relevant companies within the Group provide pre-retirement benefit programs for employees who had been working for a minimum of 15 years to be inactive for three months prior to attaining normal retirement age. During this period, the employees are entitled to monthly income.

Imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan-perusahaan yang relevan dalam Grup memberikan program imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk penghargaan ulang tahun dinas yang akan diberikan kepada karyawan setiap lima tahun sekali.

Other long-term benefits

The relevant companies within the Group provide a long-term service anniversary award which will be given to employees every five years.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan pasca kerja karyawan Grup adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in the calculation of post-employment benefits obligations

The principal assumptions used in determining the Group's post-employment benefits obligations are as follows:

	2025	2024	
Tabel mortalita	TMI IV	TMI IV	Mortality table
Tingkat disabilitas	5% TMI IV	5% TMI IV	Disability rate
Usia pensiun normal	56-58	56-58	Normal retirement age

Asumsi mengenai pengalaman mortalitas di masa depan ditetapkan berdasarkan nasihat aktuaria sesuai dengan statistik yang dipublikasikan dan pengalaman Grup. Asumsi mortalitas yang digunakan didasarkan pada tingkat mortalitas industri asuransi Indonesia yang digunakan untuk kontrak asuransi jiwa perorangan; yaitu Tabel Mortalita Indonesia 2019 ("TMI IV") dengan provisi tambahan 5% morbiditas yang diterapkan dalam menghitung liabilitas imbalan jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience by the Group. The mortality assumptions used are based on the Indonesian insurance industry mortality rate which is used for individual life insurance contracts; namely the Indonesian Mortality Table 2019 ("TMI IV") with a further 5% provision for morbidity which is applied in calculating the long-term benefits liability recognised within the consolidated statements of financial position.

Perhitungan aktuaria untuk program pensiun, program masa persiapan pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria terdaftar, KKA Riana & Rekan dan KKA Steven & Mourits sebagaimana dituangkan dalam laporan masing-masing tertanggal 3 Maret 2026 dan 26 Februari 2025.

The actuarial calculations of pension program, pre-retirement benefit program and other long-term benefits as at 31 December 2025 and 2024 were calculated by a registered Actuarial Consulting Firm, KKA Riana & Partners and KKA Steven & Mourits as set out in their reports dated 3 March 2026 and 26 February 2025, respectively.

i. Program pensiun manfaat pasti

Jumlah liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

i. Defined benefit pension program

The liability recognised in the consolidated statements of financial position is determined as follows:

	2025	2024	
Nilai kini kewajiban yang didanai	41.524	34.246	Present value of funded obligations
Nilai wajar aset program	(18.307)	(18.828)	Fair value of plan assets
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	23.217	15.418	Liabilities in the consolidated statements of financial position

Mutasi kewajiban program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefit pension program obligation is as follows:

	2025	2024	
Pada awal tahun	34.246	36.082	At the beginning of the year
Akuisisi entitas anak	-	94	Acquisitions of subsidiaries
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss
Biaya jasa kini	2.244	2.273	Current service cost
Biaya bunga	2.201	2.095	Interest expense
Biaya jasa lalu	-	17	Past service cost
Keuntungan dari perubahan selisih kurs	(1.424)	(1.664)	Gains from foreign exchange differences
	3.021	2.721	
Kerugian/(keuntungan) aktuaria dari perubahan:			Actuarial losses/(gains) from changes in:
Asumsi keuangan	7.051	(910)	Financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	995	546	Experience adjustments
	8.046	(364)	
Imbalan yang dibayar	(3.789)	(4.287)	Benefits paid
Jumlah	41.524	34.246	Total

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2025	2024	
Tingkat diskonto	6,00 - 6,71%	7,00%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%	3,00%	Salary growth rate per annum

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets is as follows:

	2025	2024	
Pada awal tahun	18.828	21.642	At the beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Pendapatan bunga	1.235	1.307	Interest income
Kerugian dari perubahan selisih kurs	(699)	(959)	Losses from foreign exchange differences
	19.364	21.990	
Keuntungan/(kerugian) aktuaria:			Actuarial gains/(losses) from:
Pengukuran kembali imbalan hasil atas aset	808	(627)	Remeasurement of return on plan assets
Iuran pemberi kerja	1.832	1.480	Employer's contributions
Pembayaran manfaat	(3.697)	(4.015)	Benefit payments
Jumlah	18.307	18.828	Total

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori utama aset program yang dikelola oleh DPLK Allianz pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2025 and 2024, the major categories of plan assets managed by DPLK Allianz at the end of the reporting period are as follows:

	2025	2024	
Investasi pendapatan tetap	17.541	18.428	Fixed income investment
Investasi pasar uang	766	400	Money market investment
Jumlah	18.307	18.828	Total

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan yang wajar dari setiap asumsi signifikan dalam perhitungan program pensiun manfaat pasti pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi semua asumsi lain tetap konstan:

The sensitivity analysis below has been determined based on the reasonably possible changes of each significant assumption in the calculation of the defined benefit pension program as at the end of the reporting period, assuming all other assumptions were held constant:

		Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on defined benefit obligation		
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(2.653)	2.869	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	2.934	(2.759)	Salary growth rate

ii. Program masa persiapan pensiun

Mutasi kewajiban program masa persiapan pensiun adalah sebagai berikut:

ii. Pre-retirement benefit program

The movement in the pre-retirement benefit program obligation is as follows:

	2025	2024	
Pada awal tahun	1.193	1.228	At the beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	65	71	Current service cost
Biaya bunga	80	76	Interest expense
Keuntungan dari perubahan selisih kurs	(48)	(57)	Gains from foreign exchange differences
	1.290	1.318	
Keuntungan/(kerugian) aktuaria dari perubahan:			Actuarial losses/(gains) from changes in:
Asumsi keuangan	229	(28)	Financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	(67)	(54)	Experience adjustments
	162	(82)	
Imbalan yang dibayar	(56)	(43)	Benefit payments
Jumlah	1.396	1.193	Total

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2025	2024	
Tingkat diskonto	6,00 - 6,50%	7,00%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%	3,00%	Salary growth rate per annum

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan yang wajar dari setiap asumsi signifikan yang digunakan dalam perhitungan program masa persiapan pensiun pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi semua asumsi lain tetap konstan:

The sensitivity analysis below has been determined based on the reasonably possible changes of each significant assumption used in the calculation of the pre-retirement benefit program as at the end of the reporting period, assuming all other assumptions were held constant:

		Dampak terhadap program masa persiapan pensiun/ impact on pre-retirement benefits program		
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(84)	93	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	96	(88)	Salary growth rate

iii. Imbalan jangka panjang lainnya

iii. Other long-term benefit

Mutasi kewajiban imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The movement in the other long-term benefit program obligation is as follows:

	2025	2024	
Pada awal tahun	323	242	At the beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	39	26	Current service cost
Biaya bunga	21	15	Interest expense
Perubahan selisih kurs	(11)	(6)	Foreign exchange differences
Kerugian/(keuntungan) aktuaria dari perubahan:			Actuarial losses/(gains) from changes in:
Asumsi keuangan	30	14	Financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	115	50	Experience adjustments
	194	99	
Imbalan yang dibayar	(35)	(18)	Benefit payments
Jumlah	482	323	Total

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2025	2024	
Tingkat diskonto	3,75 - 6,76%	7,00%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%	3,00%	Salary growth rate per annum

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan yang wajar dari setiap asumsi signifikan yang digunakan dalam perhitungan program imbalan jangka panjang lainnya pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi semua asumsi lain tetap konstan:

The sensitivity analysis below has been determined based on the reasonably possible changes of each significant assumption used in the calculation of the other long-term benefit program as at the end of the reporting period, assuming all other assumptions were held constant:

		Dampak terhadap imbalan jangka panjang lainnya/ Other long-term benefit		
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(26)	27	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	21	(19)	Salary growth rate

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti, program masa persiapan pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Group is exposed to a number of risks through its defined benefit pension program, pre-retirement benefit program and other long-term benefit program. The most significant risks are as follows:

Volatilitas Aset

Kewajiban dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada Zero-Coupon Bond dari Indonesia Government Securities Yield Curve ("IGSYC"). Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Grup menempatkan aset program investasinya di pasar aktif (pendapatan tetap dan investasi pasar uang) yang tidak memiliki harga pasar yang dikutip.

Asset volatility

The liabilities are calculated using a discount rate set with reference to the Zero-Coupon Bond from the Indonesian Government Securities Yield Curve ("IGSYC"). If the plan assets underperform this yield, it will create a deficit.

The Group places its investment plan assets in active markets (fixed income and money market investments) which did not have a quoted market.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Manfaat yang diharapkan akan dibayarkan setiap tahun selama lima tahun ke depan, dan agregat untuk lima tahun sesudahnya adalah sebagai berikut (tidak didiskonto):

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The benefits expected to be paid in each of the next five years, and the aggregate for the five years thereafter are as follows (undiscounted):

	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Antara dua sampai lima tahun/ *Between two to five years*	Lebih dari lima tahun/ *Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Program pensiun manfaat pasti	4.687	15.273	71.291	91.251	Defined benefit pension program
Program persiapan masa pensiun	136	641	2.650	3.427	Pre-retirement benefit program
Imbalan jangka panjang lainnya	77	229	555	861	Other long-term benefit program
Jumlah	4.900	16.143	74.496	95.539	Total

Manajemen Grup berpendapat bahwa estimasi liabilitas imbalan pasca kerja cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

The management of the Group believes that the estimated liability provided for post-employment benefits is adequate to cover the requirements of the manpower regulations or Collective Labour Agreement.

19. MODAL SAHAM, CADANGAN LAINNYA, DAN SAHAM TREASURI

a. Modal saham

Seluruh saham Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 9 Oktober 2023. Struktur pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, biro administrasi efek, adalah sebagai berikut:

Pemegang saham/*Shareholders*	saham/ *Number of shares*	Percentage of ownership (%)	Nilai/ *Amount* (AS$/US$)	
Barito Pacific	86.514.146.666	64,67	832.080	Barito Pacific
Green Era	30.673.313.100	22,93	295.008	Green Era
Prajogo Pangestu	138.459.700	0,10	1.332	Prajogo Pangestu
Pemegang saham lainnya (masing-masing di bawah 5%)	16.454.300.534	12,29	158.242	Other Shareholders (each below 5%)
	133.780.220.000	99,99	1.286.662	
Saham diperoleh kembali	6.000.000	0,01	58	Treasury stocks
Jumlah	133.786.220.000	100,00	1.286.720	Total

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2024			
Pemegang saham/*Shareholders*	Lembar saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Nilai/ *Amount* (AS$/US$)	
Barito Pacific	86.514.146.666	64,67	832.080	Barito Pacific
Green Era	31.577.660.000	23,60	303.698	Green Era
Prajogo Pangestu	130.889.700	0,10	1.259	Prajogo Pangestu
Pemegang saham lainnya (masing-masing di bawah 5%)	15.563.523.634	11,63	149.683	Other Shareholders (each below 5%)
Jumlah	133.786.220.000	100,00	1.286.720	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 54 oleh Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta Selatan, tertanggal 15 Juni 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0033656.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023, pemegang saham menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dari semula Rp1.000.000 – nilai penuh per lembar saham menjadi Rp150 – nilai penuh per lembar saham.

Pemegang saham biasa berhak menerima dividen pada saat dan ketika diumumkan oleh Perusahaan. Semua saham biasa membawa satu suara per saham.

Selama tahun 2025, Perusahaan tidak mengumumkan pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan (2024: AS$48.496).

Selama tahun 2025, entitas-entitas anak Perusahaan mengumumkan dan membayarkan dividen kepada pihak non-pengendali sebesar AS$13.613 (2024: AS$28.001).

19. SHARE CAPITAL, OTHER RESERVES AND TREASURY SHARES

a. Share capital

All shares in the Company have been listed on the Indonesia Stock Exchange since 9 October 2023. The Company's shareholders as at 31 December 2025 based on the records maintained by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, the share administrator, were as follows:

The Company's shareholders as at 31 December 2024 were as follows:

Based on the Notarial Deed No. 54 of Aulia Taufani, S.H., a notary in South Jakarta, dated 15 June 2023 and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0033656.AH.01.02.Tahun 2023 dated 16 June 2023, the Shareholders agree the change of the Company's nominal share value from IDR1,000,000 – full amount per share to become IDR150 – full amount per share.

The holders of ordinary shares are entitled to receive dividends as and when declared by the Company. All ordinary shares carry one vote per share.

During 2025, the Company did not declare any dividends to the shareholders of the Company (2024: US$48,496).

During 2025, the subsidiaries of the Company declared and paid dividends to non-controlling interests amounted to US$13,613 (2024: US$28,001).

b. Tambahan modal disetor

Tambahan modal disetor berasal dari selisih nilai transaksi restrukturisasi antar entitas sepengendali dari selisih antara nilai saham baru Perusahaan dengan nilai modal saham SEGHPL yang diperoleh (Catatan 1c), serta jumlah lebih yang diterima dari Penawaran Umum Saham Perdana setelah dikurangi dengan biaya emisi saham (Catatan 1b).

b. Additional paid-in capital

Additional paid-in capital was resulted from difference in value from restructuring transactions of entities under common control arises from the difference between the value of the Company's new shares and the value of SEGHPL's share capital acquired (Note 1c), and the excess amounts received from the IPO in after deducting the share issuance costs (Note 1b).

c. Cadangan lainnya

c. Other reserves

	2025	2024	
Pengaruh transaksi yang melibatkan entitas sepengendali	(977.346)	(977.346)	Effect of transactions involving entities under common control
Premi yang dibayarkan atas akuisisi anak perusahaan dengan hak partisipasi	(10.274)	(10.274)	Premium paid on acquisition of subsidiaries with participating interests
Penyesuaian mata uang asing	(2)	(2)	Foreign currency adjustment
Cadangan lindung nilai arus kas	(5.625)	-	Cash flow hedging reserve
Jumlah	(993.247)	(987.622)	Total

Perubahan cadangan lindung nilai arus kas adalah sebagai berikut:

Changes in the cash flow hedging reserve is as follows:

	2025	2024	
Cadangan lindung nilai arus kas:			Cash flow hedging reserve:
Pada awal tahun	-	-	At the beginning of the year
Efek estimasi nilai wajar	(5.625)	-	Impact of the estimated fair value
Pada akhir tahun	(5.625)	-	At the end of the year

d. Cadangan umum

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007 mewajibkan pembentukan cadangan umum dari laba bersih hingga mencapai paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk pembentukan cadangan.

Pada tanggal 8 Juni 2023, melalui keputusan sirkuler pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa Perusahaan menyetujui dan memutuskan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar AS$911 sebagai cadangan umum dan sisanya sebagai laba ditahan, yang kemudian diresmikan melalui Akta Notaris No. 52 oleh Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta Selatan, tertanggal 15 Juni 2023. Cadangan umum disajikan sebagai laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya pada laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 29 Mei 2024, melalui rapat umum pemegang saham tahunan, pemegang saham menyetujui dan memutuskan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar AS$1.100 sebagai cadangan umum dan sisanya sebagai laba ditahan, yang kemudian diresmikan melalui Akta Notaris No. 17 oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta Selatan, tertanggal 29 Mei 2024. Cadangan umum disajikan sebagai laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya pada laporan posisi keuangan.

d. General reserve

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 issued in August 2007 requires the establishment of a general reserve from net profits of at least 20% of a company's issued and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of the reserve.

On 8 June 2023, circular resolutions of the shareholders in lieu of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company approved and decided the use of net profit of the Company from the financial year ended 31 December 2022 amounted to US$911 as a general reserve fund and the remaining as retained earnings, which was subsequently formalised through Notarial Deed No. 52 of Aulia Taufani, S.H., a notary in South Jakarta, dated 15 June 2023. The general reserve is presented as appropriated retained earnings in the statement of financial position.

On 29 May 2024, through annual general meeting of shareholders of the Company approved and decided the use of net profit of the Company from the financial year ended 31 December 2023 amounted to US$1,100 as a general reserve fund and the remaining as retained earnings, which was subsequently formalised through Notarial Deed No. 17 of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., a notary in South Jakarta, dated 29 Mei 2024. The general reserve is presented as appropriated retained earnings in the statement of financial position.

Pada tanggal 18 Juni 2025, melalui rapat umum pemegang saham tahunan, pemegang saham menyetujui dan memutuskan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS$1.220 sebagai cadangan umum dan sisanya sebagai laba ditahan, yang kemudian diresmikan melalui Akta Notaris No. 72 oleh Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta Selatan, tertanggal 18 Juni 2025. Cadangan umum disajikan sebagai laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya pada laporan posisi keuangan.

On 18 June 2025, through annual general meeting of shareholders of the Company approved and decided the use of net profit of the Company from the financial year ended 31 December 2024 amounted to US$1,220 as a general reserve fund and the remaining as retained earnings, which was subsequently formalised through Notarial Deed No. 72 of Aulia Taufani, S.H., a notary in South Jakarta, dated 18 June 2025. The general reserve is presented as appropriated retained earnings in the statement of financial position.

e. Saham treasuri

Pada tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 23 Juni 2025, Perusahaan melakukan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar berfluktuasi signifikan tanpa memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), sesuai Pasal 7 Peraturan OJK No.13 tahun 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan melakukan Pembelian Kembali melalui Bursa Efek Indonesia sejumlah 6.000.000 lembar saham sebesar Rp32 miliar (nilai penuh) atau setara dengan AS$1.930.

Adapun mutasi jumlah lembar saham dan nilai saham treasuri untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

e. Treasury shares

On 24 March 2025 to 23 June 2025, the Company carried out share buybacks in significantly fluctuating market conditions without the Company's General Meeting of Shareholders ("GMS") as stipulated by Article 7 of OJK Regulation No.13 in 2023.

For the year ended 31 December 2025, the Company conducted the Buyback through the Indonesia Stock Exchange of 6,000,000 shares amounted to Rp32 billion (full amount) or equivalent to US$1,930.

The mutations in the number of shares and the value of treasury shares for the years ended 31 December 2025 are as follows:

	Jumlah saham treasuri/ Total treasury shares		
	Lembar saham/Number of shares	Jumlah/ Total	
Saldo 1 Januari 2025	-	-	Balance as of 1 January 2025
Pembelian saham treasuri	6.000.000	1.930	Buyback of treasury shares
Saldo 31 Desember 2025	6.000.000	1.930	Balance as of 31 December 2025

20. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

20. NON-CONTROLLING INTERESTS

	2025						
	Saldo awal/ Beginning balance	Bagian atas laba neto/ Share in net profit	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Dividen/ Dividends	Penambahan modal ditempatkan dan disetor/ Increase of issued and paid-up capital	Saldo akhir/ Ending balance	
ACEHI	166.270	21.254	(583)	(10.913)	-	176.028	ACEHI
DGA SEG B.V.	42.307	11.656	(292)	(2.700)	-	50.971	DGA SEG B.V.
Lain-lain	7.094	29	(315)	-	12.844	19.652	Others
Jumlah	215.671	32.939	(1.190)	(13.613)	12.844	246.651	Total

	2024						
	Saldo awal/ Beginning balance	Bagian atas laba neto/ Share in net profit	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Dividen/ Dividends	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiary	Saldo akhir/ Ending balance	
ACEHI	165.060	20.743	(32)	(19.501)	-	166.270	ACEHI
DGA SEG B.V.	38.340	12.469	(2)	(8.500)	-	42.307	DGA SEG B.V.
Lain-lain	2.829	(237)	3	-	4.499	7.094	Others
Jumlah	206.229	32.975	(31)	(28.001)	4.499	215.671	Total

Berikut adalah ringkasan informasi keuangan Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V. yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material terhadap Grup.

Below is the summarised financial information of Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V. that has non-controlling interests that are material to the Group.

Ringkasan laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Summarised consolidated statements of financial position are as follows:

	2025	2024	
Aset			**Assets**
Aset lancar	273.218	326.698	Current assets
Aset tidak lancar	2.599.401	2.485.368	Non-current assets
Jumlah aset	2.872.619	2.812.066	Total assets
Liabilitas			**Liabilities**
Liabilitas jangka pendek	(149.887)	(115.688)	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	(1.565.081)	(1.603.676)	Non-current liabilities
Jumlah liabilitas	(1.714.968)	(1.719.364)	Total liabilities
Aset bersih	1.157.651	1.092.702	Net assets

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Summarised consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2025	2024	
Pendapatan	392.890	371.767	Revenue
Laba tahun berjalan	141.501	138.332	Profit for the year
(Kerugian)/penghasilan komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	(3.802)	(219)	Other comprehensive (loss)/income for the year, net of tax
Jumlah keuntungan komprehensif tahun berjalan	137.699	138.113	Total comprehensive income for the year

Ringkasan laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

Summarised consolidated statements of cash flows are as follows:

	2025	2024	
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	234.305	198.984	Net cash generated from operating activities
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(175.052)	(74.146)	Net cash used in investing activities
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(87.500)	(152.235)	Net cash used in financing activities
Penurunan bersih kas dan setara kas	(28.247)	(27.397)	Net decrease in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	72.398	99.795	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	44.151	72.398	Cash and cash equivalents at the end of the year

21. PENDAPATAN / 21. REVENUE

	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan:			Revenue from contracts with customers:
Sepanjang waktu:			Overtime:
Penjualan listrik	291.276	278.366	Sales of electricity
Penjualan uap	123.760	122.023	Sales of steam
Subjumlah	415.036	400.389	Subtotal
Pada waktu tertentu:			Point in time:
Biaya manajemen	22	37	Management fee
Penjualan kredit karbon	-	1	Sales of carbon credits
Subjumlah	22	38	Subtotal
Pendapatan sewa operasi	147.813	156.763	Operating lease income
Pendapatan sewa pembiayaan	42.316	39.633	Finance lease income
Jumlah	605.187	596.823	Total

Penjualan listrik, pendapatan sewa operasi dan pendapatan sewa pembiayaan dihasilkan dari PLN. Penjualan uap dihasilkan dari PGE. Tidak ada pelanggan lain dengan penjualan di atas 10% dari total pendapatan.

Sales of electricity, operating lease income and finance lease income are generated from PLN. Sales of steam is generated from PGE. There are no other customers with sales above 10% of total revenue.

22. BIAYA BERDASARKAN FUNGSI / 22. EXPENSE BY FUNCTION

Daftar rincian beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The detailed schedule of operating expenses for the year ended 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	2025	2024	
Beban usaha:			Operating expenses:
Depresiasi dan amortisasi	(93.449)	(82.756)	Depreciation and amortisation
Kompensasi dan tunjangan karyawan	(39.647)	(39.210)	Employee compensation and benefits
Konsultan dan teknisi	(22.376)	(17.088)	Consultant and technician
Tunjangan produksi kepada PGE	(16.747)	(16.574)	Production allowance to PGE
Lain-lain, bersih	(19.585)	(21.780)	Others, net
Jumlah	(191.804)	(177.408)	Total

Tidak ada pemasok dengan transaksi pembelian di atas 10% dari total beban usaha.

There are no suppliers with purchase transactions above 10% of total operating expenses.

Daftar rincian beban kompensasi dan tunjangan karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The detailed schedule of employee compensation and benefits for the years ended 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	2025	2024	
Tunjangan dan gaji	(35.466)	(35.157)	Wages and salaries
Pelatihan dan perjalanan bisnis	(1.386)	(1.501)	Training and business travel
Katering dan makanan	(1.502)	(1.369)	Catering and food
Lain-lain	(1.293)	(1.183)	Others
Jumlah	(39.647)	(39.210)	Total

Daftar rincian (beban)/pendapatan non-operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The detailed schedule of non-operating (expense)/income for the years ended 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	2025	2024	
(Beban)/pendapatan non-operasional:			Non-operating (expenses)/income:
Beban keuangan	(118.812)	(134.472)	Finance costs
Kerugian kurs mata uang asing, bersih	(150)	(202)	Loss on foreign exchange, net
Pendapatan bunga	11.892	15.397	Interest income
Beban lain-lain, bersih	(559)	(2.042)	Other expenses, net
Jumlah	(107.629)	(121.319)	Total

23. BEBAN KEUANGAN

23. FINANCE COSTS

	2025	2024	
Senior secured notes:			Senior secured notes:
Beban bunga	(71.738)	(76.776)	Interest expense
Amortisasi biaya pembiayaan yang ditangguhkan	(2.084)	(2.261)	Amortisation of deferred financing costs
Utang bank:			Bank loans:
Beban bunga	(41.627)	(52.564)	Interest expense
Amortisasi biaya pembiayaan yang ditangguhkan	(2.117)	(1.831)	Amortisation of deferred financing costs
Breaking costs	-	(63)	Breaking costs
Beban bunga atas liabilitas sewa	(551)	(592)	Interest expense on lease liabilities
Lain-lain	(695)	(385)	Others
Jumlah	(118.812)	(134.472)	Total

24. PERPAJAKAN

24. TAXATION

a. Utang pajak

a. Taxes payable

	2025	2024	
Bagian lancar:			Current portion:
Pajak penghasilan badan	34.323	36.512	Corporate income tax
Pajak lain-lain:			Other taxes:
Pajak Pertambahan Nilai	2.730	3.498	Value Added Tax
Lain-lain	1.111	2.940	Others
Sub-jumlah	3.841	6.438	Sub-total
Bagian tidak lancar:			Non-current portion:
Pajak Pertambahan Nilai	5.711	5.931	Value Added Tax
Jumlah	43.875	48.881	Total

b. Beban pajak penghasilan / **b. Income tax expense**

	2025	2024	
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan kini	-	-	Current income tax
Beban pajak tangguhan	-	-	Deferred tax expense
Sub-jumlah	-	-	Sub-total
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak penghasilan kini	154.527	147.691	Current income tax
Pendapatan pajak tangguhan	(13.910)	(4.678)	Deferred tax income
Sub-jumlah	140.617	143.013	Sub-total
Jumlah	140.617	143.013	Total

Pajak atas laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian berbeda dengan jumlah teoritis yang dihitung menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas laba masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on consolidated profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profit of the consolidated subsidiaries as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	305.754	298.096	Consolidated profit before income tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	104.141	101.562	Tax calculated at applicable tax rate
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	36.476	41.451	Non-deductible expenses
Beban pajak penghasilan konsolidasian	140.617	143.013	Consolidated income tax expense

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dengan estimasi penghasilan kena pajak konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the consolidated profit before income tax and estimated consolidated taxable income is as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	305.754	298.096	Consolidated profit before income tax
Dikurangi:			Less:
Laba sebelum pajak penghasilan - Entitas anak	(309.124)	(303.594)	Profit before income tax - Subsidiaries
Penyesuaian jurnal eliminasi pada konsolidasi	5.000	68.000	Adjustment of elimination entries on consolidation
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	1.630	62.502	Profit before income tax - the Company
Koreksi fiskal	(4.047)	(66.732)	Fiscal correction
Estimasi rugi fiskal - Perusahaan	(2.417)	(4.230)	Estimated fiscal loss - the Company
Pajak penghasilan kini - Entitas anak	154.527	147.691	Current income tax - Subsidiaries
Pajak penghasilan kini - Konsolidasian	154.527	147.691	Current income tax - Consolidated

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan atas rugi fiskal karena adanya ketidakpastian mengenai ketersediaan laba kena pajak di masa depan untuk dapat memanfaatkan aset pajak tangguhan.

As at 31 December 2025 and 2024, the Company did not recognise deferred tax assets for the fiscal losses because there is uncertainty regarding the availability of future taxable profits against which the deferred tax assets can be utilised.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 digunakan sebagai dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan di masing-masing negara.

Corporate Income Tax computations for the years ended 31 December 2025 and 2024 are used as the basis for completing the Corporate Income Tax Returns submitted to the tax authorities in the respective countries.

c. Liabilitas pajak tangguhan

c. Deferred tax liabilities

	2025				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Entitas anak					Subsidiaries
Aset pajak tangguhan					**Deferred tax assets**
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang	5.032	429	2.356	7.817	Provision for long-term employee benefits
Penyisihan atas persediaan usang	644	(17)	-	627	Provision for inventory obsolescence
Saldo make-up account PLN	7.883	373	-	8.256	PLN make-up account balances
Liabillitas sewa	2.369	93	-	2.462	Lease liabilities
Sub-jumlah	15.928	878	2.356	19.162	Sub-total
Liabilitas pajak tangguhan					**Deferred tax liabilities**
Aset tetap	(310.242)	18.020	-	(292.222)	Property, plant and equipment
Piutang sewa pembiayaan	(123.572)	2.073	-	(121.499)	Finance lease receivable
Properti yang belum dikembangkan	(301.002)	-	-	(301.002)	Undeveloped properties
Biaya ditangguhkan	(4.672)	(8.096)	-	(12.768)	Deferred charges
Aset keuangan derivatif	(2.294)	-	343	(1.951)	Derivative financial assets
Aset hak guna	(2.351)	(45)	-	(2.396)	Right-of-use assets
Kontrak pelanggan	(16.775)	151	-	(16.624)	Customer contract
Lain-lain	(1.101)	929	-	(172)	Others
Sub-jumlah	(762.009)	13.032	343	(748.634)	Sub-total
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(746.081)	13.910	2.699	(729.472)	Deferred tax liabilities, net

	2024						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan sehubungan dengan akuisisi entitas anak/ Addition related to acquisition of subsidiary	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Entitas anak							Subsidiaries
Aset pajak tangguhan							**Deferred tax assets**
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang	4.154	-	797	81	-	5.032	Provision for long-term employee benefits
Penyisihan atas persediaan usang	644	-	-	-	-	644	Provision for inventory obsolescence
Saldo make-up account PLN	7.540	-	343	-	-	7.883	PLN make-up account balances
Liabillitas sewa	932	-	1.437	-	-	2.369	Lease liabilities
Sub-jumlah	13.270	-	2.577	81	-	15.928	Sub-total
Liabilitas pajak tangguhan							**Deferred tax liabilities**
Aset tetap	(281.530)	(4.768)	(848)	-	(23.096)	(310.242)	Property, plant and equipment
Piutang sewa pembiayaan	(126.605)	-	3.033	-	-	(123.572)	Finance lease receivable
Properti yang belum dikembangkan	(324.098)	-	-	-	23.096	(301.002)	Undeveloped properties
Biaya ditangguhkan	(4.933)	-	261	-	-	(4.672)	Deferred charges
Aset keuangan derivatif	-	(2.371)	-	77	-	(2.294)	Derivative financial assets
Aset hak guna	(893)	-	(1.458)	-	-	(2.351)	Right-of-use assets
Kontrak pelanggan	-	(17.316)	541	-	-	(16.775)	Customer contract
Lain-lain	(1.673)	-	572	-	-	(1.101)	Others
Sub-jumlah	(739.732)	(24.455)	2.101	77	-	(762.009)	Sub-total
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(726.462)	(24.455)	4.678	158	-	(746.081)	Deferred tax liabilities, net

d. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, beberapa anak-anak perusahaan dalam Grup, yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri Indonesia, menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

Kontraktor JOC menyampaikan pengembalian pajak atas dasar self-assessment. Sesuai dengan amendemen terakhir tentang perpajakan umum dan hukum acara, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2018, kantor pajak dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

d. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, several subsidiaries within the Group, which are Indonesian Taxpayers, calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within five years of when the tax becomes due.

The JOC contractor submits tax returns on the basis of self-assessment. In accordance with the latest amendments of the general taxation and procedural law, which became effective on 1 January 2018, the tax office may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes payable.

e. Tarif pajak

Perusahaan

Perusahaan Terbuka yang memenuhi syarat-syarat tertentu dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan ("PPh") Badan yang berlaku. Dalam hal Perusahaan memenuhi syarat-syarat tersebut, Perusahaan dapat memperoleh tarif PPh Badan lebih rendah untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP"). UU HPP tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% berlaku mulai Tahun Pajak 2022.

Anak perusahaan yang beroperasi di bawah JOC

Anak perusahaan utama Grup beroperasi dan memperoleh pendapatan dari operasi panas bumi dan pembangkit listrik di Indonesia. Berdasarkan JOC, laba entitas anak utama Grup dikenakan pajak penghasilan sebesar 34% dari penghasilan kena pajak masing-masing entitas anak.

Biaya yang tidak dapat dikurangkan terutama terdiri dari biaya bunga dan biaya korporasi lainnya yang dikeluarkan oleh entitas yang memiliki kepentingan di JOC. Perhitungan pajak penghasilan didasarkan pada taksiran penghasilan kena pajak dan jumlahnya dapat disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Pajak diajukan kepada otoritas pajak masing-masing.

e. Tax rates

The Company

Publicly Listed Companies that fulfil certain requirements are entitled to obtain a rate 3% lower than the applicable Corporate Income Tax ("CIT") rate. In the event that the Company fulfils the requirements, the Company can obtain a lower CIT rate for the relevant Fiscal Year.

On 29 October 2021, the President of the Republic of Indonesia has ratified the law No. 7 Year 2021 as Harmonisation of Taxation Regulations (the "HPP Law"). The HPP Law the corporate income tax rate for Corporate Taxpayers and Permanent Establishments remains at 22% effective from 2022 Fiscal Year.

Subsidiaries operating under JOCs

The Group's main subsidiaries operate and earn income from geothermal and power plant operations in Indonesia. Under the JOCs, the Group's main subsidiaries' profit is subject to income tax at 34% of taxable income of the respective subsidiaries.

Non-deductible expenses mainly comprise interest expense and other corporate costs incurred by entities holding interests in the JOCs. Income tax calculations are based on estimated taxable income and amounts may be adjusted when tax returns are filed with the respective tax authority.

Entitas anak lainnya

Entitas anak lainnya dalam Grup adalah wajib pajak Singapura, Belanda dan Indonesia yang dikenakan pajak penghasilan masing-masing sebesar 17% (2024: 17%), 25,8% (2024: 25,8%) dan 22% dan oleh karena itu wajib menyampaikan kepada otoritas pajak Singapura, Belanda dan Indonesia. Tidak ada beban pajak penghasilan kini yang dikeluarkan untuk entitas anak Singapura dan Belanda untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Grup adalah entitas anak dari sebuah Multinational Enterprise (”MNE”) grup, PT Barito Pacific Tbk. PT Barito Pacific Tbk adalah Entitas Induk Utama (”UPE”) Grup.

Grup telah menerapkan pengecualian sementara dari akuntansi untuk pajak tangguhan yang timbul dari peraturan perpajakan Pilar Dua, sebagaimana diatur dalam PSAK 212. Oleh karena itu, Grup tidak mengakui atau mengungkapkan informasi tentang aset dan kewajiban pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua.

Pada Desember 2024, pemerintah Indonesia, sudah mengesahkan peraturan pajak penghasilan Pilar Dua yang berlaku mulai 1 Januari 2025 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2024 (“PMK-136”). Berdasarkan asesmen PT Barito Pacific Tbk, perusahaan induk utama, entitas-entitas yang beroperasi di yurisdiksi Indonesia, termasuk Grup, memenuhi Transitional Safe-Harbour relief untuk tahun pajak 2025.

Grup tidak berekspektasi terdapat eksposur material terhadap pajak penghasilan Pilar Dua atas laporan keuangan konsolidasian ini.

Grup secara berkelanjutan menilai dampak peraturan pajak penghasilan Pilar Dua terhadap kinerja keuangan konsolidasianya di masa depan.

Other subsidiaries

The other subsidiaries within the Group are Singapore, Netherlands and Indonesia tax residents which are subject to income tax at 17% (2024: 17%), 25.8% (2024: 25.8%) and 22%, respectively and hence file tax returns with the Singapore, Netherlands and Indonesia tax authorities. There was no current income tax expense incurred for the Singapore and Netherlands subsidiaries during the years ended 31 December 2025 and 2024.

The Group is a subsidiary of a Multinational Enterprise (“MNE”) group, PT Barito Pacific Tbk. PT Barito Pacific Tbk is the Group’s Ultimate Parent Entity (“UPE”).

The Group has applied the temporary exception from accounting for deferred taxes arising from Pillar Two model rules, as provided in the PSAK 212. Accordingly, the Group neither recognizes nor discloses information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes.

In December 2024, the government of Indonesia has enacted the Pillar Two income taxes legislation effective from January 1, 2025 by issuing Ministry of Finance (“MOF”) Regulation No. 136 Year 2024 (“PMK-136”). Based on assessment of PT Barito Pacific Tbk, the ultimate parent entity, entities operate in Indonesia jurisdiction, including the Group, qualify for Transitional Safe-Harbour relief for fiscal year 2025.

The Group does not expect a material exposure to the Pillar Two income taxes to these consolidated financial statements.

Group continuously assess the impact of the Pillar Two income taxes legislation on its future consolidated financial performance.

25. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

a. Sifat hubungan

25. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

a. Nature of relationships

Pihak berelasi/ Related party	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Jenis transaksi/ Type of transaction
Barito Pacific	Induk Perusahaan/ Parent of the Company	Pemegang saham/Shareholders
PT Griya Idola	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/Under common control with the Company	Piutang lain-lain/Other receivables Beban sewa kantor dan utang sewa/ Office rental expense and lease liabilities

Pihak berelasi/ Related party	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Jenis transaksi/ Type of transaction
Personil manajemen kunci/ Key management personnel	Direksi dan Komisaris Perusahaan/Board of Directors and Board of Commissioners of the Company	Kompensasi/Compensation

b. Rincian transaksi dan saldo

Saldo dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dirinci di bawah ini:

b. Details of transactions and balances

Balances with related parties as at 31 December 2025 and 2024 are detailed below:

	2025	2024	
Liabilitas sewa dan beban yang masih harus dibayar PT Griya Idola	4.107	5.258	Lease liabilities and accrued expenses PT Griya Idola
Persentase terhadap total liabilitas	0,14%	0,17%	As a percentage of total liabilities

Selain informasi pihak berelasi yang diungkapkan di bagian lain dalam laporan keuangan konsolidasian ini, transaksi signifikan berikut antara Grup dan pihak berelasi terjadi sesuai dengan persyaratan yang disepakati antara para pihak selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

In addition to the related party information disclosed elsewhere in these consolidated financial statements, the following significant transactions between the Group and the related parties took place at terms agreed between the parties during the years ended 31 December 2025 and 2024:

	2025	2024	
Penyusutan aset hak guna dan akresi bunga atas liabilitas sewa PT Griya Idola	1.591	1.129	Depreciation of right-of-use assets and accretion of interest on lease liabilities PT Griya Idola
Persentase terhadap total beban	0,53%	0,38%	As a percentage of total expenses

c. Kompensasi manajemen kunci

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

c. Key management compensation

The compensation paid or payable to key management for employee services for the year ended 31 December 2025 and 2024 are as follows.

	2025				
	Direksi dan personel manajemen kunci lainnya/Board of Directors and other key management personnel		Dewan Komisaris/Board of Commissioners		
	%*	AS$/US$	%	AS$/US$	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	7,4	2.953	1,6	652	Salary and other short-term employee benefits

	2024				
	Direksi dan personel manajemen kunci lainnya/Board of Directors and other key management personnel		Dewan Komisaris/Board of Commissioners		
	%*	AS$/US$	%	AS$/US$	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	6,9	2.708	2,0	798	Salary and other short-term employee benefits

* persentase terhadap jumlah beban imbalan kerja/*percentage to total employee benefit expense*.

26. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

26. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

	2025	2024	
Laba konsolidasian untuk tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	132.198	122.108	Consolidated profit for the year attributable to the owners of the parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (dalam lembar saham)	133.781.832.877	133.786.220.000	Weighted average number of ordinary shares outstanding (in shares)
Laba per saham dasar dan dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - (nilai penuh)	0,00099	0,00091	Basic and diluted earnings per share attributable to the owners of the parent entity - (full amount)

Perusahaan tidak memiliki saham yang berpotensi dilusi, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

The Company does not have any potentially dilutive shares, therefore the diluted earnings per share is equal to the basic earnings per share.

27. ASET DAN LIABILITAS MONETER NETO DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup memiliki aset dan liabilitas moneter dengan mata uang selain Dolar AS, sebagai berikut:

27. NET MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As at 31 December 2025 and 2024, the Group had monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars, as follows:

		31 Desember/December 31, 2025		31 Desember/December 31, 2024		
		Mata Uang selain Dolar AS/ Currencies other than US Dollars	Ekuivalen AS$ Equivalent US$	Mata Uang selain Dolar AS/ Currencies other than US Dollars	Ekuivalen AS$ Equivalent US$	
Aset						Assets
Kas dan setara kas	IDR	148.705.302	8.861	160.440.174	9.927	Cash and cash equivalents
	Others		102		45	
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi pengguaannya	IDR	889.529.910	53.005	721.083.792	44.616	Restricted cash and time deposits
Investasi obligasi	IDR	1.500.000.000	89.381	-	-	Investment in bonds
Piutang lain-lain	IDR	1.499.555.610	89.355	1.005.029.843	62.185	Other receivables
Jumlah Aset			240.704		116.773	Total Assets
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	IDR	183.595.080	10.940	84.415.174	5.223	Trade payables
Utang lain-lain	IDR	35.812.788	2.134	41.777.920	2.585	Other payables
Utang pajak	IDR	96.832.140	5.770	107.179.257	6.632	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	IDR	437.389.266	26.063	263.394.565	16.297	Accrued expenses
	Others		489		112	
Liabilitas sewa	IDR	90.220.032	5.376	112.613.373	6.968	Lease liabilities
Pinjaman	IDR	2.130.911.232	126.976	2.031.146.677	125.673	Borrowings
Liabilitas imbalan pasca-kerja	IDR	419.214.360	24.980	272.089.902	16.835	Post-employment benefits obligation
Jumlah Liabilitas			202.728		180.325	Total Liabilities
Aset (liabilitas) moneter bersih			37.976		(63.552)	Net monetary assets (liabilities)

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs tengah penutupan Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang selain Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2025 dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, aset moneter neto akan turun sekitar AS$464 (2024: liabilitas moneter neto naik sekitar AS$853).

Monetary assets and liabilities mentioned above are translated using the Bank Indonesia closing rate as at the reporting date.

If assets and liabilities in currencies other than US Dollars as at 31 December 2025 are translated using the exchange rate as at the date of completion of these consolidated financial statements, the total net monetary assets will decrease by approximately US$464 (2024: monetary liabilities increased by approximately US$853).

28. INFORMASI ARUS KAS

Berikut ini adalah transaksi non-kas Grup:

28. CASH FLOW INFORMATION

The following are the Group's non-cash transactions:

	2025	2024	
Penambahan aset hak guna melalui sewa	3.127	6.403	Additions of right-of-use assets through leases
Penambahan beban keuangan yang ditangguhkan melalui beban yang masih harus dibayar	-	161	Addition of deferred financing costs through accrued expenses
Transfer aset dalam pembangunan ke piutang sewa pembiayaan	43.757	-	Transfer of construction in progress to finance lease receivables
Penerbitan saham baru melalui konversi utang lain-lain	11.623	-	Issuing new shares through other payables conversion
Pemindahan properti yang belum dikembangkan ke aset tetap	-	67.931	Transfer of undeveloped properties to property, plant, and equipment

29. SEGMEN OPERASI

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya, manajemen menetapkan segmen Grup berdasarkan operasi JOC. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Dalam hal segmen geografis, seluruh pendapatan berasal dari, dan aset signifikan berlokasi di Indonesia.

29. OPERATING SEGMENTS

The operating segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources, management considers the Group’s segments based on the operating JOCs. All transactions between segments have been eliminated.

In terms of geographical segments, all revenues are derived from, and significant assets are located in, Indonesia.

Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup dibagi ke dalam operasi JOC. Operasi JOC menjadi dasar pelaporan informasi segmen Grup, dengan rincian sebagai berikut:

For management reporting purposes, as at 31 December 2025 and 2024, the Group is divided into the operating JOCs. The operating JOCs are the basis on which the Group reports segment information, with the following details:

	2025								
	Salak	Darajat	Wayang Windu	Sidrap	Lainnya/ *Others*	Jumlah sebelum eliminasi/ *Total before elimination*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah konsolidasian/ *Total consolidated*	
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMEN									SEGMENT REVENUE AND RESULTS
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	217.627	132.947	43.252	21.210	7.227	422.263	(7.205)	415.058	Revenue from contracts with customers
Pendapatan sewa operasi	-	-	147.813	-	-	147.813	-	147.813	Operating lease income
Pendapatan sewa pembiayaan	18.254	24.062	-	-	-	42.316	-	42.316	Finance lease income
Beban usaha	(62.129)	(53.184)	(58.947)	(11.278)	(6.966)	(192.504)	700	(191.804)	Operating expenses
Beban keuangan	(26.303)	(19.837)	(28.422)	(4.033)	(54.599)	(133.194)	14.382	(118.812)	Finance costs
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing, bersih	430	(540)	(616)	(291)	939	(78)	(72)	(150)	(Loss)/gain on foreign exchange, net
Pendapatan bunga	3.104	2.070	15.880	441	4.664	26.159	(14.267)	11.892	Interest income
(Kerugian)/keuntungan lain-lain, bersih	83	95	(420)	(4)	(722)	(968)	409	(559)	Other (losses)/gains, net
Laba sebelum pajak penghasilan	151.066	85.613	118.540	6.045	(49.457)	311.807	(6.053)	305.754	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(59.477)	(35.253)	(45.044)	(1.207)	(634)	(141.615)	998	(140.617)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	91.589	50.360	73.496	4.838	(50.091)	170.192	(5.055)	165.137	Profit for the year
ASET DAN LIABILITAS SEGMEN									SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen	1.279.396	863.363	796.929	131.503	4.893.704	7.964.895	(4.097.485)	3.867.410	Segment assets
Liabilitas segmen	698.576	523.500	555.874	94.034	2.292.784	4.164.768	(1.180.877)	2.983.891	Segment liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi	(28.192)	(27.407)	(29.394)	(7.782)	(1.367)	(94.142)	693	(93.449)	Depreciation and amortisation expense

	2024								
	Salak	Darajat	Wayang Windu	Sidrap	Lainnya/ *Others*	Jumlah sebelum eliminasi/ *Total before elimination*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah konsolidasian/ *Total consolidated*	
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMEN									SEGMENT REVENUE AND RESULTS
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	218.245	113.889	45.878	22.378	6.556	406.946	(6.519)	400.427	Revenue from contracts with customers
Pendapatan sewa operasi	-	-	156.763	-	-	156.763	-	156.763	Operating lease income
Pendapatan sewa pembiayaan	14.943	24.690	-	-	-	39.633	-	39.633	Finance lease income
Beban usaha	(57.930)	(43.648)	(58.945)	(10.466)	(7.176)	(178.165)	757	(177.408)	Operating expenses
Beban keuangan	(27.174)	(20.497)	(31.957)	(3.549)	(65.783)	(148.960)	14.488	(134.472)	Finance costs
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing, bersih	(87)	(776)	815	(163)	9	(202)	-	(202)	(Loss)/gain on foreign exchange, net
Pendapatan bunga	4.613	3.258	18.264	472	3.625	30.232	(14.835)	15.397	Interest income
(Kerugian)/keuntungan lain-lain, bersih	15	302	(364)	(68)	(2.283)	(2.398)	356	(2.042)	Other (losses)/gains, net
Laba sebelum pajak penghasilan	152.625	77.218	130.454	8.604	(65.052)	303.849	(5.753)	298.096	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(59.621)	(32.203)	(48.901)	(2.077)	(34)	(142.836)	(177)	(143.013)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	93.004	45.015	81.553	6.527	(65.086)	161.013	(5.930)	155.083	Profit for the year
ASET DAN LIABILITAS SEGMEN									SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen	1.259.387	887.972	806.317	135.246	5.016.912	8.105.834	(4.318.321)	3.787.513	Segment assets
Liabilitas segmen	719.684	546.786	579.016	99.949	2.202.936	4.148.371	(1.093.391)	3.054.980	Segment liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi	(24.503)	(20.475)	(30.062)	(8.203)	(32)	(83.275)	519	(82.756)	Depreciation and amortisation expense

30. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN KONTINJENSI

a. Klaim audit pemerintah

Kebijakan akuntansi entitas anak perusahaan Grup tunduk pada ketentuan dalam JOC. Setiap tahun, catatan akuntansi dan laporan entitas anak Grup yang beroperasi berdasarkan JOC diaudit oleh PGE dan/atau pemerintah. Temuan yang timbul dari audit ini disetujui oleh manajemen Grup dan dicatat dalam catatan akuntansinya, atau diperdebatkan. Penyelesaian temuan yang disengketakan mungkin memerlukan proses negosiasi yang panjang selama beberapa tahun.

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Government audit claims

The accounting policies of the Group's subsidiaries are subject to the provisions of the JOC. Annually, the accounting records and reports of the subsidiaries of the Group operating under JOCs are subjected to an audit by PGE and/or the government. Findings arising from these audits are either agreed upon by management of the Group and recorded in its accounting records, or are disputed. Resolution of disputed findings may require a lengthy negotiation process extending over a number of years.

SEGWWL

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi ini, SEGWWL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2018 sebesar AS$6.128 terkait overhead perusahaan induk (“PCO”) dan AS$17.552 terkait temuan lainnya.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan Surat Kurang Bayar setoran bagian Pemerintah periode 2013-2018 sebesar AS$1.688 saja yang telah dibayarkan oleh SEGWWL. Jika temuan yang tersisa akan terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS$949.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pemerintah atas setiap tahun anggaran:

Sampai dengan Audit 2012

Pada tanggal 31 Desember 2025, SEGWWL memiliki berbagai temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) yang belum diselesaikan dengan total AS$15.780 untuk periode sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 tetapi BPKP tidak mengumumkan temuan tersebut, yang akan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah. Jika terwujud, dampak dari temuan ini akan meningkatkan bagian Pemerintah dan tunjangan produksi untuk PGE masing-masing sebesar AS$5.152 dan AS$631.

SEGWWL berkeyakinan bahwa temuan audit untuk tahun 2012 tidak berdasar, oleh karena itu tidak ada biaya yang masih harus dibayar yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan temuan yang belum terselesaikan.

Audit 2013-2014

Pada tanggal 26 Mei 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan AS$3.762. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PCO dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan, dengan jumlah masing-masing sebesar AS$1.575 dan AS$2.187.

Namun, kesimpulan dari laporan audit BPKP menyatakan bahwa kekurangan pembayaran bagian Pemerintah hanya sebesar AS$714, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS$2.187. BPKP tidak menyebutkan temuan PCO mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

SEGWWL

As of the completion date of these consolidated financial statements, SEGWWL has various audit findings from the Government auditors for the period from 2008-2018 amounting to US$6,128 relating to parent company overhead (“PCO”) and US$17,552 relating to other findings.

With regards to the other findings of the Government auditors, the DGB issued an underpayment of the Government share letter for the period from 2013-2018 totalling US$1,688 only which has been paid by SEGWWL. If the remaining findings materialise, the income tax expense will increase by US$949.

The following are the details of the results of the audits conducted by the Government auditors for each fiscal year:

Up to Audit 2012

As of 31 December 2025, SEGWWL has various outstanding Finance and Development Supervisory Agency (“BPKP”) findings totalling US$15,780 for the periods up to financial year ended 31 December 2012, but BPKP did not declare these findings, which will result in underpayment of the Government share. If they materialise, the impact of these findings will increase the Government share and production allowance to PGE by US$5,152 and US$631, respectively.

SEGWWL believes that the 2012 audit findings are without merit, therefore no accrual has been recognised in the consolidated financial statements in relation to the outstanding findings.

2013-2014 audit

On 26 May 2016, the BPKP issued its 2013-2014 audit report with findings totalling US$3,762. Most of the findings pertained to the dispute over the amount of the PCO and the amount of expenses that should not be deductible, with total amount of US$1,575 and US$2,187, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that underpayment of the Government share is only amounted to US$714, which represents 34% of the non-deductible expenses of US$2,187. BPKP did not state that PCO findings resulted in underpayment of the Government share.

Pada tanggal 5 September 2016, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS$1.250, lebih tinggi AS$536 dari kurang bayar bagian Pemerintah sebagaimana tercantum dalam laporan audit BPKP.

Pada tanggal 1 Desember 2016, SEGWWL mengajukan surat keberatan kepada DJA atas surat pemberitahuan kurang bayar tersebut. Untuk dapat melanjutkan proses keberatan, pada tanggal 2 Desember 2016, SEGWWL membayar kekurangan pembayaran bagian Pemerintah sebesar AS$1.250 kepada DJA dan mengajukan surat keberatan.

Pada tanggal 26 Januari 2018, SEGWWL menerima surat keputusan dari Kemenkeu Surat No. S-13/MK.2/2018 yang menolak keberatan SEGWWL ("Surat Keputusan").

Tahap keberatan

Pada tanggal 25 April 2018, SEGWWL mengajukan gugatan kepada Kemenkeu di Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta untuk menggugat surat keputusan tersebut.

Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan SEGWWL. Putusannya adalah sebagai berikut:

1) Mengabulkan semua gugatan
   a. Kemenkeu tidak berwenang memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP");
   b. Kemenkeu tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNBP SEGWWL;
   c. Kemenkeu tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNBP SEGWWL berdasarkan hasil audit BPKP;
   d. Objek sengketa melanggar undang-undang PNBP; dan
   e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
2) Menyatakan Surat Keputusan batal dan tidak berlaku.
3) Mewajibkan Kemenkeu untuk mencabut Surat Keputusan.
4) Kemenkeu membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp272.000 – nilai penuh.

On 5 September 2016, SEGWWL received a notification letter from the DGB in relation to the audit report with a total underpayment of Government share amounting to US$1,250, which was higher by US$536 than the underpayment of the Government share stated in the BPKP audit report.

On 1 December 2016, SEGWWL submitted an objection letter to the DGB with regards to the underpayment notification letter. To be able to proceed with the objection process, on 2 December 2016, SEGWWL paid the underpayment of the Government share amounting to US$1,250 to the DGB and submitted an objection letter.

On 26 January 2018, SEGWWL received a decision letter from the MoF Letter No. S-13/MK.2/2018 rejecting SEGWWL's objections (the "Decision Letter").

Objection stage

On 24 April 2018, SEGWWL filed a claim against the MoF at the Jakarta State Administrative Court ("PTUN") to dispute the decision letter.

On 26 November 2018, PTUN pronounced the verdicts in favour of SEGWWL. The verdicts are as follows:

1) Grant all of the lawsuits
   a. The MoF has no authority to collect the Non-tax State Revenue ("PNBP");
   b. The MoF has no authority to request an audit to BPKP on SEGWWL's PNBP obligations;
   c. The MoF has no authority to decide the overpayment or underpayment of SEGWWL's PNBP based on BPKP audit result;
   d. The objects of the dispute violated the PNBP law; and
   e. The objects of the dispute were contrary to the general principles of good governance.
2) Declare null and void the decision letter
3) Require the MoF to revoke the decision letter
4) The MoF to pay all of the court fees of IDR272,000 – full amount.

Tahap banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kemenkeu telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PTTUN") sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit tahun 2013 - 2014. Pada 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan kasasinya yang menerima eksepsi terdakwa (yaitu; Kemenkeu) atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili kasus quo tersebut sesuai dengan UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBP.

Appeal stage

On 6 February 2019, the MoF submitted a memorandum of appeal to the State Administrative High Court ("PTTUN") in response to the decision issued by PTUN regarding the 2013-2014 audit reports. On 11 April 2019, PTTUN issued its appeal decision accepting the exception of the defendant (i.e. MoF) on the absolute competence of the court and declared that the PTUN has no authority to adjudicate such a quo case in accordance with Law No. 20 year 1997 involving PNBP.

Tahap kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, SEGWWL mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung dengan dasar yang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016) ("SEMA 4 /2016") menegaskan bahwa setelah terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara, kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN, dan bukan PTTUN. Oleh karena itu, SEGWWL keberatan dengan keputusan PTTUN pada tahap banding di atas dan berpendapat bahwa dasar peraturan yang digunakan oleh PTTUN tidak diperbarui.

Cassation stage

On 23 May 2019, SEGWWL submitted the memorandum of cassation to the Supreme Court on a basis that in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016) ("SEMA 4/2016") emphasised that after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the State Administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative matters would be under PTUN, and not PTTUN. Therefore, SEGWWL objected to the PTTUN decision during the appeal stage above and believes that the basis of the regulations used by PTTUN was not up to date.

Pada tanggal 10 Juni 2019, Kemenkeu mengajukan kontra memorandum kepada Mahkamah Agung.

On 10 June 2019, the MoF submitted a contra memorandum to the Supreme Court.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No.454 K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari SEGWWL.

On 3 October 2019, the Supreme Court issued its cassation decision No.454 K/TUN/2019 declining the cassation request from SEGWWL.

Tahap peninjauan kembali

Pada tanggal 16 Juli 2020, SEGWWL mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 21 PK/TUN/2021 yang menolak peninjauan kembali dari SEGWWL.

Civil review stage

On 16 July 2020, SEGWWL submitted a reconsideration request to the Supreme Court. On 21 April 2021, the Supreme Court issued its decision No.21 PK/TUN/2021 declining the memorandum of civil review from SEGWWL.

Proses pengajuan ulang

Pada tanggal 1 September 2021, SEGWWL mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama (seperti pada proses sebelumnya) ke PTTUN.

Resubmission process

On 1 September 2021, SEGWWL re-submitted a lawsuit with the same matter (as in the previous proceeding) to the PTTUN.

Pada tanggal 8 Maret 2022, PTTUN mengeluarkan putusannya yang menolak keberatan SEGWWL.

On 8 March 2022, PTTUN issued its verdict rejecting the objection of SEGWWL.

Pada tanggal 1 April 2022, SEGWWL mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan banding atas putusan PTTUN.

On 1 April 2022, SEGWWL submitted its cassation request to the Supreme Court appealing the PTTUN verdict.

Pada tanggal 12 Juli 2022, MA mengeluarkan putusan kasasi No.345/K/TUN/2022 menolak permohonan kasasi dari SEGWWL, yang salinan putusannya diterima pada tanggal 8 September 2022.

Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, SEGWWL telah mencatat penyisihan penuh untuk penurunan nilai sebesar AS$1.250 pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS$536 di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS$714 di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi.

Audit 2015

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP menerbitkan laporan audit tahun 2015 dengan temuan sebesar AS$2.234. Sebagian besar temuan berkaitan dengan perselisihan tentang jumlah PCO dan jumlah biaya yang seharusnya tidak dapat dikurangkan yang diakui oleh SEGWWL, dengan jumlah masing-masing sebesar AS$1.286 dan AS$948.

Namun, laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya merupakan jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dan sebesar AS$380. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PCO harus berdampak pada bagian Pemerintah.

Sejak SEGWWL berada pada posisi rugi pada tahun 2015, temuan ini kemudian diteruskan ke tahun 2016, sebagai koreksi akumulasi rugi pajak sebesar AS$380.

2016 audit

Pada tanggal 1 Juli 2019, BPKP menerbitkan laporan audit 2016 dengan total temuan AS$2.170. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PCO dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan yang diakui oleh SEGWWL, dengan jumlah total masing-masing AS$1.505 dan AS$665 (termasuk AS$380 dari koreksi rugi fiskal 2015 yang dapat dikompensasikan).

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS$215, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS$665. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PCO harus berdampak pada bagian Pemerintah.

Pada tanggal 12 Februari 2020, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA terkait laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS$217. SEGWWL telah melunasi masing-masing jumlah tersebut pada bulan Maret 2020 dan tidak memiliki rencana lebih lanjut untuk mengajukan keberatan karena jumlah tersebut tidak material terhadap laporan keuangan.

On 12 July 2022, the Supreme Court issued its cassation decision No.345/K/TUN/2022 rejecting the cassation request from SEGWWL, for which a copy of the decision was received on 8 September 2022.

Following the Supreme Court cassation decision, SEGWWL has recorded a full provision for impairment of US$1,250 as of 31 December 2022, which represents an additional provision of US$536 in 2022 from the provision of US$714 in 2021, recorded as part of income tax expense in profit or loss.

2015 audit

On 15 September 2017, BPKP issued its 2015 audit report with findings totalling US$2,234. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of the PCO and the amount of expenses that should not be deductible recognised by SEGWWL, with a total amount of US$1,286 and US$948, respectively.

However, the BPKP audit report stated that the underpayment of the Government share only represents the amount of expenses that should not be deductible amounted to US$380. BPKP did not state that the PCO finding resulted in underpayment of the Government share.

Since SEGWWL was in a loss position in 2015, these findings were then carried forward to 2016, as a tax loss carryforward correction amounting to US$380.

2016 audit

On 1 July 2019, BPKP issued its 2016 audit report with findings totalling US$2,170. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of the PCO and other amounts of expenses that should not be deductible recognised by SEGWWL, with total amount of US$1,505 and US$665 (including US$380 of the 2015 tax loss carryforward correction), respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of Government share only amounted to US$215, which represents 34% of the non-deductible expenses of US$665. BPKP did not state that the PCO finding resulted in underpayment of the Government share.

On 12 February 2020, SEGWWL received a notification letter from the DGB in relation to the audit report with a total underpayment of the Government share amounting to US$217. SEGWWL has fully paid the respective amount on March 2020 and has no further plan to submit an objection as the amount is not material to the financial statements.

2017-2018 audit

Pada tanggal 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan AS$677. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya PCO sebesar AS$680 dari AS$1.045. BPKP beranggapan bahwa jumlah AS$365 itu tidak disetujui oleh PGE. Temuan lain termasuk jumlah beban yang tidak boleh dikurangkan, sebesar AS$312.

Oleh karena itu, BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah karena kelebihan biaya PCO dan pengurangan biaya yang dapat dikurangkan adalah sebesar AS$221 untuk tahun 2017 dan 2018.

Selanjutnya, pada tanggal 19 Januari 2022, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS$221 (2017: AS$110 dan 2018: AS$111).

SEGWWL setuju dengan temuan tersebut sebesar AS$28 dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, SEGWWL mengajukan surat keberatan kepada DGB untuk sisa AS$193 dan mencatat pembayaran tersebut sebagai klaim audit pemerintah dibayar di muka.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, SEGWWL menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-385/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGWWL. Menanggapi surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS$193. Oleh karena itu, seluruh temuan sebesar AS$221 bagian Pemerintah untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Kelompok Kontraktor Darajat

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Kelompok Kontraktor Darajat memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2018 sebesar AS$7.179 terkait temuan Pertamina Production Allowance ("PPA"), AS$2.931 terkait dengan PCO dan AS$4.078 terkait dengan temuan lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, sehingga harus diperlakukan sebagai pengurang perhitungan bagian Pemerintah. Terlepas dari temuan yang berkaitan dengan PPA, auditor Pemerintah tidak pernah memperhitungkan temuan terkait PPA sebagai kurang bayar bagian Pemerintah. Jika temuan terkait PPA terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS$7.179.

2017-2018 audit

On 17 January 2022, the BPKP issued its 2017-2018 audit report with findings totalling US$677. For the years 2017 and 2018, BPKP only approved PCO charges with a total amount of US$680 out of US$1,045. BPKP argued that the amount of US$365 was not approved by PGE. Other findings include the amount of expenses that should not be deductible, amounting to US$312.

Therefore, BPKP stated that the underpayment of Government share due to excess of PCO charges and reduction of deductible expenses amounted to US$221 in total for the years 2017 and 2018.

Subsequently, on 19 January 2022, SEGWWL received a notification letter from the DGB in relation to the audit report with total underpayment of the Government share amounting to US$221 (2017: US$110 and 2018: US$111).

SEGWWL agreed with the findings of US$28 and recorded it as part of income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2022. On 14 April 2022, SEGWWL submitted an objection letter to the DGB for the remaining US$193 and recorded the payment as prepaid government audit claims.

On 6 October 2022, SEGWWL received a decision letter from the MoF No. S-385/MK.2/2022 rejecting the SEGWWL's objections. As a response to this decision letter, management has decided to write-off the remaining US$193 prepayment. Therefore, the full amount of the findings of US$221 of the Government share for 2017-2018 has been recorded as income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2022.

Darajat Contractor Group

As of the completion date of these consolidated financial statements, the Darajat Contractor Group has various audit findings from the Government auditors for the period from 2004-2018 amounting to US$7,179 relating to Pertamina Production Allowance findings ("PPA"), US$2,931 relating to PCO and US$4,078 relating to other findings. Management believes that, as per Indonesian tax regulations, the PPA is categorised as a cost incurred by the Darajat Contractor Group to obtain, maintain and manage its revenue. On that basis, management believes that the PPA should be classified as a deductible cost. Hence, it should be treated as a deduction from the Government share calculation. Notwithstanding the findings pertaining to the PPA, the Government auditors have never factored in the findings relating to PPA as an underpayment of the Government share. If the findings relating to PPA materialise, the income tax expense will increase by US$7,179.

Atas temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan Surat Kurang Bayar setoran bagian Pemerintah periode 2013-2018 sebesar AS$1.489, yang telah dibayarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat. Jika sisa temuan tersebut terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS$890.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor Pemerintah pada setiap tahun anggaran:

Audit 2004-2012

Kelompok Kontraktor Darajat memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2012 sebesar AS$3.465 terkait temuan PPA, AS$804 terkait temuan PCO dan AS$1.410 terkait temuan lainnya, namun BPKP tidak menyatakan temuan ini akan menghasilkan dalam bagian Kurang Bayar Pemerintah. Jika hal ini terwujud, dampak temuan terkait PPA ini akan meningkatkan bagian Pemerintah sebesar AS$3.465 dan dampak temuan lainnya akan meningkatkan bagian Pemerintah sebesar AS$753.

Audit 2013-2014

Pada tanggal 26 Mei 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan AS$3.896. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PPA, PCO, dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan, masing-masing sebesar AS$819, AS$1.073 dan AS$2.004.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS$678, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS$2.004. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Pada tanggal 5 September 2016, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS$1.043, yang lebih tinggi sebesar AS$365 dari kurang bayar bagian Pemerintah yang tercantum dalam laporan audit BPKP.

Kelompok Kontraktor Darajat membayar jumlah tersebut dan menyerahkan surat tersebut ke DJA pada tanggal 1 Desember 2016. Kelompok Kontraktor Darajat kemudian mengirimkan surat pengajuan bukti baru pada tanggal 25 Januari 2018 sesuai Peraturan Pemerintah ("PP") No. 34 Tahun 2010. Pada tanggal 26 Januari 2018, DJA menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun 2013-2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA menyetujui keberatan tersebut sebesar AS$15.

With regards to the other findings of the Government auditors, the DGB issued an underpayment of Government share letter for the period from 2013-2018 totalling US$1,489, which has been paid by the Darajat Contractor Group. If the remaining findings materialise, the income tax expense will increase by US$890.

The following are the details of the results of the audits conducted by the Government auditors for each fiscal year:

2004-2012 audit

The Darajat Contractor Group has various audit findings from the Government auditors for the period from 2004-2012 amounting to US$3,465 relating to PPA findings, US$804 relating PCO findings and US$1,410 related to other findings, but BPKP did not declare these findings will result in the Underpayment of Government share. If this materialises, the impact of this finding relating to PPA will increase the Government share by US$3,465 and the impact of other findings will increase the Government share by US$753.

2013-2014 audit

On 26 May 2016, the BPKP issued its 2013-2014 audit report with findings totalling US$3,896. Most of the findings pertained to the dispute over the amount of PPA, the PCO, and the amount of expenses that should not be deductible, with total amounts of US$819, US$1,073 and US$2,004, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that underpayment of the Government share only amounted to US$678, which represents 34% from the non-deductible expenses of US$2,004. BPKP did not state that PPA and PCO findings resulted in underpayment of the Government share.

On 5 September 2016, the Darajat Contractor Group received a notification letter from the DGB in relation to the audit report with a total underpayment of the Government share amounting to US$1,043, which was higher by US$365 than the underpayment of the Government share stated in the BPKP audit report.

The Darajat Contractor Group paid the amount and submitted the letter to the DGB on 1 December 2016. The Darajat Contractor Group then sent a submission letter for new proof on 25 January 2018 in accordance with Government Regulations ("PP") No. 34 Year 2010. On 26 January 2018, the DGB issued a decision letter for overpayment of the Government share for the year 2013-2014. Based on the decision letter, the DGB approved this objection amounting to US$15.

Tahap Keberatan

Pada tanggal 24 April 2018, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan gugatan kepada Kemenkeu di PTUN untuk membantah Surat Keputusan tersebut.

Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan Kelompok Kontraktor Darajat. Putusannya adalah sebagai berikut:

1) Mengabulkan semua gugatan.
   a. Kemenkeu tidak berwenang memungut PNBP;
   b. Kemenkeu tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNBP Kelompok Kontraktor Darajat;
   c. Kemenkeu tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNBP Kelompok Kontraktor Darajat berdasarkan hasil audit BPKP;
   d. Objek sengketa melanggar undang-undang PNBP; dan
   e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
2) Menyatakan Surat Keputusan batal demi hukum.
3) Mewajibkan Kemenkeu mencabut Surat Keputusan tersebut.
4) Kemenkeu untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp282.000 – nilai penuh.

Tahap Banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kemenkeu menyerahkan memorandum banding ke PTTUN sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit 2013-2014. Pada tanggal 21 Februari 2019, Kelompok Kontraktor Darajat menyerahkan kontra memorandum banding ke PTTUN.

Pada tanggal 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan banding yang menerima eksepsi tergugat (yaitu: Kemenkeu) atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili perkara quo tersebut sesuai dengan UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tahap Kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung dengan dasar bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016) ("SEMA 4/2016") setelah terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara, kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN, bukan PTTUN. Oleh karena itu, Kelompok Kontraktor Darajat berkeberatan atas keputusan PTTUN tersebut selama tahap kasasi di atas dan berpendapat bahwa dasar peraturan yang digunakan oleh PTTUN tidak diperbarui.

Objection stage

On 24 April 2018, the Darajat Contractor Group filed a claim against the MoF at the PTUN to dispute the decision letter.

On 26 November 2018, PTUN pronounced the verdicts in favour of the Darajat Contractor Group. The verdicts are as follows:

1) Grant all of the lawsuits.
   a. The MoF has no authority to collect the PNBP;
   b. The MoF has no authority to request an audit to BPKP on the Darajat Contractor group PNBP obligations;
   c. The MoF has no authority to decide the overpayment or underpayment of the Darajat Contractor Group PNBP based on BPKP audit result;
   d. The objects of the dispute violated the PNBP law; and
   e. The objects of the dispute were in contrary to the general principles of good governance.
2) Declare null and void the decision letter.
3) Require the MoF to revoke the decision letter.
4) The MoF to pay all of the court fees of IDR282,000 – full amount.

Appeal stage

On 6 February 2019, the MoF submitted a memorandum of appeal to PTTUN in response to the decision issued by PTUN regarding the 2013-2014 audit reports. On 21 February 2019, the Darajat Contractor Group submitted a contra memorandum of appeal to PTTUN.

On 11 April 2019, PTTUN issued its appeal decision accepting the exception of the defendant (i.e. MoF) on the absolute competence of the court and declaring that the PTUN has no authority to adjudicate such a quo case in accordance with Law No. 20 year 1997 involving Non-Tax State Revenue.

Cassation stage

On 23 May 2019, the Darajat Contractor Group submitted the memorandum of cassation to the Supreme Court on the basis that, in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016) ("SEMA 4/2016") after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the State Administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative matters would be under PTUN, and not PTTUN. Therefore, the Darajat Contractor Group objected to the PTTUN decision during the appeal stage above and believes that the basis of the regulations used by PTTUN was not up to date.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 455/K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari Kelompok Kontraktor Darajat.

On 3 October 2019, the Supreme Court issued its cassation decision No. 455/K/TUN/2019 refusing the cassation request from the Darajat Contractor Group.

Tahap peninjauan kembali

Civil review stage

Pada tanggal 16 Juli 2020, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan nota peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 22 Desember 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 173/PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari Kelompok Kontraktor Darajat.

On 16 July 2020, Darajat Contractor Group submitted the memorandum of civil review to the Supreme Court. On 22 December 2020, the Supreme Court issued its decision No. 173/PK/TUN/2020 declining the memorandum of civil review from the Darajat Contractor Group.

Proses pengajuan ulang ke tahap PTTUN

Resubmission to PTTUN stage

Pada tanggal 23 Agustus 2021, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama (seperti pada proses sebelumnya) ke PTTUN.

On 23 August 2021, Darajat Contractor Group re-submitted a lawsuit with the same matter (as in the previous proceeding) to the PTTUN.

Pada tanggal 17 Februari 2022, PTTUN mengeluarkan putusan yang menolak keberatan Kelompok Kontraktor Darajat atas kurang bayar bagian Pemerintah untuk tahun 2013-2014, sebesar AS$1.043.

On 17 February 2022, PTTUN issued its verdict rejecting the objection of Darajat Contractor Group regarding the underpayment of the Government share for 2013-2014, which amounted to US$1,043.

Pada tanggal 2 Maret 2022, manajemen telah mengajukan tanggapan resmi kepada PTTUN dan pada tanggal 16 Maret 2022, SEGDL telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan banding atas putusan PTTUN tersebut.

On 2 March 2022, management has submitted a formal response to the PTTUN and on 16 March 2022, SEGDL has submitted its cassation request to the Supreme Court appealing the PTTUN verdict.

Pada tanggal 21 Juni 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 305/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari Kelompok Kontraktor Darajat yang salinan putusannya telah diterima pada tanggal 8 September 2022.

On 21 June 2022, the Supreme Court issued its cassation decision No. 305/K/TUN/2022 rejecting the cassation request from the Darajat Contractor Group for which the copy of the decision was received on 8 September 2022.

Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, Grup Kontraktor Darajat telah mencatat penyisihan penuh atas penurunan nilai sebesar AS$1.043 per 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS$365 di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS$678 di tahun 2021, dicatat sebagai bagian beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi.

Following the Supreme Court cassation decision, the Darajat Contractor Group has recorded a full provision for impairment of US$1,043 as of 31 December 2022, which represents an additional provision of US$365 in 2022 from the provision of US$678 in 2021, recorded as part of income tax expense in profit or loss.

Audit 2015

2015 audit

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan AS$885. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PPA dan kelengkapan dokumentasi masing-masing sebesar AS$626 dan AS$259.

On 15 September 2017, BPKP issued its 2015 audit report with findings totalling US$885. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA and the completeness of documentation amounting to US$626 and US$259, respectively.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyebutkan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS$88, yang merupakan 34% dari ketidaklengkapan dokumentasi sebesar AS$259. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of the Government share only amounted to US$88, which represents 34% of the incomplete documentation cost of US$259. BPKP did not state that the PPA finding resulted in underpayment of the Government share.

Pada tanggal 13 Maret 2018, Kelompok Kontraktor Darajat menerima dari DJA surat ketetapan kurang bayar bagian pemerintah sebesar AS$88. Pada tanggal 12 April 2018, Kelompok Kontraktor Darajat membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 7 Juni 2018.

Pada tanggal 23 Juli 2019, DJA telah menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian pemerintah untuk tahun 2015. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA belum menyetujui permohonan keberatan dari Kelompok Kontraktor Darajat. Oleh karena itu, sebagai tanggapan atas surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar di muka dan mencatat kerugian pada laporan laba rugi konsolidasi tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, Kelompok Kontraktor Darajat menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar AS$1.354. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PPA, PCO dan jumlah biaya lain yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar AS$697, AS$404 dan AS$253.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyebutkan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS$86, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar AS$253. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 2020, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut, yang menunjukkan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS$86, yang telah dibayarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat pada tanggal 2 September 2020. Temuan tersebut dibebankan pada laba rugi tahun 2020.

Audit 2017-2018

Pada tanggal 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan AS$2.373. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya PCO dengan jumlah total AS$1.065 dari AS$1.714. BPKP beranggapan bahwa jumlah AS$649 itu tidak disetujui oleh PGE. Temuan lainnya termasuk PPA dan jumlah beban yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar AS$1.572 dan AS$152.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS$272, yang merupakan 34% dari beban yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS$801.

On 13 March 2018, the Darajat Contractor Group received from the DGB the assessment letter of underpayment for the Government share amounting to US$88. On 12 April 2018, the Darajat Contractor group paid this amount and submitted an objection letter to the DGB on 7 June 2018.

On 23 July 2019, the DGB issued a decision letter for overpayment of the Government share for the year 2015. Based on the decision letter, DGB has not approved the objection request from the Darajat Contractor Group. Therefore, as a response to this decision letter, management has decided to write-off the prepaid amount and record loss in profit or loss in 2019.

2016 audit

On 23 July 2020, the Darajat Contractor Group received the 2016 audit report issued by BPKP with findings totalling US$1,354. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA, PCO and other amounts of expenses that should not be deductible amounting to US$697, US$404 and US$253, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of the Government share only amounted to US$86, which represents 34% of the amount of expenses that should not be deductible of US$253. BPKP did not state that PPA and PCO findings resulted in underpayment of the Government share.

Subsequently, on 14 August 2020, the Darajat Contractor Group received a notification letter from the DGB in relation to the audit report, with a total underpayment of the Government share amounting to US$86, which was paid by the Darajat Contractor Group on 2 September 2020. Such findings are expensed in profit or loss in 2020.

2017-2018 audit

On 17 January 2022, the BPKP issued its 2017-2018 audit report with total findings of US$2,373. For the years 2017 and 2018, BPKP only approved PCO charges with a total amount of US$1,065 out of US$1,714. BPKP argued that the amount of US$649 was not approved by PGE. Other findings include PPA and the amount of expenses that should not be deductible amounting to US$1,572 and US$152, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that underpayment of the Government share only amounted to US$272, which represents 34% of the non-deductible expenses of US$801.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2022, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS$272.

Kelompok Kontraktor Darajat setuju dengan temuan sebesar AS$212 dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan surat keberatan kepada DJA atas tersisa sebesar AS$60 dan mencatat pembayaran tersebut sebagai pembayaran di muka sehubungan dengan klaim audit pemerintah.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-383/MK.2/2022 yang menolak keberatan Kelompok Kontraktor Darajat. Menanggapi surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS$60. Oleh karena itu, seluruh temuan sebesar AS$272 bagian Pemerintah untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Audit 2006 dan 2010

Pada tahun 2013 dan 2014, DJP menerbitkan surat ketetapan pajak terkait klaim audit PPA untuk tahun fiskal 2006 dan 2010. Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan keberatan atas SKP ini, yang ditolak oleh DJP. Dalam hal ini, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan banding ke pengadilan pajak pada tanggal 22 Juni 2015 yang hasilnya menguntungkan Kelompok Kontraktor Darajat untuk tahun fiskal 2006 sejumlah AS$115. DJP mengajukan pertimbangan ulang terhadap hasilnya ke Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2017. Pada tanggal 2 Desember 2021, Mahkamah Agung menerbitkan keputusan yang menguntungkan bagi Kelompok Kontraktor Darajat dan menolak banding oleh DJP.

Kelompok Kontraktor Darajat menerima putusan pengadilan pajak tertanggal 19 Februari 2018 sehubungan dengan temuan audit PPA untuk tahun fiskal 2010 sebesar AS$186, yang menyetujui keputusan DJP. Pada tanggal 18 Mei 2018, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kembali banding ke Mahkamah Agung terkait dengan masalah ini.

Pada tanggal 14 Januari 2019, Kelompok Kontraktor Darajat menerima keputusan pengajuan kembali dari Mahkamah Agung terkait dengan temuan audit PPA tahun fiskal 2010 yang menolak permintaan pengajuan kembali dari Kelompok Kontraktor Darajat. Pada tahun 2023, manajemen telah mencatat cadangan penuh untuk penurunan nilai sebesar AS$186 pada tanggal 31 Desember 2023, dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi.

Subsequently, on 24 January 2022, Darajat Contractor Group received a notification letter from the DGB in relation to the audit report with a total underpayment of the Government share amounting to US$272.

Darajat Contractor Group agreed with the findings of US$212 and recorded it as part of income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2022. On 14 April 2022, the Darajat Contractor Group submitted an objection letter to the DGB for the remaining US$60 and recorded the payment as prepaid government audit claims.

On 6 October 2022, the Darajat Contractor Group received a decision letter from the MoF No. S-383/MK.2/2022 rejecting the Darajat Contractor Group's objections. As a response to this decision letter, management has decided to write-off the remaining US$60 prepayment. Therefore, the full amount of the findings of US$272 of the Government share for 2017-2018 has been recorded as part of income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2022.

2006 and 2010 audit

In 2013 and 2014, the DGT issued tax assessments regarding PPA audit claims for fiscal years 2006 and 2010. The Darajat Contractor Group filed an objection to these tax assessments, which was rejected by the DGT. In this regard, the Darajat Contractor Group filed appeals to the tax court on 22 June 2015, the result of which was in favour of the Darajat Contractor Group for fiscal year 2006 amounting to US$115. The DGT filed a reconsideration against the result to the Supreme Court on 23 May 2017. On 2 December 2021, the Supreme Court issued a decision in favour of Darajat Contractor Group rejecting the appeal from the DGT.

The Darajat Contractor Group received a tax court verdict dated 19 February 2018 in relation to the PPA audit finding for the fiscal year 2010 amounting to US$186, which approved the DGT's decision. On 18 May 2018, the Darajat Contractor Group re-submitted an appeal to the Supreme Court related to this matter.

On 14 January 2019, the Darajat Contractor Group received the Supreme Court reconsideration verdict related with the PPA's audit finding for fiscal year 2010, which rejected the reconsideration request from the Darajat Contractor Group. In 2023, management has recorded a full provision for impairment of US$186 as of 31 December 2023, recorded as part on income tax expense in profit or loss.

Untuk ketetapan pajak lain yang diterbitkan untuk tahun pajak 2010 sebesar AS$193, putusan pengadilan pajak mengeluarkan keputusan yang menguntungkan bagi Kelompok Kontraktor Darajat pada tanggal 5 September 2019. DJP mengajukan peninjauan kembali terhadap hasil tersebut ke Mahkamah Agung pada tanggal 12 Desember 2019. Akibatnya, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menguntungkan bagi Grup Kontraktor Darajat pada tanggal 9 September 2020. Besaran restitusi pajak tersebut telah diterima oleh SEGD-I pada tanggal 16 Desember 2020.

For another tax assessment issued for fiscal year 2010 amounting to US$193, the tax court verdict issued a favourable decision for the Darajat Contractor Group on 5 September 2019. The DGT filed a reconsideration against the result to the Supreme Court on 12 December 2019. As a result, the Supreme Court issued a favourable decision for Darajat Contractor Group on 9 September 2020. The amount of tax refund was received by SEGD-I on 16 December 2020.

PPN ditangguhkan

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh kantor pajak BADORA kepada SEGD-II sebagai operator JOC Darajat tertanggal 24 Januari 2000, Kelompok Kontraktor Darajat diharuskan membayar seluruh PPN tangguhan terutang sebesar Rp90 miliar (setara dengan AS$5,4 juta – nilai penuh).

Kelompok Kontraktor Darajat keberatan dengan surat tersebut dan berdasarkan surat keputusan tertanggal 7 Februari 2001, jumlah yang harus dibayar dikurangi menjadi Rp71 miliar (setara dengan AS$4,2 juta – nilai penuh) dan denda sebesar Rp1,4 miliar (setara dengan AS$83 ribu – nilai penuh).

Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang perpajakan, Kelompok Kontraktor Darajat membayar PPN tangguhan dan dendanya sebesar Rp72,4 miliar (setara dengan AS$4,3 juta – nilai penuh), dan kemudian mengajukan banding ke pengadilan pajak.

Pada tanggal 3 Januari 2002, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat penagihan pajak atas PPN tangguhan yang belum dibayar sejumlah Rp21,7 miliar (setara dengan AS$1,3 juta – nilai penuh) untuk periode 15 bulan Maret 2000 – Mei 2001, yang merupakan periode dari jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran PPN yang ditangguhkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat.

Pada tanggal 3 Mei 2002, pengadilan pajak mengeluarkan putusan yang menguatkan ketetapan kantor pajak yang mewajibkan pembayaran PPN yang ditangguhkan. Oleh karena itu, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung.

Pada bulan September 2002, Kelompok Kontraktor Darajat membayar Rp2 miliar (setara dengan AS$119 ribu – nilai penuh) dari denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp21,7 miliar (setara dengan AS$1,3 juta – nilai penuh). Jumlah yang dibayarkan dibebankan pada laba rugi 31 Desember 2002.

Deferred VAT

As stated in an Assessment Letter issued by the BADORA tax office to SEGD-II as the operator of the Darajat JOC dated 24 January 2000, Darajat Contractor Group was required to pay all outstanding deferred VAT amounting to IDR90 billion (equivalent to US$5.4 million – full amount).

The Darajat Contractor Group objected to the letter and based on decision letter dated 7 February 2001, the amount required to be paid was reduced to IDR71 billion (equivalent to US$4.2 million – full amount) and penalties amounting to IDR1.4 billion (equivalent to US$83 thousand – full amount).

As required by the tax laws, the Darajat Contractor Group paid the deferred VAT and its penalties amounting to IDR72.4 billion (equivalent to US$4.3million – full amount), and then appealed to the tax court.

On 3 January 2002, the Darajat Contractor Group received a tax collection letter assessing late payment penalties on unpaid deferred VAT amounting to IDR21.7 billion (equivalent to US$1.3 million – full amount) for the 15 month period March 2000 – May 2001, representing the period from the due date to the payment date of deferred VAT by the Darajat Contractor Group.

On 3 May 2002, the tax court issued its judgement confirming the tax office's assessment requiring the payment of the deferred VAT. Subsequently, the Darajat Contractor Group submitted a reconsideration of the decision to the Supreme Court.

In September 2002, the Darajat Contractor Group paid IDR2 billion (equivalent to US$119 thousand – full amount) from IDR21.7 billion of the late payment penalties (equivalent to US$1.3 million – full amount). This amount was expensed in profit or loss for the year ended 31 December 2002.

Pada bulan September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang memenangkan Kelompok Kontraktor Darajat. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2004 DJP mengeluarkan surat keputusan atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kewajiban membayar PPN tangguhan untuk Kelompok Kontraktor Darajat sebesar Rp71 miliar (setara dengan AS$4,2 juta – nilai penuh), dan denda yang dinilai masing-masing sebesar Rp21,7 miliar (setara dengan AS$1,3 juta – nilai penuh). Namun, pada bulan Juni 2004, DJP mengeluarkan keputusan lanjutan untuk membatalkan surat keputusan perpajakan sebelumnya mengenai eksekusi putusan Mahkamah Agung.

In September 2003, the Supreme Court issued its decision in favour of the Darajat Contractor Group. Subsequently, on 27 May 2004, the DGT issued decision letters regarding the Supreme Court's decision which cancelled the requirement to pay the deferred VAT for the Darajat Contractor Group amounting to IDR71 billion (equivalent to US$4.2 million – full amount), and respective assessed penalties amounting to IDR21.7 billion (equivalent to US$1.3 million – full amount). However, in June 2004, the DGT issued further decisions to cancel the previous tax decision letters regarding the execution of the Supreme Court's decision.

Pada November 2010, Kelompok Kontraktor Darajat melalui suratnya ke kantor pajak telah meminta proses pemindahbukuan sebesar Rp71 miliar (setara dengan AS$4,2 juta – nilai penuh) dan termasuk denda sebesar Rp1,4 miliar (setara dengan AS$83ribu – nilai penuh).

In November 2010, the Darajat Contractor Group, through its letter to the tax office, requested an overbooking process amounting to IDR71 billion (equivalent to US$4.2 million – full amount), including penalties amounting to IDR1.4 billion (equivalent to US$83 thousand – full amount).

Pada Juni 2013, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat penyitaan untuk rekening banknya dari kantor pajak untuk menerima pembayaran atas surat penagihan pajak 2002 tersebut. Kantor pajak masih berpendapat bahwa Kelompok Kontraktor Darajat perlu membayar denda keterlambatan atas PPN ditangguhkan yang belum dibayar sebesar Rp21,7 miliar (setara dengan AS$1,3 juta – nilai penuh). Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas surat penyitaan tersebut. Pada tanggal 19 Agustus 2014 melalui surat keputusan dari pengadilan pajak, Kelompok Kontraktor Darajat memenangkan gugatan tersebut.

In June 2013, the Darajat Contractor Group received a confiscation letter for its bank account from the tax office to collect the above 2002 tax collection letter. The tax office was still of the opinion that the Darajat Contractor Group needed to pay the outstanding late payment penalties on unpaid deferred VAT of IDR21.7 billion (equivalent to US$1.3 million – full amount). The Darajat Contractor Group has filed a lawsuit to the tax court on this confiscation letter. On 19 August 2014, through the tax court decision letter, the Darajat Contractor Group was successful in the lawsuit.

Sebagaimana dijelaskan di atas, PPN ditangguhkan sebesar Rp72,4 miliar (setara dengan AS$4,3 juta – nilai penuh) telah dibayar dan dicatat sebagai piutang lain-lain kepada pihak ketiga – tidak lancar di laporan keuangan konsolidasian.

As noted above, the IDR72.4 billion (equivalent to US$4.3 million – full amount) of paid deferred VAT has been recorded as other receivables to third parties – non-current in these consolidated financial statements.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen terus bekerja sama dengan konsultan pajaknya untuk menyiapkan serangkaian rencana aksi yang melibatkan pemerintah untuk memulihkan saldo PPN yang ditangguhkan. SEGD-II masih mempertimbangkan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan klaim tersebut. Kelompok Kontraktor Darajat berkeyakinan bahwa jumlah tersebut akan dikembalikan oleh kantor pajak atau diganti dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, yang menguntungkan Kelompok Kontraktor Darajat, karena Kelompok Kontraktor Darajat telah mulai membayar bagian Pemerintah sesuai dengan ketentuan JOC dan peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada penyisihan untuk tidak terpulihkannya piutang PPN tangguhan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

Up to the date of these consolidated financial statements, management continues to work with its tax consultant to prepare a set of action plans to engage the government to recover the deferred VAT balance. SEGD-II is still considering actions to be taken relating to the claim. The Darajat Contractor Group believes this amount will be refunded by the tax office or reimbursed by the GOI in accordance with the Supreme Court's decision, which favours the Darajat Contractor Group, since the Darajat Contractor Group has commenced paying the government share in accordance with the terms of the JOC and the applicable government regulation. As such, no provision for non-recovery of deferred VAT receivable has been recognised in these consolidated financial statements.

SEGSL

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, SEGSL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2018 sebesar AS$20.357 terkait temuan PPA, AS$26.548 terkait temuan PCO, dan AS$11.758 terkait temuan lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh SEGSL untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga diperlakukan sebagai pengurang perhitungan bagian pemerintah. Terlepas dari temuan terkait PPA, auditor Pemerintah tidak pernah menganggap temuan terkait PPA sebagai kurang bayar bagian Pemerintah. Jika temuan ini terlaksana, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS$20.357.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan surat bagian pemerintah yang kurang bayar periode 2013-2018 sejumlah AS$11.116 yang telah dibayarkan oleh SEGSL. Jika sisa temuan ini diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS$1.908.

Berikut adalah rincian hasil audit yang dilakukan oleh auditor Pemerintah untuk setiap tahun anggaran:

Audit 2008-2012

SEGSL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2012 sejumlah AS$10.963 terkait PPA, AS$2.930 terkait dengan temuan PCO dan AS$959 terkait temuan lainnya, namun BPKP belum menerbitkan surat bagian Pemerintah yang kurang bayar terkait audit ini. Jika temuan terkait PPA akan diperhitungkan, maka beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS$10.963, dan jika temuan lain diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS$1.322.

Audit 2013-2014

Pada tanggal 6 Juni 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan sebesar AS$31.892. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PPA, PCO, biaya alokasi antar perusahaan dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan yang diakui dengan jumlah masing-masing sebesar AS$2.756, AS$4.814, AS$16.303 dan AS$8.019.

SEGSL

As of the completion date of these consolidated financial statements, SEGSL has various audit findings from the Government auditors for the period from 2008-2018 amounting to US$20,357 related to PPA findings, US$26,548 related to PCO findings, and US$11,758 related to other findings. Management believes that, as per Indonesian tax regulations, the PPA is categorised as a cost incurred by SEGSL to obtain, maintain and manage its revenue. On that basis, management believes that the PPA should be classified as a deductible cost. Hence, it should be treated as a deduction from the Government share calculation. Notwithstanding the findings pertaining to the PPA, the Government auditors have never factored in the findings relating to PPA as an underpayment of the Government share. If the findings relating to PPA materialise, the income tax expense will increase by US$20,357.

With regards to the other findings of the Government auditors, the DGB issued an underpayment of the Government share letter for the period from 2013–2018 totalling US$11,116, which has been paid by the SEGSL. If the remaining findings materialise, the income tax expense will increase by US$1,908.

The following are the details of the results of the audits conducted by the Government auditors for each fiscal year:

2008-2012 audit

SEGSL has various audit findings from the Government auditors for the period of 2008-2012 amounting to US$10,963 relating to PPA, US$2,930 related to PCO findings and US$959 related to other findings, but BPKP did not declare these findings will result in an underpayment of the Government share. If they materialise, the impact of the findings relating to PPA will increase the Government share by US$10,963, and the impact of other findings will increase the Government share by US$1,322.

2013-2014 audit

On 6 June 2016, the BPKP issued its 2013-2014 audit report with findings totalling US$31,892. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA, the PCO, intercompany allocation charges and the amounts of expenses that should not be deductible recognised with total amounts of US$2,756, US$4,814, US$16,303 and US$8,019, respectively.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS$2.726, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS$8.019. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA, temuan PCO dan biaya alokasi antar perusahaan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Pada tanggal 5 September 2016, SEGSL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan jumlah kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS$9.906, lebih tinggi sebesar AS$7.180 dari kurang bayar bagian Pemerintah yang tercantum dalam laporan audit BPKP.

SEGSL membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 1 Desember 2016. SEGSL mengirimkan surat pengajuan bukti baru pada tanggal 26 Januari 2018. DJA telah menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun 2013-2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA menyetujui keberatan tersebut sebesar AS$7.

Tahap Keberatan

Pada tanggal 24 April 2018, SEGSL mengajukan gugatan kepada Kemenkeu di PTUN untuk membantah Surat Keputusan tersebut. Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan SEGSL. Putusannya adalah sebagai berikut:

1) Mengabulkan semua gugatan:
   a. Kemenkeu tidak berwenang memungut PNBP;
   b. Kemenkeu tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNBP SEGSL;
   c. Kemenkeu tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNBP SEGSL berdasarkan hasil audit BPKP;
   d. Objek sengketa melanggar undang-undang PNBP; dan
   e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
2) Menyatakan Surat Keputusan batal demi hukum.
3) Mewajibkan Kemenkeu mencabut Surat Keputusan tersebut.
4) Kemenkeu untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp282.000 – nilai penuh.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that underpayment of the Government share only amounted to US$2,726, which represents 34% of the non-deductible expenses of US$8,019. BPKP did not state that PPA, PCO finding and intercompany allocation charges findings resulted in underpayment of the Government share.

On 5 September 2016, SEGSL received a notification letter from the DGB in relation to the audit report with a total underpayment of the Government share amounting to US$9,906, which is higher by US$7,180, than the underpayment of the Government share stated in the BPKP audit report.

SEGSL paid the amount and submitted an objection letter to DGB on 1 December 2016. SEGSL sent a submission letter for new proof on 26 January 2018. The DGB issued a decision letter for overpayment of Government share for the year 2013-2014. Based on the decision letter, the DGB approved the objection amounting to US$7.

Objection Stage

On 24 April 2018, SEGSL filed a claim against the MoF at PTUN to dispute the decision letter. On 26 November 2018, PTUN pronounced the verdicts in favour of SEGSL. The verdicts are as follows:

1) Grant all of the lawsuits:
   a. The MoF has no authority to collect the PNBP;
   b. The MoF has no authority to request an audit to BPKP on the SEGSL PNBP obligations;
   c. The MoF has no authority to decide the overpayment or underpayment of the SEGSL PNBP based on BPKP audit result;
   d. The objects of the dispute violated the PNBP law; and
   e. The objects of the dispute were in contrary to the general principles of good governance.
2) Declare null and void the decision letter.
3) Require the MoF to revoke the decision letter.
4) The MoF to pay all of the court fees of IDR282,000 – full amount.

Tahap Banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kemenkeu mengajukan nota banding kepada PTTUN sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN terkait laporan audit 2013-2014. Pada tanggal 21 Februari 2019, SEGSL telah mengajukan kontra memori banding kepada PTTUN. Pada tanggal 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan banding yang menerima eksepsi terdakwa (yaitu; Kemenkeu) atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili kasus tersebut sesuai dengan UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tahap Kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, SEGSL mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung dengan dasar bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016 ("SEMA 4/2016"), setelah terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara maka kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN, bukan PTTUN. Oleh karena itu, SEGSL keberatan dengan keputusan PTTUN pada tahap banding di atas dan berpendapat bahwa dasar peraturan yang digunakan oleh PTTUN tidak diperbarui.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 456/K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari SEGSL.

Tahap peninjauan kembali

Pada tanggal 11 Mei 2020, SEGSL mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 2 PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari SEGSL.

Proses pengajuan ulang ke tahap PTTUN

Pada tanggal 12 Oktober 2021, SEGSL mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama (seperti pada proses sebelumnya) kepada PTTUN.

Pada tanggal 16 Maret 2022, PTTUN mengeluarkan putusannya yang menolak keberatan SEGSL.

Pada tanggal 1 April 2022, SEGSL telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTTUN tersebut.

Pada tanggal 12 Juli 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No.339/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari SEGSL yang salinannya telah diterima pada tanggal 26 September 2022.

Appeal stage

On 6 February 2019, the MoF submitted a memorandum of appeal to PTTUN in response to the decision issued by PTUN regarding 2013-2014 audit reports. On 21 February 2019, SEGSL has submitted a contra memorandum of appeal to PTTUN. On 11 April 2019, PTTUN issued its appeal decision accepting the exception of the defendant (i.e. MoF) on the absolute competence of the court and declaring that the PTUN has no authority to adjudicate such a case in accordance with Law No. 20 year 1997 involving Non-Tax State Revenue.

Cassation stage

On 23 May 2019, SEGSL submitted the memorandum of cassation to the Supreme Court on the basis that, in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016) ("SEMA 4/2016"), after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the State Administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative matters would be under PTUN, and not PTTUN. Therefore, SEGSL objected to the PTTUN decision during the appeal stage above and believes that the basis of the regulations used by PTTUN was not up to date.

On 3 October 2019, the Supreme Court issued its cassation decision No. 456/K/TUN/2019 declining the cassation request from SEGSL.

Civil review stage

On 11 May 2020, SEGSL submitted the memorandum of civil review to the Supreme Court. On 21 April 2021, the Supreme Court issued its decision No. 2 PK/TUN/2020 declining the memorandum of the civil review from SEGSL.

Resubmission to PTTUN stage

On 12 October 2021, SEGSL resubmitted a lawsuit with the same matter (as in the previous proceeding) to the PTTUN.

On 16 March 2022, PTTUN issued its verdict rejecting the objection of SEGSL.

On 1 April 2022, SEGSL has submitted its cassation request to the Supreme Court appealing the PTTUN verdict.

On 12 July 2022, the Supreme Court issued its cassation decision No.339/K/TUN/2022 rejecting the cassation request from the SEGSL, for which a copy was received on 26 September 2022.

Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, SEGSL telah membukukan penyisihan penurunan nilai penuh sebesar AS$9.906 pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS$7.180 di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS$2.726 di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari pajak penghasilan biaya dalam laba rugi.

Following the Supreme Court cassation decision, SEGSL has recorded a full provision for impairment of US$9,906 as of 31 December 2022, which represents an additional provision of US$7,180 in 2022 from the provision of US$2,726 in 2021, recorded as part of income tax expense in profit or loss.

Audit 2015

2015 audit

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan AS$3.955. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PPA, PCO dan jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar AS$1.512, AS$1.008 dan AS$1.435.

On 15 September 2017, BPKP issued its 2015 audit report with findings totalling US$3,955. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA, PCO and amount of expenses that should not be deductible amounting to US$1,512, US$1,008 and US$1,435, respectively.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS$488, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar AS$1.435. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO induk perusahaan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of the Government share only amounted to US$488, which represents 34% of the amount of expenses that should not be deductible of US$1,435. BPKP did not state that PPA and PCO findings resulted in underpayment of the Government share.

Pada tanggal 12 Maret 2018, SEGSL menerima dari DJA surat ketetapan kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS$488. Pada tanggal 12 April 2018, SEGSL membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 7 Juni 2018.

On 12 March 2018, SEGSL received from the DGB the assessment letter of underpayment for the Government share amounting to US$488. On 12 April 2018, SEGSL paid this amount and submitted an objection letter to DGB on 7 June 2018.

Pada tanggal 23 Juli 2019, DJA telah menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun buku 2015. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA belum menyetujui permohonan keberatan dari SEGSL. Oleh karena itu, sebagai tanggapan atas surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar di muka dan mencatat kerugian pada laba rugi tahun 2019.

On 23 July 2019, the DGB issued a decision letter for overpayment of the Government share for the year 2015. Based on the decision letter, the DGB has not approved the objection request from SEGSL. Therefore, in response to this decision letter, management has decided to write-off the prepaid amount and record the loss in profit or loss in 2019.

Audit 2016

2016 audit

Pada tanggal 23 Juli 2020, SEGSL menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar AS$3.216. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PPA, PCO dan jumlah biaya lain yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar AS$1.614, AS$715 dan AS$887.

On 23 July 2020, SEGSL received the 2016 audit report issued by BPKP with findings totalling US$3,216. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA, PCO and other amount of expenses that should not be deductible amounting to US$1,614, US$715 and US$887, respectively.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyebutkan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS$302, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar AS$887. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of Government share only amounted to US$302, which represents 34% of the amount of expenses that should not be deductible of US$887. BPKP did not state that PPA and PCO findings resulted in underpayment of the Government share.

SEGSL menerima surat pemberitahuan kurang bayar bagian Pemerintah dari DJA sebesar AS$302 pada tanggal 4 Agustus 2020 dan telah dibayarkan pada bulan September 2020. SEGSL menyetujui temuan sebesar AS$190 dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Temuan yang tersisa sebesar AS$112 dicatat sebagai klaim audit pemerintah dibayar di muka. Pada tanggal 28 Oktober 2020, SEGSL mengajukan keberatan kepada DJA dengan total AS$106 (sebagian). Pada tanggal 5 April 2021, DJA menolak permohonan keberatan dari SEGSL dan selanjutnya, SEGSL menghapus sisa tagihan sebesar AS$112 sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

SEGSL received the notification letter of underpayment of the Government share from the DGB amounted to US$302 on 4 August 2020 and already paid in September 2020. SEGSL agreed the findings of US$190 and recorded it as part of income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2020. The remaining findings of US$112 recorded as prepaid Government audit claims. On 28 October 2020, SEGSL filed an objection to the DGB totalling US$106 (partial). On 5 April 2021, the DGB rejected the objection request from SEGSL and subsequently, SEGSL wrote-off the remaining US$112 claim as part of income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2022.

Audit 2017-2018

Pada tanggal 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan AS$4.748. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya PCO dengan jumlah total AS$1.193 dari AS$1.971. BPKP berdalih jumlah AS$778 itu tidak disetujui PGE. Temuan lainnya termasuk PPA dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar AS$3.512 dan AS$458.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS$421, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS$1.236.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2022, SEGSL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut yang menunjukkan jumlah kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS$421.

SEGSL setuju dengan temuan tersebut sebesar AS$150 dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, SEGSL mengajukan surat keberatan kepada DGB untuk sisa AS$271 dan mencatat pembayaran tersebut sebagai klaim audit pemerintah dibayar di muka.

Pada tanggal 9 Oktober 2022, SEGSL menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-389/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGSL. Menanggapi surat keputusan ini, manajemen memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS$271. Oleh karena itu, seluruh temuan sebesar AS$421 bagian Pemerintah untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2017-2018 audit

On 17 January 2022, the BPKP issued its 2017-2018 audit report with total findings of US$4,748. For the years 2017 and 2018, BPKP only approved PCO charges with a total amount of US$1,193 out of US$1,971. BPKP argued that the amount of US$778 was not approved by PGE. Other findings include PPA and the amounts of expenses that should not be deductible amounting to US$3,512 and US$458, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of the Government share only amounted to US$421, which represents 34% of the non-deductible expenses of US$1,236.

On 24 January 2022, SEGSL received a notification letter from the DGB in relation to the audit report indicating a total underpayment of the Government share amounting to US$421.

SEGSL agreed with the findings of US$150 and recorded it as part of income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2022. On 14 April 2022, SEGSL submitted an objection letter to the DGB for the remaining US$271 and recorded the payment as prepaid government audit claims.

On 9 October 2022, SEGSL received a decision letter from the MoF No. S-389/MK.2/2022 rejecting SEGSL's objections. As a response to this decision letter, management has decided to write-off the remaining US$271 prepayment. Therefore, the full amount of the findings of US$421 of the Government share for 2017-2018 has been recorded as part of income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2022.

PPN Ditangguhkan

Pada tanggal 23 Juni 2000, SEGSL menerima surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak BADORA. SEGSL diharuskan membayar semua PPN tangguhan yang belum dibayar sebesar Rp17,5 miliar (setara dengan AS$1,0 juta – nilai penuh). SEGSL mengajukan keberatan atas ketetapan tersebut pada tanggal 18 September 2000 yang ditolak oleh DJP. Pada tanggal 27 Maret 2002 SEGSL mengajukan banding atas keputusan DJP ke Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 7 April 2002, SEGSL menerima surat penagihan pajak yang menetapkan denda keterlambatan pembayaran atas PPN tangguhan yang belum dibayar sebesar Rp5,6 miliar – nilai penuh (setara dengan AS$334 ribu – nilai penuh) untuk periode 16 bulan terhitung sejak satu bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran ketetapan pada bulan Juli 2000 ke tanggal pembayaran PPN tangguhan oleh SEGSL pada bulan November 2001. Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang perpajakan, SEGSL membayar PPN tangguhan termasuk denda sebesar Rp23,1 miliar – nilai penuh (setara dengan AS$1,4 juta – nilai penuh).

Pada tanggal 26 Agustus 2002, pengadilan pajak mengeluarkan surat keputusan yang memenangkan SEGSL, yang memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp595 juta – nilai penuh (setara dengan AS$35 ribu – nilai penuh). Sehingga jumlah yang harus dikembalikan oleh DJP adalah sebesar Rp22,5 miliar – nilai penuh (setara dengan AS$1,3 juta – nilai penuh). SEGSL mengakui beban sebesar Rp595 juta (setara dengan AS$35 ribu – nilai penuh) pada tahun keputusan kurang bayar oleh pengadilan pajak.

Pada tanggal 22 November 2002, DJP mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 26 Januari 2004, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang memenangkan SEGSL, menolak peninjauan kembali dari DJP.

Sejak tanggal putusan Mahkamah Agung tersebut, SEGSL telah melakukan berbagai diskusi dengan DJP. Seperti disebutkan di atas, Rp22,5 miliar (setara dengan AS$1,3 juta – nilai penuh) telah dicatat sebagai aset tidak lancar lain-lain di laporan keuangan konsolidasian ini.

Deferred VAT

On 23 June 2000, SEGSL received a tax assessment letter issued by the BADORA tax office. SEGSL was required to pay all outstanding deferred VAT amounting to IDR17.5 billion (equivalent to US$1.0 million – full amount). SEGSL filed an objection to the assessment on 18 September 2000, which was rejected by the DGT. On 27 March 2002, SEGSL appealed the DGT's decision to the tax court.

On 7 April 2002, SEGSL received a tax collection letter assessing late payment penalties on unpaid deferred VAT of IDR5.6 billion – full amount (equivalent to US$334 thousand – full amount) for the 16-month period as counted from one month after the assessment payment due date in July 2000 to the deferred VAT payment date by the SEGSL in November 2001. As required by the tax laws, SEGSL paid the deferred VAT including penalties amounting to IDR23.1 billion – full amount (equivalent to US$1.4 million – full amount).

On 26 August 2002, the tax court issued its decision letter in favour of SEGSL, which had an underpayment of IDR595 million – full amount (equivalent to US$35 thousand – full amount). Therefore, the amount required to be refunded by DGT is IDR22.5 billion – full amount (equivalent to US$1.3 million – full amount). SEGSL recognised an expense of IDR595 million (equivalent to US$35 thousand – full amount) in the year the underpayment decision was made by the tax court.

On 22 November 2002, the DGT submitted a reconsideration request for this decision to the Supreme Court. On 26 January 2004, the Supreme Court issued the decision in favour of SEGSL, rejecting the reconsideration from the DGT.

Since the date of the Supreme Court's decision, SEGSL has had various discussions with the DGT. As noted above, IDR22.5 billion (equivalent to US$1.3 million – full amount) has been recorded as part of other non-current assets in these consolidated financial statements.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen terus bekerja sama dengan konsultan pajaknya untuk menyiapkan serangkaian rencana aksi yang melibatkan pemerintah untuk memulihkan saldo PPN yang ditangguhkan. SEGSL masih mempertimbangkan tindakan yang akan diambil terkait dengan klaim tersebut. SEGSL berkeyakinan jumlah tersebut akan dikembalikan oleh kantor pajak atau diganti oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, yang memenangkan SEGSL, karena SEGSL telah mulai membayar bagian Pemerintah sesuai dengan ketentuan JOC dan peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada provisi untuk tidak terpulihkannya piutang PPN tangguhan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

Up to the date of these consolidated financial statements, management continues to work with its tax consultant to prepare a set of action plans to engage the government to recover the deferred VAT balances. SEGSL is still considering actions to be taken relating to the claim. SEGSL believes this amount will be refunded by the tax office or reimbursed by the GOI in accordance with the Supreme Court's decision, which was in favour of SEGSL, since SEGSL has commenced paying the Government share in accordance with the terms of the JOC and the applicable government regulation. As such, no provision for non-recovery of deferred VAT receivables has been recognised in these consolidated financial statements.

SEGSPL

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, SEGSPL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2018 sebesar AS$803 terkait temuan PPA dan AS$22 terkait temuan lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh SEGSPL untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, sehingga harus diperlakukan sebagai pengurang perhitungan bagian Pemerintah. Terlepas dari temuan terkait PPA, auditor Pemerintah tidak pernah memperhitungkan temuan terkait PPA sebagai kurang bayar bagian Pemerintah. Jika temuan yang berkaitan dengan PPA terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS$803.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan Surat Kurang Bayar setoran bagian Pemerintah periode 2013-2016 sebesar AS$2 yang telah dibayarkan oleh SEGSPL. Jika temuan yang tersisa terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS$5.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pemerintah pada setiap tahun anggaran:

Audit 2008-2014

SEGSPL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2014 sebesar AS$620 terkait temuan PPA dan AS$16 terkait temuan lainnya, namun BPKP tidak menyatakan temuan tersebut akan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah. Jika terwujud, dampak temuan terkait PPA akan meningkatkan bagian Pemerintah sebesar AS$620 dan dampak temuan lainnya akan meningkatkan bagian Pemerintah sebesar AS$5.

SEGSPL

As of the completion date of these consolidated financial statements, SEGSPL has various audit findings from the Government auditors for the period from 2004-2018 amounting to US$803 relating to PPA findings and US$22 relating to other findings. Management believes that, as per Indonesian tax regulations, the PPA is categorised as a cost incurred by SEGSPL to obtain, maintain and manage its revenue. On that basis, management believes that the PPA should be classified as a deductible cost, hence, it should be treated as a deduction from the Government share calculation. Notwithstanding the findings pertaining to the PPA, the Government auditors have never factored in the findings relating to PPA as an underpayment of the Government share. If the findings relating to PPA materialise, the income tax expense will increase by US$803.

With regards to the other findings of the Government auditors, the DGB issued an underpayment of the Government share letter for the period from 2013-2016, totalling US$2, which has been paid by SEGSPL. If the remaining findings materialise, the income tax expense will increase by US$5.

The following are the details of the results of the audits conducted by the Government auditors for each fiscal year:

2008-2014 audit

SEGSPL has various audit findings from the Government auditors for the period from 2008-2014 amounting to US$620 relating to PPA findings and US$16 related to other findings, but BPKP did not declare these findings would result in the underpayment of the Government share. If they materialise, the impact of the finding relating to PPA will increase the Government share by US$620 and the impact of other findings will increase the Government share by US$5.

Audit 2015

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan sebesar AS$116. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PPA sebesar AS$110 dan temuan lainnya sebesar AS$6.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS$2, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar AS$6. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Pada tanggal 13 Maret 2018, SEGSPL menerima dari DJA surat ketetapan kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS$2. Manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar di muka dan mencatat kerugian pada laba rugi tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, SEGSPL menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar AS$73 terkait PPA. Tidak ada surat penilaian kurang bayar bagian Pemerintah dari DJA terkait temuan audit SEGSPL. Namun, SEGSPL belum menerima surat pemberitahuan kurang bayar bagian Pemerintah dari DJA terkait temuan audit tersebut. Manajemen berpendapat bahwa temuan audit tersebut tidak berdasar karena SEGSPL telah secara konsisten menerapkan kerangka akuntansi sebagaimana diatur dalam JOC.

b. Pendaftaran karbon kredit

SEGWWL

Pada tahun 2011, SEGWWL mengadakan Perjanjian Proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (“MPP”) dengan Bank Standard Chartered (“SCB”) dan Sindicatum Carbon Capital Limited dan Perjanjian pra-registrasi VCU dengan PT Sindicatum Carbon Capital Indonesia (“SCCI”) (secara bersama-sama, “Perjanjian”) untuk melaksanakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu Tahap 2 117 MW (“Proyek”) yang berlokasi di Jawa Barat, Indonesia.

2015 audit

On 15 September 2017, BPKP issued its 2015 audit report with findings totalling US$116. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA amounting to US$110 and other findings amounting to US$6.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of the Government share only amounted to US$2, which represents 34% of the amount of expenses that should not be deductible of US$6. BPKP did not state that the PPA finding resulted in underpayment of the Government share.

On 13 March 2018, SEGSPL received from the DGB the assessment letter of underpayment of the Government share amounting to US$2. Management has decided to write-off the prepaid amount and record the loss in profit or loss in 2019.

2016 audit

On 23 July 2020, SEGSPL received the 2016 audit report issued by BPKP with findings totalling US$73, related to PPA. There is no assessment letter of underpayment of the Government share from the DGB related to SEGSPL audit findings. However, SEGSPL has not yet received the notification letter of underpayment of the Government share from the DGB related to the audit findings. Management believes that the audit findings are without merit as SEGSPL has consistently applied the accounting framework as stipulated in the JOC.

b. Carbon credits registration

SEGWWL

In 2011, SEGWWL entered into a Clean Development Mechanism (“CDM”) Project Agreement with Standard Chartered Bank (“SCB”) and Sindicatum Carbon Capital Limited and pre-registration VCU Services Agreement with PT Sindicatum Carbon Capital Indonesia (“SCCI”) (collectively, the “Agreements”) to execute Wayang Windu Phase 2 117 MW geothermal power station (the “Project”) located in West Java, Indonesia.

CER (tidak diaudit)

Proyek ini terdaftar sebagai proyek CDM oleh United Nations Framework Convention on the Climate Change ("UNFCCC") pada tanggal 2 Desember 2010 dengan nomor referensi 3193. Sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian, SEGWWL setuju untuk melaksanakan Proyek. yang diharapkan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar setara dengan 794.832 metrik ton CO_2 per tahun. Tujuan Proyek ini adalah untuk menghasilkan listrik menggunakan sumber daya yang andal dan terbarukan sebagai pengganti pembangkit listrik dengan sbahan bakar/sumber yang lebih intensif gas rumah kaca. Proyek ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggantian pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan sumber energi yang bersih dan terbarukan.

Periode kredit untuk Proyek adalah dari 2 Desember 2010 sampai dengan 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing selama tujuh tahun, tergantung pada persetujuan UNFCCC. Pada tanggal 13 Maret 2020, SEGWWL berhasil memperpanjang periode kredit hingga 1 Desember 2024.

Pada tanggal 15 Mei 2015 dan 29 Mei 2019, UNFCCC menerbitkan masing-masing 1.505.313 CER dan 1.681.431 CER. SEGWWL telah menjual 2.600.000 CER yang berjumlah AS$1.711 selama tahun 2021. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2022, UNFCCC mengeluarkan 2.237.274 CER. Per 31 Desember 2025, sisa saldo CER SEGWWL adalah 2.343.054 CER.

VCU (tidak diaudit)

Pada tanggal 27 Mei 2011, SEGWWL menandatangani Perjanjian Layanan VCU dengan Sindicatum Carbon Capital (South East Asia) Pte. Limited ("SCC") untuk memonetisasi 1.406.789 VCU dengan menunjuk SCC untuk mengatur pendaftaran proyek dan mencari pembeli untuk VCU.

Pendapatan karbon kredit disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Per 31 Desember 2025, tidak terdapat sisa saldo VCU.

SEGD-II

Pada tahun 2006, SEGD-II telah mendaftarkan proyek Darajat Unit 3 ("Proyek DRJ3") dengan kapasitas 110 MW sebagai proyek CDM.

CER (unaudited)

The Project was registered as a CDM project by the United Nations Framework Convention on Climate Change ("UNFCCC") on 2 December 2010 with reference number 3193. As stated in the Agreements, SEGWWL agreed to carry out the Project, which is expected to result in the reduction of greenhouse gas emissions amounting to approximately 794,832 metric tonnes CO_2 equivalent per annum. The purpose of this Project is to generate power using a reliable and renewable resource in lieu of power generation by a more greenhouse gas intensive fuel/source. The Project will reduce greenhouse gas emissions through the displacement of fossil fuel electricity generation with a clean, renewable energy source.

The crediting period for the Project is from 2 December 2010 until 1 December 2017 and can be extended twice, each for a seven-year period, depending on UNFCCC approval. On 13 March 2020, SEGWWL successfully extended the crediting period to 1 December 2024.

On 15 May 2015 and 29 May 2019, UNFCCC issued 1,505,313 CERs and 1,681,431 CERs, respectively. SEGWWL sold 2,600,000 CERs totalling US$1,711 during 2021. Subsequently on 22 July 2022, UNFCCC issued 2,237,274 CERs. As of 31 December 2025, SEGWWL's remaining CER balance is 2,343,054 CERs.

VCU (unaudited)

On 27 May 2011, SEGWWL entered into a VCU Services Agreement with Sindicatum Carbon Capital (South East Asia) Pte. Limited ("SCC") to monetise 1,406,789 VCUs by appointing SCC to arrange for the registration of the project and find buyers for the VCUs.

Carbon credit revenue is presented as part of "Revenue from contracts with customers" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

As of 31 December 2025, there is no remaining VCU balance.

SEGD-II

In 2006, SEGD-II registered the Darajat Unit 3 project ("DRJ3 Project") with a capacity of 110 MW as a CDM project.

CER (tidak diaudit)

Proyek DRJ3 terdaftar sebagai proyek CDM oleh UNFCCC pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nomor referensi 0673. SEGD-II melaksanakan Proyek DRJ3 yang diharapkan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar setara dengan 652.173 metrik ton CO_2 per tahun. Proyek DRJ3 didirikan untuk berkontribusi pada pasokan listrik dalam sistem jaringan terinterkoneksi Jawa, Madura dan Bali ("JAMALI") dan menghasilkan energi dari sumber yang bersih dan ramah lingkungan.

Pada tanggal 18 Agustus 2017 dan 31 Maret 2022, UNFCCC menerbitkan masing-masing 801.111 CER dan 2.006.875 CER untuk Proyek DRJ3. Pada tahun 2021, SEGD-II telah menjual CER sebanyak 1.550.000 CER dan di tahun 2022 berhasil terjual CER sebanyak 1.100.000 CER. Pada tanggal 31 Desember 2025, sisa saldo CER SEGD-II adalah 1.761.227 CER.

SBE

Pada tahun 2024, SBE telah menandatangani Perjanjian Jasa Karbon (Carbon Services Agreement) dengan Ultimate Carbon B.V. ("UC") untuk secara eksklusif mengelola, memelihara, menjaga, menyimpan dalam akun registri SBE atau mengarahkan akun atau personel SBE yang terkait dengan penjualan sebagaimana relevan, serta menjual setiap sertifikat atribut lingkungan atau sertifikat atribut energi yang dihasilkan oleh atau dikaitkan dengan Proyek Energi Angin Sidrap Tahap 1 ("Proyek SBE"), yaitu suatu pembangkit listrik tenaga angin dengan kapasitas 75 MW yang berlokasi di Sulawesi Selatan, Indonesia.

GS VER

Pada tahun 2019, UPC Renewables Asia I Ltd mendaftarkan Proyek SBE sebagai proyek Gold Standard dengan nomor identifikasi GS4813. Proyek SBE kemudian diakuisisi oleh BWE pada tanggal 2 April 2024, termasuk pengalihan kepemilikan kredit karbon.

Proyek SBE diperkirakan akan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 141.248 metrik ton CO2 ekuivalen per tahun. Tujuan dari Proyek SBE adalah untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan tenaga angin serta berkontribusi pada pasokan listrik yang bersih dan ramah lingkungan dalam sistem interkoneksi Sulawesi Selatan ("SULBAGSEL"). Periode kredit untuk Proyek SBE adalah dari 1 Maret 2018 hingga 29 Februari 2028 dan tidak dapat diperpanjang.

CER (unaudited)

The DRJ3 Project was registered as a CDM project by the UNFCCC on 11 December 2006 with reference number 0673. SEGD-II is implementing the DRJ3 Project which is expected to result in a reduction in greenhouse gas emissions of around 652,173 metric tonnes of CO_2 equivalent per year. The DRJ3 Project was established to contribute to the supply of electricity in the Java, Madura and Bali ("JAMALI") interconnected network system and generate energy from clean and environmentally friendly sources.

On 18 August 2017 and 31 March 2022, the UNFCCC issued 801,111 CERs and 2,006,875 CERs for the DRJ3 Project, respectively. In 2021, SEGD-II has sold 1,550,000 CERs and in 2022 it has sold 1,100,000 CERs. As of 31 December 2025, the remaining balance of SEGD-II CERs was 1,761,227 CERs.

SBE

In 2024, SBE entered into a Carbon Services Agreement with Ultimate Carbon B.V. ("UC") to exclusively manage, maintain, take custody of, hold within the SBE's registry accounts or direct SBE's account or personnel related to such sales as applicable, and to sell any environmental attribute certificate or energy attribute certificate generated by or attributable to the Sidrap Wind Energy Project Phase 1 (the "SBE Project"), a wind power plant with a capacity of 75 MW and located in South Sulawesi, Indonesia.

GS VER

In 2019, UPC Renewables Asia I Ltd registered the SBE Project as a Gold Standard project with the identification number GS4813. The SBE Project was later acquired by BWE on 2 April 2024, which included transfer of carbon credits ownership.

The SBE Project is expected to result in a reduction in greenhouse gas emissions of around 141,248 metric tonnes of CO2 equivalent per year. The purpose of the SBE Project is to generate electricity by utilizing wind power and contribute to the supply of clean and environmentally friendly electricity in the South Sulawesi ("SULBAGSEL") interconnected system. The crediting period for the SBE Project is 1 March 2018 to 29 February 2028 which cannot be extended.

Pada tanggal 21 Oktober 2019, 1 Juli 2021 dan 25 Februari 2022, Gold Standard menerbitkan masing-masing 135,388, 252.115, dan 137.748 VER. Pada tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat saldo VER yang tersisa.

On 21 October 2019, 1 July 2021 and 25 February 2022, Gold Standard issued 135,388, 252,115, and 137,748 VERs respectively. As of 31 December 2025, there is no remaining VER balance.

c. Perjanjian penyelesaian penjualan uap kepada PT PLN Indonesia Power ("PT PIP") – anak perusahaan PLN

c. Settlement agreement on steam sales to PT PLN Indonesia Power ("PT PIP") – a subsidiary of PLN

Kelompok Kontraktor Darajat memiliki sengketa yang sedang berlangsung tentang penjualan uap antara SEGDL dan PT PIP sejak 2018. *Shutdown* yang tidak direncanakan terjadi di Darajat Unit-1 PT PIP karena kerusakan turbin. PT PIP selaku operator PLTU mengindikasikan bahwa kualitas uap yang dialirkan oleh SEGDL menjadi faktor utama penyebab rusaknya turbin. Oleh karena itu, PT PIP menghentikan pembayaran kepada SEGDL atas tagihan untuk periode Mei hingga September 2018 sebesar AS$7,9 juta – nilai penuh.

The Darajat Contractor Group has had an ongoing dispute on steam sales between SEGDL and PT PIP since 2018. An unplanned shutdown occurred in PT PIP's Darajat Unit-1 due to turbine breakdown. PT PIP as the operator of the power plant, indicated that the steam quality delivered by SEGDL was the main factor that caused the turbine damage. As such, PT PIP stopped the payment to SEGDL of the invoices for the period from May to September 2018 totalling US$7.9 million – full amount.

Menurut Pasal 5.1 dan Pasal 11.3 ESC Darajat, selama periode di mana PLN tidak dapat mengambil semua uap yang dapat dikirim dari SEGDL, PLN harus membayar jumlah kewajiban "Ambil atau Bayar" kepada SEGDL. Selama saat sengketa, kedua belah pihak akan terus melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan ESC Darajat. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa SEGDL berhak atas pembayaran penuh dari PT PIP atas tagihan terutang dari Mei 2018 sampai dengan September 2018.

According to Article 5.1 and Article 11.3 of the Darajat ESC, during the period where PLN is unable to take all steam that could be delivered from SEGDL, PLN shall pay the "Take or Pay" obligation amount to SEGDL. During any time of dispute, both parties shall continue to carry out their responsibilities pursuant to the Darajat ESC. Hence, the management believes that SEGDL is entitled for the full payments from PT PIP for the outstanding invoices from May 2018 to September 2018.

Pada tanggal 21 Desember 2021, manajemen mencapai sebuah kesepakatan dengan PT PIP dan PLN tentang pengaturan penyelesaian dalam bentuk pengiriman uap berlebih di masa mendatang (di luar level "Take or Pay") dari SEGDL ke PLN dengan total akumulasi volume uap sebesar 159.890.000 kWh selama kurang lebih 42 bulan mulai Desember 2022, dengan harga rata-rata tertimbang harga energi pada saat sengketa yaitu Mei – September 2018.

On 21 December 2021, management reached an agreement with PT PIP and PLN on the settlement arrangement in the form of future excess steam delivery (beyond "Take or Pay" level) from SEGDL to PLN with a total accumulated steam volume of 159,890,000 kWh over approximately 42 months starting December 2022, priced at the weighted average energy price at the time of the dispute i.e. May – September 2018.

Karena jangka waktu penyelesaian yang lama, pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Kelompok Kontraktor Darajat mengakui provisi untuk ECL masing-masing sebesar AS$ nihil dan AS$35, secara berurutan, di laporan posisi keuangan konsolidasian terhadap saldo piutang usaha.

Due to the long settlement period, as of 31 December 2025 and 2024, the Darajat Contractor Group recognised a provision for ECL amounting to US$ nil and US$35, respectively in the consolidated statements of financial position against the trade receivables balance.

d. Jaminan akuisisi Salak-Darajat

d. Guarantees of Salak-Darajat acquisitions

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD BV menandatangani perjanjian jual beli saham ("Salak-Darajat SPA") dengan Chevron Darajat Holdings, Ltd., Chevron Geothermal Indonesia Holdings, Ltd., dan Chevron Geothermal Salak Holdings, Ltd. (para "Penjual") untuk mengakuisisi 100% saham para Penjual di CDL, CGI, dan CGS. Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dari transaksi tersebut adalah SEGHPL, Holdings BV dan ACEHI, yang jumlah jaminannya tidak terbatas.

On 22 December 2016, SEGSDBV signed a share sale and purchase agreement ("Salak-Darajat SPA") with Chevron Darajat Holdings, Ltd., Chevron Geothermal Indonesia Holdings, Ltd., and Chevron Geothermal Salak Holdings, Ltd. (the "Sellers") to acquire 100% of the Sellers shares in CDL, CGI, and CGS. The Buyer Direct Shareholder Guarantors of the transaction are SEGHPL, Holdings B.V. and ACEHI, for which the guarantees are unlimited in amount.

Penjamin Kelompok Pembeli adalah SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc., dimana kewajiban maksimum secara keseluruhan hingga 31 Desember 2057 dibatasi sebesar AS$200.000.000 – nilai penuh. Hingga 31 Desember 2049, jaminan SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc. dibatasi masing-masing sebesar AS$54.820.000 – nilai penuh, AS$81.800.000 – nilai penuh, AS$23.780.000 – nilai penuh dan AS$39.600.000 – nilai penuh. Dari 1 Januari 2050 hingga 31 Desember 2057, jaminan SEGHPL, SEGPL dan AC Energy Holdings, Inc. dibatasi masing-masing sebesar AS$62.220.000 – nilai penuh, AS$92.840.000 – nilai penuh dan AS$44.940.000 – nilai penuh, yang merupakan Proporsi Ekuitas Kelompok Pembeli dari masing-masing Penjamin Kelompok Pembeli.

Jaminan mencakup semua jumlah yang harus dibayar oleh SEG-SD BV sebagai pembeli berdasarkan atau sehubungan dengan dokumen transaksi, yang terutama terkait dengan ketentuan ganti rugi "clean-break" berdasarkan Pasal 8 Salak-Darajat SPA tertanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan ketentuan ini, SEG-SD BV akan mengganti rugi para Penjual untuk semua kerugian yang diakibatkan atau sehubungan dengan perusahaan target (CDL, CGI dan CGS) dan operasi mereka. Contoh klaim yang dapat dibuat oleh para Penjual adalah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika para Penjual diwajibkan untuk membayar pajak, biaya penonaktifan, atau biaya atau kerugian lainnya yang terkait dengan perusahaan Grup dan operasinya.

SEGHPL akan menahan sejumlah AS$5.000.000 – nilai penuh dari Phoenix Power B.V. (“Phoenix”) atas dividen dan distribusi serupa lainnya yang terhutang kepada Phoenix oleh masing-masing SEGPL dan Star Phoenix Geothermal B.V. yang berlaku efektif sejak 2040 hingga berakhirnya periode JOC yang terakhir, atau jika dividen tersebut dan distribusi serupa lainnya tidak berjumlah AS$5.000.000 – nilai penuh, oleh pembayaran kekurangan oleh Phoenix kepada SEGHPL. SEGHPL akan diharuskan untuk menggunakan AS$5.000.000 – nilai penuh tersebut untuk pembayaran klaim apa pun yang dibuat oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli antara 1 Januari 2050 dan 31 Desember 2057 atau mulai 1 Januari 2058 dan seterusnya.

Selain itu, SEGHPL telah menerima jaminan sejumlah AS$5.000.000 – nilai penuh dari AC Energy Holdings, Inc. terhadap pembayaran klaim apa pun yang dibuat oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli mulai 1 Januari 2058 dan seterusnya.

The Buyer Group Guarantors are SEGHPL, SEGPL, EGCO and AC Energy Holdings, Inc., for which the aggregate maximum liability until 31 December 2057 is capped at a total amount of US$200,000,000 – full amount. Up to 31 December 2049, SEGHPL’s, SEGPL’s, EGCO’s and AC Energy Holdings, Inc.’s guarantees are capped at US$54,820,000 – full amount, US$81,800,000 – full amount, US$23,780,000 – full amount and US$39,600,000 – full amount, respectively. From 1 January 2050 to 31 December 2057, SEGHPL’s, SEGPL’s and AC Energy Holdings, Inc.’s guarantees are capped at US$62,220,000 – full amount, US$92,840,000 – full amount and US$44,940,000 – full amount, respectively, representing the Buyer Group Equity Proportion of each of the Buyer Group Guarantors.

The guarantee covers all amounts which SEGSDBV as the buyer is liable to pay under or in relation to the transaction documents, which primarily relates to the "clean-break" indemnity provision under Clause 8 of Salak-Darajat SPA dated 22 December 2016. Under this provision, SEGSDBV shall indemnify the Sellers for all losses resulting from or in connection with the target companies (CDL, CGI and CGS) and their operations. An example of a claim that the Sellers may make would be a claim under the indemnity provision if the Sellers are required to pay any taxes, decommissioning costs or any other costs or losses pertaining to the Group companies and their operations.

SEGHPL will retain US$5,000,000 – full amount from an assignment by Phoenix Power B.V. (“Phoenix”) of dividends and other similar distributions payable to Phoenix by each of SEGPL and Star Phoenix Geothermal B.V. with effect from 2040 to the expiry of the last of the JOCs, or if such dividends and other similar distributions do not amount to US$5,000,000 – full amount, by a payment of the shortfall by Phoenix to SEGHPL. SEGHPL will be required to utilise such US$5,000,000 – full amount towards payment of any claim made by the Sellers against the Buyer Direct Shareholder Guarantors between 1 January 2050 and 31 December 2057 or from 1 January 2058 onwards.

In addition, SEGHPL has received a guarantee in the amount of US$5,000,000 – full amount from AC Energy Holdings, Inc. towards payment of any claim made by the Sellers against the Buyer Direct Shareholder Guarantors from 1 January 2058 onwards.

Selanjutnya, Penjamin Kelompok Pembeli dan Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli harus mempertahankan Kekayaan Bersih Berwujud ("KBB") kolektif masing-masing sebesar AS$2.500.000.000 – nilai penuh dan AS$500.000.000 – nilai penuh. Jika Penjamin Kelompok Pembeli atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli gagal mempertahankan KBB agregat yang disyaratkan, para Penjual dapat meminta Penjamin Kelompok Pembeli dan/atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli yang gagal untuk memberikan salah satu dari:

a) jaminan yang dilaksanakan dari afiliasi Penjamin Pembeli gagal yang akan memungkinkan Penjamin Kelompok Pembeli atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli, sebagaimana berlaku, untuk secara kolektif memenuhi ambang batas KBB yang disebutkan di atas; atau
b) satu atau lebih jaminan kredit, dalam jumlah yang sama dengan kekurangannya.

Pada tanggal 16 November 2022, SEGHPL menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Phoenix dan EGCO, untuk mengakuisisi 20% saham tambahan di SEGPL dan 30,25% saham di Star Phoenix Geothermal JV B.V. (sekarang dikenal sebagai Star Energy Geothermal Netherlands B.V.). Sebagai hasil dari transaksi ini, SEGHPL akan menanggung:

a. bagian EGCO dari Penjamin Kelompok Pembeli sampai batas AS$23.780.000 – nilai penuh, sampai dengan 31 Desember 2049;
b. kewajiban EGCO untuk mendanai AS$5.000.000 pertama – jumlah penuh dari setiap klaim oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dari 1 Januari 2050 hingga 31 Desember 2057 dan untuk periode dari 1 Januari 2058 dan seterusnya; dan
c. porsi KBB EGCO sebesar AS$800.000.000 – jumlah penuh hingga 31 Maret 2027 dan AS$712.500.000 – nilai penuh mulai 1 April 2027.

Grup telah menilai bahwa kemungkinan penarikan jaminan sangat kecil berdasarkan hasil operasi Salak-Darajat hingga saat ini, dan fakta bahwa KBB kolektif berada di atas ambang batas minimum. Oleh karena itu Grup tidak berkeyakinan bahwa penyisihan untuk jaminan tersebut diperlukan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Furthermore, the Buyer Group Guarantors and the Buyer Direct Shareholder Guarantors should maintain a collective Tangible Net Worth ("TNW") of US$2,500,000,000 – full amount and US$500,000,000 – full amount, respectively. If the Buyer Group Guarantors or the Buyer Direct Shareholder Guarantors fail to maintain the relevant required aggregate TNW, the Seller may require the defaulting Buyer Group Guarantor and/or the defaulting Buyer Direct Shareholder Guarantor to provide either:

a) a duly executed guarantee from an affiliate of the defaulting Buyer Guarantor that would enable the Buyer Group Guarantors or Buyer Direct Shareholder Guarantors, as applicable, to collectively satisfy the TNW thresholds mentioned above; or

b) one or more letters of credit, in an amount equal to the shortfall.

On 16 November 2022, SEGHPL signed a Share Purchase Agreement with Phoenix and EGCO, to acquire an additional 20% interest in SEGPL and a 30.25% interest in Star Phoenix Geothermal JV B.V. (now known as Star Energy Geothermal Netherlands B.V.). As a result of this transaction, SEGHPL will assume:

a. EGCO's portion of the Buyer Group Guarantee up to a cap of US$23,780,000 – full amount, up to 31 December 2049;
b. EGCO's liability to fund the first US$5,000,000 – full amount of any claim by the Sellers against the Buyer Direct Shareholders from 1 January 2050 to 31 December 2057 and for the period from 1 January 2058 onwards; and

c. EGCO's TNW portion of US$800,000,000 – full amount until 31 March 2027 and US$712,500,000 – full amount from 1 April 2027.

The Group has assessed that the probability of the guarantees being called is remote based on the results of the Salak-Darajat operations to date, and the fact that the collective TNW is above the minimum threshold. The Group therefore does not believe that a provision for such guarantees is necessary as of 31 December 2025 and 2024.

e. Jaminan akuisisi Sekincau

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEGSDBV menandatangani perjanjian jual beli saham ("Sekincau SPA") dengan Chevron Global Energy, Inc. untuk mengakuisisi 100% saham CVX di PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau (yaitu, mewakili 95% kepemilikan). Pembeli Pemegang Saham Langsung Penjamin dari transaksi tersebut adalah Holdings B.V. dan ACEHI, dimana jaminannya tidak terbatas. Penjamin Grup Pembeli adalah SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc.

Kewajiban maksimum agregat hingga 31 Desember 2037 dibatasi sebesar AS$1.500.000 – nilai penuh. Jaminan SEGHPL dan SEGPL dibatasi masing-masing sebesar AS$411.150 – nilai penuh dan AS$613.500 – nilai penuh, sampai dengan 31 Desember 2037, mewakili Proporsi Ekuitas Grup Pembeli masing-masing SEGHPL dan SEGPL.

Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dan Penjamin Grup Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai Penjamin Pembeli.

Jaminan mencakup semua jumlah yang SEGSDBV sebagai pembeli bertanggung jawab untuk membayar berdasarkan atau sehubungan dengan dokumen transaksi, yang terutama berkaitan dengan ketentuan ganti rugi "clean-break" berdasarkan klausul 8 dari Sekincau SPA tertanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan ketentuan ini, SEGSDBV akan memberikan ganti rugi kepada CVX untuk semua kerugian yang diakibatkan dari atau sehubungan dengan perusahaan target (PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau) dan operasinya. Contoh klaim yang dapat dibuat oleh CVX adalah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika CVX diharuskan membayar pajak, biaya penonaktifan, atau biaya atau kerugian lain apa pun yang berkaitan dengan Grup dan operasinya.

Grup telah menilai bahwa kemungkinan penarikan jaminan sangat kecil berdasarkan hasil operasi Sekincau hingga saat ini. Oleh karena itu Grup tidak berkeyakinan bahwa penyisihan untuk jaminan tersebut diperlukan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

e. Guarantees of Sekincau acquisition

On 22 December 2016, SEGSDBV signed a share sale and purchase agreement ("Sekincau SPA") with Chevron Global Energy, Inc. to acquire 100% of CVX's shares in PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau (i.e. representing 95% ownership). The Buyer Direct Shareholder Guarantors of the transaction are Holdings B.V. and ACEHI, for which the guarantees are unlimited. The Buyer Group Guarantors are SEGHPL, SEGPL, EGCO and AC Energy Holdings, Inc.

The aggregate maximum liability until 31 December 2037 is capped at a total amount of US$1,500,000 – full amount. SEGHPL's and SEGPL's guarantees are capped at US$411,150 – full amount and US$613,500 – full amount, respectively, up to 31 December 2037, representing the Buyer Group Equity Proportion of each of SEGHPL and SEGPL.

The Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors are collectively referred to as Buyer Guarantors.

The guarantee covers all amounts which SEGSDBV as the buyer is liable to pay under or in relation to the transaction documents, which primarily relates to the "clean-break" indemnity provision under clause 8 of the Sekincau SPA dated 22 December 2016. Under this provision, which SEGSDBV shall indemnify CVX for all losses resulting from or in connection with the target company (PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau) and its operations. An example of a claim that CVX may make would be a claim under the indemnity provision if CVX is required to pay any taxes, decommissioning costs or any other costs or losses pertaining to the Group and its operations.

The Group has assessed that the probability of the guarantees being called is remote based on the results of the Sekincau operations to date. The Group therefore does not believe that a provision for such guarantees is necessary as of 31 December 2025 and 2024.

f. Jaminan akuisisi aset Filipina

Pada tanggal 22 Desember 2016, ACEHI-Star Holdings, Inc. (“ACEHI-Star”) menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan Union Oil Company of California, Unocal International Corporation dan Chevron Foreign Investments, Inc. untuk mengakuisisi 100% saham CVX di Chevron Kalinga, Ltd., Chevron Geothermal Philippines Holdings, LLC, dan Chevron Geothermal Services Company (“Filipina SPA”) di mana jaminan sehubungan dengan kewajiban ACEHI-Star diberikan kepada penjual CVX oleh Pembeli Penjamin Pemegang Saham Langsung dan Penjamin Kelompok Pembeli. Penjamin Pemegang Saham Pembeli Langsung adalah SEGHPL dan Star Energy Geothermal Philippines B.V. Penjamin Grup Pembeli adalah SEGHPL dan AC Energy Holdings, Inc. Penjamin Pemegang Saham Pembeli Langsung dan Penjamin Grup Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai Penjamin Pembeli. Pada bulan Juli 2017, AC Energy Holdings, Inc. dan SEGHPL menandatangani perjanjian definitif untuk pengalihan kepentingan konsorsium mereka di ACEHI-Star kepada AllFirst Equity Holdings, Inc. ("AllFirst"). Oleh karena itu, tidak melepaskan SEGHPL sebagai Penjamin Kelompok Pembeli sampai dengan tanggal 31 Desember 2048.

Dengan demikian, AllFirst memberikan jaminan back-to-back kepada SEGHPL (yaitu Stand-By Letter of Credit), yang diterbitkan oleh BPI, untuk menjamin kewajiban AllFirst untuk mengganti kerugian dan menjaga SEGHPL bebas dan tidak berbahaya dari segala tuntutan yang mungkin dibuat oleh penjual dan/atau penjual penjamin terhadap SEGHPL dalam kedudukannya sebagai pembeli penjamin sebesar AS$2.592.000 – nilai penuh untuk 18% dari Buyer Group Equity Proportion.

Terdapat diskusi yang sedang berlangsung sehubungan dengan novasi semua kewajiban berdasarkan jaminan yang diberikan oleh Penjamin Pembeli di SPA Filipina kepada AllFirst, tetapi dokumentasi formal sehubungan dengan novasi tersebut belum dilaksanakan hingga saat ini.

f. Guarantees of Philippines asset acquisition

On 22 December 2016, ACEHI-Star Holdings, Inc. (“ACEHI-Star”) signed a Share Sale and Purchase Agreement with Union Oil Company of California, Unocal International Corporation and Chevron Foreign Investments, Inc. to acquire 100% of CVX’s shares in Chevron Kalinga, Ltd., Chevron Geothermal Philippines Holdings, LLC, and Chevron Geothermal Services Company (“the Philippines SPA”) pursuant to which a guarantee in respect of ACEHI-Star's obligations was given to the CVX sellers by the Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors. The Buyer Direct Shareholder Guarantors are SEGHPL and Star Energy Geothermal Philippines B.V. The Buyer Group Guarantors are SEGHPL and AC Energy Holdings, Inc. The Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors are collectively referred as Buyer Guarantors. In July 2017, AC Energy Holdings, Inc. and SEGHPL entered into definitive agreements for the transfer of their consortium interests in ACEHI-Star to AllFirst Equity Holdings, Inc. (“AllFirst”). Therefore, it does not release SEGHPL as a Buyer Group Guarantor until 31 December 2048.

As such, AllFirst gave a back to back guarantee to SEGHPL (i.e; Stand-By Letter of Credit), issued by Bank of the Philippine Islands, to secure the obligation of AllFirst to indemnify and keep SEGHPL free and harmless from any claim that may be made by the sellers and/or seller guarantors against SEGHPL in its capacity as a buyer guarantor, amounting to US$2,592,000 – full amount for 18% of its Buyer Group Equity Proportion.

There are discussions ongoing in relation to the novation of all obligations under the guarantees given by the Buyer Guarantors in the Philippines SPA to AllFirst, but formal documentation in respect of such novation has not been executed to date.

g. PSPE Suoh Sekincau Selatan di Sumatra dan Hamiding di Maluku

Pada tanggal 21 Juni 2018, Kementerian ESDM memberikan PSPE Suoh Sekincau Selatan dan Hamiding. Sehubungan dengan PSPE, SEGSS dan SEGI diwajibkan untuk mengebor sekurang-kurangnya 1 (satu) sumur eksplorasi untuk setiap PSPE dalam periode (yaitu tiga tahun) di Suoh Sekincau Selatan dan Hamiding.

g. PSPE of South Suoh Sekincau in Sumatra and Hamiding in Maluku

On 21 June 2018, the MoEMR granted PSPEs of South Suoh Sekincau and Hamiding. In relation to the PSPEs, SEGSS and SEGI are required to drill at least 1 (one) exploration well for each PSPE within the period (i.e 3 years) in South Suoh Sekincau and Hamiding.

Pada tanggal 3 Juni 2025, Kementerian ESDM menyetujui untuk memperpanjang periode PSPE Suoh Sekincau Selatan hingga 20 Juni 2026 karena izin perubahan tata batas belum dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, Kementerian ESDM setuju untuk menunda kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan PSPE di Suoh Sekincau Selatan.

Kementerian ESDM lewat beberapa surat yang diterbitkan telah menyetujui penghentian sementara dan penundaan kewajiban Grup untuk melaksanakan kegiatan PSPE di Hamiding. Surat terakhir dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2025, untuk menyetujui menyetujui perpanjangan penghentian sementara PSPE Hamiding hingga 20 Juni 2026 karena penolakan dan permintaan penggantian tanaman masyarakat di area Hutan Lindung.

Hingga tanggal 31 Desember 2025, SEGI telah menyelesaikan pekerjaan infrastruktur dan pengeboran dua sumur eksplorasi dengan baik dan selamat dan juga telah menyampaikan Laporan Akhir PSPE kepada Pemerintah Indonesia.

On 3 June 2025, the MoEMR approved to extend the PSPE period of South Suoh Sekincau until 20 June 2026 since the permit of boundary modification is not issued yet by the Ministry of Environment and Forestry. Therefore, MoEMR agreed to postpone the Company's responsibility to implement PSPE's activities in South Suoh Sekincau.

MoEMR, through several letters issued, has approved the temporary suspension and postponement of the Group's obligations to carry out PSPE activities in Hamiding. The latest letter was issued on 6 March 2025, to approve the extension of the temporary suspension of PSPE Hamiding until 20 June 2026 due to rejection and requests for replacement of community plants in the Protected Forest area.

By 31 December 2025, SEGI had successfully and safely completed the infrastructure works and the drilling of two exploration wells, and had also submitted the PSPE Final Report to the Government of Indonesia.

h. Akuisisi anak perusahaan

Pada tanggal 15 Desember 2023, BWE menandatangani perjanjian jual dan beli saham bersyarat sebagai berikut:

i. *Agreement for the Sale and Purchase of Shares* dalam PT UPC Sidrap Bayu Energi dengan UPC Renewables Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. ("UPCAPH"), ACEN Renewables International Pte. Ltd. ("ACRI"), UPC Renewables Asia III Limited ("Asia III"), Sidrap (HK) Limited ("Sidrap HK"), dan Sunedison Sidrap B.V. ("SunEd BV") (UPCAPH, ACRI, Asia III, Sidrap HK, dan SunEd BV secara bersama-sama disebut sebagai "Para Penjual"), dimana BWE setuju untuk melakukan pengambilalihan 515.515 saham kelas A dan 34.368 saham kelas B yang mewakili sekitar 99,99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SBE") yang dimiliki oleh Para Penjual ("Perjanjian SBE").

ii. *Agreement for the Sale and Purchase of Shares* dalam PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia dengan UPCAPH, dimana BWE setuju untuk melakukan pengambilalihan 2.499 saham yang mewakili sekitar 99,99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia ("OMI") yang dimiliki oleh UPCAPH ("Perjanjian OMI").

h. Acquisitions of subsidiaries

On 15 December 2023, BWE entered into conditional share sale and purchase agreements as follows:

i. Agreement for the Sale and Purchase of Shares in PT UPC Sidrap Bayu Energi with UPC Renewables Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. ("UPCAPH"), ACEN Renewables International Pte. Ltd. ("ACRI"), UPC Renewables Asia III Limited ("Asia III"), Sidrap (HK) Limited ("Sidrap HK"), and Sunedison Sidrap B.V. ("SunEd BV') (UPCAPH, ACRI, Asia III, Sidrap HK, and Sun Ed BV collectively referred to as the"Sellers"), where BWE agreed to acquire 515,515 class A shares and 34,368 class B shares representing approximately 99.99% of the total issued and paid-up capital of PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SBE") owned by the Sellers ("SBE Agreement").

ii. Agreement for the Sale and Purchase of Shares in PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia with UPCAPH, where BWE agreed to acquire 2,499 shares representing approximately 99.99% of the total issued and paid-up capital of PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia ("OMI") owned by UPCAPH ("OMI Agreement").

iii. *Agreement for the Sale and Purchase of Relevant Sale Shares* dan novasi penyertaan Development Loan dengan UPCAPH dan ACEN Investments HK Limited (“ACEN HK”), dimana BWE setuju untuk:
- melakukan pengambilalihan atas:
  - 19.364 saham yang mewakili sekitar 51% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor PT Sukabumi Bayu Energi ("Sukabumi") yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia IV Limited dan UPC Sukabumi (HK) Ltd.; dan
  - 10.200 saham yang mewakili sekitar 51% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor PT Lombok Timur Bayu Energi ("Lombok") yang dimiliki oleh UPC Renewables Asia VIII Limited dan UPC Lombok (HK) Ltd.
- menerima novasi sebagian piutang sehubungan dengan penyertaan *development loan* Sukabumi dan Lombok dari UPCRI dan UPCRL.

Lebih lanjut, pada tanggal 15 Desember 2023, BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan 10.200 saham yang mewakili sekitar 51% dari jumlah modal disetor dan modal ditempatkan SIDRAP 2 dari UPCRAV dan UPCSE selaku para penjual dengan harga pembelian sebesar AS$1.346 serta penerimaan novasi sebagian piutang atas *development loan* participation untuk SIDRAP 2 sejumlah AS$19 dari UPCRI dan AS$3.805 dari UPCRL (Catatan 5c).

BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan atas Sukabumi dan Lombok pada tanggal 3 Januari 2024 (Catatan 5).

Pada tanggal 2 April 2024 BWE telah melakukan penyelesaian pengambilalihan atas:

i. 515.515 saham kelas A dan 34.368 saham kelas B yang mewakili sekitar 99,99% dari jumlah modal disetor dan modal ditempatkan PT UPC Sidrap Bayu Energi ("SBE") dari UPC Renewables Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. (“UPCAPH”), ACEN Renewables International Pte. Ltd. (“ACRI”), UPC Renewables Asia III Limited (“Asia III”), Sidrap (HK) Limited (“Sidrap HK”), dan Sunedison Sidrap B.V. (“SunEd BV”) (UPCAPH, ACRI, Asia III, Sidrap HK, dan SunEd BV secara bersama-sama disebut sebagai “Para Penjual”) dengan imbalan yang dibayarkan sebesar AS$177.877.

ii. 2.499 saham yang mewakili sekitar 99,99% dari jumlah modal disetor dan modal ditempatkan PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia (“OMI”) dari UPCAPH dengan harga pembelian sebesar AS$292.

iii. Agreement for the Sale and Purchase of Relevant Sale Shares and the novation of Development Loan Participations with UPCAPH and ACEN Investments HK Limited (“ACEN HK”), where BWE agreed to:
- Acquire:
  - 19,364 shares representing approximately 51% of the total issued and paid-up capital of PT Sukabumi Bayu Energi ("Sukabumi") owned by UPC Renewables Asia IV Limited and UPC Sukabumi (HK) Ltd; and
  - 10,200 shares representing approximately 51% of the total issued and paid-up capital of PT Lombok Timur Bayu Energi ("Lombok") owned by UPC Renewables Asia VIII Limited and UPC Lombok (HK) Ltd.
- received a novation of a portion of the receivables in relation to the development loan participation of Sukabumi and Lombok from UPCRI and UPCRL.

In relation to the above, on 15 December 2023 BWE completed the acquisition of 10,200 shares representing approximately 51% of the total paid-up capital and issued capital of SIDRAP 2 from UPCRAV and UPCSE as the sellers for a purchase price of US$1,346 and the novation of a portion of the receivables in relation to the development loan participation for SIDRAP 2 in the amount of US$19 from UPCRI and US$3,805 from UPCRL (Note 5c).

BWE has completed the acquisition of Sukabumi and Lombok on 3 January 2024 (Note 5).

On 2 April 2024, BWE has completed the acquisition of:

i. 515,515 of class A shares and 34,368 of class B shares representing approximately 99,99% of the total paid-up capital and issued capital of PT UPC Sidrap Bayu Energi (“SBE”) from UPC Renewables Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. (“UPCAPH”), ACEN Renewables International Pte. Ltd. (“ACRI”), UPC Renewables Asia III Limited (“Asia III”), Sidrap (HK) Limited (“Sidrap HK”), dan Sunedison Sidrap B.V. (“SunEd BV”) (UPCAPH, ACRI, Asia III, Sidrap HK, dan SunEd BV collectively referred to as “Sellers”) with a consideration paid of US$108,278.

ii. 2,499 of shares representing approximately 99,99% of the total paid-up capital and issued capital of PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia (“OMI”) from UPCAPH with a purchase price of US$292.

i. Pemeriksaan Pajak SBE

Pada tanggal 9 Agustus 2016, Kementerian Keuangan ("Kemenkeu") menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 141/KM.3/2016, dimana Kemenkeu memberikan fasilitas pajak penghasilan untuk SBE sebagai berikut:

1. Pengurangan penghasilan neto sampai dengan 30% dari jumlah yang diinvestasikan, diprorata sebesar 5% selama enam tahun dari produksi komersial, dengan syarat aset yang diinvestasikan tidak dialihkan dalam jangka waktu enam tahun;
2. Penyusutan yang dipercepat dan/atau pengurangan amortisasi;
3. Perpanjangan rugi fiskal yang dapat dikompensasi hingga sepuluh tahun; dan
4. Pengurangan tarif pemotongan pajak atas dividen yang dibayarkan kepada non-residen menjadi 10% (atau lebih rendah jika ada keringanan dalam perjanjian).

Fasilitas pajak tersebut berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan, kecuali untuk pengurangan penghasilan neto dan perpanjangan rugi fiskal yang dapat dikompensasi yang tunduk pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak ("DJP").

Pada tanggal 25 Januari 2019, DJP menerbitkan Surat Keputusan nomor KEP-32/PJ/2019 yang menegaskan persetujuan atas fasilitas pengurangan penghasilan neto yang berlaku efektif mulai tahun fiskal 2018 sebesar Rp323,9 miliar (setara dengan AS$19.302).

Pada tanggal 26 April 2022, Kemenkeu mencabut fasilitas pajak SBE berdasarkan surat nomor 154/KM.3/2022. Pada tanggal 29 September 2022, SBE mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak terhadap Kemenkeu dan DJP atas keputusan ini. Pada tanggal 6 Desember 2024, Pengadilan Pajak mengabulkan banding SBE. Selanjutnya, SBE menerima surat pemberitahuan tertanggal 13 Maret 2025 yang menginformasikan bahwa DJP telah menyampaikan kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung tertanggal 6 Maret 2025. Pada tanggal 9 Desember 2025, Mahkamah Agung menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali yang menolak memori peninjauan kembali DJP. Dengan demikian maka fasilitas perpajakan SBE berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 141/KM.3/2016 tetap berlaku.

i. Tax Audit SBE

On 9 August 2016, the Ministry of Finance ("MoF") issued MoF Decree number 141/KM.3/2016, in which the MoF has granted income tax facilities for SBE as follows:

1. Reduction in net income up to 30% of the amount invested, prorated at 5% for six years of the commercial production, provided that the assets invested are not transferred out within six years;
2. accelerated depreciation and/or amortisation deductions;
3. extension of tax losses carried forward for up to ten years; and
4. a reduction of the withholding tax rate on dividends paid to non-residents to 10% (or lower if treaty relief is available).

The tax facilities are effective from the date the MoF Decree was issued, except for the reduction in net income and the extension of tax losses carried forward which are subject to Decision of the Directorate General of Taxes ("DGT").

On 25 January 2019, the DGT issued Decision Letter number KEP-32/PJ/2019 confirming its approval for reduction in net income facility effective from fiscal year 2018 amounting to Rp323.9 billion (equivalent to US$19,302).

On 26 April 2022, the MoF revoked the SBE's tax facility based on letter number 154/KM.3/2022. On 29 September 2022, SBE filed a lawsuit to the Tax Court against MoF and DGT for this decision. On 6 December 2024, the Tax Court accepted SBE appeal. Subsequently, SBE received a notification letter dated 13 March 2025 informing that DGT had submitted the contra memory for judicial review to the Supreme Court dated 6 March 2025. On 9 December 2025, Supreme Court issued the memory of judicial review verdict which not in favor to DGT memory of judicial review. Accordingly, the SBE Tax Facility as stipulated under MoF Decree number 141/KM.3/2016 shall remain valid.

Pada tanggal 5 Oktober 2023, SBE menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ("SKPKBT") untuk tahun fiskal 2020 sebesar Rp 21,1 miliar (setara dengan AS$1.263). Pada tanggal 21 Desember 2023, SBE telah melakukan pembayaran penuh atas kurang bayar untuk tahun fiskal 2020. Pada tanggal 27 Desember 2023, SBE telah mengajukan surat keberatan atas SKPKBT tahun pajak 2020 dan ditolak oleh Kantor Pajak pada tanggal 13 September 2024. Pada tanggal 12 Desember 2024, SBE mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 27 Februari 2026, Pengadilan Pajak menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan banding SBE. Atas Putusan Pengadilan Pajak ini, DJP masih memiliki hak untuk mengajukan memori peninjauan kembali dalam jangka waktu sejak 3 bulan sejak Putusan Pengadilan Pajak dikirim.

On 5 October 2023, SBE received Notice of Additional Tax Underpayment Assessment ("SKPKBT") for fiscal year 2020 amounting to Rp 21.1 billion (equivalent to US$1,263). On 21 December 2023, SBE fully paid for the underpayment for fiscal year 2020. On December 27, 2023, SBE has submitted tax objection letters for SKPKBT fiscal year 2020 and rejected by Tax Office on 13 September 2024. On 12 December 2024, SBE filed an appeal to the Tax Court. On 27 February 2026, Tax Court issued Tax Court Verdict which in favor to SBE appeal. Pursuant to this Tax Court Verdict, DGT retains statutory right to submit memory of judicial review within 3 months from Tax Court Verdict is delivered.

Pada tanggal 14 November 2023, SBE menerima SKPKBT untuk tahun fiskal 2019 sebesar Rp80,7 miliar (setara dengan AS$4.815). SBE belum melakukan pembayaran atas kurang bayar untuk tahun fiskal 2019. Pada tanggal 12 Februari 2024, SBE telah mengajukan surat keberatan atas SKPKBT tahun fiskal 2019 dan ditolak oleh Kantor Pajak pada tanggal 4 November 2024. Pada tanggal 31 Januari 2025, SBE mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 27 Februari 2026, Pengadilan Pajak menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan banding SBE. Atas Putusan Pengadilan Pajak ini, DJP masih memiliki hak untuk mengajukan memori peninjauan kembali dalam jangka waktu sejak 3 bulan sejak Putusan Pengadilan Pajak dikirim.

On 14 November 2023, SBE received SKPKBT for fiscal year 2019 amounting to Rp80.7 billion (equivalent to US$4,815). SBE has not paid the underpayment for fiscal year 2019. On 12 February 2024, SBE has submitted tax objection letters for SKPKBT fiscal year 2019 and rejected by Tax Office on 4 November 2024. On 31 January 2025, SBE filed an appeal to the Tax Court. On 27 February 2026, Tax Court issued Tax Court Verdict which in favor to SBE appeal. Pursuant to this Tax Court Verdict, DGT retains statutory right to submit memory of judicial review within 3 months from Tax Court Verdict is delivered.

Pada tanggal 21 November 2023, SBE menerima SKPN untuk tahun fiskal 2018. Akan tetapi kerugian fiskal tahun 2018 menjadi lebih kecil sebagai akibat dicabutnya fasilitas pajak SBE. Pada tanggal 12 Februari 2024, SBE telah mengajukan surat keberatan atas SKPN tahun fiskal 2018 dan ditolak oleh Kantor Pajak pada tanggal 4 November 2024. Pada tanggal 31 Januari 2025, SBE mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 27 Februari 2026, Pengadilan Pajak menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan banding SBE. Atas Putusan Pengadilan Pajak ini, DJP masih memiliki hak untuk mengajukan memori peninjauan kembali dalam jangka waktu sejak 3 bulan sejak Putusan Pengadilan Pajak dikirim.

On 21 November 2023, SBE received SKPN for fiscal year 2018. However, the fiscal loss for year 2018 was reduced following the revocation of SBE's tax facility. On 12 February 2024, SBE has submitted tax objection letters for SKPKBT fiscal year 2018 and rejected by Tax Office on 4 November 2024. On 31 January 2025, SBE filed an appeal to the Tax Court. On 27 February 2026, Tax Court issued Tax Court Verdict which in favor to SBE appeal. Pursuant to this Tax Court Verdict, DGT retains statutory right to submit memory of judicial review within 3 months from Tax Court Verdict is delivered.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak tersebut di atas, manajemen berposisi bahwa fasilitas perpajakan SBE berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 141/KM.3/2016 tetap berlaku.

Pursuant to the respective Supreme Court and Tax Court Verdicts, management concludes that the SBE tax facilities granted under Minister of Finance Decree Number 141/KM.3/2016 shall remain valid.

DJP melakukan pemeriksaan pajak tahun 2021 karena SBE mengajukan permohonan SPT PPh Badan Lebih Bayar sebesar Rp. 5,2 miliar (setara dengan AS$310 ribu).

Pada tanggal 22 Desember 2025, DJP menerbitkan SKPLB PPh Badan sebesar Rp5,2 miliar (setara dengan AS$310 ribu), SKPKB PPh 23 sebesar Rp. 24,3 juta (setara dengan AS$ 1.450, SKPKB PPh 4(2) sebesar Rp7,9 juta (setara dengan AS$ 469, SKPKB PPh 26 sebesar Rp. 139 juta (setara dengan AS$ 8.274, SKPKB PPh 21 sebesar Rp. 16,8 juta (setara dengan AS$ 1.001) dan SKPN PPN.

SBE menerima pengembalian SKPLB PPh Badan tahun 2021 sebesar Rp.5 miliar (setara dengan AS$290 ribu) pada tanggal 15 Januari 2026 Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dimaksud, DJP mengakui bahwa fasiltas perpajakan tetap berlaku dengan tidak melakukan koreksi atas pengurang penghasilan neto dan depresiasi dipercepat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 141/KM.3/2016. SBE tidak mengajukan keberatan atas penerbitan ketetapan pajak tahun 2021.

Selanjutnya, SBE juga menyampaikan SPT Pembetulan PPh Badan Lebih Bayar untuk :

1. Tahun pajak 2022 sebesar Rp 4,2 miliar (setara dengan AS$250 ribu) pada tanggal 19 November 2025
2. Untuk tahun pajak 2022, DJP sudah menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak dan proses pemeriksaan pajak saat ini masih berlangsung
3. Tahun pajak 2023 sebesar Rp 30,4 miliar (setara dengan AS$ 1,8 juta) pada tanggal 26 Februari 2026
4. Tahun pajak 2025 sebesar Rp 36 miliar setara dengan AS$ 2,1 juta pada tanggal 15 Februari 2026.

Untuk pajak 2023, 2024 dan 2025, DJP belum menerbitkan surat pemeriksaan pajak sampai dengan tanggal laporan ini.

Untuk SPT PPh Badan Pembetulan Tahun pajak 2024 masih dalam proses untuk di sampaikan ke DJP.

The DGT conducted a tax audit for fiscal year 2021 since SBE submitted an Overpayment Corporate Income Tax (CIT) Return (SPT LB PPh Badan) amounting to Rp. 5.2 billion (equivalent to US$310 thousand).

On 22 December 2025, the DGT issued an Overpayment CIT Assessment (SKPLB PPh Badan) amounting to Rp5,2 billion (equivalent to US$310 thousand), Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) PPh 23 amounting to Rp24.3 million (equivalent to US$ 1,450), SKPKB PPh 4(2) amounting to Rp. 7.9 million (equivalent to US$ 469), SKPKB PPh 26 amounting to Rp. 139 million (equivalent to US$ 8,274), SKPKB PPh 21 amounting to Rp. 16.8 million (equivalent to US$ 1,001) and Nil VAT Assessment (SKPN PPN).

SBE received the Overpayment CIT Assessment refund of Rp 5 billion (equivalent to US$290 thousand) on 15 January 2026. Referring to the tax audit results, the DGT acknowledged that the tax facilities remained valid by not conducting any adjustments to the net income deductions and accelerated depreciation as stipulated in the Ministry of Finance Decree No. 141/KM.3/2016. SBE did not file an objection to the issuance of the 2021 tax assessments.

Furthermore, SBE also submitted CIT Returns Revision showing overpayments for the following fiscal years:

1. Fiscal year 2022, amounting to Rp 4.2 billion (equivalent to US$250 thousand) on 19 November 2025
2. For fiscal year 2022, the DGT has issued a tax audit notification letter and the tax audit process is currently still ongoing
3. Fiscal year 2023, amounting to Rp 30.4 billion (equivalent to US$1.8 million) on 20 February 2026
4. Fiscal year 2025, amounting to Rp 36 billion (equivalent to US$ 2.1) on 15 February 2026.

As of to report date, the DGT has not issued any tax audit notification letters for the 2023 and 2025 fiscal years.

The Overpayment CIT Revision for fiscal year 2024 is still on progress to be filed to DGT.

31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan lain-lain (kecuali piutang PPN dan pembayaran di muka terkait dengan klaim audit pemerintah), piutang sewa pembiayaan, investasi dalam obligasi dan deposito – aset tidak lancar lain-lain, sebesar AS$1.044.805 (2024: AS$994.967) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup mengklasifikasikan utang usaha, beban yang masih harus dibayar dan pinjaman sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sebesar AS$2.161.169 (2024: AS$2.205.556).

31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2025, the Group classified its cash and cash equivalents, restricted cash and time deposit, trade and other receivables (excluding VAT receivables and prepayment of government audit claims), finance lease receivables, investment in bonds and deposits – other non-current assets, amounting to US$1,044,805 (2024: US$994,967) as financial assets at amortised cost.

As at 31 December 2025, the Group classified its trade payables, accrued expenses and borrowings as financial liabilities at amortised cost amounting to US$2,161,169 (2024: US$2,205,556).

32. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS

a. Hierarki nilai wajar

Grup mengkategorikan pengukuran nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar yang bergantung pada input penilaian yang digunakan sebagai berikut:

- Tingkat 1 - Harga kuotasian (belum disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas identik yang dapat diakses Grup pada tanggal pengukuran;
- Tingkat 2 - Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai harga) atau tidak langsung (yaitu berasal dari harga); dan
- Tingkat 3 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara langsung atau tidak langsung tidak dapat diobservasi.

  Untuk investasi obligasi yang dinilai menggunakan Teknik penilaian berdasarkan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3), Grup menangguhkan selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih tersebut dibebankan ke laba rugi seiring dengan perubahan pada faktor-fakor terkait termasuk jangka waktu obligasi.

Pengukuran nilai wajar yang menggunakan input dari tingkat hirarki yang berbeda dikategorikan secara keseluruhan dalam tingkat hierarki nilai wajar yang sama sebagai input dengan level terendah yang signifikan untuk keseluruhan pengukuran.

32. FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES

a. Fair value hierarchy

The Group categorises fair value measurements using a fair value hierarchy that is dependent on the valuation inputs used as follows:

- Level 1 - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the Group can access at the measurement date;
- Level 2 - Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly unobservable.

  For investment in bonds valued using techniques based on significant unobservable inputs (Level 3), the Group defers the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequent to the initial recognition, the difference is charged to profit or loss following changes in relevant factors including the tenor of the bonds.

Fair value measurements that use inputs of different hierarchy levels are categorised in their entirety in the same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement.

b. Aset dan liabilitas tidak dicatat pada nilai wajarnya tetapi nilai wajarnya diungkapkan

Tabel berikut menunjukkan analisis aset dan liabilitas Grup yang tidak diukur pada nilai wajar tetapi diungkapkan nilai wajarnya:

b. Assets and liabilities not carried at fair value but for which fair value is disclosed

The following table shows an analysis of the Group's assets and liabilities not measured at fair value but for which fair value is disclosed:

	2025					
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Jumlah Total	Jumlah Tercatat/ Carrying amount	
Aset:						Assets:
Piutang sewa pembiayaan	-	-	473.152	473.152	396.289	Finance lease receivables
Liabilitas:						Liabilities:
Pinjaman	1.314.144	-	608.625	1.922.769	2.059.044	Borrowings
Liabilitas sewa	-	-	5.376	5.376	5.376	Lease liabilities

	2024					
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Jumlah Total	Jumlah Tercatat/ Carrying amount	
Aset:						Assets:
Piutang sewa pembiayaan	-	-	439.575	439.575	363.449	Finance lease receivables
Liabilitas:						Liabilities:
Pinjaman	1.372.892	-	577.669	1.950.561	2.010.175	Borrowings
Liabilitas sewa	-	-	6.968	6.968	6.968	Lease liabilities

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar yang diungkapkan dalam tabel di atas diestimasi dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan pada suku bunga pinjaman tambahan pasar untuk jenis pinjaman serupa pada akhir periode pelaporan.

Determination of fair value

The fair values disclosed in the table above are estimated by discounting expected future cash flows at market incremental lending rates for similar types of lending at the end of the reporting period.

c. Aset dan liabilitas yang jumlah tercatatnya mendekati nilai wajar

Manajemen menilai bahwa nilai wajar asset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatatnya sebagian besar karena jatuh tempo jangka pendek dari instrumen tersebut.

c. Assets and liabilities whose carrying amounts approximate the fair value

The management assessed that the fair values of financial assets and financial liabilities approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat harga komoditas, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan dari proses manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Grup.

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar dan risiko harga lainnya dan analisis umur piutang untuk risiko kredit.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including the effects of foreign currency exchange rate risk, commodity price risk and interest rate risk), and credit risk and liquidity risk. The objectives of the Group's risk management processes are to identify, measure, monitor and manage key risks in order to safeguard the Group's long-term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Group.

The Group uses various methods to measure risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rates, foreign exchange and other price risks and aging analysis for credit risk.

Faktor risiko keuangan

a. Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional entitas. Eksposur ini dikelola sebagian dengan menggunakan lindung nilai alami yang timbul dari aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing yang sama. Manajemen juga mengelola risiko nilai tukar mata uang asing melalui pemantauan fluktuasi mata uang asing secara terus-menerus dan menjaga kecukupan kas dalam mata uang asing untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jika Rupiah menguat/melemah sebesar 10% terhadap AS$, dengan asumsi semua variabel lainnya konstan, laba sebelum pajak akan lebih rendah/tinggi masing-masing sebesar AS$3.836 (2024: AS$1.620), terutama sebagai akibat dari keuntungan/kerugian selisih kurs penjabaran kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, liabilitas imbalan pasca kerja, dan biaya yang masih harus dibayar.

(ii) Risiko harga komoditas

Tidak ada masalah risiko harga komoditas untuk bisnis panas bumi karena harga telah disepakati dalam ESC berdasarkan formula yang disepakati dan ditetapkan untuk jangka panjang hanya disesuaikan dengan inflasi (Catatan 1.c).

(iii) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman jangka panjang dalam mata uang Dolar AS. Risiko suku bunga dari kas di bank tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan bunga. Di dalam pinjaman, utang bank yang diterbitkan dengan tingkat bunga variabel mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas.

Grup menganalisis eksposur dari risiko bunga secara dinamis. Beberapa skenario disimulasikan dengan beberapa pertimbangan seperti pembiayaan kembali, memperbaharui dari kondisi yang ada dan alternatif lain pembiayaan. Berdasarkan scenario tersebut di atas, Grup mengelola risiko arus kas dari suku bunga dengan melakukan pembiayaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

Financial risk factors

a. Market risk

(i) Foreign exchange risk

Foreign exchange risk primarily arises from recognised monetary assets and liabilities that are denominated in a currency that is not the entity's functional currency. This exposure is managed partly by using natural hedges that arise from monetary assets and liabilities in the same foreign currency. Management also manages its foreign currency exchange risk through monitoring the fluctuation of foreign currency continuously and maintaining sufficient cash in foreign currency to cover its maturing obligations denominated in foreign currency.

As at 31 December 2025, if the Indonesian Rupiah strengthened/weakened by 10% against the US$, with all other variables held constant, profit before tax would have been lower/higher by US$3,836 (2024: US$1,620), respectively, mainly as a result of foreign exchange gains/losses on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, post-employment benefits liabilities, and accrued expenses.

(ii) Commodity price risk

There is no commodity price risk issue for the geothermal business as the price has been agreed in the ESC based on the agreed formula and fixed for a long-term, only adjusted by inflation (Note 1.c).

(iii) Interest rate risk

The Group's interest rate risk arises from long-term borrowings denominated in US Dollars. The interest rate risk on cash in banks is not significant and all other financial instruments are not interest bearing. Within borrowings, bank loans issued at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk.

The Group analyses its interest rate exposure on a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration the refinancing of existing positions, and alternative financing. Based on the above scenarios, the Group manages its cash flow interest rate risk by refinancing borrowings at a lower interest rate.

Tidak ada analisis sensitivitas yang disiapkan sebab Grup tidak mengharapkan efek material pada laba atau rugi konsolidasian yang timbul dari efek perubahan yang mungkin terjadi terhadap suku bunga pada instrumen keuangan berbunga pada akhir periode pelaporan.

No sensitivity analysis is prepared as the Group does not expect any material effect on the Group's consolidated profit or loss arising from the effects of reasonably possible changes to interest rates on interest bearing financial instruments at the end of the reporting period.

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang mungkin timbul atas instrumen keuangan yang beredar jika pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya. Eksposur risiko kredit Grup terutama timbul dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Untuk aset keuangan lainnya, Grup dan Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan berurusan secara eksklusif dengan rekanan dengan peringkat kredit tinggi (termasuk BUMN). Selain itu, berdasarkan sejarah masa lalu Grup, semua piutang dari PGE dan PLN, dua badan usaha milik negara Indonesia akan diselesaikan berdasarkan syarat pembayaran yang disepakati. Oleh karena itu, Grup memiliki selera risiko yang rendah dan mengelola risiko kredit pada tingkat yang rendah.

Eksposur risiko kredit

Pada akhir periode pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit diwakili oleh nilai tercatat setiap kelas aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, termasuk derivatif dengan nilai wajar positif.

Profil konsentrasi risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi pihak lain. Departemen keuangan korporat Grup secara rutin memantau kondisi keuangan bank dan lembaga keuangan tempat kas disimpan. Per 31 Desember 2025, Grup tunduk pada konsentrasi risiko kredit karena 87% simpanan banknya ditempatkan di bank dengan peringkat kredit Aa1 atau Aaa, berdasarkan Moody's. Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari piutang usaha, Grup tunduk pada konsentrasi risiko kredit karena seluruh penjualan listrik dan uap hanya melalui PGE dan PLN, dua badan usaha milik negara Indonesia yang tidak memiliki riwayat gagal bayar. Grup tidak memiliki jaminan apapun untuk menjamin pembayaran PLN kepada Grup berdasarkan ESC. Pada tanggal pelaporan, nilai tercatat aset keuangan mencerminkan eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit.

b. Credit risk

Credit risk is the risk of loss that may arise on outstanding financial instruments should a counterparty default on its obligations. The Group's exposure to credit risk arises primarily from trade and other receivables. For other financial assets, the Group and the Company minimise credit risk by dealing exclusively with high credit rating counterparties (including state-owned enterprises). In addition, based on the Group's past history, all outstanding receivables from PGE and PLN, two Indonesian state-owned enterprises will be settled based on the agreed terms of payment. Therefore, the Group has a low risk appetite and manages credit risk to a low level.

Exposure to credit risk

At the end of the reporting period, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets recognised in the statement financial position, including derivatives with positive fair values.

Credit risk concentration profile

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge its obligation resulting in a financial loss to the other party. The Group's corporate finance department regularly monitors the financial condition of banks and financial institutions where cash is deposited. As of 31 December 2025, the Group is subject to concentration of credit risk as 87% of its bank deposits are placed in banks with a credit rating Aa1 or Aaa, based on Moody's. With respect to credit risk arising from trade receivables, the Group is subject to concentration of credit risk as its entire electricity and steam sales are solely through PGE and PLN, two Indonesian state-owned enterprises with no history of default. The Group does not hold any collateral to secure PLN payments to the Group under the ESC. As at the reporting date, the carrying amounts of financial assets represent the Group's maximum exposure to credit risk.

Aset keuangan yang belum lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai

Piutang usaha dan piutang lain-lain yang belum jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai adalah milik debitur yang layak kredit dengan catatan pembayaran yang baik dengan Grup. Kas di bank, kas yang dibatasi penggunaannya dan deposito jangka pendek yang belum jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai ditempatkan pada atau diadakan pada lembaga keuangan terkemuka yang tidak memiliki riwayat gagal bayar.

Financial assets that are neither past due nor impaired

Trade and other receivables that are neither past due nor impaired are with creditworthy debtors with a good payment record with the Group. Cash in banks, restricted cash and short-term deposits that are neither past due nor impaired are placed with or entered into with reputable financial institutions with no history of default.

Aset keuangan yang lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai

Informasi mengenai aset keuangan yang telah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 8 atas laporan keuangan konsolidasian.

Financial assets that are either past due or impaired

Information regarding financial assets that are either past due or impaired is disclosed in Note 8 to the consolidated financial statements.

Kerugian kredit ekspektasian (“ECL”)

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup diharuskan untuk menilai penyisihan ECL untuk semua piutang. Grup telah mencatat pembalikan penyisihan kerugian kredit sebesar AS$35 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: pembalikan penyisihan kerugian kredit sebesar AS$53). Tidak ada pergerakan lain dalam penyisihan kerugian kredit.

Expected credit losses (“ECL”)

At the end of each reporting period, the Group is required to assess an allowance for ECL for all receivables. The Group has recorded a reversal of credit loss allowance amounting to US$35 for the year ended 31 December 2025 (2024: reversal of credit loss allowance amounting to US$53). There are no other movements within the credit loss allowance.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya karena kekurangan dana. Eksposur Grup terhadap risiko likuiditas terutama timbul dari ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati menyiratkan menjaga kecukupan kas dan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit dalam jumlah yang memadai. Departemen keuangan korporat bertujuan untuk mempertahankan fleksibilitas dalam pendanaan dengan menyediakan fasilitas kredit yang berkomitmen. Aset keuangan Grup meliputi kas dan setara kas, kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lainnya tidak termasuk piutang PPN dan pembayaran di muka terkait dengan klaim audit pemerintah. Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan cadangan dan fasilitas perbankan yang memadai, dengan terus memantau prakiraan dan arus kas aktual, dan dengan menyesuaikan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its financial obligations due to a shortage of funds. The Group’s exposure to liquidity risk arises primarily from mismatches of the maturities of financial assets and liabilities. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities. The corporate finance department aims to maintain flexibility in funding by keeping committed credit facilities available. The Group’s financial assets include cash and cash equivalents, restricted cash and time deposit, trade and other receivables excluding VAT receivables and prepayment of government audit claims. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves and banking facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Analisis instrumen keuangan dengan sisa jatuh tempo kontraktual

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup pada akhir periode pelaporan berdasarkan kontrak kewajiban pembayaran tanpa diskonto:

Analysis of financial instruments by remaining contractual maturities

The table below summarises the maturity profile of the Group's financial liabilities at the end of the reporting period based on contractual undiscounted repayment obligations:

	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/More than one year and not later than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years	Jumlah/ Total	
2025					**2025**
Liabilitas keuangan					**Financial liabilities**
Utang usaha dan lain-lain	19.534	-	-	19.534	Trade and other payables
Beban yang masih harus dibayar	73.153	-	-	73.153	Accrued expenses
Pinjaman*	281.718	1.275.303	1.157.104	2.714.125	Borrowings*
Liabilitas sewa*	2.239	4.075	-	6.314	Lease liabilities*
Jumlah	376.644	1.279.378	1.157.104	2.813.126	Total

* Termasuk bunga yang diperhitungan di masa depan/*including future imputed interest*

	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/More than one year and not later than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years	Jumlah/ Total	
2024					**2024**
Liabilitas keuangan					**Financial liabilities**
Utang usaha dan lain-lain	21.201	7.377	-	28.578	Trade and other payables
Beban yang masih harus dibayar	87.119	-	-	87.119	Accrued expenses
Pinjaman*	287.354	1.225.482	1.355.436	2.868.272	Borrowings*
Liabilitas sewa*	2.441	5.747	-	8.188	Lease liabilities*
Jumlah	398.115	1.238.606	1.355.436	2.992.157	Total

* Termasuk bunga yang diperhitungan di masa depan/*including future imputed interest*

d. Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

d. Changes in liabilities arising from financing activities

	Awal/ Beginning	Arus kas/ Cash flows	Amortisasi/ Amortisation	Penambahan sehubungan dengan akuisisi entitas anak/ Addition related to acquisition of subsidiary	Lainnya/ Others (a)	Akhir/ Ending	
2025							2025
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	341.989	(27.112)	-	-	-	314.877	Restricted cash and time deposits
Pinjaman:							Borrowings:
utang bank	678.930	69.922	2.117	-	(10.964)	740.005	bank loans
senior secured notes	1.418.307	(101.352)	2.084	-	-	1.319.039	senior secured notes
Liabilitas sewa	6.968	(2.076)	-	-	484	5.376	Lease liabilities

	Awal/ Beginning	Arus kas/ Cash flows	Amortisasi/ Amortisation	Penambahan sehubungan dengan akuisisi entitas anak/ Addition related to acquisition of subsidiary	Lainnya/ Others (a)	Akhir/ Ending	
2024							2024
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	267.334	74.655	-	-	-	341.989	Restricted cash and time deposits
Pinjaman:							Borrowings:
utang bank	486.316	109.699	1.831	86.224	(5.140)	678.930	bank loans
senior secured notes	1.498.213	(82.167)	2.261	-	-	1.418.307	senior secured notes
Liabilitas sewa	2.740	(2.206)	-	-	6.434	6.968	Lease liabilities

a) Merupakan aktivitas non-kas seperti penambahan biaya pendanaan yang ditangguhkan (disajikan sebagai pengurang saldo pinjaman di laporan posisi keuangan), penambahan kewajiban sewa, dan pengaruh penjabaran mata uang asing.

a) Represents non-cash activities such as additions to deferred financing costs (presented as deduction of borrowings balance in the statements of financial position), additions to lease liabilities and the effect of foreign currency translation.

Manajemen risiko permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk melindungi kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan mempertahankan struktur modal yang optimal untuk memaksimalkan nilai pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalannya dan melakukan penyesuaian terhadapnya, sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Grup memantau modal dengan menggunakan gearing ratio, yaitu utang bersih dibagi total modal ditambah utang bersih. Grup memasukkan utang bersih, pinjaman, liabilitas sewa, utang usaha dan lainnya, dan biaya akrual dikurangi saldo kas dan bank dan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya tidak termasuk operasi yang dihentikan. Modal terdiri dari jumlah ekuitas dalam neraca.

Modal termasuk utang dan ekuitas seperti yang diungkapkan dalam tabel di bawah ini:

Capital risk management

The primary objective of the Group's capital management is to safeguard the Group's ability to continue as a going concern and to maintain an optimal capital structure so as to maximise shareholders' value.

The Group manages its capital structure and makes adjustment to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes during the year ended 31 December 2025.

The Group monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total capital plus net debt. The Group includes within net debt, borrowings, lease liabilities, trade and other payables, and accrued expenses less cash and bank balances and restricted cash and time deposit excluding discontinued operations. Capital comprises total equity in the balance sheets.

Capital includes debt and equity items as disclosed in the table below:

	2025	2024	
Pinjaman	2.059.044	2.097.237	Borrowings
Liabilitas sewa	5.376	6.968	Lease liabilities
Utang usaha dan lain-lain dan beban yang masih harus dibayar	92.687	115.697	Trade and other payables and accrued expenses
Kurang:			Less:
Kas dan setara kas	(114.985)	(162.724)	Cash and cash equivalents
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaanya	(314.877)	(341.989)	Restricted cash and time deposit
Utang bersih	1.727.245	1.715.189	Net debt
Jumlah Ekuitas	883.519	732.533	Total equity
Modal dan utang bersih	2.610.764	2.447.722	Capital and net debt
Gearing ratio	66%	70%	Gearing ratio

34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan 3 Mei 2026, Perusahaan melakukan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar berfluktuasi signifikan tanpa memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), sesuai Pasal 7 Peraturan OJK No.13 tahun 2023.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026, Perusahaan melakukan pembelian kembali melalui Bursa Efek Indonesia sejumlah 700.000 lembar saham sebesar Rp5,6 miliar (nilai penuh) atau setara dengan AS$335. Sampai dengan tanggal 28 Februari 2026, jumlah pembelian kembali adalah sejumlah 6.700.000 lembar saham. Seluruh pembayaran untuk melakukan pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp37,6 miliar (nilai penuh) atau setara dengan AS$2.265.

Adapun mutasi jumlah lembar saham dan nilai saham treasuri untuk periode yang berakhir pada 28 Februari 2026 adalah sebagai berikut:

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

On 4 February 2026 to 3 May 2026, the Company carried out share buybacks in significantly fluctuating market conditions without the Company's General Meeting of Shareholders ("GMS") as stipulated by Article 7 of OJK Regulation No.13 in 2023.

For the period ended 28 February 2026, the Company conducted the buybacks through the Indonesia Stock Exchange of 700,000 shares amounted to Rp5.6 billion (full amount) or equivalent to US$335. Up to 28 February 2026, total Buyback was 6,700,000 shares. The total amount paid to buy back the shares was Rp37.6 billion (full amount) or equivalent to US$2,265.

The mutations in the number of shares and the value of treasury shares for the period ended 28 February 2026 are as follows:

	Jumlah saham treasuri/ Total treasury shares		
	Lembar saham/Number of shares	Jumlah/ Total (In US$'000)	
Saldo 1 Januari 2026	6.000.000	1.930	Balance as of 1 January 2026
Pembelian saham treasuri	700.000	335	Buyback of treasury shares
Saldo 28 Februari 2026	6.700.000	2.265	Balance as of 28 February 2026

35. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 157 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2026.

35. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 157 were the responsibilities of the management and were approved by the Directors and authorized for issuance on 18 March 2026.